



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**TAHUN 2022**  
**KECAMATAN BLIMBING**

KECAMATAN BLIMBING

KOTA MALANG

Jl. Raden Intan Kav. 14 Malang

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada saat ini kami telah dapat menyampaikan evaluasi Laporan Akhir Tahun 2022 mengenai pelaksanaan kebijakan kegiatan program prioritas dibidang pemerintahan, pelaksanaan bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan dalam mengukur keberhasilan kinerja selama satu tahun pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Blimbing Kota Malang dalam bentuk "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP) Tahun 2022".

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban dari salah satu tugas dan kewajiban Camat dalam melaksanakan seluruh program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan batasan kewenangan yang telah dilimpahkan (didelegasikan) oleh Walikota kepada Camat dan tugas serta fungsi Kecamatan sebagai lembaga teknis kewilayahan unsur pendukung pelaksana kebijakan pemerintah daerah yang bersifat spesifik dan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, diantaranya mensukseskan implementasi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi program prioritas Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan tugas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian pemantapan pembangunan perdesaan, peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan program lainnya yang diaplikasikan ke dalam Visi, Misi dan Program Kegiatan Pemerintah Kota Malang.

Kami menyadari bahwa penyampaian dan pemaparan materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna, sehingga saran pendapat yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan.

Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mambantu dalam proses penyusunan laporan ini, Semoga Alloh SWT senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Malang, Pebruari 2023

**CAMAT BLIMBING**

**NINA SUDIARTY, S.STP,M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19770718 199703 2 005

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	1
1.2 Sumber Daya Manusia .....	3
1.3 Aspek Strategis Organisasi .....	4
1.4 Permasalahan Utama Organisasi .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Perencanaan Kinerja .....	7
2.2 Indikator Kinerja Utama .....	10
2.3 Perjanjian Kinerja.....	11
2.4 Standar Penilaian Kinerja .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	14
a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	14
b. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 - 2023 .....	16
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	25
4.2 Tindak Lanjut .....	25

## BAB I

### PENDAHULUAN

Kecamatan merupakan perangkat daerah terdepan yang mengampu tugas-tugas kewilayahan. Kecamatan memiliki peran sebagai penyusun kebijakan/ pengambil keputusan, koordinator kegiatan pembangunan di wilayah, sekaligus sebagai administrator. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan yaitu terwujudnya kecamatan yang profesional dan akuntabel, Kecamatan Blimbing menyusun *road map* perencanaan berupa Rencana Strategis Perubahan 2019-2023 dan Rencana Kerja (Renja). Selanjutnya, dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) Kecamatan maupun Kelurahan-Kelurahan dalam merumuskan rencana kerja masing-masing dan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

Sebagai bentuk perwujudan tujuan pembangunan tersebut, Rencana Kerja (Renja) 2022 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2019-2023, mengangkat tema **“Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, dan Layanan Dasar Lainnya melalui Pemantapan Kelambagaan Perangkat Daerah serta Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Perekonomian dan Prasarana Sosial.”**

#### 1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Perwal 81 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota nomor 49 tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.

Kecamatan memiliki kedudukan yaitu :

1. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan, berkedudukan di bawah Walikota.
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun kelurahan

Tugas dan Fungsi Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan tingkat Kecamatan;
  - b. Pengorganisasian dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan;
  - c. Pengkoordinasian kegiatan pemerintahan umum, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana umum serta penyelenggaraan administrasi layanan umum di tingkat kecamatan;
  - d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan;
  - e. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh kelurahan;
  - f. Pelaksanaan pengembangan lembaga kemasyarakatan.

#### **TUGAS DAN FUNGSI CAMAT**

Camat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
- c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. penyelenggaraan layanan umum di tingkat Kecamatan;
- i. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kerjanya;
- j. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- k. pelaksanaan administrasi Kecamatan;

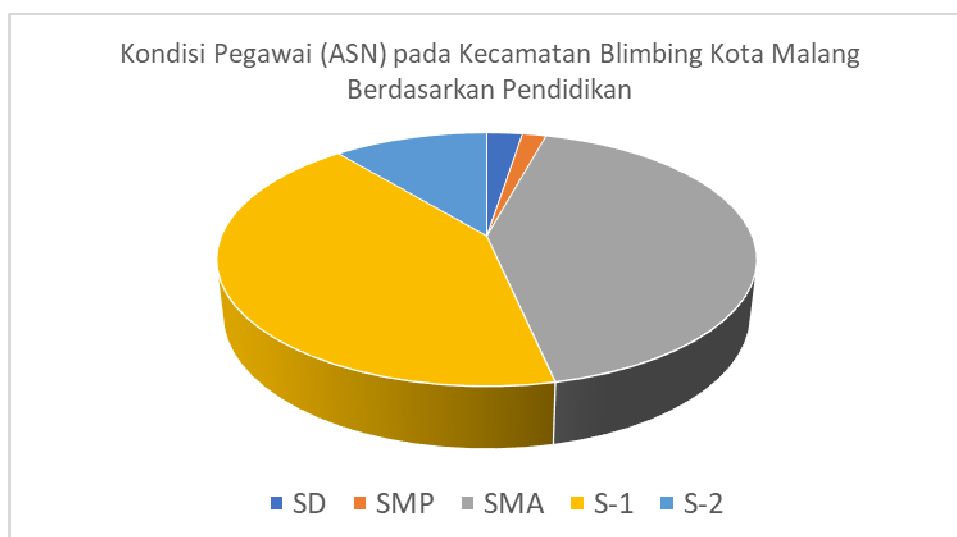
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Kecamatan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.

1.2. Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2022, jumlah Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Blimbing termasuk di kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Blimbing berjumlah 132 orang, terdiri atas 72 laki-laki dan 57 perempuan. Dari sisi pendidikan, persentase terbesar adalah pegawai berpendidikan S-1 (40,91%). Komposisi pegawai secara detail dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Tingkat Pendidikan ASN Kecamatan Blimbing Tahun 2022

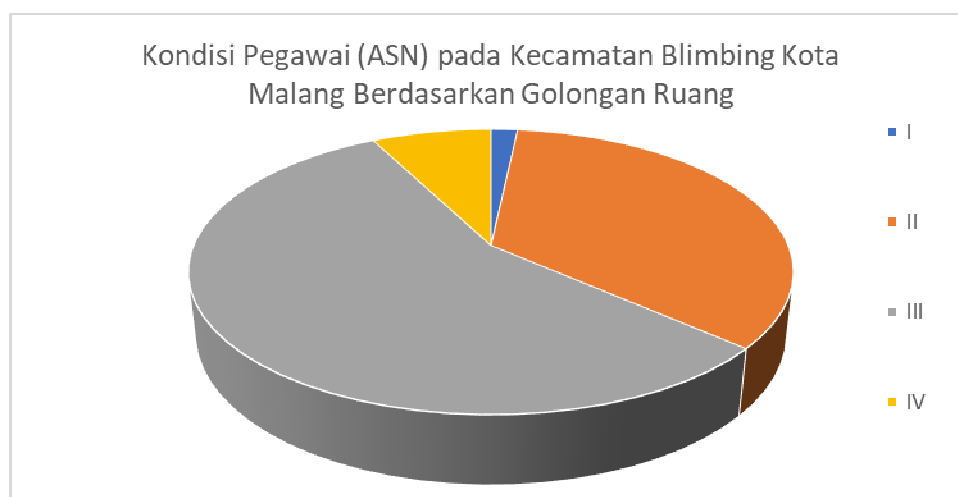
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	3
2	SMP	2
3	SMA	50
5	S-1	50
6	S-2	13
JUMLAH		118



Sumber: Kecamatan Blimbing, 2022

Gambar 1.2. Komposisi Golongan ASN Kecamatan Blimbing  
Tahun 2022

No	Gol/Ruang	Jumlah
1	I	2
2	II	41
3	III	66
4	IV	9
<b>JUMLAH</b>		<b>118</b>



Sumber: Kecamatan Blimbing, 2022

### 1.3. Aspek Strategis Organisasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, selain melaksanakan sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan, Camat juga sebagai penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum dan secara berjenjang melaksanakan tugas pemerintah pusat di wilayah kecamatan. Pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat bertujuan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan sebagai ujung tombak pemerintah daerah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Kecamatan memiliki peran strategis, baik tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia maupun sumber pembiayaan. Sebagai perangkat daerah, kecamatan berperan dalam penyusunan rencana strategis, Rencana Kerja Tahunan, pengendalian maupun evaluasi pelaksanaan rencana strategis.

#### 1. Penyusunan Rencana Strategis

Sebagai perangkat daerah yang membawahi Kelurahan-kelurahan, dalam penyusunan Rencana Strategis, Kecamatan berperan sebagai administrator dan *integrator* sekaligus. Sebagai *integrator*, Kecamatan memadukan semua usulan masyarakat yang ditampung dalam forum

musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari semua kelurahan untuk mencapai sasaran pembangunan Kecamatan dan selanjutnya diolah dan diadministrasikan di Kecamatan (peran administrator).

Rencana Strategis Kecamatan merupakan acuan bagi Kelurahan-kelurahan untuk menyusun rencana kerja masing-masing dan menjadi dasar dalam perumusan rencana kegiatan dan anggaran. Rencana strategis juga harus memadukan antara usulan masyarakat di tingkat kelurahan (*bottom up*) dan sasaran yang ingin dicapai di tingkat kota (*top down*). Oleh karena itu, penyusunan rencana strategis merupakan tahap yang sangat krusial dalam proses perencanaan pembangunan kecamatan.

## 2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, salah satu fungsi kecamatan adalah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi kecamatan. Kecamatan juga menjalankan fungsi pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga kecamatan juga berperan dalam memastikan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Seiring dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, isu strategis yang dihadapi Kecamatan Blimbing adalah sebagai berikut:

### 1. Struktur Organisasi dan Proses Bisnis

Semangat yang diusung dalam penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan adalah efisiensi dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada kebutuhan restrukturisasi organisasi yang mencerminkan proses bisnis yang efisien dan dinamis.

### 2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menuntut aparatur kecamatan memiliki kemampuan yang cukup dalam menyelenggarakan pelayanan dan pemerintahan umum, mengkoordinir pemberdayaan masyarakat serta mengkoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Di samping itu, perubahan proses



bisnis dan upaya sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah, antar daerah dan antar wilayah juga membutuhkan inovasi yang terus menerus seiring dengan perubahan kebijakan dan strategi yang terjadi baik dalam siklus tahunan maupun lima tahunan. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan dan kapasitas aparatur menjadi sebuah keniscayaan.

### 3. Peningkatan pembangunan infrastruktur

Salah satu indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2018-2023 adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). Indikator ini kemudian diturunkan menjadi indikator perangkat daerah dalam hal ini kecamatan, yaitu indeks kepuasan layanan prasarana sarana. Berdasarkan indikator ini maka pembangunan infrastruktur kecamatan harus memenuhi berbagai kriteria antara lain, ketersediaan fisik (*availability*), kualitas fisik (*quality*), kesesuaian (*appropriateness*), kemanfaatan (*utility*), penyerapan tenaga kerja (*job creation*) serta kontribusi terhadap perekonomian.

#### 1.4. Permasalahan Utama Organisasi

Merespon Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, beberapa permasalahan utama yang ditemui di Kecamatan Blimbing adalah sebagai berikut:

1. Proses perencanaan belum sepenuhnya berbasis *outcome* dan belum sinkron dengan rencana strategis dan RPJMD.
2. Belum maksimalnya proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana secara tersistem.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi belum ter-*cascading* secara individu sedang Indikator Program dan Kegiatan belum menggunakan prinsip *specific, measurable, achievable, realistic* dan *timebond* (SMART).

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Kinerja

Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023, Kecamatan Blimbing menyusun sasaran strategis, indikator program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Blimbing Tahun 2018-2023. Rencana strategis dan RPJMD merupakan penerjemahan visi misi Walikota Malang yang akan dicapai dalam kurun waktu 2018-2023. Bagan alur visi, misi, tujuan Kepala Daerah dan sasaran strategis Kecamatan Blimbing dapat dilihat dalam bagan berikut:

Gambar 2.1: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran



Sumber: Renstra Kecamatan Blimbing 2018-2023

## 1. Tujuan dan Sasaran

Renstra Kecamatan Blimbing Tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Malang telah menetapkan Tujuan pembangunan Kecamatan Blimbing yaitu: Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel. Berdasarkan gambar 2.1 tujuan dan sasaran dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1  
Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra  
Tahun 2018-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80,28	80,43	80,58	80,73
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMasy) Kecamatan	4,13	4,21	4,29	4,37	4,45
		Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3,75	3,80	3,80	3,85	3,90

Sumber: Renstra Kecamatan Blimbing 2018-2023

## 2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

Adapun strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif
2. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi forum-forum atau koordinasi tingkat kecamatan
3. Peningkatan keaktifan dan peran lembaga kemasyarakatan
4. Peningkatan Pelaksanaan kualitas penentuan prioritas dalam penanganan masalah di wilayah
5. Peningkatan konsistensi perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan dengan pelaksanaannya
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat/ kelompok masyarakat dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan
2. Membangun sarana dan prasarana fisik lingkungan tematik
3. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat menumbuhkembangkan ekonomi dengan potensi/ skill/ keterampilan/ pengetahuan masyarakat dengan adanya pelatihan-pelatihan
4. Membangun mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan yang partisipatif dan mengakomodir pengarusutamaan kesetaraan gender
5. Mengoptimalkan peran pemuda dalam program dan kegiatan pembangunan kecamatan
6. Menumbuhkan dan meningkatkan kualitas eksistensi forum anak di setiap kelurahan sampai tingkat kecamatan
7. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk percepatan layanan dasar kesehatan di setiap kelurahan
8. Mendorong peningkatan kualitas kader di posyandu balita dan posyandu lansia di tiap-tiap kelurahan
9. Mendukung peningkatan layanan keluarga berencana di setiap kelurahan
10. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pos PAUD di tiap-tiap kelurahan dalam rangka pembinaan
11. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Dinas Pendidikan guna peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini

12. Menciptakan sistem serta mekanisme pengamanan lingkungan yang innovative, integratif, partisipatif dan koordinatif
13. Meningkatkan kualitas tenaga pendukung pada pos tanggap bencana
14. Mengoptimalkan layanan informasi tanggap bencana yang cepat, efektif dan efisien
15. Melaksanakan pengadaan perangkat hardware pendukung kegiatan pelayanan administrasi
16. Menerapkan system pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi
17. Mengoptimalkan standard operasional prosedur (SOP) pelayanan masyarakat yang lebih efektif dan efisien
18. Menerapkan sistem jaringan komunikasi dan informasi antar kelurahan yang bersifat koordinatif

#### B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang di tetapkan dalam SK Walikota Malang Nomor : 188.45/234/35.73.402/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023.

Adapun IKU Kecamatan Blimbing sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2: Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80	80	80,2	80,3	80,4
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80,28	80,43	80,58	80,73
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMasy)	4,13	4,21	4,29	4,37	4,45

		Kecamatan					
4.	Meningkatnya pemerataann pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3,75	3,80	3,80	3,85	3,90

Sumber: Renstra Kecamatan Blimbing 2018-2023

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat di capai dalam tahun 2021 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Blimbing Kota Malang Tahun 2022 secara rinci adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel

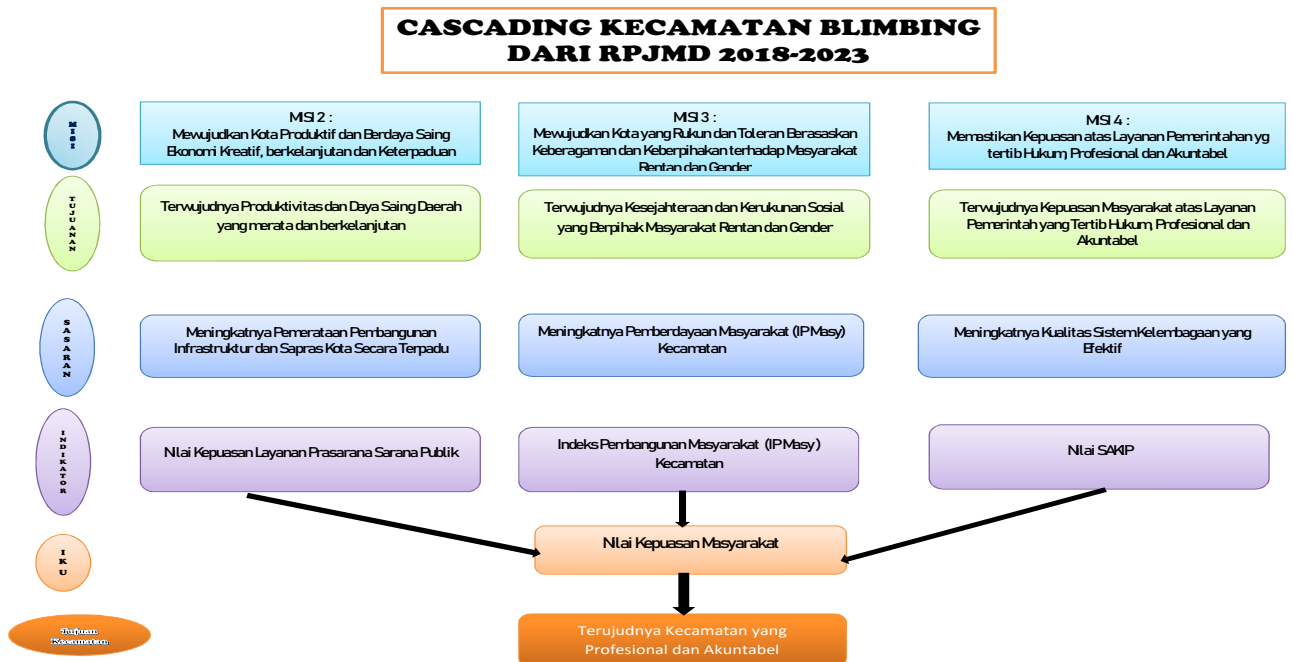
Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran strategi	Indikator kinerja	target	program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,5	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.829.242.908
			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.842.166.539
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMasy) Kecamatan	4.9	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (7.01.03.2.02.03	8.282.490.521

			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)	
			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan)	7.991.662.277
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	237.050.000
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.743.807.700
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3,85	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan)	8.114.639.840

Selanjutnya, dalam penentuan target dan pencapaian realisasi indikator kinerja, peran masing-masing unit kerja digambarkan dalam cascading berikut:

Gambar 2.2: Cascading Kecamatan Blimbing Tahun 2022



Sumber: Renstra Kecamatan Blimbing 2019-2023

#### D. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Kecamatan Blimbing Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

<b>Nilai</b>	<b>Pencapaian</b>
110 ke atas	Sangat tercapai/sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai / berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai / cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai / tidak berhasil



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023. Dari segi Indikator Kinerja Utama (IKU), sasaran strategis maupun indikator program merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya. Selain telah memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measureable, Achievable, Realistic dan Timebond*), pengukuran target kinerja juga telah memenuhi prinsip dapat diperbandingkan.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi.**

Capaian Kinerja Organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Capaian kinerja di atas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Blimbing yaitu :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas
3. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut adalah :

#### **1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Laporan kinerja tahunan ini disusun berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun anggaran 2022. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dalam perjanjian kinerja dengan realisasi. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Kinerja**  
**Tahun 2022**

Sasaran strategis	Indikator kinerja sasaran/ Program	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	keterangan
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,43	81,25	101,02%	Penilaian berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022
	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu tercapai	100%	100%	100,00%	
	IKM Perangkat Daerah	80,73	81	100,33%	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat Kecamatan	4,37	4,06	92,91%	Penilaian oleh BAPPEDA untuk Tahun 2022
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	91,67%	92,00%	100,36%	
	Rasio Linmas per RT	95,50%	66,30%	69,42%	
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks kepuasan layanan prasarana sarana publik	3,8	4,14	108,95%	Penilaian oleh BAPPEDA untuk Tahun 2022
	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	32%	43,00%	133,04%	
	Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	25%	45,00%	180,00%	

Sumber: Data Kecamatan Blimbing dan Bappeda Kota Malang diolah, 2022

Capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 100,33%** pada tahun 2022. Rata-rata capaian indikator sasaran tahun 2022 adalah 100,33%. Dengan demikian, capaian kinerja sasaran Kecamatan Blimbing mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 13,31%. Berdasarkan realisasi Tahun 2021, maka status capaian kinerja sasaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Status Capaian Kinerja Tahun 2022**

Sasaran	Indikator	Capaian	Status
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	101,02%	Sangat Berhasil
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMasy) Kecamatan	92,91%	Cukup berhasil
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	108,95%	Sangat Berhasil

Sumber: Data Kecamatan Blimbing diolah, 2022

Capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator Nilai SAKIP perangkat daerah pada tahun 2022 adalah 101,02%. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMasy) Kecamatan adalah 92,91% dan Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik adalah 108,95%. Rata-rata Status Capaian Kinerja kenaikan dari tahun sebelumnya.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2023

Penyusunan target kinerja 2019-2023 didasarkan pada realisasi kinerja tahun 2018. Pengukuran realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 -2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 3.3  
Realisasi dan Capaian Kinerja  
Tahun 2018-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79	79	82,69	78,23	90,08			98,75%	102,09%	96,58%	102,12%	
	Tingkat publikasi informasi	4	4	4	4				100,00%	100,00%	100,00%		
	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu tercapai				100%	100%					100%	100%	
	IKM Perangkat Daerah	80,16	74,17	80,54	81	82			92,14%	99,43%	101,62%	102,12%	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas	Indeks Pembangunan masyarakat kecamatan	-	3,3478	3,23	81,72	4,14			-	71,15%	86,57%	84,49%	
	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	89,7	91,7	91,7	100,00%	1			107,88%	105,40%	119,05%	111,11%	
	Rasio Linmas per RT	78,4	95,13	91,97	82,00%	69,42%			47,57%	45,99%	82,00%	68,30%	
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Wilayah	-	94,654	83,408	4,16	4,3			-	111,21%	101,71%	111,69%	
	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	76,44%	72,31%	28,46%	42,10%	43,0%			289,24%	94,87%	110,79%	113,16%	
	Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	48,20%	55,87%	27,46%	41,60%	48,0%			74,49%	35,21%	109,47%	160,00%	

Secara umum, dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2022, realisasi tahun 2022 ini mengalami kenaikan meskipun tidak dengan secara signifikan. Adapun perbandingan realisasi untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

a) Sasaran strategis : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

a. Indikator kinerja sasaran : Nilai SAKIP perangkat daerah

Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Blimbing pada Tahun 2022 adalah 81,25 dari target 80,43 sehingga ada peningkatan sebesar 0,8 poin pada tahun 2022 ini.

Sasaran ini ada 2 program dengan indikator sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

g. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

(Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan),

Dengan indikator sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Pada Tahun 2022, nilai IKM Kecamatan Blimbing terealisasi sebesar 80,73 meningkat dari tahun 2022 yang terealisasi sebesar 81 atau meningkat sebesar 0,2 poin.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan), dengan Indikator sebagai berikut

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Pada Tahun 2022, nilai IKM Kecamatan Blimbing terealisasi sebesar 82 meningkat dari tahun 2021 yang terealisasi sebesar 81,5 atau meningkat sebesar 0,5 poin.

- b) Sasaran strategis : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas

Indikator kinerja sasaran : Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMasy) Kecamatan

Realisasi indikator ini pada Tahun 2022 sebesar 4,06 turun dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 4,26 turun 0,2 poin indeks.

Sasaran ini dicapai melalui :

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) serta Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan)

dengan indikator sebagai berikut:

1. Indikator 1 : Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  
Indikator ini terealisasi sebesar 100,36%
2. Indikator 2 : Rasio Linmas per RT  
Indikator ini terealisasi sebesar 69,42%

Sasaran strategis: Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu

Indikator kinerja sasaran : Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik

Realisasi kinerja indikator sasaran ini pada Tahun 2022 sebesar 4,14 atau naik 1 Point dari realisasi tahun 2021.

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik dengan indikator:

1. Indikator 1 : Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan  
Indikator ini terealisasi sebesar 43% atau naik sebesar 0,90% dari tahun 2021.
2. Indikator 2 : Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Indikator ini tercapai sebesar 45% atau naik sebesar 6,4% dari tahun 2021.

3. Perbandingan Relisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisis berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu tabulasi target jangka menengah sebagaimana dalam rencana strategis tahun 2018-2023, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4  
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah  
Renstra

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target jangka menengah	Realisasi Kinerja				
			2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	2	3	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	79	82,69	78,23	81,25	
		Tingkat publikasi informasi	4	4	4	4		
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu tercapai				100%	100%	
		IKM Perangkat Daerah	81	74,17	80,54	81,5	81	
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas	Indeks pembangunan masyarakat kecamatan	4,45	3,3478	3,23	81,72	406%	
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	96			100	92%	
		Rasio Linmas per RT	200%	95,13%	91,97	82,00%	69,42%	
3	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara	Indeks kepuasan layanan prasarana sarana publik	85	94,654	83,41	4,16	4,14	

	terpadu	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	45%	72,31%	28,46	42,1	43%	
		Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	85%	55,87%	27,46	41,6	45%	

Sumber: Data Kecamatan Blimbing diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dianalisis capaian kinerja untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

A. Sasaran strategis : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

1. Indikator kinerja sasaran : Nilai SAKIP perangkat daerah  
Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Blimbing pada Tahun 2022 adalah 81,25. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka sudah tercapai 101,02%. Artinya, untuk mencapai target jangka menengah pada tahun 2023, capaian Tahun 2022 sudah melebihi target.
2. Sasaran Program
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
  - d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
  - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator 1 : Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu tercapai

Capaian kinerja indikator ini pada Tahun 2022 dan juga capaian target jangka menengah sebesar 100%.

Indikator 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Pada Tahun 2022, capaian kinerja indikator ini sebesar 81 dan capaian jangka menengah



sebesar 100,33%. Artinya, untuk mencapai target jangka menengah, capaian indikator ini sudah *on the track*.

B. Sasaran strategis : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas

1. Indikator kinerja sasaran: Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMasy) Kecamatan

Realisasi indikator ini pada Tahun 2022 turun 0,201 poin dari tahun lalu yaitu sebesar 4,26 tercapai 4,06 dari target. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka tingkat capaian baru mencapai 92,91%. Sehingga, untuk mencapai target jangka menengah masih perlu upaya yang lebih keras lagi.

2. Indikator Program

a. Indikator 1: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator ini terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 92%. Sedang capaian terhadap target jangka menengah sebesar 91,675% sehingga diharapkan target kinerja jangka menengah dapat tercapai.

b. Indikator 2: Rasio Linmas per RT

Indikator ini tercapai sebesar 69,42% dengan capaian kinerja terhadap target tahunan sebesar dan target jangka menengah sebesar 66,30%. Dilihat dari capaian ini maka untuk indikator Rasio Linmas per RT masih diperlukan usaha yang sangat keras untuk pencapaian kinerja di akhir periode.

C. Sasaran strategis: Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu

1. Indikator kinerja sasaran : Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik

Realisasi kinerja indikator sasaran ini pada Tahun 2022 mencapai 4,14 dengan capaian kinerja sebesar 108,95%. Sedang target jangka menengah tercapai sebesar 3,8.

Artinya, baik target tahunan maupun target jangka menengah sudah sesuai.

2. Indikator Program

a. Indikator 1 : Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Indikator ini tercapai sebesar 43% dengan capaian kinerja tahunan sebesar 113,04% dan capaian kinerja jangka menengah sebesar 32%. Target tahunan telah tercapai sementara untuk target jangka menengah masih perlu upaya yang lebih keras.

b. Indikator 2 : Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Indikator ini terealisasi sebesar 45,00% dengan capaian kinerja tahunan sebesar 180,00% dan capaian kinerja jangka menengah sebesar 25%. Indikator ini melampaui target yang perlu dicapai.

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/ Standar Nasional lainnya

Tiga indikator sasaran Kecamatan Blimbing tidak masuk dalam Standar Pelayanan Minimal ataupun standar nasional lainnya. Sebagai bahan perbandingan, digunakan capaian indikator yang berkaitan di beberapa pemerintah daerah lain. Hasil perbandingan masing-masing indikator ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5

Realisasi Kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Realisasi Kinerja	Rata-Rata Realisasi Daerah Lainnya	Persentase Perbandingan
			2022	2022	
1	2	3	4	5	6
1.	meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas	Indeks pembangunan masyarakat kecamatan	4,37	4,06	107,64%

Sumber : BPS provinsi jawa timur 2022, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa:

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator nilai SAKIP perangkat daerah di Kecamatan Blimbing dikategorikan BERHASIL jika dibandingkan dengan capaian daerah-daerah lain. Nilai SAKIP kecamatan di daerah lain berkisar antara 80-81. Jika digunakan angka tertinggi sebagai perbandingan, maka capaian Kecamatan Blimbing adalah 101,02%.

Sasaran 2 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas. Meskipun tidak banyak, beberapa daerah telah mengukur indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung. Rata-rata indeks adalah 88,13 sehingga persentase perbandingan Kecamatan Blimbing sebesar 92,91%

Sasaran 3 : Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu.

Indikator kepuasan layanan prasarana sarana publik (IKLSarpras) merupakan turunan dari indeks kepuasan layanan infrastruktur (IKLI). IKLSarpras adalah IKLI yang diukur di tingkat kecamatan. IKLSarpras di beberapa daerah mencapai 4,14 sehingga persentase perbandingan Kecamatan Blimbing sebesar 108,95%.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.

Pengukuran pencapaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama Tahun 2022 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah di perjanjikan adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran strategis : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah capaian indikator 100,33%, melebihi dari yang diperjanjikan. Beberapa terobosan baru dalam rangka meningkatkan pelayanan dan meningkatkan nilai SAKIP telah dilaksanakan pada Tahun 2022. Misalnya, dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan aparatur, Kecamatan Blimbing menerapkan penilaian kinerja untuk setiap unit kerja setiap bulan. Penilaian ini dipergunakan untuk melakukan evaluasi berkala

sehingga memungkinkan untuk menyusun strategi pencapaian sasaran dan menemukan solusi atas permasalahan dan hambatan-hambatan yang ada.

Indikator : Nilai SAKIP perangkat daerah telah terealisasi 81,25 lebih dari target sebesar 80,43 dengan kategori BERHASIL.

- 2) Sasaran strategis : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas.

Capaian indikator sasaran ini Tahun 2022 adalah 92,91 dari target.. Penyebab Permasalahan tahun sebelumnya yaitu belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan telah mulai diatasi dengan melakukan perencanaan kegiatan yang berbasis outcome serta meningkatkan kompetensi aparatur. Sementara, pencaangan kelurahan siaga yang ditopang oleh LINMAS yang cukup terus digalakkan. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat keberdayaan masyarakat dari sisi sosial.

Indikator : Indeks Pemberdayaan Masyarakat (IPMas) Kecamatan terealisasi 4,37 atau 4,064 ( Nilai Indeks) atau mencapai 92,91% dari target yang dengan kategori CUKUP BERHASIL.

- 3) Sasaran strategis : Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu.

Pada tahun 2022, indikator sasaran ini telah tercapai sebesar 108,95%. Faktor pendukung keberhasilan adalah adanya alokasi anggaran khusus untuk program peningkatan sarana prasarana kelurahan melalui usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah banyak yang diakomodir.

Indikator : Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik terealisasi sebesar 4,14 atau mencapai 108,95% dari target Tahun 2022 dengan kategori SANGAT BERHASIL.

## 6. Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber daya

Keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja tidak terlepas dengan kinerja anggaran. Karena itu analisis hasil pengukuran kinerja juga dilengkapi dengan analisis capaian anggaran. Realisasi anggaran untuk menunjang pencapaian masing-masing sasaran ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)**

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Capaian (%)	
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Efektivitas	Efisiensi
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,43	81,25	101,02%	17.690.211.032	16.700.148.575	94,40%	107,01%	5,99%
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat Kecamatan	4,37	4,06	92,91%	35.253.956.420	34.833.124.932	98,81%	94,03%	1,12%
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks kepuasan layanan prasarana sarana publik	3,8	4,14	108,95%	7.726.479.860	7.497.442.343	97,04%	112,28%	3,33%

Sumber : Data Kecamatan Blimbing diolah, 2022

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaa sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) Indikator Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah dengan capaian kinerja 101,02 dan capaian anggaran 94,40%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 5,99% dan efektivitas penggunaan dana sebesar 107,01%
- 2) Indikator Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas dengan capaian kinerja 92,91% dan capaian anggaran 98,81%. Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis bahwa program dan kegiatan untuk mendukung sasaran ini dilaksanakan dengan efisiensi sebesar 1,12% tetapi efektivitasnya hanya 94,03% sehingga capaian kinerja sasaran optimal.
- 3) Indikator Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu dengan capaian kinerja 108,95% dan capaian anggaran 97,04% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 3,33% dan efektivitas penggunaan dana sebesar 112,28%. Artinya, program dan kegiatan untuk mendukung sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien dan efektif.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (perjanjian kinerja)

Jika dievaluasi ke masing-masing program dan kegiatan, maka kontribusi setiap program pada keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Keberhasilan / Kegagalan pencapaian perjanjian kinerja Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	101,02%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu tercapai	100	100	100	Meningkatkan sarana informasi warga terutama yang berkaitan dengan quick responses juga mengaktifkan kelompok informasi masyarakat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,73	81	100,33%	menetapkan Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan masyarakat
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
Indeks Pembangunan Masyarakat Kecamatan	92,91%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	91,67%	92,00%	100,36%	melakukan fasilitasi kegiatan bagi lembaga kemasyarakatan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rasio Linmas per RT	95,50%	66,30%	69,42%	Merancang Program Kelurahan Tangguh
Indeks kepuasan layanan prasarana sarana publik	108,95%	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Persentase pelaksanaan peningkatan sarpras kewilayahan	38%	43,00%	113,16%	Melaksanakan pendataan sarpras dan monev kegiatan peningkatan sarpras
			Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	25%	45,00%	180,00%	melakukan sosialisasi dan pendampingan sebelum kegiatan musrenbangkel

Sumber: Data Kecamatan Blimbing diolah, 2022

Tabel 3.8  
Realisasi Anggaran Tahun 2022

Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tarrget Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Meningkatkan Kinerja Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>17,690,211,032</b>	<b>16,700,148,575</b>	<b>94%</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49,800,000	49,485,100	99%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45,600,000	45,487,500	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,000,000	1,987,600	99%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,200,000	1,080,000	90%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,000,000	930,000	93%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16,539,258,844</b>	<b>15,612,594,587</b>	<b>94%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16,489,508,844	15,564,578,776	94%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	49,750,000	48,015,811	97%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>73,960,000</b>	<b>73,560,000</b>	<b>99%</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	73,960,000	73,560,000	99%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>7,200,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>63%</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	7,200,000	4,500,000	63%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>452,041,400</b>	<b>428,864,550</b>	<b>95%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	4,748,000	95%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67,812,000	65,172,500	96%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9,252,000	8,907,000	96%



Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tarrget Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,380,000	17,972,500	66%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000	4,144,000	69%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,000,000		0%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331,597,400	327,920,550	99%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>114,237,500</b>	<b>103,675,000</b>	<b>91%</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114,237,500	103,675,000	91%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>220,511,000</b>	<b>204,813,038</b>	<b>93%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,400,000	1,400,000	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56,847,000	45,449,538	80%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162,264,000	157,963,500	97%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>233,202,288</b>	<b>222,656,300</b>	<b>95%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86,657,000	79,007,300	91%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,437,288	2,880,000	53%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	141,108,000	140,769,000	100%
<b>Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>5,104,397,860</b>	<b>4,746,459,165</b>	<b>93%</b>
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>4,993,643,960</b>	<b>4,680,182,665</b>	<b>94%</b>
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Blimbing	17,310,600	14,260,000	82%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Balearjosari	431,685,300	379,512,525	88%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Arjosari	448,382,600	441,229,650	98%

Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tarrget Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Polowijen	464,782,000	464,782,000	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Purwodadi	393,403,000	360,967,749	92%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Blimbing	442,204,250	423,878,590	96%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pandanwangi	480,620,600	404,576,985	84%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Purwantoro	555,505,000	544,523,249	98%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bunulrejo	440,924,000	420,450,976	95%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kesatrian	446,245,050	440,650,671	99%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Polehan	489,450,000	442,698,275	90%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Jodipan	383,131,560	342,651,995	89%
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	110,753,900	66,276,500	60%
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Blimbing	6,079,800	0	0%
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Balearjosari	6,500,000	0	0%
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Arjosari	250,000	0	0%

Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tarrget Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Polowijen	0	0	0%
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Purwodadi	24,740,000	19,925,000	81%
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Blimbing	8,000,000	8,000,000	100%
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Pandanwangi	8,750,000		0%
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Purwantoro	13,990,000	12,758,400	91%
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Bunulrejo	10,800,000	3,600,000	33%
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Kesatrian	13,029,100	13,029,100	100%
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Polehan	7,500,000	3,430,500	46%
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Jodipan	11,115,000	5,533,500	50%
<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>14,962,373,400</b>	<b>14,637,534,532</b>	<b>98%</b>
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>14,866,003,400</b>	<b>14,547,584,532</b>	<b>98%</b>

Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tarrget Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan di Kecamatan Blimbing	31,240,000	31,240,000	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Balarjosari	11,540,000	11,530,000	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Arjosari	14,257,000	13,600,000	95%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polowijen	12,000,000	11,281,250	94%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodadi	13,500,000	11,400,000	84%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Blimbing	20,300,000	20,300,000	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandanwangi	13,100,000	13,100,000	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwantoro	11,000,000	10,390,800	94%

Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tarrget Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bunulrejo	11,000,000	10,390,800	94%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kesatrian	15,300,000	15,300,000	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polehan	14,500,000	12,975,000	89%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jodipan	16,953,800	14,940,375	88%
	Evaluasi Kelurahan	272,170,160	257,488,324	<b>95%</b>
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Balearjosari	499,525,000	485,260,000	<b>97%</b>
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Arjosari	320,690,000	312,171,550	97%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Polowijen	526,890,000	519,523,530	99%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purowodadi	410,826,000	407,446,000	99%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Blimbing	339,190,000	336,488,200	99%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandanwangi	588,284,900	469,218,200	80%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwantoro	681,402,000	658,830,500	97%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bunulrejo	1,029,425,000	1,028,386,100	99.9%

Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tarrget Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kesatrian	442,150,000	439,833,750	99%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Polehan	1,297,072,000	1,294,376,225	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jodipan	1,046,684,640	1,030,931,640	98%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Balarjosari	540,370,000	471,070,000	87%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arjosari	497,317,000	493,618,438	99%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polowijen	422,652,000	417,651,750	98.8%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodadi	651,130,000	649,335,000	99.7%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Blimbing	453,745,750	452,860,000	99.8%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandanwangi	935,670,000	927,870,000	99%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwantoro	1,113,425,000	1,110,220,000	99.7%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bunulrejo	880,500,000	877,665,700	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian	437,043,150	437,041,400	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polehan	711,550,000	711,050,000	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jodipan	583,600,000	582,800,000	100%
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>96,370,000</b>	<b>89,950,000</b>	93%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Blimbing	96,370,000	89,950,000	93%

Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tarrget Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Balearjosari	417,295,250	408,474,000	98%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Arjosari	407,801,000	407,105,000	99.8%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Polowijen	442,100,000	439,710,000	99%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwodadi	774,224,000	760,324,000	98%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Blimbing	567,460,000	561,120,000	99%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pandanwangi	1,041,020,000	1,033,970,000	99%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwantoro	1,249,647,000	1,249,291,000	99.97%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bunulrejo	1,208,688,000	1,207,426,000	100%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kesatrian	616,806,500	616,801,500	100%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Polehan	561,143,000	549,786,500	98%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jodipan	672,204,000	668,000,000	99%
<b>Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dan Tingkat</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>1,872,255,600</b>	<b>1,842,861,429</b>	<b>98%</b>
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>1,852,269,600</b>	<b>1,825,511,429</b>	<b>99%</b>

Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tarrget Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Kelurahan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Blimbing	17,211,000	16,800,000	98%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Balearjosari	160,100,000	156,971,700	98%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Arjosari	188,402,400	182,080,000	97%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Polowijen	164,970,000	161,645,200	98%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Purwodadi	156,710,000	156,630,000	100%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Purwodadi			#DIV/0!
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Blimbing	168,742,000	161,052,800	95%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pandanwangi	161,325,000	159,179,000	99%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Purwantoro	173,622,000	173,312,284	100%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bunulrejo	187,580,000	186,351,345	99%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kesatrian	168,233,200	168,232,100	100%



Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tarrget Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Polehan	164,700,000	164,130,000	100%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Jodipan	140,674,000	139,127,000	99%
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>19,986,000</b>	<b>17,350,000</b>	<b>87%</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>19,986,000</b>	<b>17,350,000</b>	<b>87%</b>
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19,986,000	17,350,000	87%
<b>Total Jumlah</b>		<b>39,649,223,892</b>	<b>37,944,353,701</b>	<b>96%</b>

CAMAT BLIMBING,  
  
**NINA SUDIARTY, S.STP. M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 0770718-199703 2 005

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Laporan kinerja Kecamatan Blimbing Tahun 2022 merupakan gambaran kinerja dari unit-unit kerja ( kelurahan ) yang ada di Kecamatan Blimbing. Laporan kinerja juga memuat hasil analisis dan evaluasi pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2022. Ada 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator yang harus dicapai oleh Kecamatan Blimbing. Secara umum ketiga sasaran telah dicapai dengan hasil: (i) sasaran 1 tercapai 101,02%, (ii) sasaran 2 tercapai 92,91% dan (iii) sasaran 3 tercapai 108,95%. Capaian dari masing-masing indikator sasaran dan program adalah sebagai berikut:

- A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai 101,02% melalui indikator program:
  - 1). Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu tercapai 100%
  - 2). IKM Perangkat Daerah tercapai 100,33%
  
- B. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas dengan indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMasy) Kecamatan tercapai 92,91% melalui indikator program:
  - 1). Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif tercapai 100,36%%
  - 2). Rasio Linmas per RT tercapai 69,42%
  
- C. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Prasarana dan Sarana Publik tercapai 108,95% melalui indikator program:
  - 1). Persentase pelaksanaan peningkatan sarana prasarana kewilayahan tercapai 133,04%
  - 2). Persentase usulan masyarakat untuk prasarana sarana kewilayahan yang diakomodir tercapai 180,00%

#### **2. TINDAK LANJUT**

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Blimbing pada tahun 2022 kami akan melakukan perbaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan evaluasi pencapaian target kinerja secara periodik dengan menyiapkan kartu Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) untuk setiap pejabat struktural dan memberikan *reward and punishment*.
- b. Mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan merancang kegiatan berbasis *outcome* serta melakukan pendampingan bagi kelompok-kelompok ekonomi dan Lembaga kemasyarakatan yang produktif dan implementasi kelurahan siaga.
- c. Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan mulai dari Renstra, Renja, RKA sampai dengan PK dengan menyiapkan SOP perencanaan dan optimalisasi laskar rencana.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak terkait. Rekomendasi di atas diharapkan dapat mendukung kebijakan terutama dalam proses perencanaan sehingga dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Blimbing.

Malang,  
**CAMAT BLIMBING**

**NINA SUDIARTY, S.STP,M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770718 199703 2 005

# **LAMPIRAN**

FORMULIR E.81  
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA  
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG  
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN IV (BULAN OKTOBER, NOPEMBER, DESEMBER) TAHUN 2022

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang mengacu pada sasaran RKPD.

No	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Peragkat Daerah Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang di evaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
KECAMATAN BLIMBING																													
I	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu					100%	17,292,157,532									4	dokumen	15,761,238,814		91.15%							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu					100%	49,800,000			30,887,600								49,485,100		50%							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja/RKT					2	dokumen	45,600,000	1	dok	30,000,000					1	dok	15487500	2	dokumen	45,487,500	100%	100%			Kec Blimbing	
			Jumlah dokumen Renstra					1	dokumen									1	dok		1	dokumen							
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA					4	dokumen	2,000,000	2	dok	887,600					2	dok	1,100,000	4	dokumen	1,987,600	100%	99%			Kec Blimbing	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja					1	dokumen	1,200,000								1	dok	1,080,000	1	dokumen	1,080,000	100%	90%			Kec Blimbing	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja					1	dokumen	1,000,000	0	dok	-					1	dok	930,000	1	dokumen	930,000					Kec Blimbing	
			Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat					2	dokumen									2	dok		2	dokumen	-						
			Jumlah dokumen standar pelayanan					2	dokumen									2	dok		2	dokumen	-						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu					100%	16,539,258,844			2,338,629,474									2,338,629,474								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan					2	dokumen	49,750,000	0	dok		1	dok	10,050,000		1	dok	37,965,811	2	dok	48,015,811	100%	97%			Kec Blimbing	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN					134	pegawai	16,489,508,844	122	pegawai	2,338,629,474	126	pegawai	5,799,528,308	121	pegawai	3,619,635,726	121	pegawai	3,806,785,268	126	pegawai	15,564,578,776	94%	94%		Kec Blimbing
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					80%	73,960,000			13,160,000									13,160,000		0%	18%					
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah petugas pengamanan kantor					12	bulan	73,960,000	3	bln	13,160,000	3	bln	24,320,000	3	bln	18,240,000	3	bln	17,840,000	12	bln	73,560,000	100%	99%		Kec Blimbing
			Jumlah petugas pengamanan kantor					2	orang		2	org		2	org		2	org		2	org		2	Org	-	100%			
		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Internal					80.58	7,200,000			-									-								
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan / dikembangkan kapasitasnya					1	kegiatan	7,200,000	0	keg	-	1	keg	4,200,000	0	keg	300,000	1	keg	4,500,000	100%	63%				Kec Blimbing	

No	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Peragkat Daerah Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Peragkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Peragkat Daerah s/d Renja Peragkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Peragkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peragkat Daerah yang di evaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peragkat Daerah yang di evaluasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rentra Peragkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Peragkat Daerah Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rentra Peragkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	
							I		II		III		IV							
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%	16					
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Internal</b>			80,58	452,041,400		83,158,000			0	83,158,000		18%					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			4 jenis	5,000,000	0	-		4 jenis	4,748,000	4 jenis	4,748,000	100%	95%	Kec Blimbing			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor			63 jenis	67,812,000	32 jenis	31,575,000	8 jenis	6,995,000	5 jenis	764,000	18 jenis	25,838,500	63 jenis	65,172,500	100%	96%	Kec Blimbing
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik			9 jenis	9,252,000	3 jenis	1,827,000	1 jenis	410,000	1 jenis	2,605,000	4 jenis	4065000	9 jenis	8,907,000	100%	96%	Kec Blimbing
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan			4 jenis	27,380,000	0 jenis		1 jenis	12,652,500	1 jenis	540,000	1 jenis	4,780,000	3 jenis	17,972,500	75%	66%	Kec Blimbing
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			2 Jenis	6,000,000	3 bulan	656,000	3 bulan	1,408,000	3 bulan	1,056,000	3 bulan	1,024,000	12 bulan	4,144,000	600%	69%	Kec Blimbing
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Souviner/Cinder Mata			12 bulan	5,000,000	0 bulan	-							0 bulan	-	0%	0%	Kec Blimbing
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman			5 Jenis	331,597,400	3 jenis	49,100,000	2 jenis	51,254,100	jenis	94,701,650	jenis	132,864,800	5 jenis	327,920,550	100%	99%	Kec Blimbing
			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			2 Jenis			-	1 Jenis		jenis		jenis		1 0	-	50%	0%	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>			80%	114,237,500		-						0	-	0%	0%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor			10 Jenis	114,237,500	0	-				9 Jenis	103,675,000	9	103,675,000	90%	91%	Kec Blimbing	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Internal</b>			80,58	220,511,000													
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik			1500 Surat	1,400,000	- Surat				1,000 Surat	1,000,000		400,000	1000 Surat	1,400,000	67%	100%	Kec Blimbing
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik			12 Bulan	56,847,000	3 Bulan	2,662,364	3 Bulan	17,205,062	3 Bulan	13,914,266	3 Bulan	11,667,846	12 Bulan	45,449,538	100%	80%	Kec Blimbing
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan 3 petugas kebersihan yang terbayarkan			12 Bulan	162,264,000	3 Bulan	25,020,000	3 Bulan	57,139,500	3 Bulan	40,124,000	3 Bulan	35,680,000	12 Bulan	157,963,500	100%	97%	Kec Blimbing
			Luasan ruangan yang dibersihkan			6 Gedung		6 Gedung		6 Gedung		6 Gedung		6 Gedung		6 Gedung				
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>			80%	233,202,288		15,560,000		131,614,500		20,346,300		55,135,500	0	222,656,300		95%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			11 Kendaraan	86,657,000	2 kendaraan	15,560,000	2 kendaraan	19,911,500	2 kendaraan	18,546,300	4 kendaraan	24,989,500	10 kendaraan	79,007,300	91%	91%	Kec Blimbing
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara			5 Jenis	5,437,288	0 Jenis	-	1 Jenis	595,000	2 Jenis	1,800,000	jenis	485,000	3 Jenis	2,880,000	60%	53%	Kec Blimbing
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan gedung kantor yang dipelihara			3 paket	141,108,000	0 paket	-	2 paket	111,108,000		1 paket	29,661,000	3 paket	140,769,000	100%	100%	Kec Blimbing	
		<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			80,58	5,104,397,860								80,58	4,722,493,994	100%	93%		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	IKM Perangkat Daerah			12 bulan	4,993,643,960	-							12 bulan	4,656,217,494	100%	93%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Peragkat Daerah Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab						
								I		II											III		IV			
								K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp	12 = 8+9+10+11	
1	2	3	4	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PATEN					1 kegiatan	17,310,600	0 keg	-			1 keg	14,260,000			1 keg	14,260,000	100%	82%					kec. Blimbing
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan					12 bulan	431,685,300	3 bulan	55,407,720	3 bulan	98,606,020	3 bulan	81,513,714	3 bulan	143,985,071	12 bulan	379,512,525	100%	88%					kel. Balearjos ari
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan					12 bulan	448,382,600	3 bin	205,429,991	3 bin	64,993,889	3 bin	56,797,986	3 bin	114,007,784	12 bin	441,229,650	100%	98%					kel. Arjosari
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan					12 bulan	464,782,000	3 bulan	105,305,681	3 bulan	53,501,483	3 bulan	76,385,267	3 bulan	205,624,398	12 bulan	440,816,829	100%	95%					kel. Polowijen
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan					12 bulan	393,403,000	3 bulan	197,678,014	3 bulan	27,149,381	3 bulan	34,425,560	3 bulan	101,714,794	12 bulan	360,967,749							kel. Purwodadi
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan					12 bulan	442,204,250	3 bulan	49,748,300	3 bulan	94,433,900	3 bulan	146,068,170	3 bulan	133,628,220	12 bulan	423,878,590	100%	96%					kel. Blimbing
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan					12 bulan	480,620,600	3 bulan	108,495,595	3 bulan	44,291,427	3 bulan	49,062,499	3 bulan	202,727,464	12 bulan	404,576,985	100%	23%					kel. Pandanwangi
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan					12 bulan	555,505,000	3 bulan	58,358,969	3 bulan	202,264,600	3 bulan	24,084,000	3 bulan	259,815,680	12 bulan	544,523,249	100%	11%					kel. Purwanto ro
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan					12 bulan	440,924,000	3 bulan	137,243,879	3 bulan	35,042,858	3 bulan	74,160,930	3 bulan	174,003,309	12 bulan	420,450,976	100%	95%					kel. Bunutrejo
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan					12 bulan	446,245,050	3 bulan	163,570,293	3 bulan	28,623,067	3 bulan	39,606,578	3 bulan	208,850,733	12 bulan	440,650,671	100%	99%					kel. Kesatrian
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan					12 bulan	489,450,000	3 bulan	117,577,200	3 bulan	29,028,100	3 bulan	110,152,825	3 bulan	185,940,150	12 bulan	442,698,275	100%	90%					kel. Polehan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan					12 bulan	383,131,560	3 bulan	155,127,376	3 bulan	24,936,195	3 bulan	44,171,198	3 bulan	118,417,226	12 bulan	342,651,995	100%	89%					kel. Jodipan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	IKM Perangkat Daerah					3 dokumen	110,753,900		-							2 dokumen	66,276,500	67%	60%					
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen informasi pembangunan					1 dokumen	6,079,800	0 dok	-							0	-	0%	0%					kec. Blimbing
			Jumlah dokumen monografi					1 dokumen		0 dok	-							0	-							

No	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
			Jumlah dokumen profil			1 dokumen	0 dok	-				0	-			kec. Balearjos ari										
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen monografi			1 dokumen	6,500,000	0 dok	-			0	-	0%	0%											
			Jumlah dokumen profil			1 dokumen	0 dok					0	-	0%												
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen monografi			2 dokumen	250,000	0 dok	-			0 dok	-			kec. Arjosari										
			Jumlah dokumen profil			1 dokumen	0 dok					0 dok	-													
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen monografi			2 dokumen	-	0 dok	-			0 dok	-	0%	#DIV/0!	kel. Polowijen										
			Jumlah dokumen profil			1 dokumen	0 dok					0 dok	-	0%												
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen monografi			2 dokumen	24,740,000	0 dok	-			2 dokumen	19,925,000	2 dok	19,925,000	0%	81%	kel. Purwodadi								
			Jumlah dokumen profil			1 dokumen	0 dok				1 dokumen	1 dok	-	0%												
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen monografi			2 dokumen	8,000,000	0 dok	-			2 dok	8,000,000	2 dok	8,000,000	100%	100%	kel. Blimbing								
			Jumlah dokumen profil			1 dokumen	0 dok				1 dok	1 dok	-													
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen monografi			1 dokumen	8,750,000	0 dok	-			0 dok	-	0%	0%	kel. Pandanwangi										
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen monografi			2 dokumen	13,990,000	0 dok	120,000			2 dok	12,638,400	2 dok	12,758,400	0%	91%	kel. Purwanto ro								
			Jumlah dokumen profil			1 dokumen	0 dok				1 dok	1 dok	-	0%												
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen profil dan monografi			3 Dokumen	10,800,000	0 dok	-			1 dok	3,600,000	1 dok	3,600,000	33%		kel. Bumirejo								
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen monografi			2 dokumen	13,029,100	0 dok		1 dok	7,666,800	1 dok	5,362,300	2 dok	13,029,100	0%	100%	kel. Kesatrian								
			Jumlah dokumen profil			1 dokumen	0 dok			0 dok	1 dok	1 dok	-	0%												
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen monografi			2 dokumen	7,500,000	0 dok	-			0 dok	3,430,500	0 dok	3,430,500	33%	46%	kel. Polehan								
			Jumlah dokumen profil			1 dokumen	0 dok				1 dok	1 dok														
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen monografi			2 dokumen	11,115,000	0 dok	-			2 dok	5,533,500	2 dok	5,533,500	100%	50%	kel. Jodipan								
			Jumlah dokumen profil			1 dokumen	0 dok				1 dok	1 dok														
		Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat Untuk SaranaPrasarana di Wilayah Yang Diakomodir		100%	23,071,346,150							100%	22,544,855,232	100%	98%									
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif			100%	14,882,103,400		5,385,372,760					100%	14,390,133,732	100%	97%									
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang			1 dokumen	31,240,000	1 dok	31,240,000					1 dok	31,240,000	100%	100%	kec. Blimbing								
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang			1 dokumen	11,540,000	1 dok	11,530,000					1 dok	11,530,000	0%	100%	kel. Balearjos ari								



No	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Peragkat Daerah Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab			
										I		II		III		IV															
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												K	Rp	12 = 8+9+10+11
1	2	3	4	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	K	Rp	14	K	Rp	15	K	Rp	16		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang					1 dokumen	14,257,000	1 dok	13,600,000							1 dok	13,600,000											kel. Arjosari	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang					1 dokumen	12,000,000	1 dok	11,281,250							1 dok	11,281,250	100%	94%									kel. Polowijen	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang					1 Dok	13,500,000	1 Dok	11,400,000							1 Dok	11,400,000	100%	84%									kel. Purwodadi	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang					1 Dokumen	20,300,000	1 Dok	20,300,000							1 Dok	20,300,000	100%	100%									kel. Blimbing	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang					1 Dokumen	13,100,000	1 Dokumen	13,100,000							2 Dok	13,100,000	200%	100%									kel. Pandanwangi	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang					1 dokumen	27,100,000	1 dokumen	21,000,000				1 dok	6,015,000		1 dokumen	27,015,000	100%	100%									kel. Purwanto	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang					1 Dokumen	11,000,000	1 Dokumen	10,390,800							1 Dokumen	10,390,800	100%	94%									kel. Bunutrejo	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang					1 dokumen	15,300,000	1 dokumen	15,300,000							1 dokumen	15,300,000	100%	100%									kel. Kesatrian	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang					1 Dokumen	14,500,000	1 Dokumen	12,975,000							1 Dokumen	12,975,000	100%	89%									kel. Polehan	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang					1 Dokumen	16,953,800	1 Dokumen	14,940,375							1 Dokumen	14,940,375	100%	88%									kel. Jodipan	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana lingkungan kelurahan					15 kegiatan	499,525,000	10 keg	229,110,000	2 keg	176,150,000			3 keg	80,000,000	15 keg	485,260,000	150%	97%										kel. balearjari
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan					10 kegiatan	320,890,000	0 keg	-	8 keg	238,089,550	2 keg	74,082,000			8 keg	312,171,550											kel. arjosari	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan					6 titik	526,890,000	0 titik	-	6 titik	191,242,548	6 titik	106,278,982	6 titik	222,002,000	6 titik	519,523,530	100%	99%									kel. polowijen	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan					15 paket	410,826,000	0 paket	5,900,000	10 paket	217,373,000	5 paket	150,143,000	10 paket	34,030,000	15 paket	407,446,000	0%	99%									kel. purwodadi	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan					10 paket	339,190,000	3 paket	79,200,000	7 paket	257,288,200					10 paket	336,488,200	100%	99%									kel. blimbing	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan					15 paket	588,284,900	2 paket	54,265,000	3 paket	148,270,000			10 paket	266,683,200	15 kegiatan	469,218,200	100%	80%									kel. pandanwangi	









No	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Peragkat Daerah Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
							I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%									
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%	16															
			Jumlah Pembinaan KLA			60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	0%															
			Jumlah Pembinaan PKK dan Ketrampilan			372 Orang	372 Orang	372 Orang	372 Orang	372 Orang	372 Orang	372 Orang	372 Orang	372 Orang																
			Jumlah RT/RW terfasilitasi			82 RT, RW	82 RT, RW	82 RT, RW	82 RT, RW	82 RT, RW	82 RT, RW	82 RT, RW	82 RT, RW	82 RT, RW	100%															
		Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Lembaga Masyarakat di Wilayah / Tingkat Kelurahan			2 kegiatan	561,143,000	0 kegiatan	105,750,000	0 kegiatan	148,650,000	1 kegiatan	142,747,000	1 kegiatan	313,903,000	2 kegiatan	711,050,000	100%	127%				kel. Polehan							
			Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan			4 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		4 kegiatan		0%												
			Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW di Kelurahan			81 Orang	81 Orang	81 Orang	81 Orang	81 Orang	81 Orang	81 Orang	81 Orang	81 Orang	100%															
		Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Kegiatan Karang Wredha			5 kegiatan	672,204,000	0 kegiatan	165,250,000	1 kegiatan	172,250,000	1 kegiatan	151,550,000	2 kegiatan	178,950,000	5 kegiatan	668,000,000	100%	99%				kel. Jodipan							
			Jumlah kegiatan PKK			2 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		kegiatan		1 kegiatan		2 kegiatan														
			Jumlah Kegiatan PUG, PPRG			4 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		4 kegiatan														
			Jumlah lembaga masyarakat yang terfasilitasi			7 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		3 kegiatan		7 kegiatan														
			Jumlah RT/RW terfasilitasi			93 Orang	93 Orang	93 Orang	93 Orang	93 Orang	93 Orang	93 Orang	93 Orang	93 Orang	93 Orang	93 Orang	93 Orang													
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Linmas per RT			0.75	1,852,269,600								0.75	1,825,511,429	100%	99%												
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rasio Linmas per RT			0.75	1,852,269,600								0.75	1,825,511,429	100%	99%												
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan (monitoring/patrol/koordinasi)			24 Patroli	17,211,000							24 Patroli	16,800,000	24 patroli	16,800,000	100%	98%				kec. Blimbing							
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patrol/koordinasi)			65 Orang	160,100,000	65 Orang	30,150,000	65 Orang	35,650,000	65 Orang	24,750,000	65 Orang	66,421,700	65 Orang	156,971,700	0%	98%				kel. Balearjosari							
			Jumlah patroli Babinsa Babinmas			144 Ok		36 Ok		36 Ok		36 Ok		36 Ok		108 Ok		75%												
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patrol/koordinasi)			1 kegiatan	188,402,400	1 kegiatan	35,480,000	1 kegiatan	37,500,000	1 kegiatan	26,100,000	1 kegiatan	83000000	1 kegiatan	182,080,000	0%	97%				kel. Arjosari							
			Jumlah patroli Babinsa Babinmas			144 patroli		36 patroli		36 patroli		36 patroli		36 patroli		144 patroli		100%												









# PEMERINTAH KOTA MALANG INSPEKTORAT DAERAH

JALAN GAJAHMADA NOMOR 2A TELP. (0341) 364450 – FAX. 321276  
MALANG

Kode Pos 65113

Malang, 29 Juli 2022

Nomor : 700/826/35.73.300/2022

Kepada

Lamp. : 1 (satu) berkas

Yth. Sdr. Camat Blimbing Kota Malang

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

di

MALANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Blimbing dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP,
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP,
  - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja,
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
  - e. Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:
  - a. Perencanaan Kinerja (Bobot 30%),
  - b. Pengukuran Kinerja (Bobot 30%),
  - c. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%), dan
  - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25%).

Setiap Komponen dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.

3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	NILAI	KATEGORI PERINGKAT	INTERPRESTASI
1.	>90-100	AA	<b>Sangat Memuaskan.</b> Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	>80-90	A	<b>Memuaskan,</b> Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3.	>70-80	BB	<b>Sangat Baik,</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan 37 Predikat Interpretasi berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4.	>60-70	B	<b>Baik,</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	>50-60	CC	<b>Cukup (Memadai),</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	>30-50	C	<b>Kurang,</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	0- 30	D	<b>Sangat Kurang,</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Blimbing Tahun 2022 menunjukkan kategori peringkat **A (Memuaskan)** dengan nilai sebesar **81,25**.

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30 %	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30 %	24,60
c. Pelaporan Kinerja	15 %	11,55
d. Evaluasi Internal	25 %	20,50
<b>Jumlah</b>	<b>100 %</b>	<b>81,25</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah :

**a. Perencanaan Kinerja**

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, dokumen perencanaan kinerja jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (P-RPJMD dan P-Renstra), dan jangka pendek (RKPD dan Renja). Serta dokumen Rencana Aksi, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Penilaian terhadap masing-masing dokumen tersebut meliputi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatannya.

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja Kecamatan Blimbing menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00, atau **82%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori **A (Memuaskan)**.

**b. Pengukuran Kinerja**

Evaluasi atas komponen pengukuran kinerja mencakup pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, Indikator Kinerja Individu (IKI), dan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja Kecamatan Blimbing menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00 atau **82%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

**c. Pelaporan Kinerja**

Evaluasi atas komponen pelaporan kinerja mencakup penilaian atas penyusunan Laporan Kinerja secara berkala yang direviu, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja Kecamatan Blimbing menunjukkan nilai sebesar 11,55 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau **77%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

**d. Evaluasi Internal**

Evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup penilaian atas ketersediaan pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan terlaksananya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar 20,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00 atau **82%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

5. Terhadap hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Kedepannya untuk dapat menetapkan target kinerja lebih baik lagi ,dan
- b. Meningkatkan capaian kinerja di tahun berjalan dan tahun berikutnya.
- c. Meningkatkan perubahan budaya kinerja melalui inovasi

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja Kecamatan Blimbing, dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan (saran) guna perbaikan untuk peningkatan kinerja serta penguatan akuntabilitas instansi.

**INSPEKTUR DAERAH KOTA MALANG**



**Drs. Mulyono, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650627 198602 1 004



**PEMERINTAH  
KOTA MALANG**

# **PERUBAHAN RPJMD KOTA MALANG TAHUN 2018-2023**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2021**



## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018 – 2023 dapat terselesaikan tepat waktu.

Perubahan RPJMD ini merupakan dokumen perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, yang bertujuan untuk penyesuaian sasaran, prioritas pembangunan daerah dengan sasaran, prioritas pembangunan nasional, dan penyesuaian program dan kegiatan strategis daerah dengan program dan kegiatan strategis prioritas nasional.

Terselesaikan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023 ini, tidak terlepas dari adanya bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak melalui diskusi, wawancara, dan berbagai macam bentuk dukungan lainnya. Maka dari itu, Tim penyusun dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Malang Tahun 2018-2023 mengucapkan terima kasih.

Kedepan harapannya dengan adanya dokumen Perubahan RPJMD ini dapat memudahkan dalam perwujudan “**Kota Malang Bermartabat**” sebagai Visi Walikota dan Wakil Walikota Malang Periode 2018-2023.

Dilihat dari segi materi maupun teknik penulisannya, Perubahan RPJMD ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan adanya saran demi kesempurnaannya.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Malang, Mei 2021

**WALIKOTA MALANG**

**Ttd.**

**SUTIAJI**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	I-9
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I-14
1.4.1 Maksud .....	I-14
1.4.2 Tujuan .....	I-15
1.5 Sistematika Penulisan .....	I-16
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	II-1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah .....	II-8
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana .....	II-9
2.1.4 Demografi .....	II-15
2.1.5 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD Tahun 2018-2023 .....	II-24
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-27
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II-27
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II-40
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....	II-49
2.3 Aspek Pelayanan Umum .....	II-50
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib .....	II-50
2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	II-50
2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	II-75
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan .....	II-124
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan .....	II-133
2.4 Aspek Daya Saing Daerah .....	II-139
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II-139
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	II-141
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi .....	II-143
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia .....	II-146

<b>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD .....	III-2
3.1.2. Neraca Daerah.....	III-14
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-21
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran .....	III-22
3.3.2. Analisis Pembiayaan.....	III-30
3.3. Kerangka Pendanaan.....	III-35
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	III-36
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan .....	III-60
<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Permasalahan Pembangunan .....	IV-2
4.2 Isu Strategis .....	IV-12
4.2.1 Isu Internasional .....	IV-12
4.2.2 Isu Nasional .....	IV-14
4.2.3 Isu Regional.....	IV-19
4.2.4 Telaah Dokumen Lainnya .....	IV-23
4.2.5 Isu Strategis Kota Malang.....	IV-27
<b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN .....</b>	<b>V-1</b>
5.1 VISI V-2	
5.2 MISI V-3	
5.3 TUJUAN DAN SASARAN .....	V-8
<b>BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN</b>	
<b>DAERAH.....</b>	<b>VI-1</b>
6.1 Strategi.....	VI-1
6.2 Arah Kebijakan.....	VI-16
6.3 Program Pembangunan Daerah.....	VI-23
<b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM</b>	
<b>PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>VII-1</b>
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan .....	VII-1
7.2 Program Perangkat Daerah.....	VII-5
<b>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>	
<b>DAERAH.....</b>	<b>VIII-1</b>
<b>BAB IX PENUTUP .....</b>	<b>IX-1</b>
9.1 Kaidah Pelaksanaan .....	IX-2







## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan RPJPD Kota Malang.....	I-2
Gambar 1.2	Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Pembangunan.....	I-10
Gambar 2.1	Peta Kota Malang .....	II-4
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya.....	II-8
Gambar 2.3	Peta Risiko Bencana Banjir Kota Malang.....	II-13
Gambar 2.4	Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Kota Malang .....	II-14
Gambar 2.5	Jumlah Penduduk Kota Malang (Dispendukcapil) Tahun 2016-2020 .....	II-15
Gambar 2.6	Jumlah Penduduk Kota Malang (BPS) Tahun 2016-2020.....	II-16
Gambar 2.7	Kepadatan Penduduk Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-17
Gambar 2.8	Pertambahan Penduduk Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-18
Gambar 2.9	Distribusi Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Malang Tahun 2020 .....	II-18
Gambar 2.10	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Malang Tahun 2020 .....	II-20
Gambar 2.11	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Dispendukcapil) di Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-20
Gambar 2.12	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (BPS) di Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-21
Gambar 2.13	Pertumbuhan PDRB, ADHK tahun 2016-2020 .....	II-29
Gambar 2.14	Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020.....	II-30
Gambar 2.15	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2020.....	II-30
Gambar 2.16	Perkembangan Inflasi di Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-31
Gambar 2.17	Perbandingan Inflasi 8 Kota di Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020.....	II-32
Gambar 2.18	Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-34
Gambar 2.19	Gini Ratio Kota Malang, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2013-2020 .....	II-35
Gambar 2.20	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita per Bulan menurut Desil Tahun 2018-2020 .....	II-36
Gambar 2.21	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-37

Gambar 2.22	Persentase Penduduk Miskin Kota Malang, Jawa Timur, Nasional Tahun 2011-2020 .....	II-38
Gambar 2.23	Persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Malang Tahun 2016-2020.	II-39
Gambar 2.24	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Pemulihan/Pengembangan Kemampuan dan Pelatihan Keterampilan di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-40
Gambar 2.25	Perkembangan Capaian Indikator Angka Melek Huruf Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-43
Gambar 2.26	Perkembangan Capaian Indikator Harapan Lama Sekolah Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-44
Gambar 2.27	Perkembangan Capaian Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-44
Gambar 2.28	Perkembangan Capaian Angka Kelangsungan Hidup Bayi Di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-45
Gambar 2.29	Perkembangan Capaian Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) Di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-46
Gambar 2.30	Pengeluaran Per Kapita di Kota Malang Tahun 2016-2020....	II-47
Gambar 2.31	Tingkat pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 2011-2020 .....	II-47
Gambar 2.32	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-48
Gambar 2.33	Capaian Angka Partisipasi Kasar PAUD Di Kota Malang Tahun 2015-2020 .....	II-51
Gambar 2.34	Capaian Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A Di Kota Malang Tahun 2015-2020 .....	II-52
Gambar 2.35	Capaian Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B Di Kota Malang Tahun 2015-2020 .....	II-53
Gambar 2.36	Capaian Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A Di Kota Malang Tahun 2015-2020 .....	II-54
Gambar 2.37	Capaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B Di Kota Malang Tahun 2015-2020 .....	II-55
Gambar 2.38	Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD/MI/Paket A Di Kota Malang Tahun 2015-2020 .....	II-55
Gambar 2.39	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B Di Kota Malang Tahun 2015-2020 .....	II-56
Gambar 2.40	Capaian Angka Putus Sekolah di Kota Malang Tahun 2015-2020.....	II-56

Gambar 2.41	Capaian Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Malang Tahun 2015-2020 .....	II-57
Gambar 2.42	Capaian Persentase Guru yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik Di Kota Malang Tahun 2015-2020 .....	II-57
Gambar 2.43	Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup Di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-59
Gambar 2.44	Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-59
Gambar 2.45	Persentase Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk Di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-60
Gambar 2.46	Rasio Rumah Sakit Terhadap Penduduk (Tiap 10.000 penduduk) di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-61
Gambar 2.47	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-61
Gambar 2.48	Perkembangan Cakupan Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) di Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-62
Gambar 2.49	Cakupan penemuan pasien Baru TBC BTA Positif di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-62
Gambar 2.50	Perkembangan Jumlah Kasus HIV/AIDS di Kota Malang Tahun 2015-2020 .....	II-63
Gambar 2.51	Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-64
Gambar 2.52	Persentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-65
Gambar 2.53	Persentase Drainase Kota dalam Kondisi Baik di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-65
Gambar 2.54	Persentase Keluarga yang Memiliki Air Minum Layak di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-66
Gambar 2.55	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang Tertangani di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-67
Gambar 2.56	Cakupan Rasio Pos Kamling per 100 KK Di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-70
Gambar 2.57	Cakupan Rasio Petugas Linmas per RT Di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-71
Gambar 2.58	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan dan Perlindungan Sosial di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-73

Gambar 2.59	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Pemulihan/Pengembangan Kemampuan dan Pelatihan Ketrampilan di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-73
Gambar 2.60	Persentase PMKS yang Mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana Sosial di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-74
Gambar 2.61	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-74
Gambar 2.62	Persentase Jumlah Anak Jalanan, Anak Terlantar, Anak Penyandang Cacat Dan Jompo Yang Dibina di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-75
Gambar 2.63	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-77
Gambar 2.64	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-77
Gambar 2.65	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016-2020 .....	II-78
Gambar 2.66	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-80
Gambar 2.67	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-80
Gambar 2.68	Persentase Penanganan Kasus Tindakan KDRT Di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-81
Gambar 2.69	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-82
Gambar 2.70	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-83
Gambar 2.71	Persentase Organisasi Perempuan yang Difasilitasi di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-83
Gambar 2.72	Persentase Forum Anak yang Difasilitasi di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-84
Gambar 2.73	Ketersediaan Pangan Utama ( <i>Food Availability</i> ) Di Kota Malang tahun 2016-2020 .....	II-85
Gambar 2.74	Konsumsi dan Keamanan Pangan Di Kota Malang tahun 2018-2019 .....	II-86

Gambar 2.75	Persentase Data Aset Daerah Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukannya Di Kota Malang Tahun 2015-2020.....	II-87
Gambar 2.76	Perusahaan dan/atau Kegiatan yang Memenuhi Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Malang Tahun 2016-2019 .....	II-88
Gambar 2.77	Capaian Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-91
Gambar 2.78	Capaian Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-91
Gambar 2.79	Capaian Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-92
Gambar 2.80	Capaian Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-92
Gambar 2.81	Capaian Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-93
Gambar 2.82	Jumlah LSM Aktif di Kota Malang Tahun 2015-2019 .....	II-94
Gambar 2.83	Persentase LSM dan Ormas yang Mengikuti Pembinaan Di Kota Malang Tahun 2015-2019 .....	II-95
Gambar 2.84	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-96
Gambar 2.85	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Menjadi Peserta KB Aktif di Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-96
Gambar 2.86	Ratio Petugas Lapangan (PLKB/PKB) Di Setiap Kelurahan di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-97
Gambar 2.87	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBD) Di Setiap Kelurahan di Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-98
Gambar 2.88	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) Masyarakat di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-98
Gambar 2.89	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keluarga di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-99
Gambar 2.90	<i>Unmeed Need</i> Kota Malang Tahun 2016-2023 .....	II-99
Gambar 2.91	Persentase Angka Pemakaian Kontrsepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15-29 Tahun di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-101
Gambar 2.92	Capaian Persentase Pengguna Informasi Publik yang Terlayani di Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-103

Gambar 2.93	Jumlah KUMKM yang Telah Mendapat Pembinaan dalam Prosedur Mengakses Permodalan di Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-104
Gambar 2.94	Persentase Wirausaha Mikro Binaan yang Berkembang di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-105
Gambar 2.95	Jumlah Koperasi Aktif di Kota Malang Tahun 2016-2022 ..	II- 105
Gambar 2.96	Jumlah Koperasi Tidak Aktif di Kota Malang Tahun 2016-2022.....	II- 106
Gambar 2.97	Jumlah anggota Koperasi Kota Malang Tahun 2016-2022.....	II-107
Gambar 2.98	Jumlah Permodalan Sendiri Tahun 2016-2020 .....	II-108
Gambar 2.99	Jumlah Permodalan Luar Tahun 2016-2020 .....	II-109
Gambar 2.100	Jumlah Usaha Mikro Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-109
Gambar 2.101	Capaian Persentase Peningkatan Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah di Kota Malang Tahun 2016-2020 ...	II-112
Gambar 2.102	Capaian Persentase Organisasi Pemuda yang aktif di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-113
Gambar 2.103	Persentase Wirausaha Muda di Kota Malang tahun 2016-2020.....	II-114
Gambar 2.104	Cakupan Pembinaan Olahraga Tahun 2016-2020 .....	II-115
Gambar 2.105	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-115
Gambar 2.106	Jumlah Prestasi Olahraga di Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-116
Gambar 2.107	Capaian Jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-118
Gambar 2.108	Capaian Persentase Budaya Tradisional yang Ditampilkan Sebagai Potensi Wisata Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-119
Gambar 2.109	Capaian Persentase Cagar Budaya yang Terjaga di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-120
Gambar 2.110	Capaian Persentase Tradisi dan Adat Istiadat Terjaga di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-120
Gambar 2.111	Capaian Persentase Cagar Budaya yang Terjaga di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-121
Gambar 2.112	Capaian Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-122
Gambar 2.113	Capaian Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-123

Gambar 2.114	Capaian Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-123
Gambar 2.115	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Kota Malang di Kota Malang tahun 2016-2020 .....	II-125
Gambar 2.116	Kunjungan Wisatawan di Obyek Daya Tarik Wisata di Kota Malang tahun 2016-2020.....	II-125
Gambar 2.117	Jumlah Nilai Produksi Hasil Pertanian Di Kota Malang tahun 2016-2020 .....	II-126
Gambar 2.118	Jumlah Nilai Produksi Hasil Perkebunan Di Kota Malang tahun 2015-2020 .....	II-127
Gambar 2.119	Persentase Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Di Kota Malang tahun 2016-2019.....	II-129
Gambar 2.120	Jumlah Pemeliharaan Pasar Tradisional Di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-130
Gambar 2.121	PDRB Sektor Industri di Kota Malang Tahun 2016-2020 ....	II-131
Gambar 2.122	Persentase Industri yang Menguasai Teknologi di Kota Malang Tahun 2016-2019 .....	II-131
Gambar 2.123	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-132
Gambar 2.124	Jumlah Nilai Produksi Hasil Perikanan Di Kota Malang tahun 2015-2019 .....	II-133
Gambar 2.125	Besaran Silpa Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-135
Gambar 2.126	Capaian Penetapan APBD Kota Malang Tahun 2016-2020..	II-135
Gambar 2.127	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan .....	II-136
Gambar 2.128	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal.....	II-137
Gambar 2.129	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural.....	II-138
Gambar 2.130	Jumlah Tindak Lanjut Temuan .....	II-139
Gambar 2.131	Jumlah Pelanggan PDAM di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-142
Gambar 2.132	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon.....	II-143
Gambar 2.133	Proporsi Nilai Pajak Daerah dalam Realisasi PAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015-2019.....	II-145
Gambar 2.134	Proporsi Nilai Retribusi Daerah dalam Realisasi PAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015-2019.....	II-146
Gambar 3.1	Realisasi Pendapatan Kota Malang Tahun 2016-2020.....	III-5

Gambar 3.2	Persentase Komponen Pendapatan Kota Malang Tahun 2016-2020.....	III-6
Gambar 3.3	Rincian Pendapatan Kota Malang Tahun 2016-2020.....	III-7
Gambar 3.4	Total Belanja Pemerintah Kota Malang Tahun 2016-2020....	III-11
Gambar 3.5	Persentase Perbandingan Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dengan Total Belanja.....	III-27
Gambar 4.1	Skematik Penetapan Isu-isu Strategis Kota Malang 2018-2023.....	IV-1
Gambar 5.1	The Future of Malang .....	V-4
Gambar 6.1	G-B.8 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatkan Masyarakat Terdidik dan Berkarakter .....	VI-2
Gambar 6.2	G-B.8 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan .....	VI-3
Gambar 6.3	G-B.8 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatkan Daya Beli Terhadap Komoditas Pangan Dan Non-Pangan .....	VI-4
Gambar 6.4	G-B.8 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif .....	VI-5
Gambar 6.5	G-B.8 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota Secara Terpadu.....	VI-6
Gambar 6.6	G-B.8 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatkan Kualitas Kemanfaatan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.....	VI-7
Gambar 6.7	G-B.8 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatkan Kualitas Perlindungan Sosial .....	VI-8
Gambar 6.8	G-B.8 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan.....	VI-9
Gambar 6.9	G-B.8 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Dan Tertib Hukum.....	VI-10





Gambar 6.10	G-B.8 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatkan Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif .....	VI-11
Gambar 6.11	G-B.8 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN .....	VI-12
Gambar 6.12	G-B.8 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatkan Integrasi Teknologi Informasi.....	VI-13



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterkaitan Sasaran Pokok RPJPD Tahun Berkenaan dengan RPJMD Tahun 2018-2023 .....	I-11
Tabel 1.2	Keterkaitan RPJMD Kota Malang dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur.....	I-12
Tabel 1.3	Keselarasn Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah.....	I-13
Tabel 1.4	Keterkaitan RPJMD Kota Malang dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kota.....	I-14
Tabel 1.5	Keterkaitan antara RPJMD dengan KLHS RPJMD .....	I-25
Tabel 2.1	Jumlah Kelurahan dan Jumlah RW dan RT Se-Kota Malang Tahun 2020 .....	II-2
Tabel 2.2	Data Kejadian Bencana Kota Malang Tahun 2020 berdasarkan Kecamatan.....	II-11
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Malang Tahun 2020.....	II-19
Tabel 2.4	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-22
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan di Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-22
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-23
Tabel 2.7	Jumlah Peristiwa Penting Pencatatan Sipil di Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-24
Tabel 2.8	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah RPJMD Tahun 2018-2023 .....	II-24
Tabel 2.9	Kontribusi Lapangan Usaha di Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-28
Tabel 2.10	Produk Domestik Regional Bruto di Kota Malang Tahun 2020 ....	II-28
Tabel 2.11	Nilai IPM Kota Malang dan Komponennya Tahun 2016 – 2020 .....	II-41
Tabel 2.12	Indikator Seni dan Budaya Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-49
Tabel 2.13	Indikator Olahraga Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-49
Tabel 2.14	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pendidikan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2020.....	II-50
Tabel 2.15	Hasil Kinerja Bidang Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-58

Tabel 2.16	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-64
Tabel 2.17	Hasil Kinerja Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2017-2020.....	II-67
Tabel 2.18	Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-68
Tabel 2.19	Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Malang Tahun 2019-2020 .....	II-69
Tabel 2.20	Hasil Kinerja Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-70
Tabel 2.21	Data SPM Trantibunlinmas Tahun 2019-2020 .....	II-72
Tabel 2.22	Hasil Kinerja Bidang Urusan Sosial Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-72
Tabel 2.23	Hasil Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-76
Tabel 2.24	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020.....	II-79
Tabel 2.25	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-84
Tabel 2.26	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pertanahan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2020 .....	II-86
Tabel 2.27	Hasil Kinerja Bidang Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-87
Tabel 2.28	Data ILKHD Kota Malang, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020.....	II-89
Tabel 2.29	Data Timbunan Sampah Kota Malang Tahun 2018-2020.....	II-89
Tabel 2.30	Data Penanganan Sampah Kota Malang Tahun 2018-2020.....	II-90
Tabel 2.31	Hasil Kinerja Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-90
Tabel 2.32	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2020 .....	II-93
Tabel 2.33	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020.....	II-95
Tabel 2.34	Hasil Kinerja Bidang Urusan Perhubungan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-101

Tabel 2.35	Hasil Kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-102
Tabel 2.36	Hasil Kinerja Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020 .	II-103
Tabel 2.37	Jumlah Industri Kreatif Kota Malang .....	II-110
Tabel 2.38	Hasil Kinerja Bidang Urusan Penanaman Modal Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-111
Tabel 2.39	Hasil Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-113
Tabel 2.40	Hasil Kinerja Bidang Urusan Statistik Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-117
Tabel 2.41	Hasil Kinerja Bidang Urusan Persandian Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-117
Tabel 2.42	Hasil Kinerja Bidang Urusan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-118
Tabel 2.43	Hasil Kinerja Bidang Urusan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-121
Tabel 2.44	Hasil Kinerja Bidang Urusan Kearsipan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-122
Tabel 2.45	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-124
Tabel 2.46	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-127
Tabel 2.47	Hasil Kinerja Bidang Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-128
Tabel 2.48	Hasil Kinerja Bidang Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-130
Tabel 2.49	Hasil Kinerja Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019 .....	II-132
Tabel 2.50	Hasil Kinerja Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019 .....	II-133
Tabel 2.51	Hasil Kinerja Bidang Urusan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-134
Tabel 2.52	Hasil Kinerja Bidang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-136
Tabel 2.53	Hasil Kinerja Bidang Urusan Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-138

Tabel 2.54	Persentase Pengeluaran Rumah Tangga Dirinci Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan di Kota Malang Tahun 2015-2020 .....	II-140
Tabel 2.55	Realisasi Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan di Kota Malang Tahun 2016-2020 .....	II-141
Tabel 2.56	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Malang Tahun 2019-2020.....	II-142
Tabel 2.57	Standar Waktu Pelayanan Perizinan di Kota Malang .....	II-144
Tabel 2.58	Rasio Ketergantungan Tahun 2016-2020 Kota Malang.....	II-146
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 Kota Malang .....	III-3
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kota Malang .....	III-10
Tabel 3.3	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020 Kota Malang ...	III-13
Tabel 3.4	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Malang .....	III-15
Tabel 3.5	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kota Malang .....	III-22
Tabel 3.6	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Malang .....	III-24
Tabel 3.7	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Malang .....	III-26
Tabel 3.8	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Malang .....	III-28
Tabel 3.9	Defisit Riil Anggaran Kota Malang .....	III-30
Tabel 3.10	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Malang .....	III-31
Tabel 3.11	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Malang .....	III-33
Tabel 3.12	Proyeksi Awal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Malang .....	III-36
Tabel 3.13	Realisasi Pendapatan Belanja Daerah Kota Malang .....	III-41
Tabel 3.14	Perubahan Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Malang .....	III-47
Tabel 3.15	Proyeksi Awal Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Malang .....	III-60
Tabel 3.16	Realisasi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Malang .....	III-61
Tabel 3.17	Perubahan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Malang.....	III-62
Tabel 3.18	Rencana Awal Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Malang .....	III-63

Tabel 3.19	Realisasi dan Perubahan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Malang .....	III-64
Tabel 5.1	Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Malang Tahun 2018-2023 .....	V-13
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Malang .....	VI-14
Tabel 6.2	Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan .....	VI-16
Tabel 6.3	Fokus Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang .....	VI-19
Tabel 6.4	Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur Dan Kota Malang.....	VI-23
Tabel 6.5	Keterkaitan Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah.....	VI-29
Tabel 6.6	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Malang .....	VI-38
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2019-2020.....	VII-3
Tabel 7.2	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2021-2023.....	VII-4
Tabel 7.3	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Malang .....	VII-5
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Malang .....	VIII-2



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR       TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang    :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah memiliki peranan yang sangat signifikan dalam perkembangan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian strategi pembangunan akibat pandemi Covid-19, perlu penyesuaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam skala makro maupun mikro atau sektoral;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023, perlu penyesuaian mengenai klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

Dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA  
KETENTUAN PERALIHAN

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dalam hal RPJMD Tahun 2018-2023 berakhir, dan RPJMD Tahun 2024-2028 belum diundangkan, maka penyusunan RKPD mempedomani RPJPD Tahun 2005-2025.
  - (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai acuan untuk Menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Umum Daerah-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
3. Ketentuan Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2021

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ERIK SETYO SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021 NOMOR .....  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR .....

# BAB-I

## PENDAHULUAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

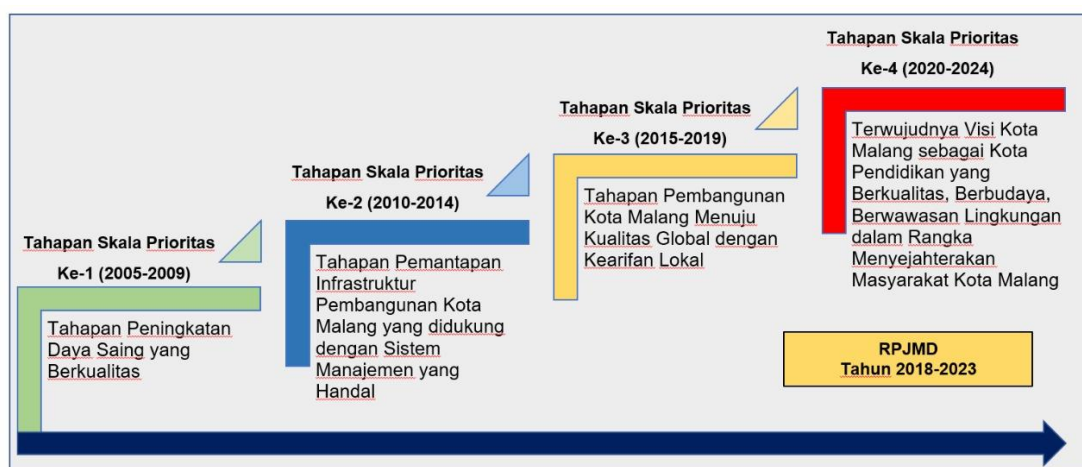
#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Undang-undang SPPN tersebut, mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Sedangkan berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Dengan terpilihnya pasangan kepala daerah pada tanggal 26 Juli 2018 dan dilantiknya pada tanggal 24 September 2018 maka Drs. H. Sutiaji dan Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko resmi sebagai



Walikota dan Wakil Walikota untuk periode 2018-2023. Sehingga sesuai dengan perundangan yang berlaku perlu disusun dokumen RPJMD untuk periode 2018-2023. Sebagai satu kesatuan perencanaan daerah yang utuh, RPJMD Kota Malang 2018-2023 merupakan irisan sebagai salah satu tahapan untuk mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Malang. Selain sebagai bagian dari RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 tentu juga merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya.

Penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan posisi RPJMD dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025.



**Gambar 1.1**  
**Tahapan RPJPD Kota Malang**

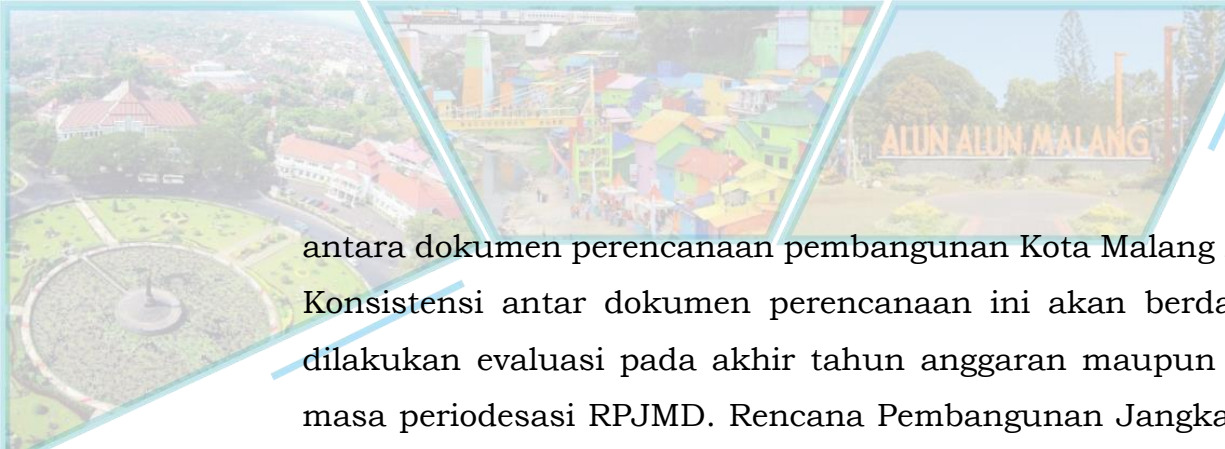
Tahapan skala prioritas ke-3 (Tahun 2015 – 2019) adalah tahap pembangunan Malang menuju kualitas global dengan kearifan lokal dan tahapan skala prioritas ke-4 (Tahun 2020 – 2025) adalah terwujudnya visi Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas, berbudaya, berwawasan lingkungan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Kota Malang. Merujuk hal tersebut bahwa posisi RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 masuk dalam tahap III (ketiga) dan tahap IV (keempat) atau tahap akhir pencapaian RPJPD Kota Malang melalui visinya “Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya, Berwawasan lingkungan menuju Masyarakat Sejahtera”. Selain itu, RPJMD



disusun harus memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah, kondisi lingkungan strategis daerah, potensi daerah, isu-isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa dalam menyusun RPJMD menggunakan 4 (empat) pendekatan, 1) politis; 2) teknokratik; 3) Partisipatif; 4) atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Dimana keempat pendekatan perencanaan pembangunan tersebut telah dilaksanakan secara sistematis dan konsisten, yang mulai dari melakukan pendekatan teknokratis dilaksanakan berdasarkan kajian ilmiah dan bukti fisik, data dan informasi yang akurat kondisi *existing* Kota Malang. Selanjutnya pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik sehingga dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, serta terciptanya konsensus. Sehingga membutuhkan pendekatan *top down* dan *bottom up* dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan melalui forum konsultasi publik. Terakhir pendekatan politis dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kota Malang, yang mengacu pada ketentuan Pasal 69 ayat (1,) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017, yaitu: Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Didasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tersebut juga mengatur bahwa dalam RPJMD harus memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), bertujuan untuk menjaga sinkronisasi

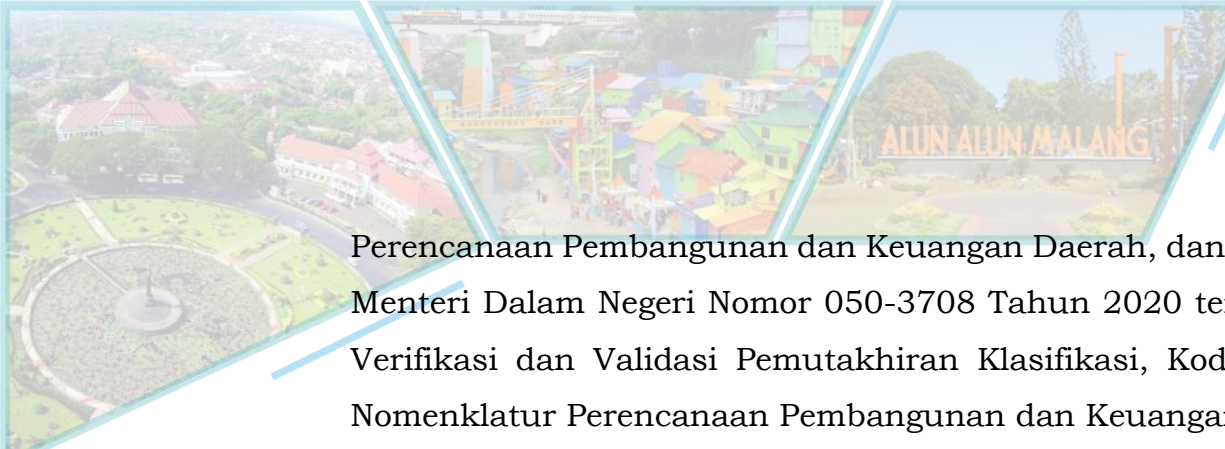


antara dokumen perencanaan pembangunan Kota Malang 2018-2023. Konsistensi antar dokumen perencanaan ini akan berdampak saat dilakukan evaluasi pada akhir tahun anggaran maupun pada akhir masa perodesasi RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah selama lima tahun yang memuat arah kebijakan daerah, strategi pembangunan daerah, dan program Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam rencana pembangunan daerah setiap tahun yang tersusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat arah kebijakan daerah, strategi pembangunan daerah, program pada Perangkat Daerah dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menjadi pedoman perencanaan Perangkat Daerah selama lima tahun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 342 ayat (1) huruf (c) menjelaskan bahwa salah satu alasan yang mendasari perlu dilakukan Perubahan RPJPD dan RPJMD adalah **terjadi perubahan yang mendasar** dan pada Pasal 342 ayat (3) Perubahan yang mendasar dimaksud adalah mencakup terjadinya **bencana alam, krisis ekonomi dan perubahan kebijakan nasional**, serta pada Pasal 344 menyebutkan bahwa tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD berlaku mutatis mutandis. Ruang lingkup yang mendasari alasan dilakukan perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023 adalah:

1. Penyelarasan sasaran, prioritas pembangunan daerah dengan sasaran, prioritas pembangunan nasional serta penyelarasan program dan kegiatan strategis daerah dengan program dan kegiatan strategis prioritas nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
2. Penyesuaian struktur Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Penyesuaian nomenklatur Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur





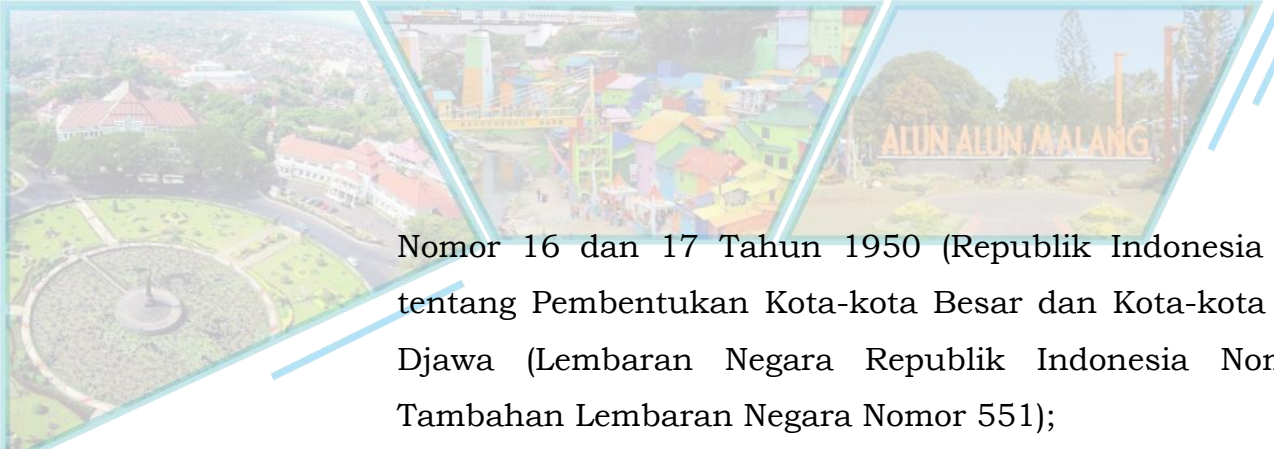
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

4. Dampak pandemi COVID-19 mempengaruhi tata ekonomi global dan nasional, berimplikasi juga kepada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam skala makro maupun mikro (sektoral), sehingga mengakibatkan realisasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD Tahun 2018-2023 terutama pada tahun 2020 menjadi jauh dari nilai capaian target. Pandemi COVID-19 yang belum bisa diprediksi kapan berakhir, membuat Pemerintah Daerah harus mengatur strategi dalam menempatkan prioritas pembangunan daerah bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Timur. Bila mencermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 342 ayat (1) huruf (c) menjelaskan bahwa salah satu alasan yang mendasari perlu dilakukan Perubahan RPJPD dan RPJMD adalah **terjadi perubahan yang mendasar** dan pada Pasal 342 ayat (3) Perubahan yang mendasar dimaksud adalah mencakup terjadinya **bencana alam, krisis ekonomi dan perubahan kebijakan nasional**, serta pada Pasal 344 menyebutkan bahwa tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD berlaku mutatis mutandis.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 berpedoman pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan yuridis dan praktis. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang



Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- 
- Kerja. (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
- 

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

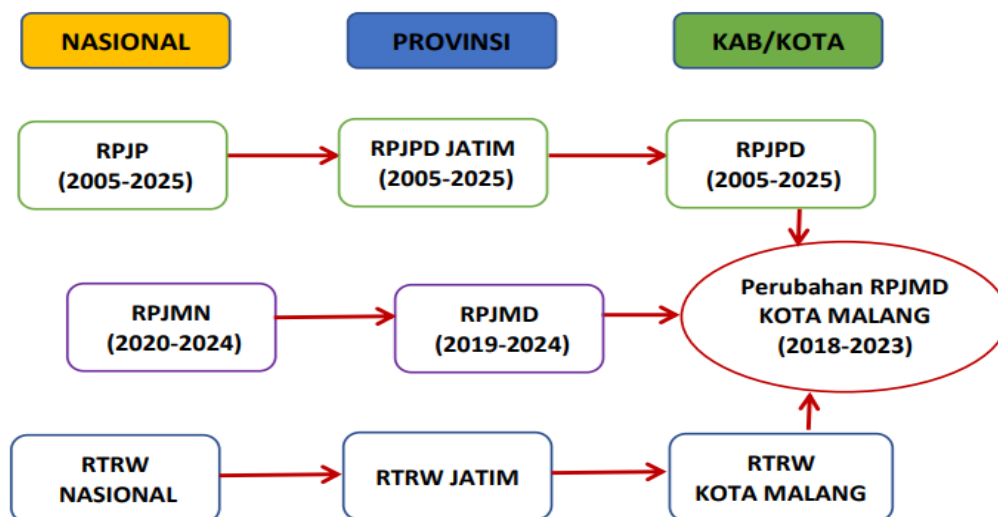
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Malang Provinsi Jawa Timur 179-5/2019);

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 tetap sesuai dengan kaidah-kaidah dengan cara terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur. Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RPJMD dan RPJPD Kabupaten/Kota sekitar, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kota Malang agar rencana

struktur ruang, rencana pola ruang dan, indikasi program pemanfaatan ruang saling selaras. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan daerah untuk menyelaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



**Gambar 1.2**  
**Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Pembangunan**

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari dokumen perencanaan lainnya dengan mempedomani RPJP nasional Tahun 2005-2025, RPJP Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025, dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Malang dan RPJMD Kota Batu. Penyusunan RPJMD Kota Malang berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW nasional Tahun 2008-2028, dan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 serta RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kota Malang dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kota. Lebih lanjut, informasi dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kota Malang digunakan sebagai acuan dalam penataan ruang dalam rangka mewujudkan target pembangunan jangka menengah periode 2018-2023.

**Tabel 1.1**  
**Keterkaitan Sasaran Pokok RPJPD Tahun Berkenaan dengan RPJMD Tahun 2018-2023**

<b>Sasaran Pokok RPJPD Tahun Berkenaan dengan RPJMD Tahun 2018-2023</b>	<b>Misi RPJMD Tahun 2018-2023</b>
Terwujudnya Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas, berbudaya, berwawasan lingkungan menuju masyarakat yang sejahtera, dengan arah pembangunan:	
1. Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang berorientasi global dengan kearifan lokal;	1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga
2. Terwujudnya SDM yang berkualitas dengan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbudaya;	
3. Terwujudnya lingkungan kota yang kondusif sebagai kota pendidikan yang berkualitas;	
4. Terwujudnya pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;	2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan
5. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang efisien, produktif dan berkelanjutan;	
6. Mewujudkan masyarakat Kota Malang yang sejahtera.	
7. Mewujudkan Kota Malang yang demokratis berlandaskan atas hukum;	
8. Mewujudkan Kota Malang yang agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;	3. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender
9. Mewujudkan tata pemerintahan dan aparatur yang profesional;	
10. Peningkatan pendayagunaan sumber daya lingkungan secara optimal dan berkelanjutan;	4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

**Tabel 1.2**  
**Keterkaitan RPJMD Kota Malang dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur**

<b>RPJMN</b>	<b>RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>RPJMD KOTA MALANG</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;</li> <li>2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;</li> <li>3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;</li> <li>4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;</li> <li>5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;</li> <li>6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;</li> <li>7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;</li> <li>8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;</li> <li>9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah.</li> <li>2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.</li> <li>3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.</li> <li>4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga</li> <li>2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan</li> <li>3. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender</li> <li>4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel</li> </ol>



**Tabel 1.3**  
**Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah**

No.	Kebijakan Nasional		
	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Jawa Timur	Prioritas Pembangunan Kota Malang
1.	<b>PN. 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan</b>	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif
2.	<b>PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</b>	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera
3.	<b>PN. 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Mendorong revolusi mental dan pembangunan budaya masyarakat
4.	<b>PN.5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian yang beririsan dengan prioritas nasional dan penyelesaian masalah prioritas kota
5.	<b>PN. 6 Membangun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</b>	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
6.	<b>PN. 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</b>	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah

**Tabel 1.4**  
**Keterkaitan RPJMD Kota Malang dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kota**

RTRW Nasional	RTRW Provinsi	RTRW Kota yang berlaku	Reviu RTRW Kota	RPJMD KOTA MALANG
Kota Malang sebagai PKN di Provinsi Jawa Timur (II/C/I)	Sistem Perkotaan PKN: Kawasan Perkotaan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan (Gerbangkertosusila) dan Malang Rencana sistem pusat pelayanan: WP Malang Raya dengan pusat di Kota Malang meliputi: Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan industri	Pengembangan fasilitas Kota Malang	- Penataan Kawasan Strategis Sosial Budaya - Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan;  Program Pengembangan Kurikulum;
			- Perlindungan bangunan cagar budaya - Perlindungan lingkungan cagar budaya	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Program Pembinaan Perpustakaan Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno  Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya  Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pembinaan Sejarah Program Pengelolaan Permuseuman
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;

RTRW Nasional	RTRW Provinsi	RTRW Kota yang berlaku	Reviu RTRW Kota	RPJMD KOTA MALANG
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; Program Pengendalian Penduduk; Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Jalan bebas hambatan antar kota Malang-Kepanjen (III/6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Pengembangan jalan bebas hambatan antar kota: Pandaan-Malang</li> <li>- Rencana pengembangan jalan strategis provinsi: Batas Kota Malang-Bandara Abdul Rachman Saleh; Jalan Laksda Adisucipto (Kota Malang)</li> <li>- Jalan nasional arteri primer: Surabaya-Malang</li> <li>- Jalan nasional kolektor primer: Malang-Kepanjen</li> <li>- Jalan provinsi kolektor primer: Turen-Malang-Pendem-Kandangan-Pare-Kediri</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Destinasi Pariwisata</li> <li>- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pariwisata</li> </ul>	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan kualitas sistem jaringan transportasi</li> <li>- Pembangunan sistem jaringan transportasi</li> <li>- Pembangunan jalan tol</li> </ul>	Program Penyelenggaraan Jalan;
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan dan penataan kawasan dan koridor industri</li> </ul>	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;

RTRW Nasional	RTRW Provinsi	RTRW Kota yang berlaku	Reviu RTRW Kota	RPJMD KOTA MALANG
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terminal tipe A: Terminal Arjosari di Kota Malang</li> <li>- Terminal tipe B: Terminal Landungsari dan Terminal Hamid Rusdi di Kota Malang</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan SAUM</li> <li>- Pengembangan jalur angkutan umum</li> <li>- Pengadaan bus kota</li> <li>- Pengembangan jalur kereta api</li> <li>- Studi jalur/rute bus di Kota Malang</li> <li>- Pengembangan sub unit Terminal Hamid Rusdi</li> <li>- Pengembangan sub unit terminal di sekitar kawasan industri</li> <li>- Perbaikan kualitas sarana dan prasarana transportasi</li> <li>- Pengadaan halte</li> <li>- Pengembangan halte di pusat pendidikan dan perdagangan</li> <li>- Pengaturan transportasi sekitar kawasan</li> </ul>	<p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang</li> <li>- Pengaturan fungsi kegiatan</li> <li>- Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Ekonomi</li> <li>- Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Sosial Budaya</li> <li>- Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi di Wilayah Kota</li> </ul>	<p>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;</p>

RTRW Nasional	RTRW Provinsi	RTRW Kota yang berlaku	Reviu RTRW Kota	RPJMD KOTA MALANG
		Pengembangan Sektor Informal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan pasar tradisional</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa</li> </ul>	<p>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;</p> <p>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;</p> <p>Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;</p> <p>Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan;</p> <p>Program Pengembangan Ekspor;</p> <p>Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;</p> <p>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</p> <p>Program Pengawasan Keamanan Pangan;</p> <p>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</p> <p>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</p> <p>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</p> <p>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</p>
Kawasan andalan malang dan sekitarnya degan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, perkebunan, pariwisata, dan panas bumi	Rencana pengembangan koridor pariwisata: Jalur pengembangan koridor C dengan pusat pelayanan di Kabupaten Pacitan dan Kota Malang		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan pasar tradisional</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa</li> <li>- Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perbelanjaan</li> <li>- Pengembangan kawasan perdagangan baru dengan berbagai skala pelayanan</li> </ul>	<p>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;</p>

RTRW Nasional	RTRW Provinsi	RTRW Kota yang berlaku	Reviu RTRW Kota	RPJMD KOTA MALANG
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan sentra-sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan</li> </ul>	
	<p>Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut keetingan ekonomi: kawasan koridor metropolitan meliputi Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kabupaten Bangkalan, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di Kota Surabaya, kawasan pusat bisnis Kota Surabaya, kawasan industri berteknologi tinggi di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Kawasan Industri Gempol di Kabupaten Pasuruan, Kawasan Komersial Lawang di Kabupaten Malang dan perkotaan Malang, kawasan pusat bisnis Kota Malang, dan pusat pariwisata di Kota Batu</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Industri Pariwisata</li> <li>- Pengembangan Kelembagaan Pariwisata</li> </ul> <p>Pembangunan Pemasaran Pariwisata</p> <p>Pengembangan dan pengelolaan industri kecil dan mikro</p>	<p>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;</p> <p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</p> <p>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</p> <p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</p> <p>Program Pemasaran Pariwisata;</p> <p>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>Program Pengembangan UMKM</p> <p>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</p> <p>Program Promosi Penanaman Modal</p>

RTRW Nasional	RTRW Provinsi	RTRW Kota yang berlaku	Reviu RTRW Kota	RPJMD KOTA MALANG
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri	Program Pengendalian Izin Usaha IndustriKabupaten/Kota; Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Hubungan Industrial; Program Penempatan Tenaga Kerja; Program Pemberdayaan Sosial; Program Rehabilitasi Sosial; Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Program Perlindungan Perempuan; Program Perlindungan Khusus Anak; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
		Pengembangan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki kualitas jaringan listrik</li> <li>- Pengembangan jaringan listrik baru, jaringan SUTT, jaringan SUTM, jaringan SUTR, penerangan jalan umum, gardu induk</li> <li>- Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi</li> <li>- Kawasan Perumahan</li> </ul>	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);  Program Pengembangan Permukiman;

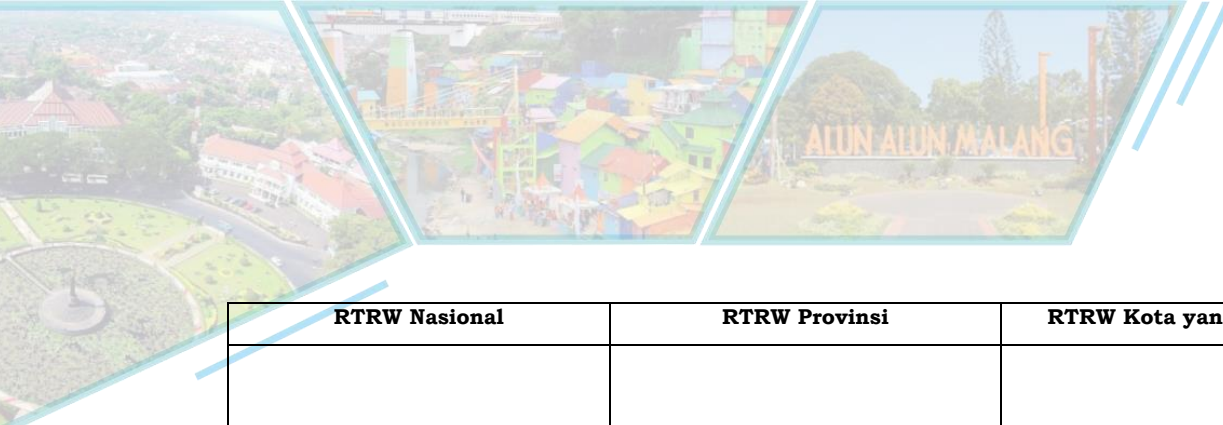
RTRW Nasional	RTRW Provinsi	RTRW Kota yang berlaku	Reviu RTRW Kota	RPJMD KOTA MALANG
			- Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Program Kawasan Permukiman; Program Pengembangan Perumahan
			- Penyediaan Prasarana Pendukung Kawasan Perkantoran Pemerintah	Program Penataan Bangunan Gedung;
			- Pengembangan Perkantoran Pemerintah Kota Malang	
			- Pengembangan Perkantoran Swasta	
			- Infrastruktur Perkotaan: Jalur Sepeda	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
			- Infrastruktur Perkotaan: Sistem Jaringan Pejalan Kaki	
			- Pembangunan batas yang jelas dengan perkerasan	
			- Pembatasan pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan	
			- Penataan Kawasan Strategis Ekonomi	
			- Revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan	
			- Penataan Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi di Wilayah Kota	
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi
	Rencana pengembangan jaringan air baku untuk air minum regional: Sistem Penyediaan Air Minum Regional Malang Raya	Pengembangan Prasarana Utilitas	- Infrastruktur Perkotaan: Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
	Kawasan rawan banjir: Kota Malang		- Kawasan Infrastruktur Perkotaan: IPAM	
			Infrastruktur Perkotaan: Sistem Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
			- Perlindungan kawasan sempadan sungai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
			- Perlindungan daerah irigasi	



RTRW Nasional	RTRW Provinsi	RTRW Kota yang berlaku	Reviu RTRW Kota	RPJMD KOTA MALANG
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian kegiatan di dalam kawasan imbuhan air tanah</li> <li>- Pengembangan fungsi konservasi pada kawasan imbuhan air tanah</li> <li>- Pengembangan RTH kawasan imbuhan air tanah dan pengamanan sumber air baku</li> <li>- Perlindungan kualitas air</li> <li>- Infrastruktur Perkotaan: Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)</li> <li>- Kawasan Infrastruktur Perkotaan: IPAL</li> <li>- Pengembangan kawasan campuran secara vertikal</li> <li>- Penyediaan ruang parkir</li> <li>- Pengembangan kawasan tanaman pangan</li> <li>- Pengembangan kawasan peternakan</li> <li>- Perlindungan sempadan sungai</li> <li>- Perlindungan sempadan rel kereta api</li> </ul>	<p>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;</p> <p>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;</p> <p>Program Pengelolaan Tanah Kosong</p> <p>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <p>Program Penyuluhan Pertanian</p> <p>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</p> <p>Program Perencanaan Lingkungan Hidup;</p> <p>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</p> <p>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);</p>

RTRW Nasional	RTRW Provinsi	RTRW Kota yang berlaku	Reviu RTRW Kota	RPJMD KOTA MALANG
	Rencana pengembangan TPA regional: Malang Raya yang melayani Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang		<p>Infrastruktur Perkotaan: Sistem Jaringan Persampahan Kota</p> <p>Infrastruktur Perkotaan: Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastruktur Perkotaan: Sistem Jaringan Evakuasi Bencana</li> <li>- Tempat Evakuasi Bencana</li> </ul>	<p>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;</p> <p>Program Pengelolaan Persampahan;</p> <p>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);</p> <p>Program Penanganan Bencana;</p> <p>Program Penanggulangan Bencana;</p> <p>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</p> <p>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;</p> <p>Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum;</p> <p>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;</p> <p>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);</p>
		Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Jalur Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventarisasi/Database RTH Kota Malang</li> <li>- Pemantapan RTH Kota Malang</li> </ul>	<p>Program Informasi Dan Komunikasi Publik;</p> <p>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <p>Program Aplikasi Informatika;</p> <p>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</p> <p>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;</p>
		Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		<p>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Keluarga;</p>

RTRW Nasional	RTRW Provinsi	RTRW Kota yang berlaku	Reviu RTRW Kota	RPJMD KOTA MALANG
				<p>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;</p> <p>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;</p> <p>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</p> <p>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</p> <p>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</p> <p>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;</p> <p>Program Pendaftaran Penduduk;</p> <p>Program Pencatatan Sipil;</p> <p>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</p> <p>Program Pengelolaan Arsip</p> <p>Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</p> <p>Program Perizinan Penggunaan Arsip</p> <p>Program Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;</p> <p>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Program Perekonomian dan Pembangunan;</p> <p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;</p>
		<p>Penyediaan prasarana pendukung kawasan perkantoran pemerintah</p>	<p>Pembaharuan database kependudukan</p>	



RTRW Nasional	RTRW Provinsi	RTRW Kota yang berlaku	Reviu RTRW Kota	RPJMD KOTA MALANG
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Program Penyelenggaraan Pengawasan; Program Kepegawaian Daerah; Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Tahapan penyusunan perubahan RPJMD berlaku mutatis mutandis, sehingga kaidah perumusan kebijakan perencanaan perlu disusun KLHS kembali dalam penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023. KLHS memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan capaian indikator pembangunan daerah dan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

**Tabel 1.5**  
**Keterkaitan antara RPJMD dengan KLHS RPJMD**

<b>Isu Strategis RPJMD Kota Malang</b>	<b>Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Malang</b>
Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan serta layanan dasar lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih banyaknya penduduk dengan kesejahteraan rendah dan rentan miskin;</li> <li>2. Masih rendahnya kualitas akses layanan kesehatan;</li> <li>3. Belum meratanya pelayanan pendidikan formal dan belum optimalnya pengelolaan SDM yang berkarakter dan berdaya saing;</li> <li>4. Belum optimalnya penanganan wabah covid-19 ditinjau dari aspek sosial.</li> </ol>
Peningkatan produktifitas dan daya saing daerah dengan dukungan infrastruktur yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya ancaman kekurangan air serta kebutuhan akses air bersih dan air minum layak serta berkelanjutan;</li> <li>2. Tingginya kemacetan lalu lintas;</li> <li>3. Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan limbah padat dan cair yang berkelanjutan di Kota Malang;</li> <li>4. Eskalasi kejadian bencana banjir, tanah longsr, gempa bumi, dan cuaca ekstrim;</li> <li>5. Belum optimalnya pengelolaan RTH dan meningkatnya ancaman penurunan kualitas udara;</li> <li>6. Masih tingginya kebutuhan alih fungsi lahan, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan permukiman yang menurunkan luasan lahan terbuka dan pertanian;</li> <li>7. Masih lemahnya perkembangan sector pariwisata Kota Malang khususnya akibat dampak pandemi covid-19;</li> <li>8. Kurang optimalnya pengembangan UMKM dan IKM sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah;</li> </ol>

Isu Strategis RPJMD Kota Malang	Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Malang
	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Masih tingginya kebutuhan pengembangan wilayah dan infrastruktur sebagai pendukung pertumbuhan perekonomian wilayah Kota Malang;</li> <li>10. Belum optimalnya penanganan covid-19 dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Malang;</li> <li>11. Perlunya peningkatan kapasitas kerjasama heksagonal, dan koordinasi antar sektor dan antar wilayah di Kota Malang.</li> </ol>
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung harmoni sosial yang berbasis kesetaraan, keamanan, ketenteraman dan toleransi;</li> <li>2. Perlunya meningkatkan penanggulangan kriminalitas dan keamanan kota.</li> </ol>
Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang optimalnya hasil reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik di daerah;</li> <li>2. Kurangnya integrasi data dan pemanfaatan inovasi teknologi informasi (TIK) untuk mendukung upaya peningkatan pencapaian tujuan berkelanjutan daerah;</li> <li>3. Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD.</li> </ol>

## 1.4 Maksud dan Tujuan

### 1.4.1 Maksud

Sebagaimana ketentuan penyusunan Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 diatur pada Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa tahapan penyusunan RPJMD berlaku mutatis muntadis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Penyusunan Perubahan RPJMD tetap berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 ini telah disusun dan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan, serta telah memuat substansi pendahuluan; gambaran umum kondisi Daerah; gambaran keuangan Daerah; permasalahan dan isu strategis Daerah; visi, misi, tujuan dan sasaran; strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan penutup.

Adapun maksud penyusunan Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pembangunan jangka menengah Kota Malang periode Tahun 2018-2023;
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Menjadi landasan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
- d. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota, serta keberhasilan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- e. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan pembangunan di wilayah Kota Malang.

#### **1.4.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 ini antara lain:

1. Penyelarasan sasaran, prioritas pembangunan daerah dengan sasaran, prioritas pembangunan nasional; dan penyelarasan program dan kegiatan strategis daerah dengan program dan kegiatan strategis prioritas nasional;
2. Penyesuaian nomenklatur penyusunan Proyeksi Keuangan Daerah berdasar PP 12/2019 dan Permendagri 77/2020;
3. Penyesuaian nomenklatur Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dengan Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-3708/2020;
4. Penyesuaian Target Indikator Program dan Strategi Pembangunan serta Reformulasi target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
  - 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD
  - 3.1.2 Neraca Daerah
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
  - 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran
  - 3.2.2 Analisis Pembiayaan
- 3.3 Kerangka Pendanaan
  - 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja
  - 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu Strategis

### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan Dan Sasaran



BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM  
PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP

# BAB-II

## **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah memberikan informasi yang relevan dan penting terkait kondisi daerah Kota Malang. Informasi yang relevan dan penting tersebut selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi Kota Malang, tujuan, sasaran pokok dan kebutuhan perumusan arah kebijakan. Dengan demikian gambaran umum kondisi daerah merupakan bagian yang sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis. Gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Malang.

#### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi Kota Malang perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Aspek demografi di Kota Malang dapat digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu.

##### 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

###### A. Luas, Letak dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Kota Malang memiliki wilayah seluas 114,2616 km<sup>2</sup>. Kota Malang merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Berdasarkan ketetapan tentang pembagian wilayah, Kota Malang secara administratif terbagi

menjadi 5 (lima) kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kelurahan yang terbagi menjadi 552 Rukun Warga (RW) dan 4.257 Rukun Tetangga (RT). Adapun rincian nama kelurahan, RW dan RT pada masing-masing kecamatan di Kota Malang sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Kelurahan dan Jumlah RW dan RT Se-Kota Malang**  
**Tahun 2020**

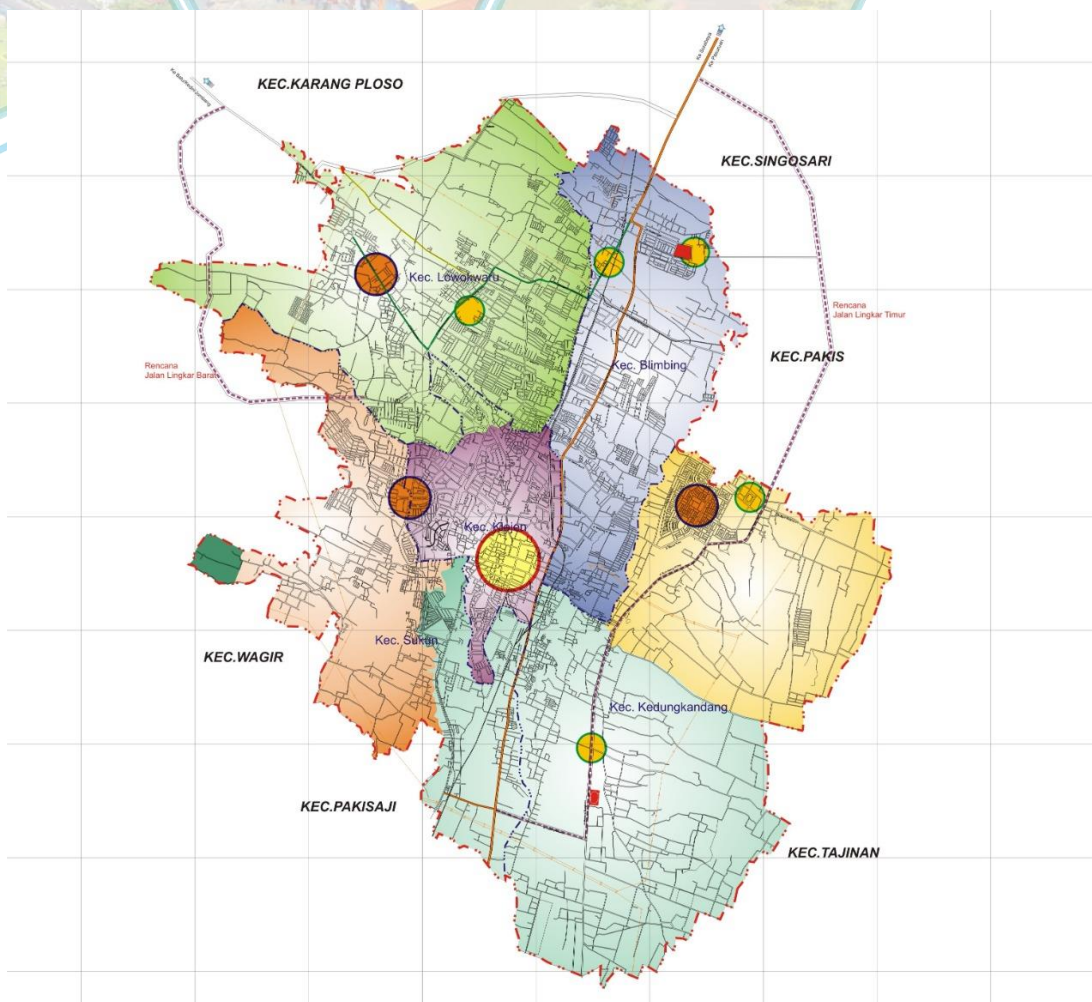
No	Kecamatan	Kelurahan		Jumlah	
				RW	RT
I	BLIMBING	1	Balearjosari	127	940
		2	Arjosari		
		3	Polowijen		
		4	Purwodadi		
		5	Blimbing		
		6	Pandanwangi		
		7	Purwantoro		
		8	Bunulrejo		
		9	Kesatrian		
		10	Polehan		
		11	Jodipan		
II	KEDUNGKANDANG	1	Kotalama	118	930
		2	Mergosono		
		3	Bumiayu		
		4	Wonokoyo		
		5	Buring		
		6	Kedungkandang		
		7	Lesanpuro		
		8	Sawojajar		
		9	Madyopuro		
		10	Cemorokandang		
		11	Arjowinangun		
		12	Tlogowaru		
III	LOWOKWARU	1	Tasikmadu	121	803
		2	Tunggulwulung		
		3	Merjosari		
		4	Tlogomas		
		5	Dinoyo		
		6	Sumbersari		
		7	Ketawanggede		
		8	Jatimulyo		
		9	Tanjungsekar		
		10	Mojolangu		
		11	Tulusrejo		

No	Kecamatan	Kelurahan		Jumlah	
				RW	RT
		12	Lowokwaru		
IV	KLOJEN	1	Klojen	90	679
		2	Samaan		
		3	Rampalcelaket		
		4	Kiduldalem		
		5	Sukoharjo		
		6	Kasin		
		7	Kauman		
		8	Oro-Oro Dowo		
		9	Bareng		
		10	Gadingkasri		
		11	Penanggungan		
V	SUKUN	1	Bakalan Krajan	96	905
		2	Mulyorejo		
		3	Karangbesuki		
		4	Ciptomulyo		
		5	Gadang		
		6	Kebonsari		
		7	Bandungrejosari		
		8	Sukun		
		9	Tanjungrejo		
		10	Pisangcandi		
		11	Bandulan		

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021

Secara astronomis, Kota Malang terletak pada 07°46'48" LS - 08°46'42" LS dan 112°31'42" BT - 112°48'48" BT. Sedangkan secara administratif, Kota Malang berbatasan dengan kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Malang, yaitu:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang
2. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang
3. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
4. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang



**Gambar 2.1 Peta Kota Malang**

*Sumber: Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang*

### **B. Topografi**

Secara topografis sebagian besar wilayah Kota Malang merupakan dataran dengan dikelilingi deretan bukit dan pegunungan. Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2018 (2018:40-41), Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667m (dpal), dengan keadaan kemiringan tanah (topografi) Kota Malang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kemiringan 0-8% tersebar diseluruh kecamatan di Kota Malang. Kelas kemiringan ini tergolong datar agak landai.
- b. Kemiringan 8-15% merupakan kelas kemiringan yang tergolong landai agak miring. Kelas kemiringan ini berada di seluruh kecamatan di Kota Malang.
- c. Kemiringan 15-25% merupakan kelas kemiringan yang tergolong miring agak curam. Wilayah terluas pada kemiringan ini yaitu Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru.

- d. Kemiringan 25-45% merupakan kelas kemiringan yang tergolong curam. Kelas kemiringan ini di Kota Malang berada disekitar sempadan sungai. Namun wilayah terluas yang berada pada kelas kemiringan ini yaitu Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru yang merupakan tempat tertinggi di Kota Malang.
- e. Kemiringan >45% merupakan kelas kemiringan sangat curam. Kelas kemiringan ini di Kota Malang berada di Kecamatan Kedungkandang.

Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2018 (2018:41-42) bahwa salah satu lokasi yang paling tinggi berdasarkan klasifikasi topografinya adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah Timur Kota Malang.

### **C. Geologi**

Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2018 (2018:44) bahwa keadaan geologis di Kota Malang termasuk kategori dataran tinggi. Sebab Kota Malang merupakan kota yang dikelilingi oleh pegunungan. Di sebelah utara terdapat Gunung Arjuno; di sebelah timur terdapat Gunung Semeru; di sebelah barat terdapat Gunung Panderman; Gunung Kawi; dan Gunung Kelud. Keadaan tanah di bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, sehingga cocok untuk industri. Keadaan tanah di bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, sehingga cocok untuk pertanian. Keadaan tanah bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur. Sedangkan keadaan tanah bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan. Jenis tanah di wilayah Kota Malang terbagi menjadi 4 (empat) macam, antara lain:

1. Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6.930.267 Ha.
2. Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 Ha.
3. Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha.
4. Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 11.862,747 Ha.

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol

yang memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15 %.

#### **D. Hidrologi**

Dipandang dari aspek hidrologis, Kota Malang terletak pada Cekungan Air Tanah (CAT) Brantas. Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2018 (2018:42) bahwa di dalam CAT Brantas terkandung potensi dan cadangan air tanah dengan kualitas yang sangat bagus untuk bahan baku air minum. Wilayah CAT Brantas ini mempunyai wilayah cekungan yang terbesar di Propinsi Jawa Timur. Karena letak Kota Malang yang berada pada CAT Brantas ini, maka pemerintah daerah melalui PDAM saat ini menggunakannya sebagai bahan baku utama untuk air minum bagi masyarakat. Di samping itu, Kota Malang juga memiliki 4 (empat) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Metro yang berada di Jalan Raya Langsep, DAS Brantas yang berada di Jalan Gajayana sampai Jalan MT Haryono, DAS Bango yang berada di Jalan Sukarno Hatta, serta DAS Bango yang berada di Jalan Terusan Borobudur sampai Kawasan Pasar Blimbing.

Sementara itu, perairan permukaannya berupa aliran beberapa sungai yang berfungsi sebagai bahan baku pengairan maupun untuk saluran pembuangan akhir dari drainase kota. Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2018 (2018:42) Di wilayah Kota Malang terdapat 4 (empat) sungai utama yang cukup besar, yaitu Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Mewek-Kalisari-Bango, dan Sungai Amprong. Sungai-sungai yang lain adalah merupakan sungai-sungai relatif kecil yang merupakan sungai pecahan, maupun sungai terusan dari keempat sungai besar tersebut. Kondisi Kota Malang berada pada daerah lereng gunung sehingga Kota Malang menjadi jalur aliran air bagi daerah dataran rendah di bawahnya.

#### **E. Klimatologi**

Iklim Kota Malang dipengaruhi oleh letak geologis yang berada di lokasi yang tinggi dan di antara wilayah pegunungan. Kota Malang beriklim muson tropis (pengelompokan iklim Köppen: Am) sehingga



memiliki dua musim, yaitu penghujan dan kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso, curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April dan Desember. Sedangkan pada bulan Juni, Agustus dan November curah hujan relatif rendah.

#### **F. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan di Kota Malang terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada masing-masing kawasan tersebut telah ditetapkan fungsi utama keberadaan dan kemanfaatannya. Adapun penggunaan lahan di Kota Malang diantaranya:

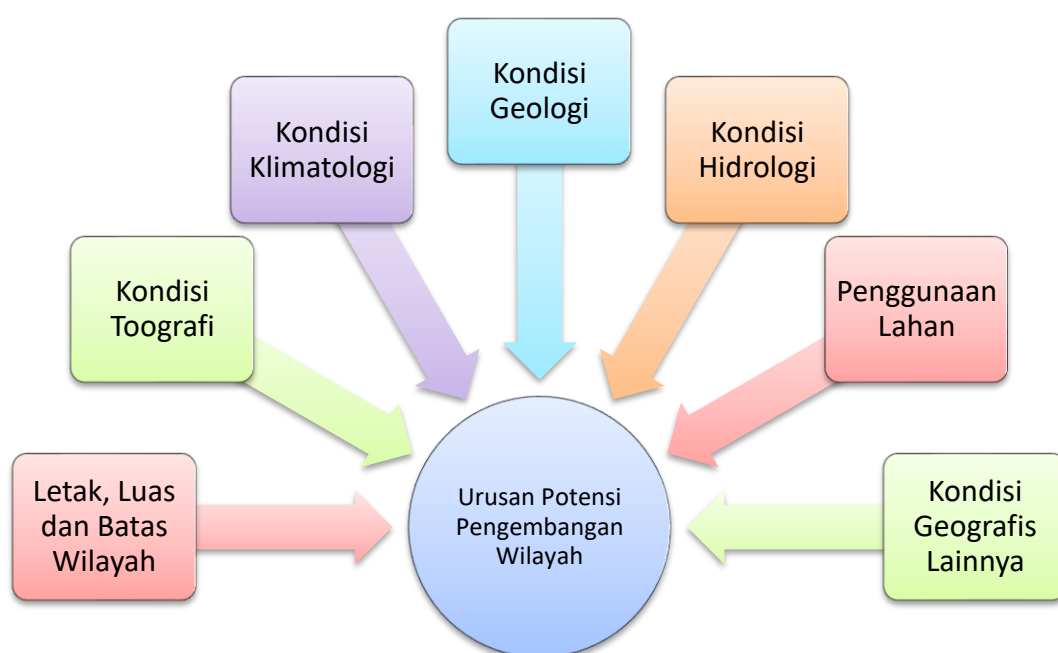
1. Kawasan Lindung di Kota Malang terdiri dari:
  - a. Kawasan Lindung Setempat, yang meliputi daerah sekitar sungai atau sempadan sungai dan sempadan irigasi
  - b. Kawasan Rawan Bencana, merupakan kawasan yang memiliki kecenderungan terjadi bencana banjir dan tanah longsor
  - c. Kawasan Cagar Budaya,
    - 1) Lingkungan Cagar Budaya,
    - 2) Bangunan Cagar Budaya,
  - d. Kawasan RTH Kota, terdiri dari:
    - 1) RTH Publik
    - 2) RTH Privat
2. Kawasan Budidaya di Kota Malang terdiri dari:
  - a. Kawasan Perumahan
  - b. Kawasan Perdagangan dan Jasa
  - c. Kawasan Perkantoran
  - d. Kawasan Industri dan Pergudangan
  - e. Kawasan Pariwisata
  - f. Ruang Evakuasi Bencana
  - g. Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal

Hingga saat ini kondisi yang ada atas struktur penggunaan lahan di Kota Malang telah mengalami perambahan kawasan terbangun (konversi lahan terbangun) semakin luas ke daerah yang bukan peruntukannya, baik secara natural maupun terencana. Semakin tinggi jumlah dan kepadatan penduduk di Kota Malang yang

disertai dengan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal menjadi salah satu penyebab konversi lahan. Sehingga hal ini berimplikasi pada meningkatnya kerusakan lingkungan. Bahkan tidak jarang sempadan sungai maupun kawasan RTH menjadi alternatif konversi lahan terbangun sebagai ruang untuk tempat tinggal maupun konversi lahan yang tidak sesuai peruntukannya.

### 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berikut kerangka pemikiran potensi pengembangan kawasan budidaya:



**Gambar 2.2**  
**(G-C.2)**  
**Kerangka Pemikiran**  
**Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 telah mengatur pengembangan kawasan budidaya Kota Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan Perumahan
- 2) Kawasan Perdagangan dan Jasa
- 3) Kawasan Perkantoran
- 4) Kawasan Komplek Industri dan Pergudangan
- 5) Kawasan Pariwisata

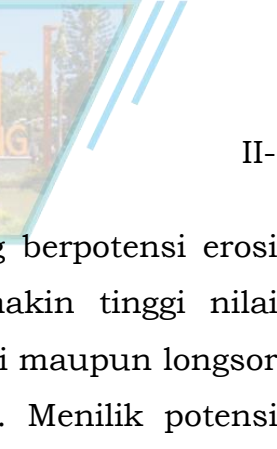
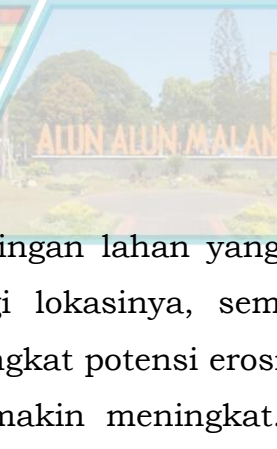
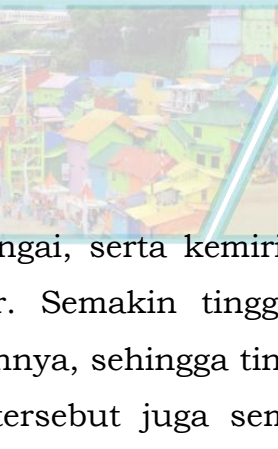
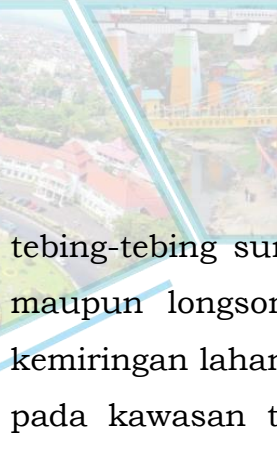

- 
- 6) Ruang Evakuasi Bencana
  - 7) Ruang Bagi kegiatan sektor informal

Potensi pengembangan wilayah yang dikembangkan di Kota Malang diarahkan dapat memberikan dampak ekonomi pada Kota Malang. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian beberapa sektor terhadap PDRB di Kota Malang. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor atas dasar harga konstan mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, yakni di tahun 2016 sebesar 13.844,82 miliar rupiah, tahun 2017 sebesar 14.620,69 miliar rupiah, tahun 2018 sebesar 15.515,26 miliar rupiah, dan tahun 2019 sebesar 16.242,51 miliar rupiah. Pada tahun 2020 kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami penurunan menjadi sebesar 15.218,98 miliar rupiah.

Selain itu, juga dapat dilihat dari kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB juga mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yakni tahun 2016 sebesar 10.463,34 miliar rupiah, tahun 2017 sebesar 10.846,90 miliar rupiah, tahun 2018 sebesar 11.397,48 miliar rupiah, dan tahun 2019 sebesar 12.009,64 miliar rupiah. Pada tahun 2020 kontribusi sektor industri pengolahan turun menjadi sebesar 11.952,14 miliar rupiah. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga turut memberikan kontribusi terbesar ke tiga terhadap PDRB Kota Malang dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, yakni tahun 2016 sebesar 1.997,08 miliar rupiah, tahun 2017 sebesar 2.163,57 miliar rupiah, tahun 2018 sebesar 2.287,16 miliar rupiah, dan tahun 2019 sebesar 2.486,16 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi sebesar 2.212,93 miliar rupiah. Turunnya kontribusi ketiga sektor penyumbang terbesar PDRB tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID-19.

### **2.1.3 Wilayah Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang memiliki kecenderungan terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Tingkat kerawanan terhadap bencana merupakan karakteristik dari daerah yang mempunyai kawasan lereng dengan aliran sungai yang dikelilingi



tebing-tebing sungai, serta kemiringan lahan yang berpotensi erosi maupun longsor. Semakin tinggi lokasinya, semakin tinggi nilai kemiringan lahannya, sehingga tingkat potensi erosi maupun longsor pada kawasan tersebut juga semakin meningkat. Menilik potensi wilayah dengan karakteristik demikian, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap beban daerah untuk mengelola kawasan-kawasan rawan erosi dan longsor.

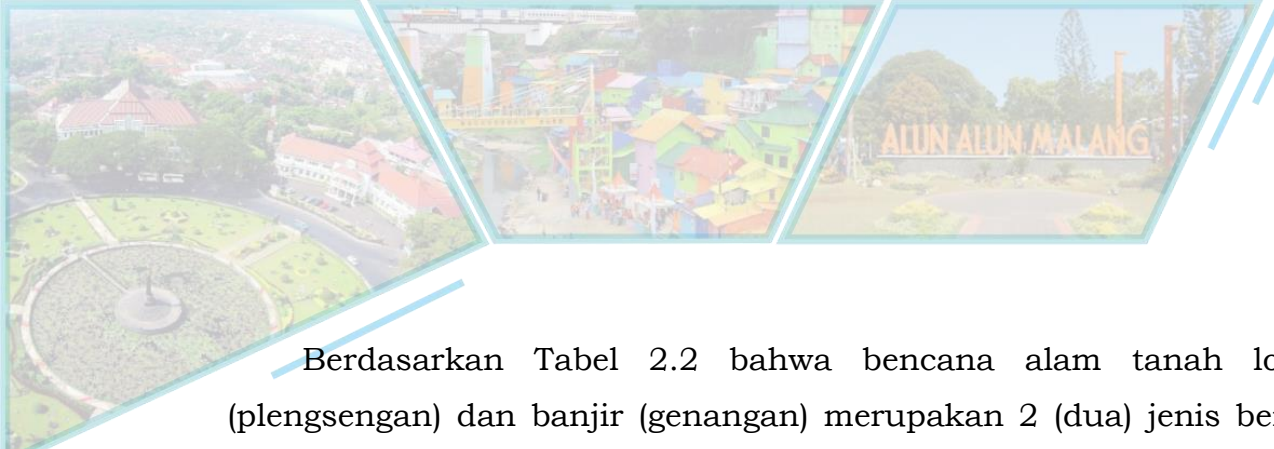
Berdasarkan kejadian bencana di Kota Malang menunjukkan bahwa bencana yang sering terjadi di Kota Malang yakni potensi bencana longsor, banjir dan angin topan. Potensi bencana tersebut terlebih harus diwaspadai pada pemukiman di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) atau tebing bibir sungai. Sehingga titik bencana dan lokasi yang berpotensi bencana harus selalu dimonitoring, mengingat intensitas hujan sedang sampai tinggi belakangan memicu debit Sungai Brantas, meluap di sejumlah titik. Dampaknya, volume air waduk pun meningkat. Selain itu, kondisi muka air waduk di DAS Brantas dan Bengawan Solo, menunjukkan peningkatan volume.

Kejadian bencana di Kota Malang sebagai dasar pertimbangan strategi dan arah kebijakan program di Pemerintah Daerah Kota Malang adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Pasal 5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penganggulangan Bencana. Selain itu, Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kota serta Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Kawasan Strategis untuk Pengendalian Ketat Skala Regional.

**Tabel 2.2**  
**Data Kejadian Bencana Kota Malang Tahun 2020 Berdasarkan Kecamatan**

<b>KEJADIAN BENCANA TAHUN 2020 BERDASARKAN KECAMATAN</b>													
NO	KECAMATAN	JENIS BENCANA ALAM					JENIS BENCANA NON ALAM			Lain-Lain (Laka Air), Pohon tumbang	BENCANA SOSIAL		JUMLAH KEJADIAN
		LAHAN	TANAH LONGSOR (PLENGSENGAN)	ANGIN KENCANG	GENANGAN (BANJIR)	GEMPA	KEBAKARAN BANGUNAN/KIOS/ KENDARAAN	GAGAL KONTRUKSI (AMBROL)	WABAH/ PANDEMI		KONFLIK/ KERUSUHAN SOSIAL	AKSI TEROR/ SABOTASE	
1	BLIMBING	0	13	1	3	1	7	4	1	8	0	0	38
2	KLOJEN	0	17	3	4	1	10	4		13	1	0	53
3	KEDUNGKANDANG	0	22	3	9	1	8	0		4	0	0	47
4	SUKUN	3	25	0	3	3	10	3		5	1	0	53
5	LOWOKWARU	4	6	1	4	1	6	0		3	0	0	25
TOTAL		7	83	8	23	7	41	11	1	33	2	0	216

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang, 2021



Berdasarkan Tabel 2.2 bahwa bencana alam tanah longsor (plengsengan) dan banjir (genangan) merupakan 2 (dua) jenis bencana alam yang paling banyak terjadi di Kota Malang yang kejadiannya tersebar hampir diseluruh Kecamatan yang ada di Kota Malang.

#### A. Tingkat Risiko Banjir

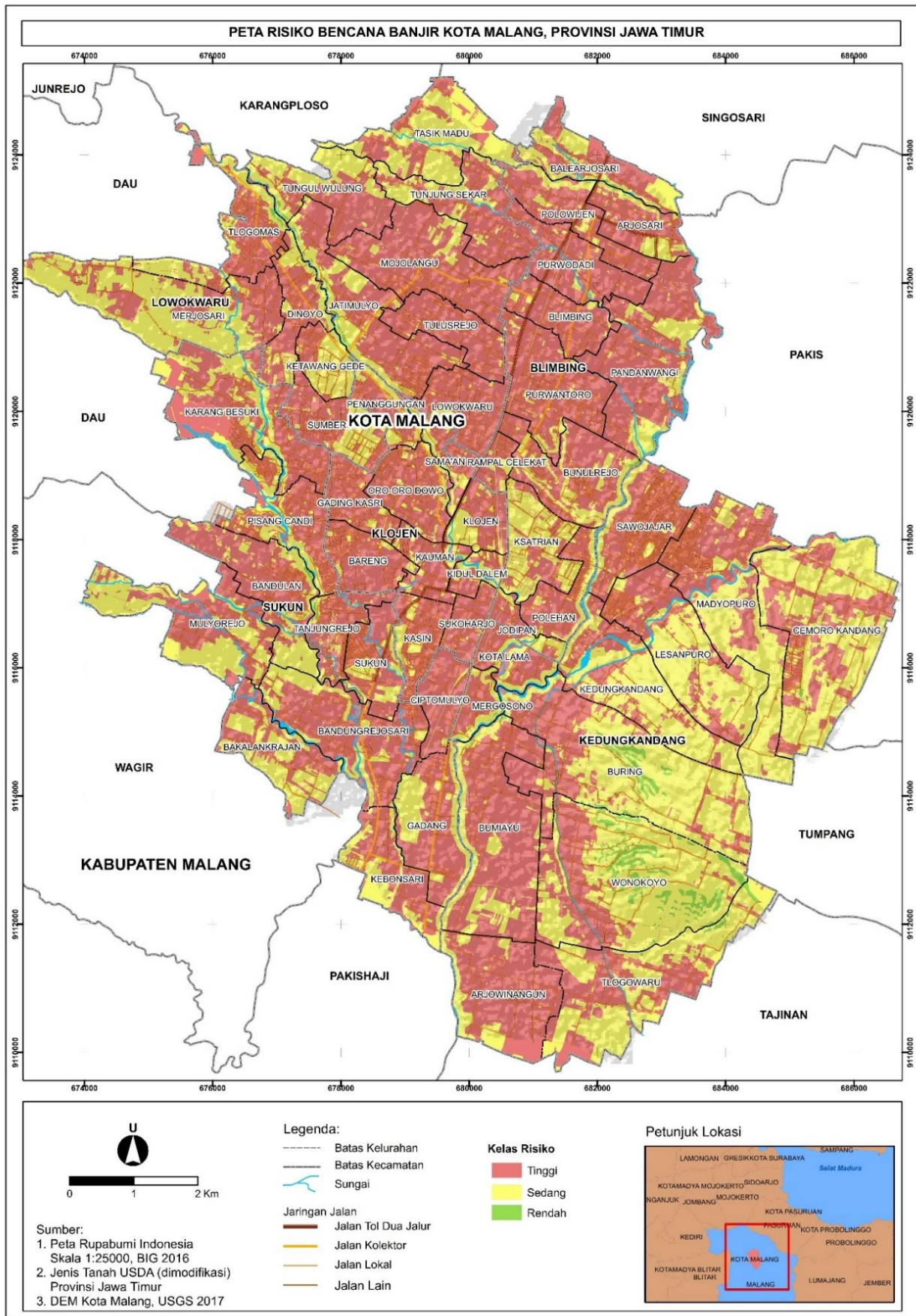
Hasil analisis kajian dokumen RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA MALANG TAHUN 2017-2022 (2017:III.1) Kota Malang terdiri atas 3 (tiga) risiko banjir yaitu risiko rendah, risiko sedang dan risiko tinggi yaitu:

1. Risiko tinggi sebesar 56,09% dari luas total Wilayah Kota Malang dan tersebar di 50 (lima puluh) Kelurahan.
2. Risiko sedang sebesar 38,56% dari luas total Wilayah Kota Malang dan tersebar di 55 (lima puluh lima) Kelurahan.
3. Risiko rendah sebesar 1,55% dari luas total Wilayah Kota Malang dan tersebar di 35 (tiga puluh lima) Kelurahan.

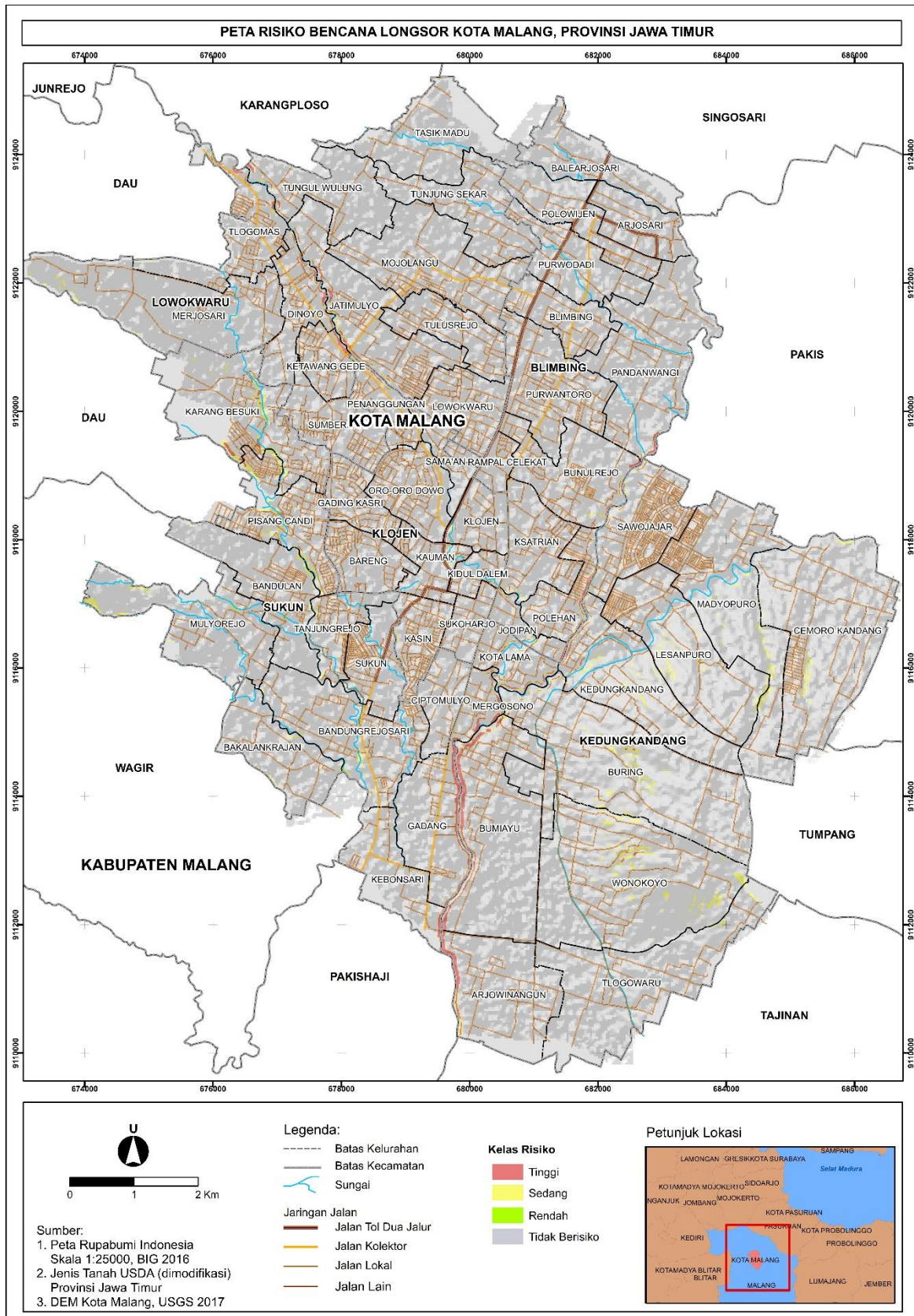
Penyebaran banjir yang terjadi di Kota Malang dapat dilihat pada **(Gambar 2.3)**.

#### B. Tingkat Risiko Tanah Longsor

Hasil analisis kajian dokumen RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA MALANG TAHUN 2017-2022 (2017:III.4) Sebagian besar wilayah Kota Malang tidak rawan terhadap bencana longsor. Hanya sekitar 3% dari wilayahnya yang berisiko terhadap longsor **(Gambar 2.4)**. Hal ini dikarenakan Kota Malang terletak pada topografi yang relatif datar, kecuali pada tepi-tepi sungai. Wilayah risiko tersebut berada di wilayah tebing Sungai Brantas yang terjal. Potensi bencana Tanah Longsor terlebih harus diwaspadai pada pemukiman di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) atau tebing bibir sungai. Namun pada kenyataan yang terjadi dilapangan dan berdasarkan data yang dihimpun oleh BPBD Kota Malang Bencana Alam Tanah Longsor adalah bencana Alam yang paling sering terjadi di Kota Malang.



Gambar 2.3 Peta Risiko Bencana Banjir Kota Malang  
 Sumber: analisis kajian dokumen RENCANA PENANGGULANGAN  
 BENCANA KOTA MALANG TAHUN 2017-2022



Gambar 2.4 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Kota Malang  
 Sumber: analisis kajian dokumen RENCANA PENANGGULANGAN  
 BENCANA KOTA MALANG TAHUN 2017-2022

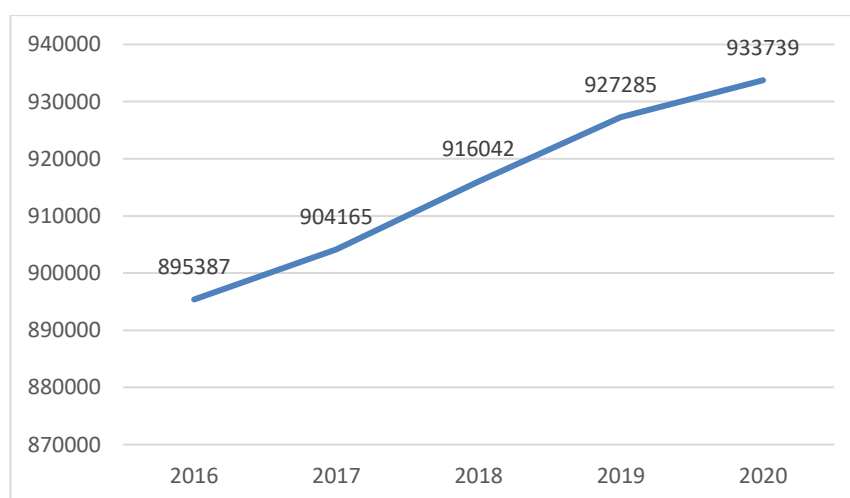


### C. Tingkat Resiko Kebakaran

Kota Malang mempunyai daerah yang cenderung padat penduduk seperti di wilayah Kecamatan Klojen dan Kecamatan Sukun. Padatnya penduduk juga hunian juga menimbulkan kekhawatiran akan rawan bencana kebakaran. Data pada Tabel 2.2 menunjukkan bahwa 25,39% resiko kebakaran berada pada daerah yang padat penduduknya, yaitu di Kecamatan Klojen dan juga Kecamatan Sukun. Penyebab kebakaran sebagian besar adalah karena konsleting listrik.

#### 2.1.4 Demografi

Informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan dan strategi pembangunan pada suatu daerah.

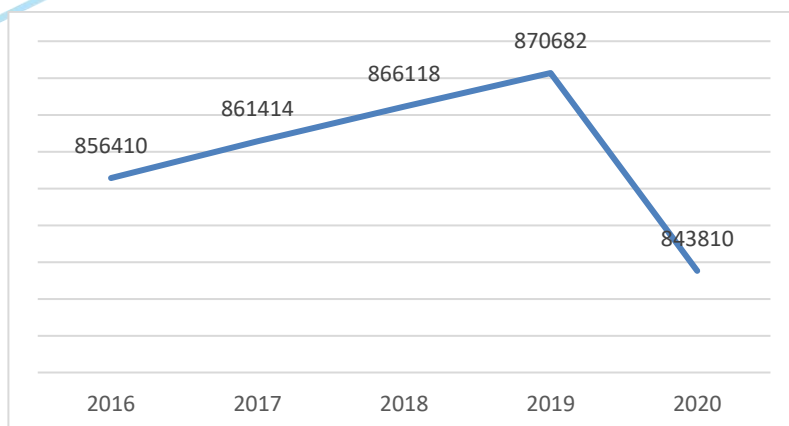


**Gambar 2.5**

#### **Jumlah Penduduk Kota Malang Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2021

Jumlah penduduk Kota Malang secara *de jure* menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Data penduduk *de jure* adalah data penduduk menurut administrasi yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan jumlah penduduk Kota Malang secara *de facto* menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang adalah sebagai berikut:

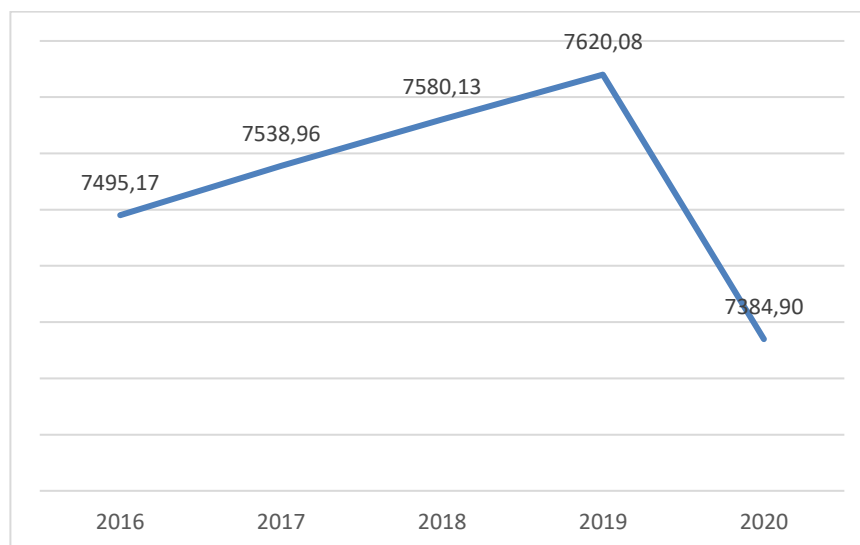


**Gambar 2.6**  
**Jumlah Penduduk Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021*

Data penduduk *de facto* adalah data pencacahan yang dilakukan Badan Pusat Statistik terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah territorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatic negara sahabat beserta keluarganya. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma dan pengungsi. Bagi yang mempunyai tempat tinggal tetap dan sedang bepergian ke luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya, tetapi dicacah ditempat tujuan. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Pada Gambar 2.6 jumlah penduduk Kota Malang menurut BPS pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah data hasil proyeksi dengan tahun dasar 2010. Sedangkan data tahun 2020 adalah merupakan hasil dari sensus penduduk. Terjadi penurunan jumlah penduduk di tahun 2020 disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah adanya pandemi COVID 19 yang menyebabkan jumlah migrasi masuk ke Kota Malang jauh berkurang karena adanya *social distancing*. Angka penduduk migrasi masuk ke Kota Malang disumbang dari jumlah mahasiswa. Dimana Kota Malang dikenal dengan Kota Pendidikan. Oleh karena itu, adanya *social distancing* menyebabkan kampus-kampus di Kota Malang melakukan pembelajaran daring. Selain itu, perusahaan juga melakukan kebijakan *Work From Home* (WFH) untuk pekerjanya yang juga menambah berkurangnya angka migrasi masuk ke Kota Malang.

Selanjutnya gambaran kepadatan penduduk Kota Malang berdasarkan jumlah penduduk *de facto* adalah sebagai berikut:



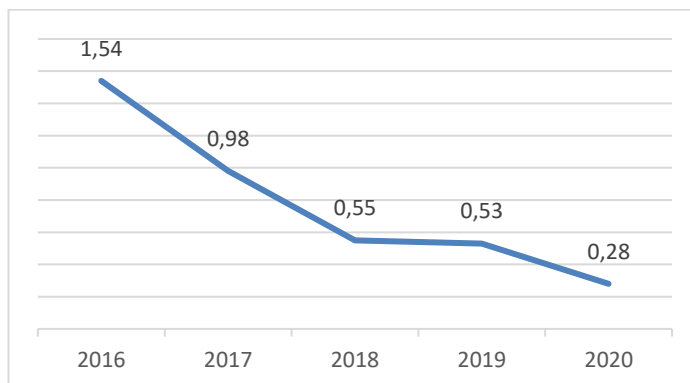
**Gambar 2.7**  
**Kepadatan Penduduk Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021*

Apabila melihat perkembangan kepadatan penduduk *de facto* yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Malang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kepadatan penduduk dari mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan kepadatan penduduk.

Penyumbang utama pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Kota Malang yakni dari faktor migrasi, dibandingkan dengan penambahan penduduk dari faktor kelahiran. Hal ini dikarenakan Kota Malang merupakan perkotaan, pusat perekonomian dan pusat pendidikan. Namun apabila melihat laju pertumbuhan penduduk Kota Malang pada lima tahun terakhir sejak tahun 2016-2020 menunjukkan angka penambahan penduduk mulai melambat. Pada tahun 2016 pertumbuhan penduduk sebesar 1,54% dan menurun di tahun 2017 yakni tumbuh sebesar 0,98%, hingga tahun 2018 turun lagi menjadi sebesar 0,55%, tahun 2019 turun diangka 0,53% dan pada tahun 2020 adanya pandemi COVID-19 penduduk Kota Malang mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk menjadi 0,28%. Adanya migrasi karena COVID-19 besar dipengaruhi oleh mahasiswa yang melakukan pembelajaran secara daring dari kota tempat asal

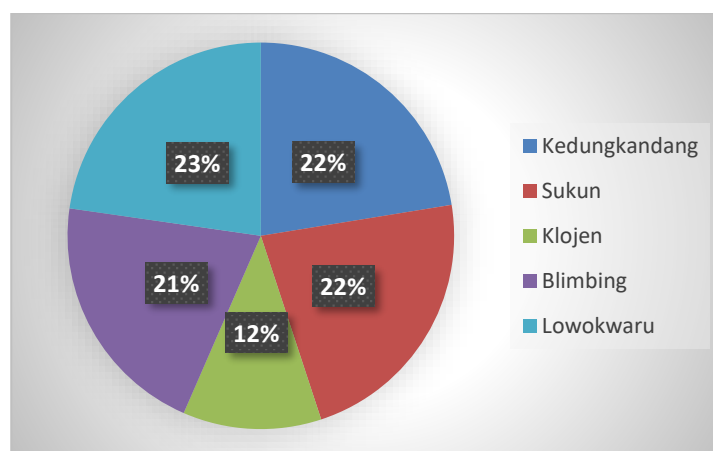
masing-masing, sehingga penduduk *de facto* dari data yang dikeluarkan oleh BPS mengalami penurunan.



**Gambar 2.8**  
**Pertambahan Penduduk Kota Malang**  
**Tahun 2016-2020**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021

Apabila dilihat dari persebaran penduduk di Kota Malang dengan menggunakan data *de facto* dari BPS untuk menggambarkan kepadatan di masing-masing kecamatan, maka sebaran penduduk tertinggi adalah di Kecamatan Lowokwaru. Pada tahun 2020 di Kecamatan Lowokwaru terdapat 23% (198.839 jiwa) dari seluruh jumlah penduduk Kota Malang. Diikuti oleh Kecamatan Sukun yaitu 22,51% (196.917 jiwa), Kecamatan Kedungkandang yaitu 22,44% (196.298 jiwa), Kecamatan Blimbing yaitu 20,74% (181.426 jiwa) dan Kecamatan Klojen yaitu 12% (101.410 jiwa).



**Gambar 2.9**  
**Distribusi Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan**  
**di Kota Malang Tahun 2020**

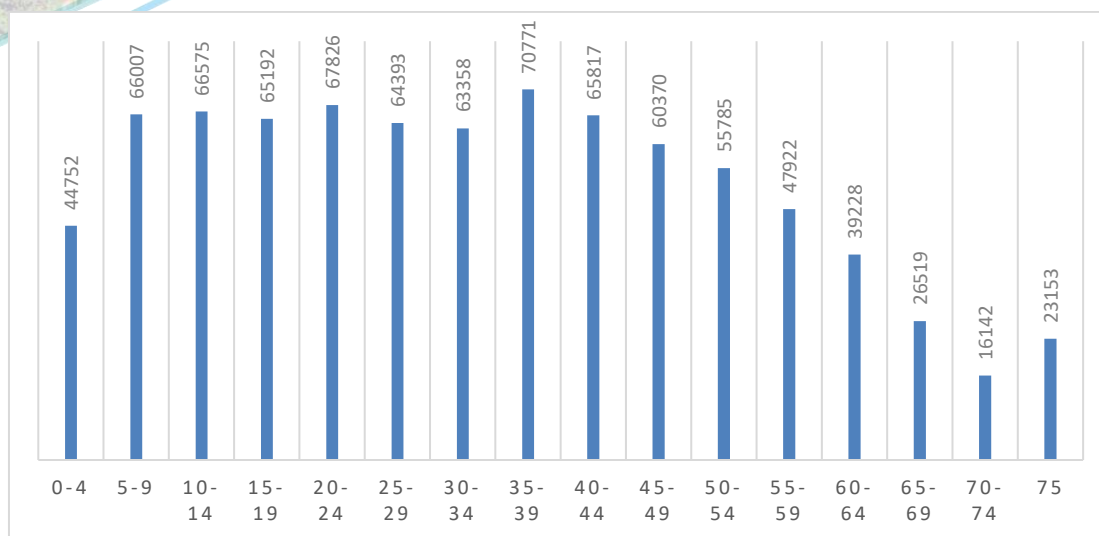
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021

Gambaran persebaran penduduk secara *de facto* dari BPS ini selaras dengan gambaran perekonomian dan luas wilayah di Kota Malang, dimana Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Sukun adalah kecamatan yang berdampingan dengan pusat perekonomian di Kota Malang yang memungkinkan peruntukan untuk hunian juga lebih besar. Sedangkan Kecamatan Kedungkandang menduduki peringkat ketiga dari persebaran penduduk karena luas wilayah kedungkandang merupakan luas wilayah kecamatan yang terbesar. Kecamatan Blimbing menempati urutan ke empat baik secara sebaran penduduk maupun luas wilayahnya. Sedangkan Kecamatan Klojen mempunyai sebaran penduduk terkecil meskipun letaknya berada pada pusat perekonomian Kota Malang, hal ini dikarenakan karena Kecamatan Klojen didominasi oleh bangunan pusat pemerintahan, pusat perbelanjaan, dan hotel.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Malang**  
**Tahun 2020**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Kota Malang
<b>0 - 4 TH</b>	23.319	21.433	44.752
<b>5 - 9 TH</b>	33.879	32.128	66.007
<b>10 - 14 TH</b>	34.284	32.291	66.575
<b>15 - 19 TH</b>	33.258	31.934	65.192
<b>20 - 24 TH</b>	34.622	33.204	67.826
<b>25 - 29 TH</b>	32.619	31.774	64.393
<b>30 - 34 TH</b>	32.052	31.306	63.358
<b>35 - 39 TH</b>	35.855	34.916	70.771
<b>40 - 44 TH</b>	33.011	32.806	65.817
<b>45 - 49 TH</b>	29.860	30.510	60.370
<b>50 - 54 TH</b>	26.784	29.001	55.785
<b>55 - 59 TH</b>	22.365	25.557	47.922
<b>60 - 64 TH</b>	18.625	20.603	39.228
<b>65 - 69 TH</b>	12.754	13.765	26.519
<b>70 - 74 TH</b>	7.141	9.001	16.142
<b>≥ 75 TH</b>	9.473	13.680	23.153
<b>Jumlah</b>	419.901	423.909	843.810

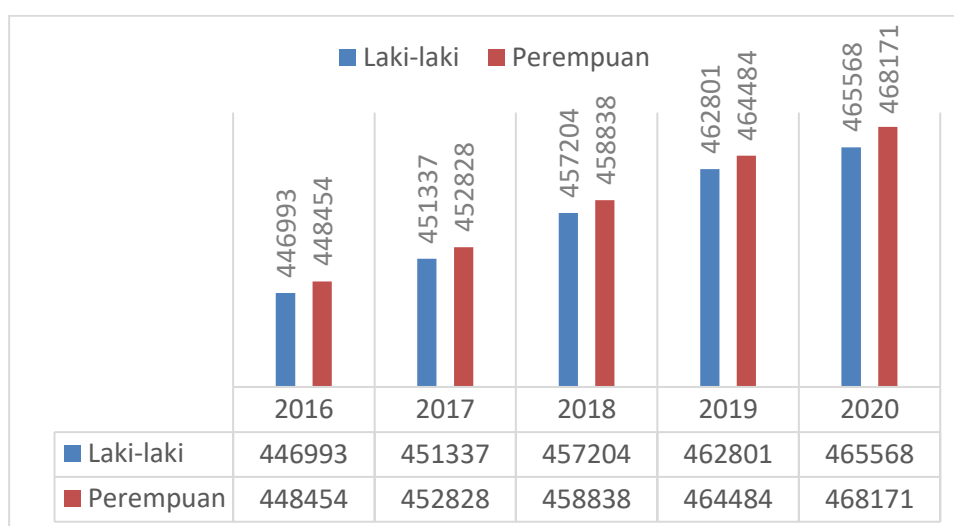
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021



**Gambar 2.10**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Malang Tahun 2020**

*Sumber: Kota Malang Dalam Angka, 2021*

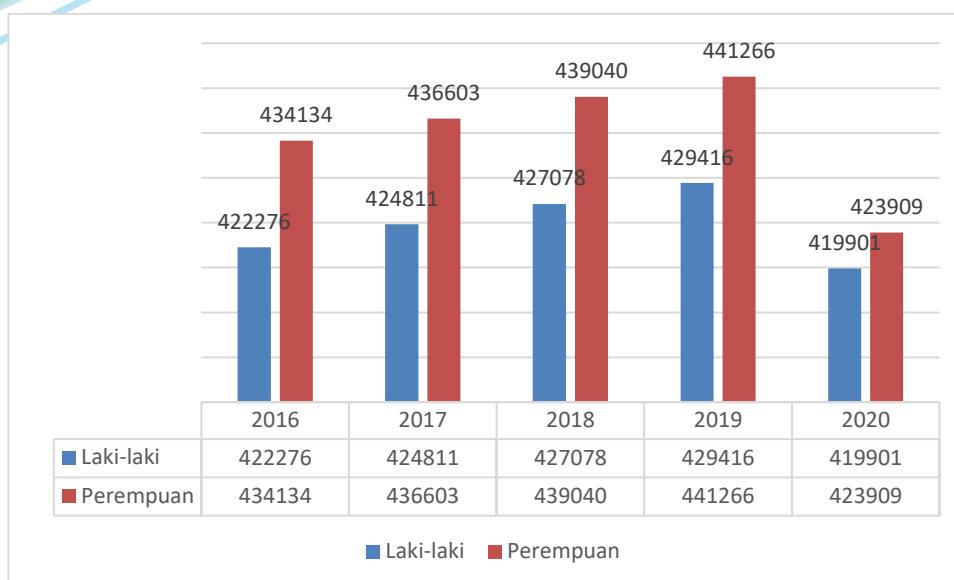
Apabila dilihat dari aspek jenis kelamin, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa berdasarkan data *de jure* jumlah penduduk di Kota Malang lebih banyak penduduk perempuan dibandingkan penduduk laki-laki.



**Gambar 2.11**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2021*

Sedangkan berdasarkan data *de facto* perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.12**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Di Kota Malang Tahun 2016-2020**  
*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021*

Data *de facto* juga menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki.

Apabila dilihat dari aspek usia, pada tahun 2020 sebagian besar penduduk di Kota Malang terkategori sebagai penduduk usia produktif, yakni pada rentang usia 15-64 tahun sebesar 600.662 jiwa atau 71,18% dari total jumlah penduduk, sedangkan jumlah penduduk yang termasuk ke dalam kategori penduduk usia tidak produktif sebanyak 243.148 jiwa atau 28,81% dari total penduduk. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di Kota Malang seimbang relatif seimbang dengan persentase penduduk laki-laki 49,32% dan penduduk laki-laki 50,68%.

Artinya, jumlah penduduk Kota Malang yang didominasi oleh penduduk produktif menjadi peluang dalam menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045. Hal tersebut merupakan Bonus Demografi Kota Malang guna menyongsong Revolusi Industri 4.0. Untuk itu, Pemerintah Kota Malang secara terus menerus melakukan upaya dalam meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia guna

Struktur penduduk Kota Malang dilihat dari aspek kualitas tingkat pendidikan selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Malang Tahun 2016-2020**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Tidak Punya Ijazah SD	13.32	16.33	14.76	16.96	12.88
SD/Sederajat	27.94	18.34	18.99	17.65	18.46
SMP/Sederajat	10.80	18.14	17.85	18.89	17.94
SMA/Sederajat	32.53	33.30	33.45	30.17	33.40
Akademi/Universitas	15.41	13.89	14.89	16.32	17.32
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021

Persentase yang tidak punya ijazah SD mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu 12,88% dari 16,96% di tahun 2019. Penurunan ini mengindikasikan angka yang positif. Hal ini mungkin berkaitan dengan naiknya tingkat pendidikan SD/ sederajat dari 17,65% menjadi 18,46%. Adanya penurunan angka lulus SMP/ sederajat dari tahun 2019 18,89% menjadi 17,94% di tahun 2020. Bisa berarti buruk atau bisa berarti baik. Berarti buruk karena mungkin ada putus sekolah sehingga terekam di tingkat pendidikan SD/ sederajat, atau bisa berarti baik karena kenaikan SMA/ sederajat dan juga Akademisi/ Universitas di tahun 2020.

Apabila struktur penduduk Kota Malang dilihat dari aspek kewarganegaraan selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan di Kota Malang Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>WNI</b>	<b>WNA</b>	<b>Total</b>
<b>2016</b>	894.279	1.108	895.387
<b>2017</b>	903.205	960	904.165
<b>2018</b>	914.956	1.086	916.042
<b>2019</b>	926.066	1.219	927.285
<b>2020</b>	932.416	1.323	933.739

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2021



Meningkatnya jumlah WNA pemegang izin tinggal di Kota Malang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 didominasi oleh mahasiswa. Hal ini dikarenakan banyaknya perguruan tinggi di Kota Malang. WNA tersebut berasal dari sejumlah negara yang studi atau menjalani program pertukaran pelajar. Selain itu, WNA di Kota Malang juga berasal dari kelompok sosial budaya, yakni WNA yang masuk ke keluarga. Sedangkan komposisi jumlah penduduk Kota Malang apabila dilihat dari aspek kewarganegaraan WNI pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

Struktur penduduk Kota Malang dapat juga dilihat dari aspek agama yang dianut selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kota Malang**  
**Tahun 2016-2020**

<b>Agama</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Islam	802.581	811.067	822.768	833.858	840.407
Kristen	51.731	52.079	52.328	52.466	52.441
Katolik	34.438	34.439	34.453	34.512	34.471
Hindu	1.483	1.474	1.460	1.492	1.514
Budha	4.881	4.850	4.787	4.703	4.655
Konghucu/ kepercayaan	273	256	246	254	251
<b>Total</b>	<b>895.387</b>	<b>904.165</b>	<b>916.042</b>	<b>927.285</b>	<b>933.739</b>

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2021*

Penduduk Kota Malang pada tahun 2020 mayoritas menganut Agama Islam sebanyak 90,004% , diikuti dengan Kristen Protestan sebanyak 5,616%, Katolik sebanyak 3,692%, Budha sebanyak 0,499%, Hindu sebanyak 0,162%, dan Kong Hu Chu sebanyak 0,027%. Malang menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren, yang terkenal ialah Pesantren Mahasiswa (Pema) Al Hikam, dan juga adanya pusat pendidikan Kristen berupa Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara, salah satunya adalah Sekolah Tinggi Teologi SAAT (Seminari Alkitab Asia Tenggara).

Apabila dilihat dari aspek peristiwa penting pencatatan sipil selama tahun 2016 sampai tahun 2020 mayoritas dikarenakan oleh

peristiwa perpindahan, diikuti dengan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengangkatan anak.

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Peristiwa Penting Pencatatan Sipil**  
**Di Kota Malang Tahun 2016-2020**

<b>Peristiwa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kelahiran	2.595	2.282	12001	2.834	1.521
Kematian	1.909	4.096	5.080	1.624	1.333
Migrasi keluar	15.427	11.241	11.498	12.154	12.256
Migrasi Masuk	N.A.	22.117	24.529	22.224	18.505
Perkawinan	392	369	74	449	N.A.
Perceraian	73	59	9	87	N.A.
Pengangkatan Anak	6	5	2	9	N.A.

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2021*

Table 2.7 menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan migrasi masuk ke Kota Malang sangat menurun drastis. Dimana tahun sebelumnya 2019 migrasi masuk sebanyak 22.224 jiwa dan pada 2020 turun sebanyak 18.505. penurunan migrasi masuk ini adalah salah satu penyebab turun pula laju pertumbuhan penduduk Kota Malang yang menjapi angka 0,28%.

### **2.1.5 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD Tahun 2018-2023**

Berikut akan disajikan data capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada RPJMD tahun 2018-2023:

**Tabel 2.8**  
**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan**  
**Pemerintah Daerah RPJMD Tahun 2018-2023**

No.	Indikator	Kondisi	Target		Realisasi	
		Awal	2018	2019	2020	2019
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,0	81,43	81,86	<b>81,320</b>	<b>81,450</b>
2.	Indeks Pendidikan	0,770	0,780	0,790	<b>0,767</b>	<b>0,768</b>

3.	Indeks Kesehatan	0,814	0,814	0,816	0,818	0,819
4.	Indeks Daya Beli	0,846	0,847	0,848	0,858	0,856
5.	Pertumbuhan Ekonomi	5,72%	5,75%	5,8%	<b>5,73%</b>	<b>-2,26%</b>
6.	Gini Rasio	0,41	0,38	0,37	0,342	<b>0,395</b>
7.	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	N/A	6	6,1	6,1	<b>-13,48</b>
8.	IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)	3,75	3,90	4,05	4,14	4,06
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	82,15	82,92	83,69	<b>65,27</b>	<b>75,54</b>
10.	Angka Kemiskinan	4,10	3,91	3,76	<b>4,07</b>	<b>4,44</b>
11.	Indeks Modal Sosial	79,20	81,36	83,52	<b>80,88</b>	<b>81,20</b>
12.	Persentase Penurunan PMKS	-2,23%	5%	5%	3,31%	5,02%
13.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,820	0,836	0,852	<b>0.846</b>	<b>0.830</b>

14.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,71	96,8	96,90	<b>94,72</b>	<b>94,97</b>
15.	Indeks Reformasi Birokrasi	68,05	72,00	74,00	<b>69,67</b>	<b>69,72</b>
16.	Persentase Perda yang ditegakkan	21%	25%	40%	26,37%	54%
17.	Nilai SAKIP	70,96	75,65	80,5	75,00	80,50
18.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	Maturitas SPIP	3,045	3,50	4	<b>3,045</b>	<b>3,045</b>
20.	Rasio PAD	0,22	0,24	0,26	0,30	<b>0,25</b>
21.	Indeks Profesionalitas ASN	64,00	71,46	72,92	<b>66,61</b>	<b>67,06</b>
22.	Indeks Kematangan SPBE	N/A	3,8	4,09	<b>2,85</b>	<b>3,70</b>

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Dari Tabel 2.8 dapat diketahui bahwa beberapa indikator kinerja penyelenggaraan daerah yang tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan adalah indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator indeks pendidikan, indikator pertumbuhan ekonomi, indikator gini ratio, indikator persentase pertumbuhan ekonomi kreatif, indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD), indikator angka kemiskinan, indikator indeks modal sosial, indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG), indikator indeks reformasi birokrasi, indikator indikator maturitas SPIP, indikator indeks profesionalitas ASN, dan indikator indeks kematangan SPBE.

Tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD salah satunya menjadi dasar dalam pertimbangan untuk melakukan review target pada perubahan RPJMD. Selain itu juga akan disesuaikan dengan prioritas dari misi Kota Malang dan juga menyesuaikan kondisi dengan adanya bencana pandemic COVID19.

## **2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan tentang kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kondisi kesejahteraan sosial, serta kondisi seni budaya dan olah raga di Kota Malang.

### **2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Berikut adalah indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kota Malang.

#### **A. Pertumbuhan PDRB**

Pada tahun 2020 lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi tertinggi bagi PDRB Kota Malang sebanyak 28,09%, Kontribusi kedua terbesar pada tahun 2020 ditunjukkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi rata-rata pertahun sebesar 26.50% terhadap PDRB Kota Malang. Kemudian ketiga diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi yang kontribusi mencapai rata-rata 12,90% terhadap PDRB Kota Malang tahun 2020. Sementara sektor lainnya hanya memberikan kontribusi dibawah 9%. Secara umum, jika melihat data kontribusi setiap lapangan usaha dan dalam kurun waktu tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peranan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih belum tergeser oleh lapangan usaha lainnya.

Penyumbang terkecil pada struktur ekonomi Kota Malang di Tahun 2020 adalah pengadaan listrik dan gas sebesar 0,03%. selanjutnya diikuti oleh sector pertambangan dan penggalian dengan

kontribusi sebesar 0,07% serta sektor lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan kontribusi sebesar 0,19%.

**Tabel 2.9**  
**Kontribusi Lapangan Usaha di Kota Malang Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,29	0,27	0,26	0,27	0,27
2	Pertambangan dan Penggalian	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07
3	Industri Pengolahan	25,40	25,23	25,47	25,73	26,50
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19	0,19	0,18	0,18	0,19
6	Konstruksi	12,92	13,07	12,78	12,61	12,90
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	29,54	29,29	29,61	29,46	28,09
8	Transportasi dan Pergudangan	2,45	2,57	2,56	2,61	2,29
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,90	5,02	5,00	5,17	4,60
10	Informasi dan Komunikasi	3,98	4,03	3,94	3,89	4,44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,04	2,99	2,95	2,84	2,96
12	Real Estate	1,41	1,39	1,43	1,45	1,51
13	Jasa Perusahaan	0,78	0,78	0,81	0,82	0,84
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,48	1,46	1,48	1,48	1,52
15	Jasa Pendidikan	8,13	8,23	8,13	8,06	8,53
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,50	2,57	2,53	2,59	2,89
17	Jasa Lainnya	2,87	2,79	2,76	2,73	2,38
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021

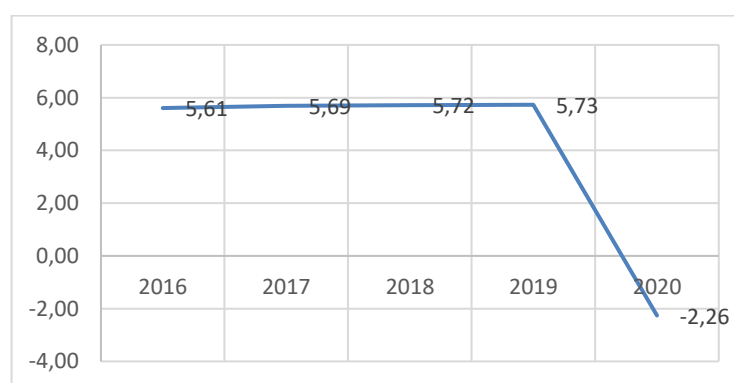
Berikut pada tabel 2.9 adalah data capaian Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) pada tahun 2020.

**Tabel 2.10**  
**Produk Domestik Regional Bruto di Kota Malang Tahun 2020**

No	Uraian	PDRB-ADHB	PDRB-ADHK
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	196.260.900.000,00	116.828.900.000,00
2	Pertambangan dan Penggalian	51.556.500.000,00	32.646.480.000,00
3	Industri Pengolahan	19.125.488.500.000,00	11.952.144.040.000,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	24.932.700.000,00	19.979.140.000,00
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	136.310.500.000,00	113.160.210.000,00
6	Konstruksi	9.310.005.900.000,00	6.856.176.770.000,00

No	Uraian	PDRB-ADHB	PDRB-ADHK
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.269.348.900.000,00	15.218.984.630.000,00
8	Transportasi dan Pergudangan	1.650.137.300.000,00	1.211.845.840.000,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.317.651.900.000,00	2.212.930.860.000,00
10	Informasi dan Komunikasi	3.202.634.600.000,00	2.944.817.340.000,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.132.907.400.000,00	1.352.484.680.000,00
12	Real Estate	1.087.749.800.000,00	815.548.320.000,00
13	Jasa Perusahaan	608.071.900.000,00	403.886.800.000,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.095.956.100.000,00	683.636.310.000,00
15	Jasa Pendidikan	6.154.057.300.000,00	4.268.995.140.000,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.083.964.200.000,00	1.593.122.310.000,00
17	Jasa Lainnya	1.716.153.900.000,00	1.357.342.750.000,00
<b>Total</b>		<b>72.163.188.500.000,00</b>	<b>51.154.530.520.000,00</b>

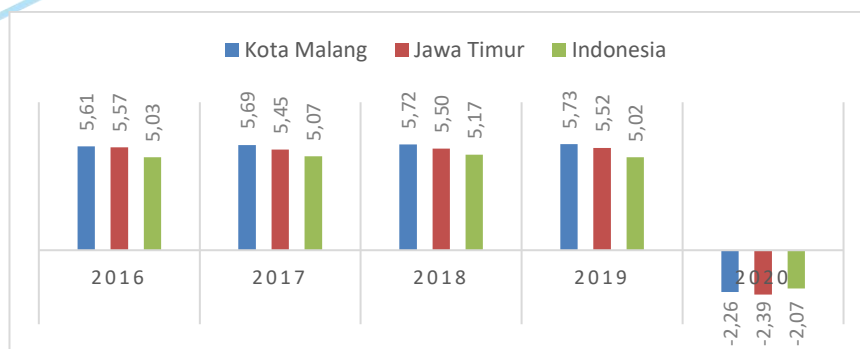
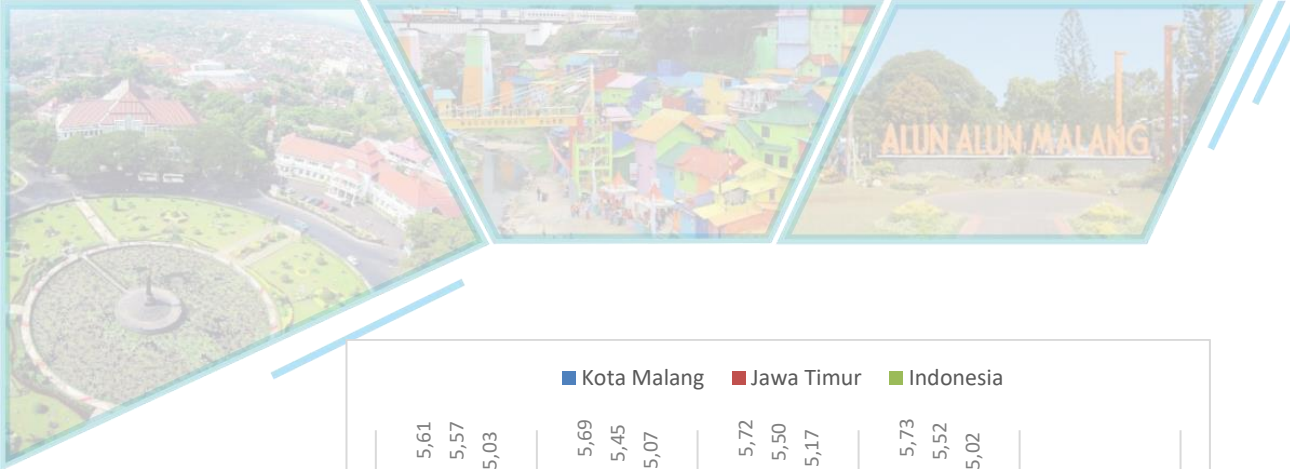
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021



**Gambar 2.13 Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2016-2020**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021

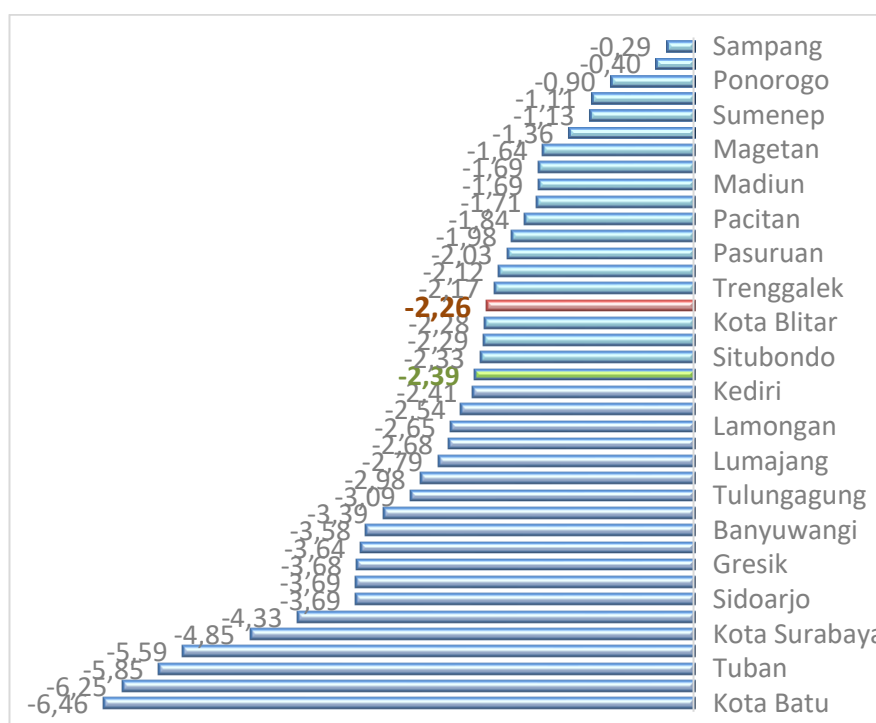
Selain PDRB, tingkat pertumbuhan ekonomi juga mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang mengalami tren positif dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi penurunan tajam. Dimana pada tahun 2019 pertumbuhan adalah sebesar 5,73%, tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,26%.



**Gambar 2.14 Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021

Pertumbuhan ekonomi Kota Malang memiliki kecenderungan masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Seluruh kabupaten/kota se Jawa Timur mengalami kontraksi sehingga pertumbuhan negatif. Akan tetapi diantara kota-kota di Jawa Timur lainnya, pertumbuhan ekonomi Kota Malang tertinggi diantara wilayah kota lain.



**Gambar 2.15 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2020**

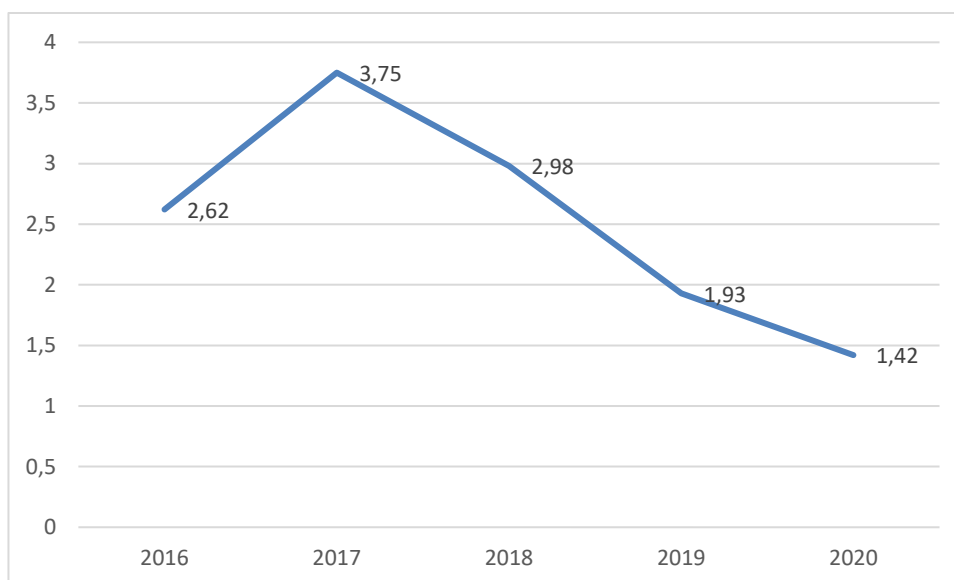
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2021



## B. Laju Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Faktor dominan yang mempengaruhi inflasi pada tahun-tahun tersebut sebagian besar disebabkan karena adanya harga-harga untuk pendidikan, rekreasi dan olahraga, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan menempati kedudukan paling atas, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pada bidang tersebut bagi masyarakat Kota Malang semakin banyak yang memicu kenaikan harga dari tahun-tahun sebelumnya sehingga hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Malang sangat membutuhkan sarana pendidikan yang memadai. Lebih dari itu semua, tiga kelompok besar penyumbang inflasi tertinggi di Kota Malang secara tidak langsung telah memicu peningkatan kebutuhan pada kelompok-kelompok lain yang terkait. Perkembangan capaian indikator laju inflasi Kota Malang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



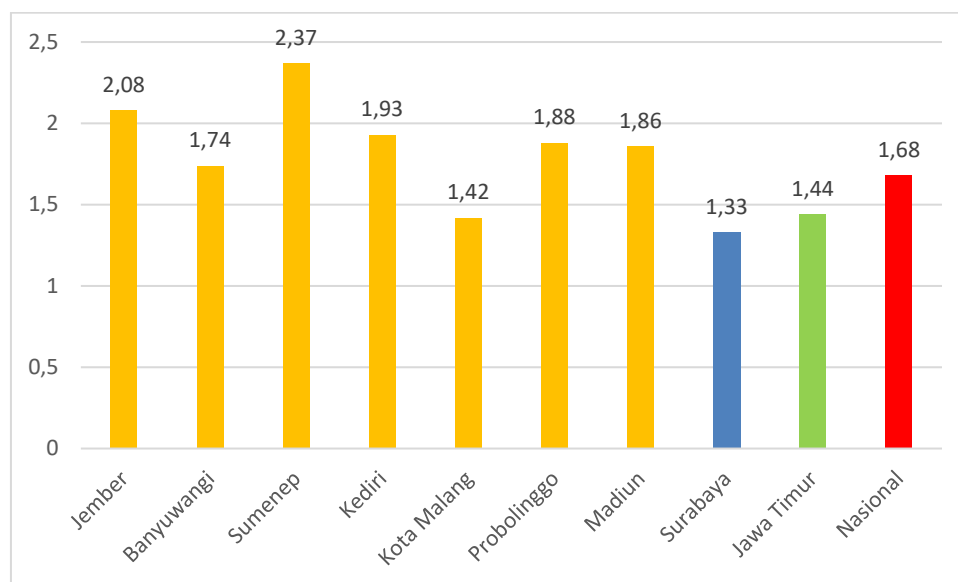
**Gambar 2.16**

### **Perkembangan Inflasi di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021*

Capaian Kota Malang dalam menekan angka inflasi di tahun 2019 terus berusaha dipertahankan dan dioptimalisasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang. Kota Malang mengalami inflasi tahun kalender terendah kedua setelah Kota Surabaya. Inflasi

tahun kalender 2020 Kota Malang mencapai 1,42 persen. Disamping itu, inflasi tahun kalender Jawa Timur sebesar 1,44 persen lebih rendah dari inflasi kalender nasional yakni sebesar 1,68 persen sebagaimana terlihat pada gambar 2.15.



**Gambar 2.17**  
**Perbandingan Inflasi 8 Kota di Jawa Timur dan Nasional**  
**Tahun 2020**

*Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021*

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang, komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi sepanjang tahun 2020 di Kota Malang adalah emas perhiasan, rokok kretek filter, daging ayam ras, minyak goreng, sekolah dasar, bayam, kontrak rumah, tahu mentah, pisang, dan bubur. Sedangkan komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya deflasi adalah angkutan udara, bensin, obat dengan resep, bawang putih, manga, batu bata/batu tela, sabun detergen bubuk/cair, sepatu anak, anggur, dan kopi bubuk.

Emas perhiasan memberikan sumbangan utama terjadinya inflasi sepanjang tahun 2020 disebabkan adanya kenaikan harga yang signifikan pada semester pertama tahun 2020. Emas perhiasan menjadi sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Juli, dan Agustus. Kenaikan terbesar harga emas perhiasan terjadi pada bulan Agustus 2020. Sepanjang

tahun 2020, emas perhiasan memberikan andil kenaikan inflasi sebesar 0,20 persen.

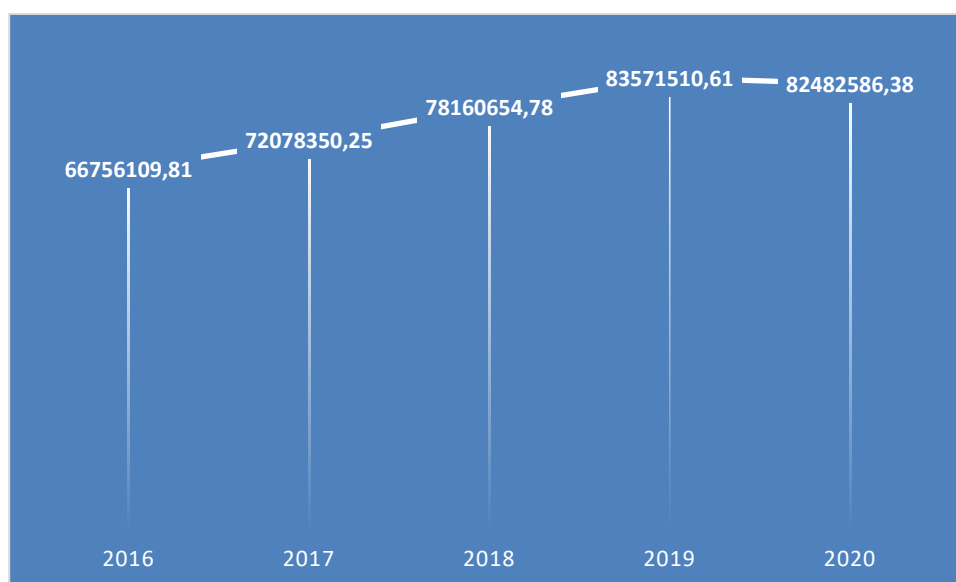
Selain beberapa komoditas yang mendorong inflasi, beberapa komoditas lain justru mampu menahan laju inflasi selama tahun 2020. Komoditas angkutan udara menjadi komoditas utama penghambat inflasi pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan mobilitas masyarakat berkurang. Hal tersebut berimbas pada sisi permintaan jasa transportasi juga ikut berkurang. Komoditas angkutan udara menjadi sepuluh komoditas utama penyumbang deflasi pada bulan Maret, April, Juli, Agustus, dan September. Penurunan terbesar tarif angkutan udara terjadi pada bulan Maret 2020. Selain itu harga bensin juga mengalami penurunan pada tahun 2020. Penurunan harga BBM terjadi pada bulan Januari 2020. Penurunan harga yang dilakukan oleh Pertamina dan beberapa SPBU Swasta ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 187K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensindan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

### **C. PDRB Per Kapita**

Pengertian dari PDRB per kapita adalah nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku per kepala atau per satu orang penduduk. Berdasarkan data perkembangan lapangan usaha dan pertambahan jumlah penduduk, diperoleh data PDRB per Kapita Kota Malang yang menunjukkan perkembangan dengan tren dan tendensi meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku di Kota Malang pada tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

Tahun 2020 pandemi COVID 19 menyebabkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kota Malang turun, sedangkan jumlah penduduk naik. Sehingga nilai PDRB per kapita mengalami penurunan.



**Gambar 2.18**  
**Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kota Malang**  
**Tahun 2016-2020**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021*

#### **D. Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio**

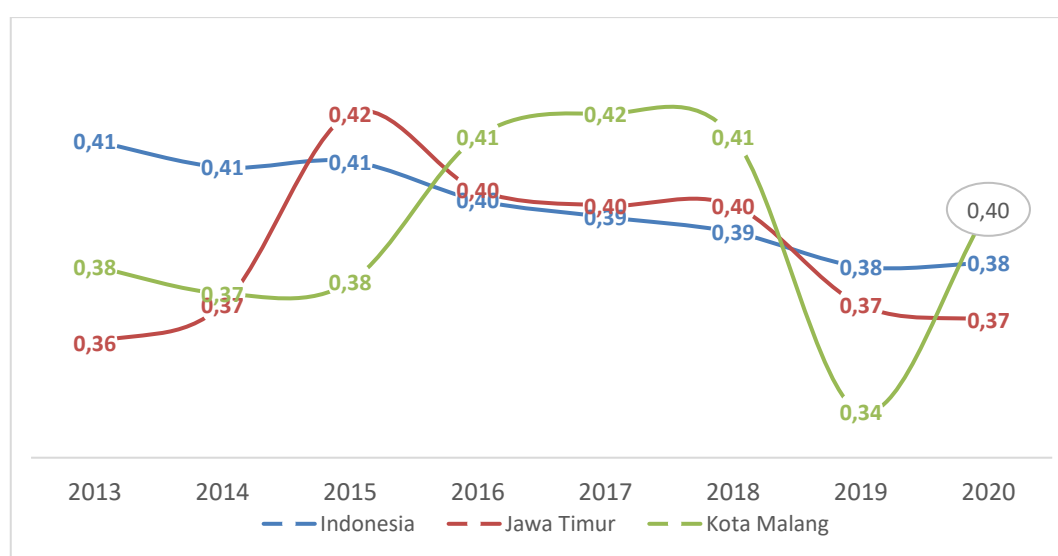
Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995):

- $GR < 0.4$  dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0.4 < GR < 0.5$  dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
- $GR > 0.5$  dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Perbandingan capaian gini ratio Kota Malang dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada Tahun 2013-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

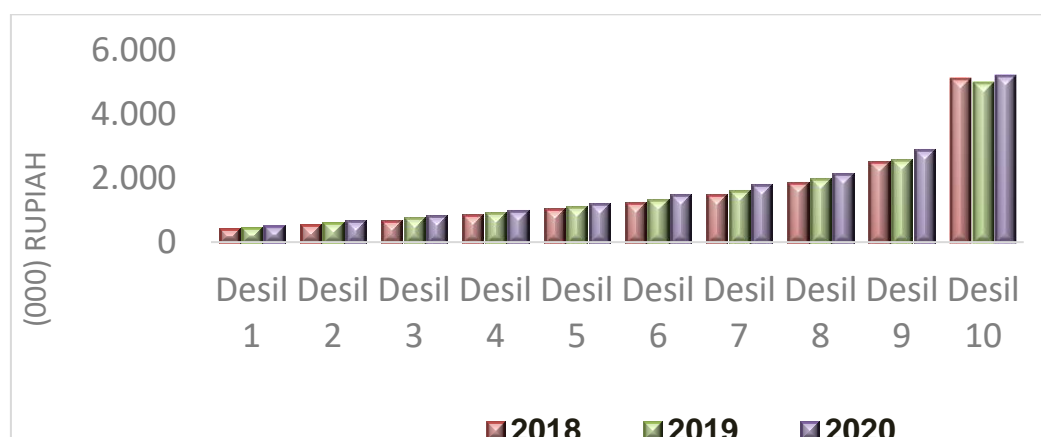


**Gambar 2.19 Gini Ratio Kota Malang, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2013-2020**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, Maret 2021*

Jika diamati lima tahun terakhir, Gini Ratio Kota Malang di tahun 2016 sampai tahun 2018 berada pada kategori ketimpangan sedang (moderat). Hal ini dapat dilihat pada nilai Gini ratio berturut-turut dari tahun 2016 sebesar 0,41, tahun 2017 sebesar 0,42, dan tahun 2018 sebesar 0,41. Sedangkan Gini Ratio pada tahun 2019 mengalami penurunan yang berarti ketimpangan di Kota Malang pada tahun tersebut semakin kecil. Dimana nilai Gini Ratio nya sebesar 0,34. Sehingga Kota Malang pada tahun tersebut pada kategori ketimpangan yang rendah. Akan tetapi adanya pandemic COVID-19 tahun 2020 menyebabkan nilai Gini Ratio kembali meningkat sebesar 0,40 mengembalikan Kota Malang pada kategori ketimpangan sedang. Angka pada tahun 2020 ini juga melampaui angka Gini Ratio Provinsi

Jawa Timur yaitu sebesar 0,37 dan angka Nasional sebesar 0,38. Data ini berdasarkan data Per Maret yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.



**Gambar 2.20 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita per Bulan menurut Desil Tahun 2018-2020**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021*

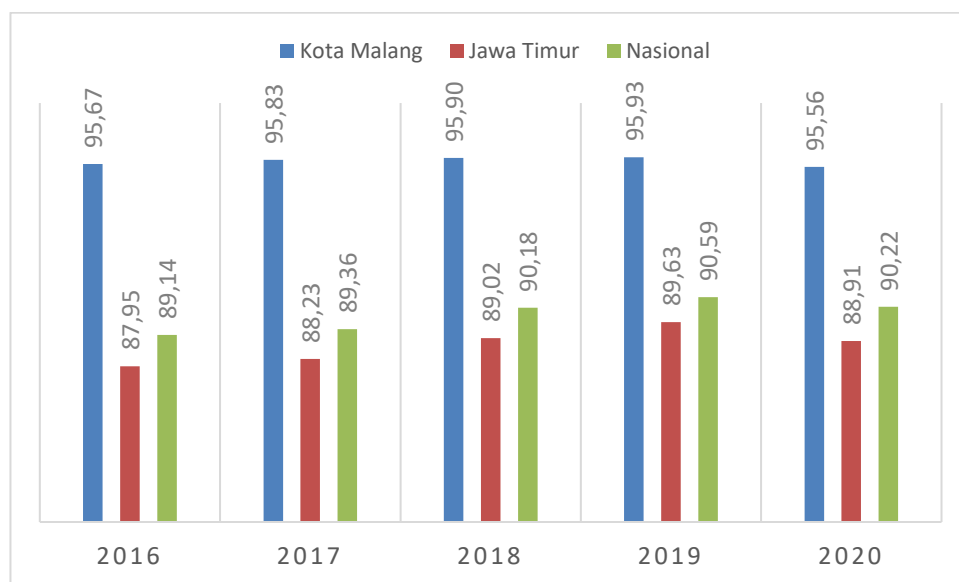
Dinamika pengeluaran masyarakat pada desil 10, berpengaruh besar terhadap angka Gini Ratio. Terlihat juga pada tahun 2019 dimana pengeluaran masyarakat pada desil 10 lebih rendah dari tahun 2018, makan sangat mempengaruhi menurunnya angka Gini Ratio sehingga Kota Malang berada pada kategori ketimpangan rendah. Sedangkan pada tahun 2020 adanya pandemi Covid 19 menyebabkan pengeluaran masyarakat pada desil 8,9 dan 10 cukup naik sehingga sangat mempengaruhi angka Gini Ratio yang turut naik juga kembali pada kategori ketimpangan sedang.

#### **E. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan**

Pada indikator persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Malang selama tahun 2016-2019 menunjukkan tren yang positif, dimana pada setiap tahunnya telah mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada tahun 2020 persentase penduduk diatas garis kemiskinan mengalami penurunan dimana angkanya menjadi 95,53 persen setelah tahun 2019 berada pada nilai 95,93 persen. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, persentase penduduk diatas garis kemiskinan masih lebih baik sebab persentase penduduk diatas garis

kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 sebesar 88,91persen artinya selisih dengan Kota Malang cukup besar yaitu 7,72. Sedangkan persentase penduduk diatas garis kemiskinan

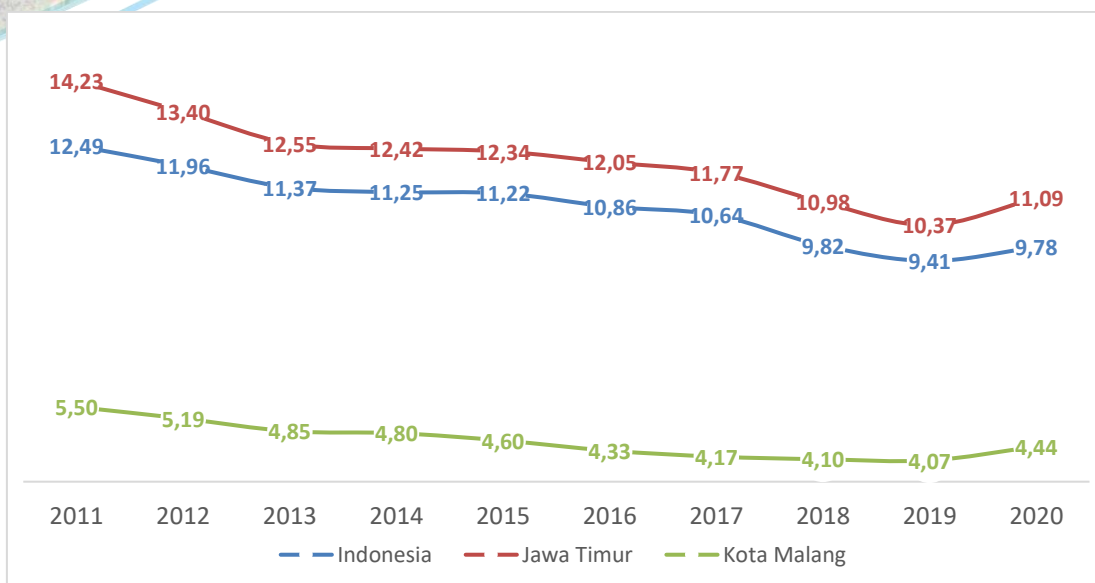
Kota Malang apabila dibandingkan dengan statistik Nasional pada tahun 2020 memiliki selisih sebesar 6,53.



**Gambar 2.21**  
**Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kota Malang**  
**Tahun 2016-2020**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021*

Peningkatan persentase penduduk di atas garis kemiskinan menunjukkan prestasi Pemerintah Kota Malang dalam mengentas kemiskinan. Meskipun demikian, angka kemiskinan masih menjadi prioritas pembangunan pada lima tahun mendatang. Penanggulangan kemiskinan menjadi tugas lintas sektor. Oleh karena itu, dalam TKPKD terdapat beberapa kelompok kerja (pokja). Di antaranya, pokja pengembangan kemitraan, pokja pengaduan masyarakat, kelompok program bantuan sosial terpadu, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pro rakyat. Selain itu, pemerintah juga masih harus menyediakan wadah bagi keterampilan yang sudah dihasilkan oleh masyarakat.



**Gambar 2.22**  
**Persentase Penduduk Miskin Kota Malang, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2011-2020**

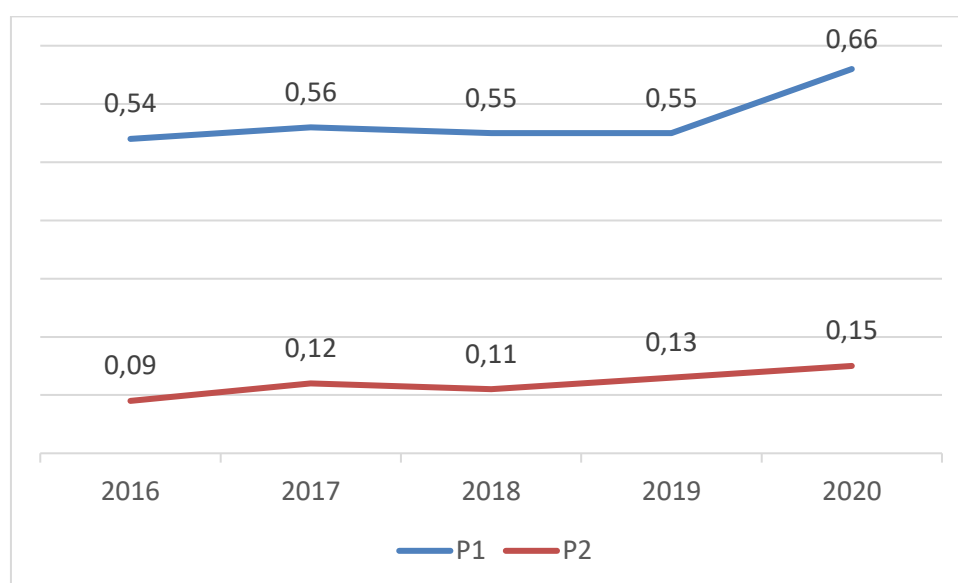
*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, Maret 2021*

Pada indikator persentase penduduk miskin di Kota Malang pada tahun 2016-2019 mengalami penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2019 dengan nilai 4,07 persen merupakan angka terendah dari 10 tahun terakhir, hal ini mengindikasikan upaya Pemerintah Kota Malang dalam mengurangi kemiskinan menunjukkan kinerja lebih baik. Akan tetapi pandemi COVID 19 pada tahun cukup mempengaruhi dari segi ekonomi sehingga berpengaruh pada meningkatnya angka kemiskinan menjadi 4,44 persen atau 38,77 ribu jiwa.

Angka kemiskinan Kota Malang pada tahun 2020 naik sebesar 0,37% jika dibandingkan tahun 2019. Data pada Gambar 2.20 adalah data per Maret. Kenaikan angka kemiskinan terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, bahkan dunia. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak bulan Maret 2020 mengharuskan negara memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi berdampak pada penurunan konsumsi masyarakat dan produktivitas industri. Pemberlakuan PSBB juga mengakibatkan sektor pariwisata terpuruk dan produktivitas UMKM pada sektor pariwisata menurun drastis. Hal ini mengakibatkan sebagian besar masyarakat mengalami



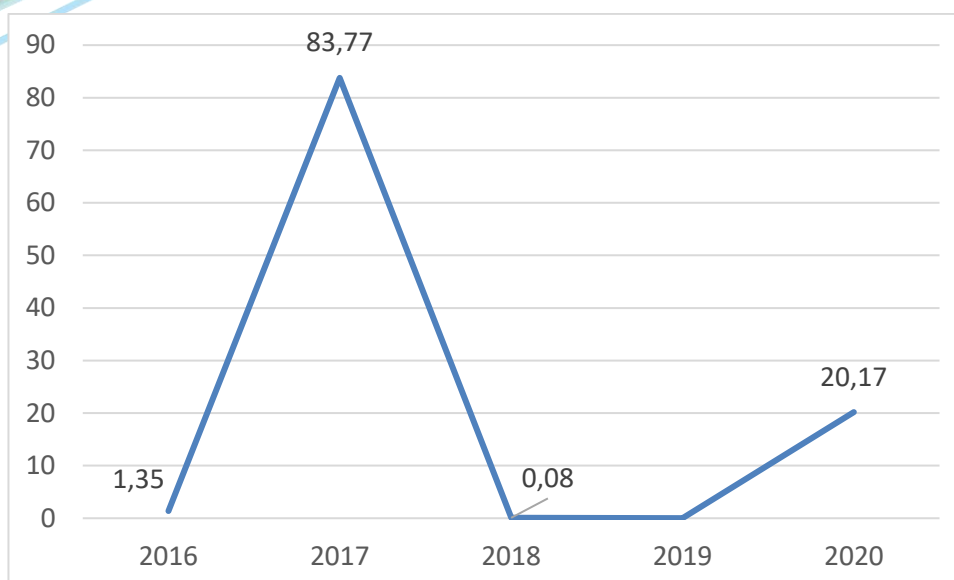
penurunan pendapatan dan pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga melambat. Selain itu Indeks Kelemahan Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2020, menunjukkan bahwa kondisi masyarakat miskin di Kota Malang semakin senjang di bawah garis kemiskinan dan beragam antar penduduk miskin.



**Gambar 2.23**  
**Persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Malang Tahun 2016-2020**  
*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021*

#### **F. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Pemulihan/Pengembangan Kemampuan dan Pelatihan Ketrampilan**

Berikut adalah perkembangan capaian indikator persentase PMKS yang memperoleh bantuan pemulihan/pengembangan kemampuan dan pelatihan ketrampilan di Kota Malang dari tahun 2016 sampai tahun 2020.



**Gambar 2.24**  
**Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan**  
**Pemulihan/Pengembangan Kemampuan dan Pelatihan**  
**Keterampilan di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2021*

Nilai persentase PMKS yang memperoleh bantuan pemulihan/pengembangan kemampuan dan pelatihan menunjukkan bahwa program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang kurang berhasil, sehingga perlu perhatian untuk dicari penyebab dan juga inovasi.

### 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan sosial. Berikut ini indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan sosial di Kota Malang.

#### A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah proses pembangunan yang ditujukan untuk pembangunan sumberdaya manusia. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan

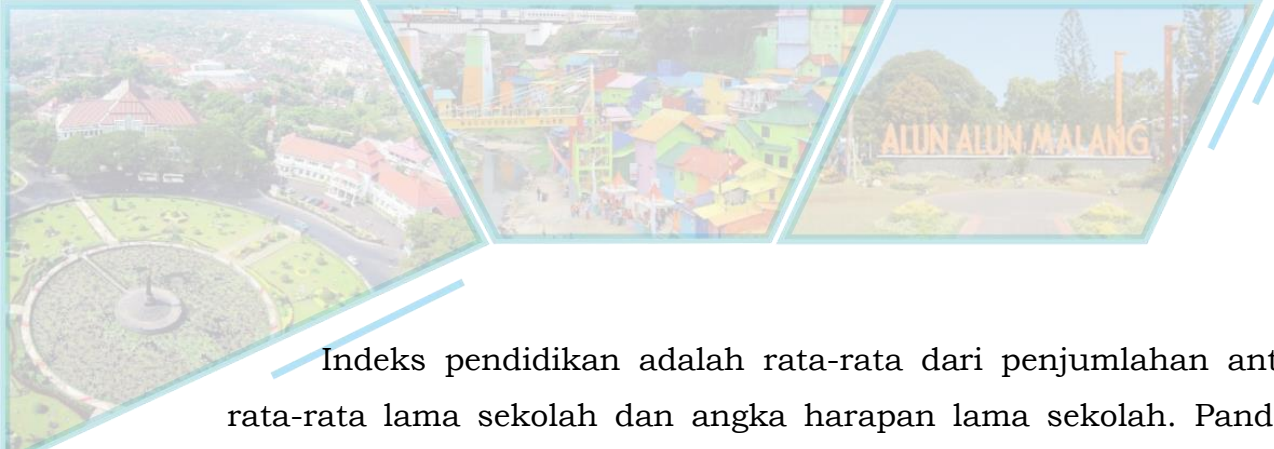
mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik.

**Tabel 2.11 Nilai IPM Kota Malang dan Komponennya  
Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	IPM	80,46	80,65	80,89	81,32	81,45
2.	Indeks Pendidikan	76,52	76,58	76,64	76,71	77,02
3.	Indeks Kesehatan	81,05	81,18	81,43	81,77	81,95

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang tahun 2020 berdasarkan publikasi BPS Kota Malang adalah sebesar 81,45. Kota Malang menduduki peringkat ke-2 di Jawa Timur di tahun 2020 dengan berkategori “IPM sangat tinggi”. Nilai IPM tumbuh sebesar 0,16% jika dibandingkan tahun 2019. Pertumbuhan IPM pada tahun 2020 lebih rendah dari pertumbuhan IPM Kota Malang tahun-tahun sebelumnya yang mencapai rata-rata 0,52%. Pandemi Covid-19 juga membawa dampak terhadap pembangunan manusia di Kota Malang. Perlambatan pertumbuhan IPM pada 2020 sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan dan rata-rata lama sekolah penduduk Kota Malang. Indikator rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan turun menjadi Rp16.593 juta pada 2020 dari Rp16.666 juta pada 2019. Indikator rata-rata lama sekolah di Kota Malang pada tahun 2020 juga mengalami pertumbuhan yang lambat yaitu hanya tumbuh sebesar 0,1% jika dibandingkan tahun 2019. Peningkatan nilai IPM Kota Malang terjadi karena adanya peningkatan pada semua komponen pembentuk IPM, yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Masing-masing komponen tersebut pada setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup bagus. Sehingga IPM Kota Malang mengalami kenaikan secara signifikan.



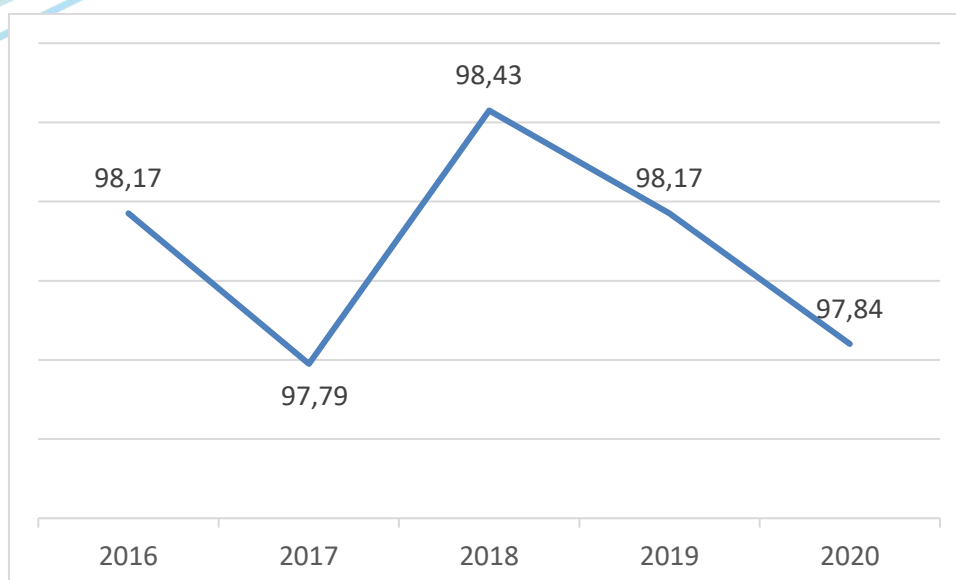
Indeks pendidikan adalah rata-rata dari penjumlahan antara rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Pandemi COVID-19 tidak mempengaruhi secara signifikan pada Indeks Pendidikan. Akan tetapi jika dilihat angka pencapaiannya masih dibawah target yang ditetapkan. Sebelumnya pada table 2.8 juga ditampilkan indeks pendidikan yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada RPJMD, dimana terlihat bahwa meskipun indeks pendidikan naik tapi belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Rata-rata kenaikan indeks pendidikan tiap tahunnya tidak sampai mencapai 1 poin. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk mereview target indeks pendidikan pada perubahan RPJMD tahun 2018-2023 ini.

Penyusun Indeks Kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH), di mana AHH adalah rata-rata estimasi lamanya tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup, dengan pendekatan data angka bayi lahir hidup dan angka bayi lahir mati. Indeks kesehatan di Kota Malang pada lima tahun terakhir memiliki capaian yang meningkat, maka tidak menutup kemungkinan indeks kesehatan ini akan mengalami penurunan karena pengaruh AHH yang menurun dan juga kelangsungan hidup bayi juga memperlihatkan angka yang menurun. AHH dan kelangsungan hidup bayi akan dibahas tersendiri pada sub bab selanjutnya di Bab 2 ini.

## **B. Aspek Pendidikan**

### **1. Angka Melek Huruf**

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Perkembangan capaian indikator angka melek huruf (AMH) di Kota Malang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



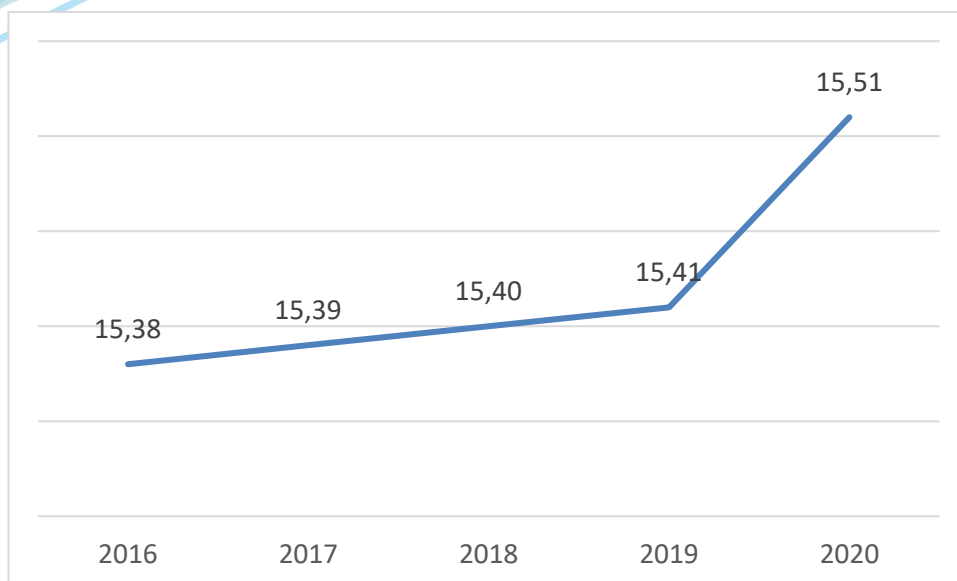
**Gambar 2.25 Perkembangan Capaian Indikator Angka Melek Huruf Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional, BPS Kota Malang 2021*

Angka melek huruf Kota Malang perlu mendapat perhatian, dimana terjadi penurunan berturut dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Meskipun angka melek huruf yang dicapai Kota Malang masih tergolong sangat baik, tapi mengingat Kota Malang merupakan Kota Pendidikan, maka hal ini tidak bisa di abaikan. Untuk itu perlu adanya program dan kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan angka melek huruf di Kota Malang.

## **2. Angka Harapan Lama Sekolah**

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur 7 tahun di masa mendatang. HLS di Kota Malang tahun 2020 meningkat cukup tajam dari sebelumnya tahun 2019 nilai HLS sebesar 15,41, maka di tahun 2020 menjadi 15,51. Hal ini berarti lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur 7 tahun di masa mendatang ada 15,51 tahun.

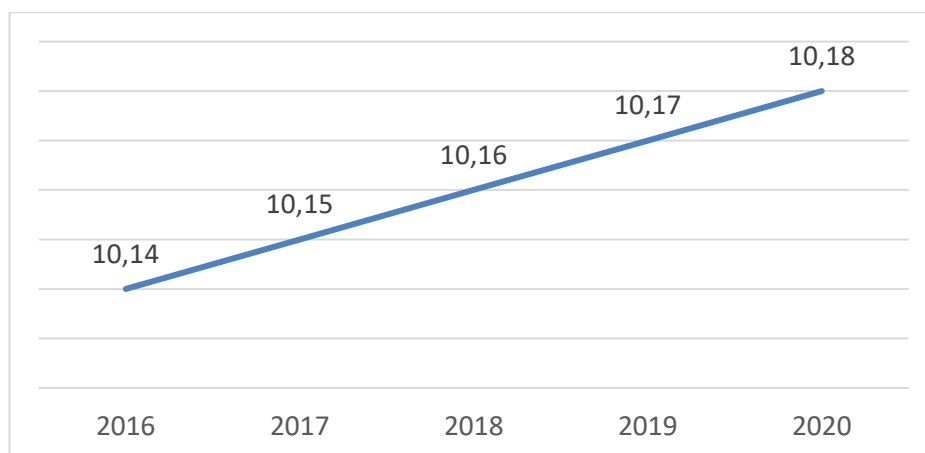


**Gambar 2.26**  
**Perkembangan Capaian Indikator Harapan Lama Sekolah**  
**Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021*

### 3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.



**Gambar 2.27**  
**Perkembangan Capaian Indikator Rata-Rata Lama Sekolah**  
**Kota Malang Tahun 2016-2020**

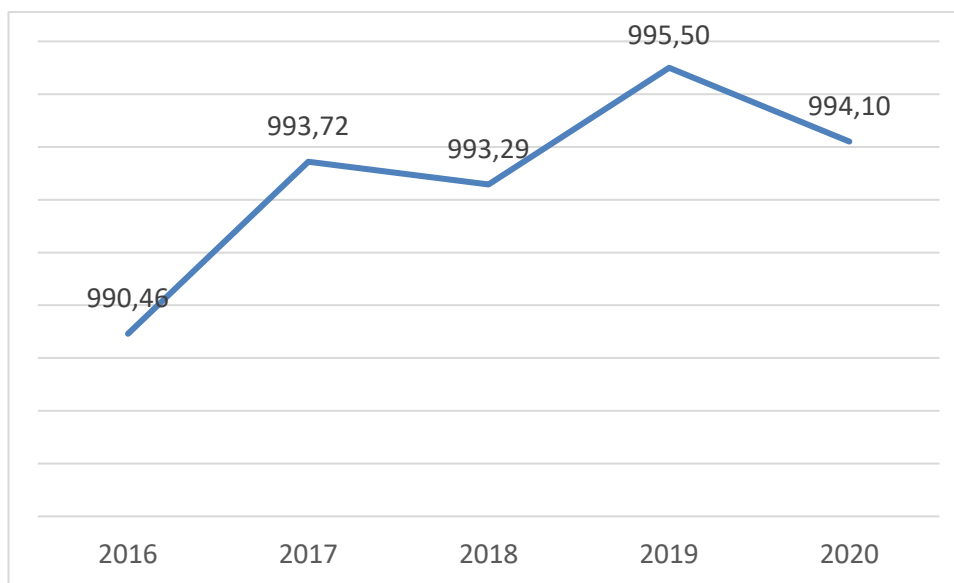
*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021*

Gambar 2.25 menunjukkan bahwa jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berumur 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terus meningkat.

## C. Aspek Kesehatan

### 1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi dapat diketahui dari indikator angka kematian bayi. Perkembangan capaian indikator Angka Keberlangsungan Hidup Bayi di Kota Malang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada diagram berikut:



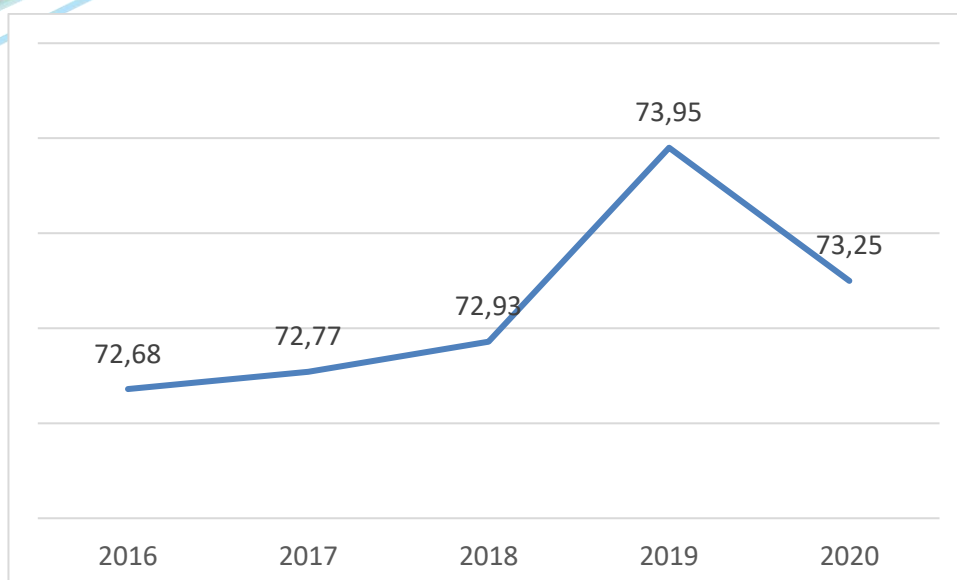
**Gambar 2.28**  
**Perkembangan Capaian Angka Kelangsungan Hidup Bayi**  
**Di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2021*

Angka keberlangsungan hidup bayi menunjukkan angka yang fluktuatif naik turun dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya suatu program dan kegiatan yang terus mendorong angka itu agar mempunyai trend positif. Termasuk mencermati penyebabnya dan mencari solusi.

### 2. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas. Perkembangan capaian indikator Usia Harapan Hidup di Kota Malang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 2.29**  
**Perkembangan Capaian Indikator Angka Harapan Hidup (AHH)**  
**Di Kota Malang Tahun 2016-2020**

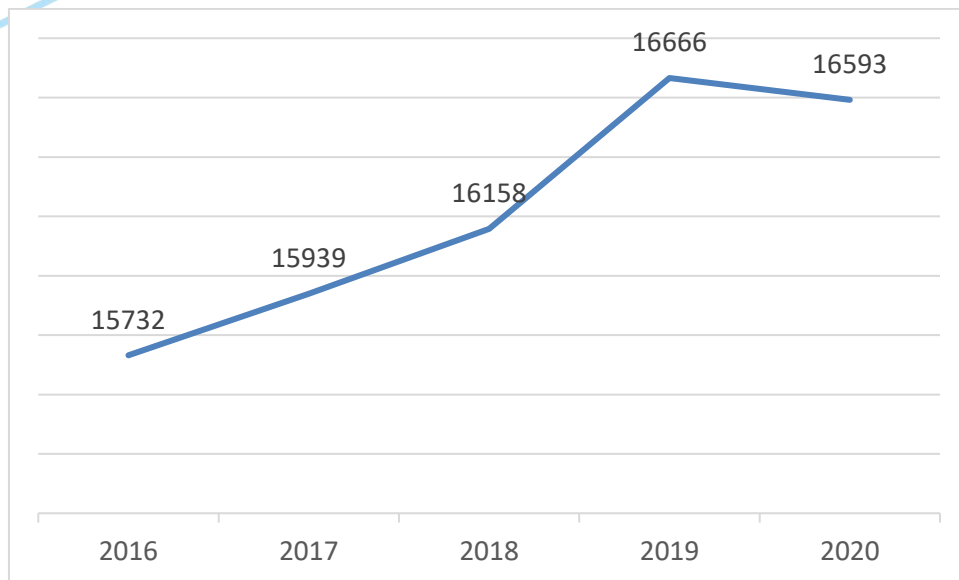
*Sumber: Bada Pusat Statistik Kota Malang, 2021*

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami kenaikan terutama lonjakan kenaikan di tahun 2019 yang mencapai angka AHH sebesar 73,95 setelah sebelumnya tahun 2018 AHH sebesar 72,93. Akan tetapi pada tahun 2020 kembali AHH kembali turun menjadi 73,25. Hal ini erat kaitannya dengan adanya pandemi COVID 19.

#### **D. Pengeluaran Per Kapita**

Kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa, dengan nilai mata uang yang distandarkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID 19, daya beli masyarakat menurun.





**Gambar 2.30**

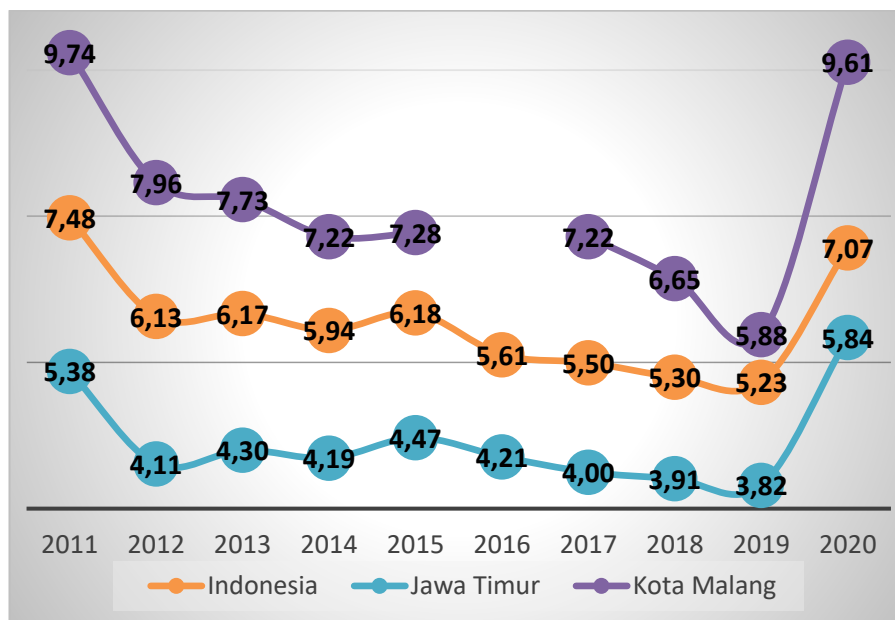
**Pengeluaran Per Kapita di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021*

**E. Aspek Tenaga Kerja**

**1. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Berikut gambaran TPT di Kota Malang pada tahun 2011-2020



**Gambar 2.31**

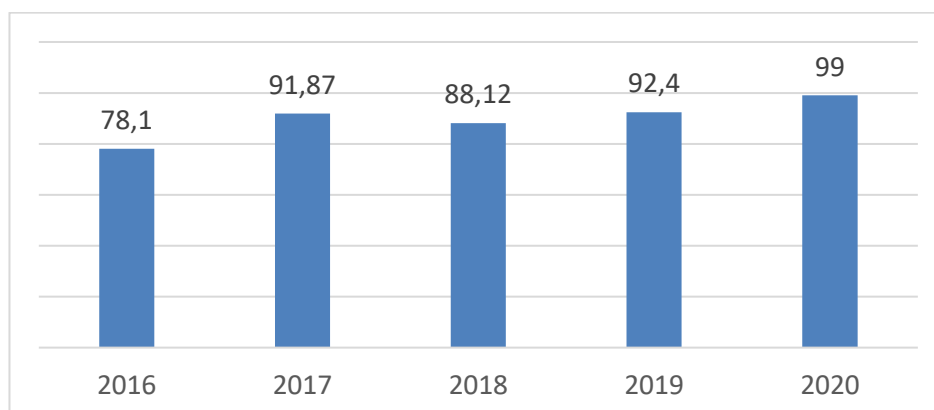
**Tingkat pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 2011-2020**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021*

TPT di Kota Malang pada tahun 2020 meningkat cukup tajam, dimana di tahun sebelumnya 2019 sebesar 5,88 langsung melonjak diangka 9,61. Angka ini adalah pengaruh dari terkontraksinya perekonomian Kota Malang akibat pandemi COVID 19. Dari total penduduk usia kerja sebanyak 708.621 orang, sebanyak 19,92% diantaranya terdampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 terdapat 18,5 ribu orang penganggur baru yang disebabkan oleh pandemi COVID 19. TPT Kota Malang tercatat berada pada urutan ke tiga setelah Kota Sidoarjo dan Kota Surabaya.

#### **F. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan**

Pada tahun 2016 pencapaian skor Pola Pangan Harapan di Kota Malang mencapai 78,1, kemudian pada tahun 2017 capaian skor Pola Pangan Harapan di Kota Malang mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu menjadi sebesar 91,87. Pada tahun 2018, capaian skor Pola Pangan Harapan di Kota Malang mengalami penurunan menjadi sebesar 88,12. Pada tahun 2019 capaian skor Pola Pangan Harapan di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi sebesar 92,4. Sedangkan tahun 2020 meningkat signifikan menjadi 99. Pencapaian di tahun 2020 dikarenakan meningkatnya konsumsi masyarakat yang sesuai B2SA terutama pada konsumsi buah dan sayur.



**Gambar 2.32**  
**Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Malang**  
**Tahun 2016-2020**

*Sumber Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, 2021*

### 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas fokus seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. Pembangunan di bidang seni, budaya dan olahraga merupakan suatu hal yang sangat penting. Sebab hal ini berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat serta menunjukkan sebuah jati diri dari suatu daerah. Analisis kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator berikut:

#### A. Indikator Seni dan Budaya

**Tabel 2.12**  
**Indikator Seni dan Budaya Tahun 2016 - 2020**  
**Kota Malang**

No.	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	8	3	5	5	9
2.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	-	-	119	199	199

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Penyelenggaraan festival seni dan budaya tahun 2020 mengalami kenaikan meskipun dalam kondisi COVID 19. Tentu saja penyelenggaraan ini diselenggarakan menggunakan media digital dan juga sesuai protokol kesehatan. Hal ini dilakukan karena pekerja seni sangat terimbas dengan adanya pandemi ini, sehingga lewat penyelenggaraan festival seni dan budaya melalui *platform* digital diharapkan bisa mendorong kreativitas para pekerja seni. Sedangkan untuk jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi jumlahnya tetap dari tahun 2018 yaitu 199 karya budaya.

#### B. Indikator Olahraga

**Tabel 2.13**  
**Indikator Olahraga Tahun 2016 - 2020**  
**Kota Malang**

No.	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	jumlah klub olahraga	185	185	185	185	185

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, 2021

Untuk data jumlah klub olahraga tidak ada perkembangan atau penambahan. Jumlah klub olahraga yang tidak ada penambahan atau berkurang ini juga menjadi perhatian, dimana data yang stagnan perlu dimonitoring dan di review. Hal ini terkait ke efektifan dan proses pembinaan klub olahraga.

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum ini menjelaskan terkait dengan layanan urusan pemerintahan wajib, baik dasar maupun non dasar; layanan urusan pilihan dan layanan urusan penunjang

### 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

Pada urusan wajib Pemerintah Daerah Kota Malang dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

#### 2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Adapun urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial. Berikut ini merupakan capaian kinerja urusan wajib pelayanan dasar.

#### A. Pendidikan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pendidikan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.14**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Pendidikan**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2020**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APK PAUD	82,39	84,28	86,09	61,15	62	56,49
2.	Angka Partisipasi Kasar						
	a. APK SD/MI/Paket A	95,99	95,86	105,89	110,47	110,48	100,98

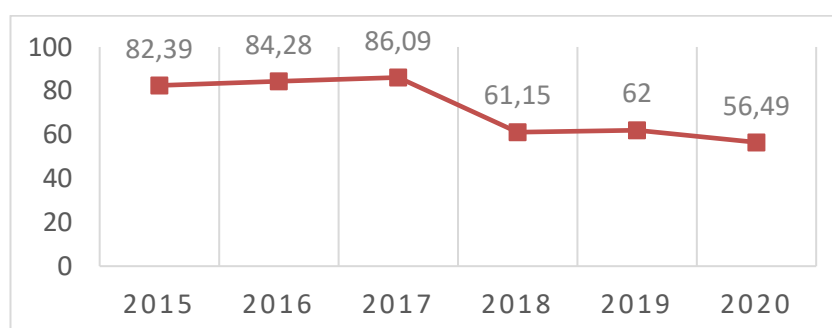
No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	b. APK SMP/MTs/Paket B	76,83	85,13	100,22	83,21	98,08	99,79
3.	Angka partisipasi murni						
	a. APM SD/MI/Paket A	85,87	82,79	95,81	99,48	99,5	96,64
	b. APM SMP/MTs/Paket B	58,52	62,99	81,51	83,05	83,19	85,26
4.	Angka Partisipasi sekolah						
	a. APS SD/MI/Paket A	104,2	105,36	72,87	100	100	99,36
	b. APS SMP/MTs/Paket B	104,37	106,35	104,87	95,52	95,59	95,19
5.	Angka Putus Sekolah						
	a. APS SD/MI	0,66	0,06	0,04	0	0,04	0,01
	b. APS SMP/MTs	0,22	0,18	0,09	0	0,29	0,08
6.	Angka Melanjutkan						
	a. AM dari SD/MI ke SMP/MTs	104,61	115,15	112	96,64	96,19	96,08
	b. AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	157,29	106,55	103,48	99,98	99,98	NA
7.	Persentase guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	42,45	81,47	86,59	75	86,6	84,11

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, 2021

### 1. Angka Partisipasi Kasar PAUD

PAUD terbagi menjadi 2 jenjang yaitu PAUD Non Formal adalah TPA, KB, dan SPS, sedangkan PAUD Formal adalah TK. Keberhasilan program ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kota Malang. Program yang dijalankan Dinas Pendidikan Kota Malang adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tujuan strategis, pemerataan akses pendidikan formal dan non formal.

Adapun tingkat capaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dapat dilihat pada grafik berikut ini:



**Gambar 2.33**  
**Capaian Angka Partisipasi Kasar PAUD**  
**Di Kota Malang Tahun 2015-2020**

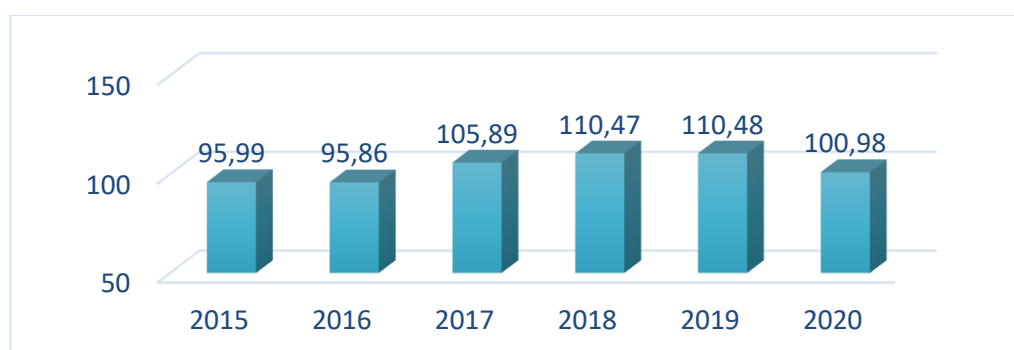
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, 2021

Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terlihat adanya peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan untuk meningkatkan jumlah layanan PAUD formal maupun nonformal dengan memperluas akses layanan PAUD yang mengacu program pemerintah dengan satu kelurahan satu layanan PAUD melalui penambahan dana bantuan biaya operasional PAUD dan sosialisasi ke masyarakat juga semakin ditingkatkan dengan menggalakkan PAUD di masyarakat luas, penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, rehabilitasi gedung, penguatan kurikulum serta pembinaan kesiswaan PAUD di Kota Malang. Namun permasalahan yang terjadi masih banyak lembaga PAUD di Kota Malang yang belum terakreditasi.

Pada tahun 2020 pandemi COVID 19 menyebabkan Capaian angka partisipasi kasar PAUD di Kota Malang turun. Adanya pemberlakuan sekolah daring menyebabkan orang tua lebih memilih tidak memasukkan anaknya untuk sekolah PAUD.

## 2. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Capaian indikator kinerja angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A di Kota Malang mulai tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan.



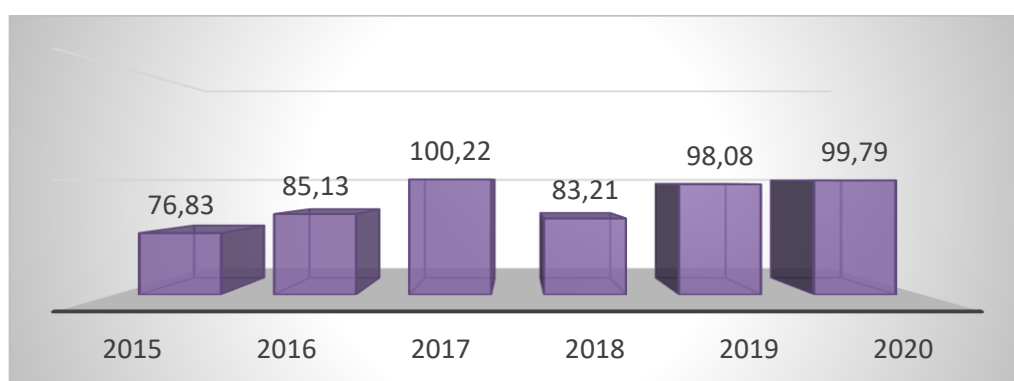
**Gambar 2.34**

### **Capaian Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A Di Kota Malang Tahun 2015-2020**

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, 2021*

Pada beberapa tahun terakhir capaian APK SD/MI/Paket A melebihi 100 karena banyak siswa yang dari luar kota Malang yang menjadi peserta didik di Kota Malang. Selain dari itu, ada siswa yang masuk SD sebelum usia 7 tahun atau sebelum usia sekolah dasar, sehingga jumlah siswa yang bersekolah di sekolah dasar lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk yang berada di usia sekolah dasar itu sendiri, dan hal tersebut menjadi salah satu factor yang membuat Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar lebih dari 100%. Hal inilah yang menjadikan angka partisipasi kasar SD di Kota Malang mengalami penurunan di tahun 2020. Orang tua siswa kemungkinan lebih merasa aman untuk menyekolahkan anaknya di wilayahnya sendiri atau menunda anaknya sampai cukup umur untuk masuk SD karena adanya pandemi COVID 19.

Capaian indikator kinerja angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di Kota Malang pada tahun 2015-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Sempat mengalami penurunan di tahun 2018 yang cukup signifikan, angka partisipasi kasar SMP kembali naik di tahun RPJMD kali ini yaitu 2019 dan 2020. Hal ini mengisyaratkan bahwa program untuk mendukung tercapainya target tersebut berhasil.



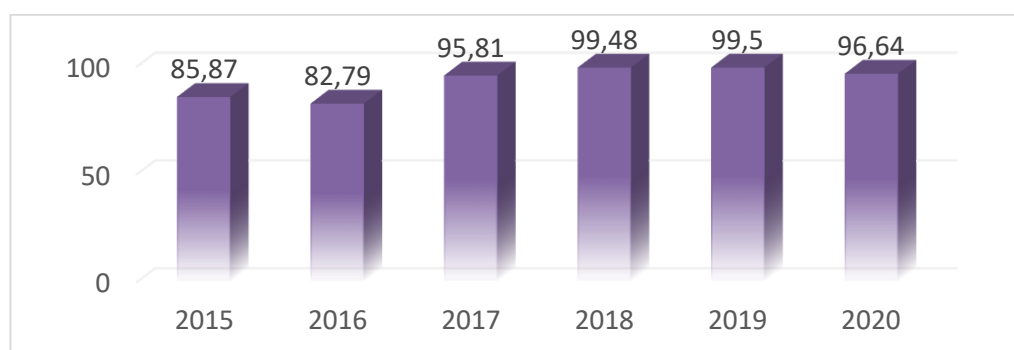
**Gambar 2.35**

**Capaian Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B  
Di Kota Malang Tahun 2015-2020**

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, 2021*

### 3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah penduduk pada usia yang sama. Capaian indikator kinerja APM SD/MI/Paket A di Kota Malang kecenderungan mengalami kenaikan mulai tahun 2015 sampai tahun 2019. Adanya pandemi COVID menyebabkan APM SD/ sederajat turun di tahun 2020.

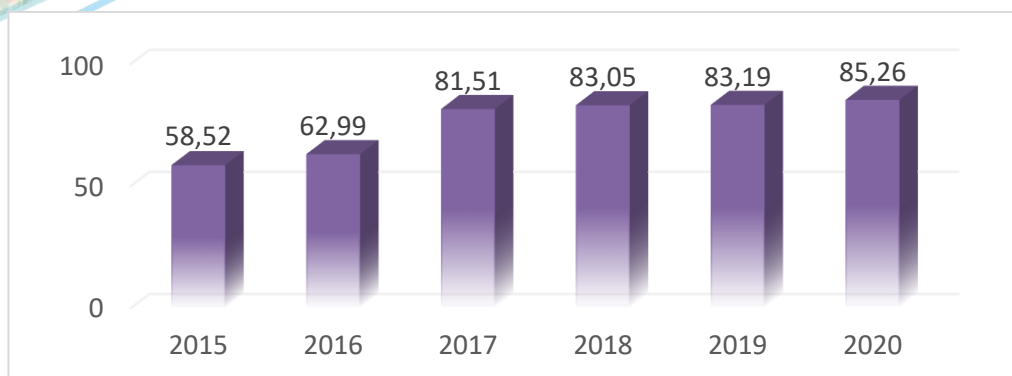


**Gambar 2.36**  
**Capaian Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A**  
**Di Kota Malang Tahun 2015-2020**

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, 2021*

Capaian indikator kinerja APM SMP/MTs/Paket B di Kota Malang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun mulai tahun 2015 sampai tahun 2020. Capaian APM SMP/MTs/Paket B di Kota Malang masih dibawah 100% dikarenakan ada penduduk Kota Malang yang bersekolah di luar Kota Malang. Hal ini disebabkan adanya siswa luar dari Kota Malang yang bersekolah di Kota Malang sedangkan kuota sekolah yang terbatas menyebabkan siswa Kota Malang yang kalah bersaing secara nilai bersekolah di luar Kota Malang. Adanya peningkatan di tahun 2020 menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk pendidikan dasar sangat tinggi meskipun ada pandemi COVID 19.





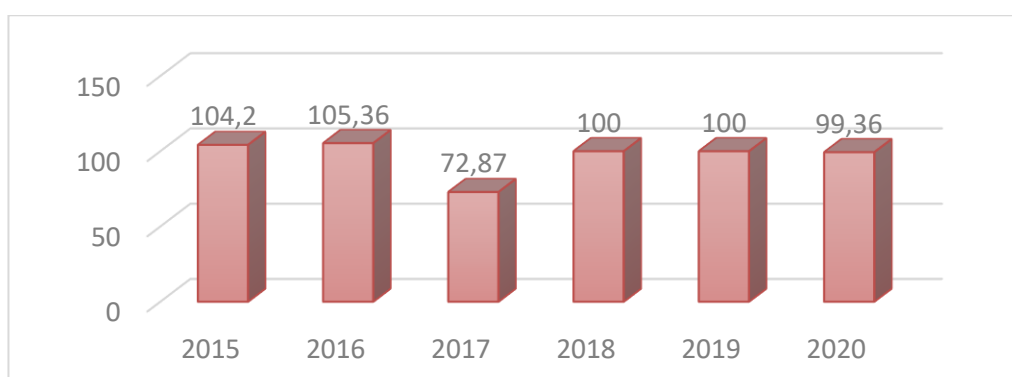
**Gambar 2.37**

**Capaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B  
Di Kota Malang Tahun 2015-2020**

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, 2021*

#### 4. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Capaian indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A di Kota Malang pada tahun 2020 terlihat turun dengan adanya pandemi COVID 19. Kemungkinan orang tua menunda anaknya untuk masuk sekolah SD sederajat meskipun sudah lulus TK karena usia masih dibawah 7 tahun.

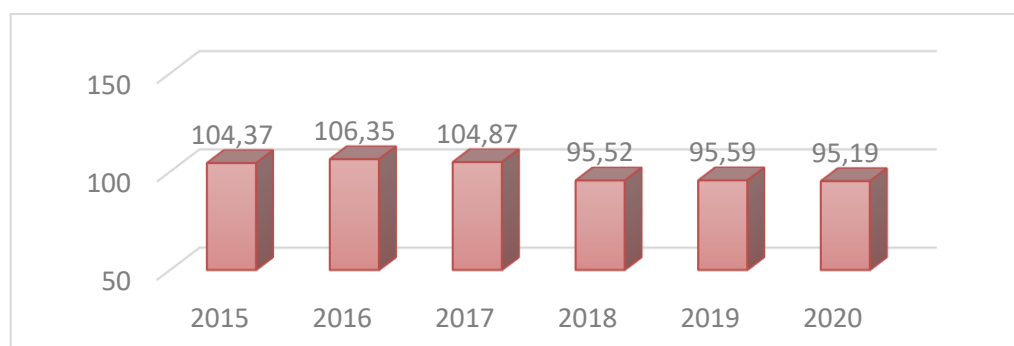


**Gambar 2.38**

**Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD/MI/Paket A  
Di Kota Malang Tahun 2015-2020**

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, 2021*

Capaian indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B di Kota Malang pada tahun 2020 mengalami penurunan meskipun tidak signifikan.

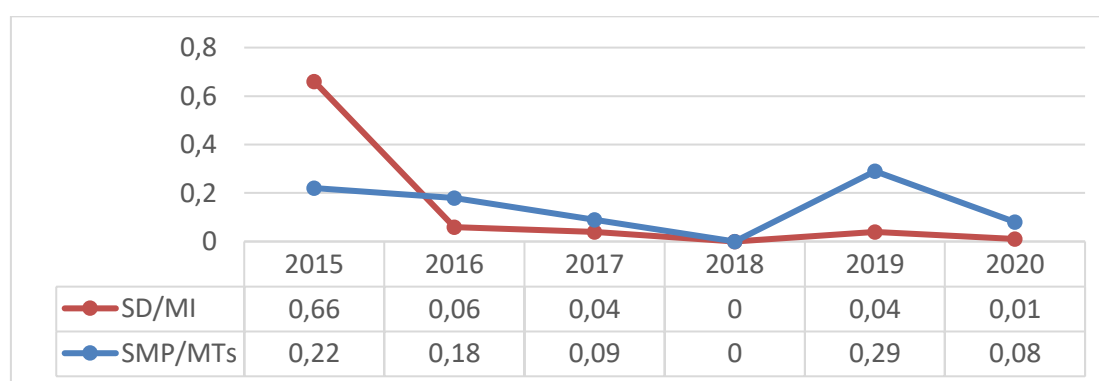


**Gambar 2.39**  
**Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B**  
**Di Kota Malang Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, 2021

## 5. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Capaian Indikator Angka Putus Sekolah tingkat SD/MI dan tingkat SMP/MTs di Kota Malang Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:



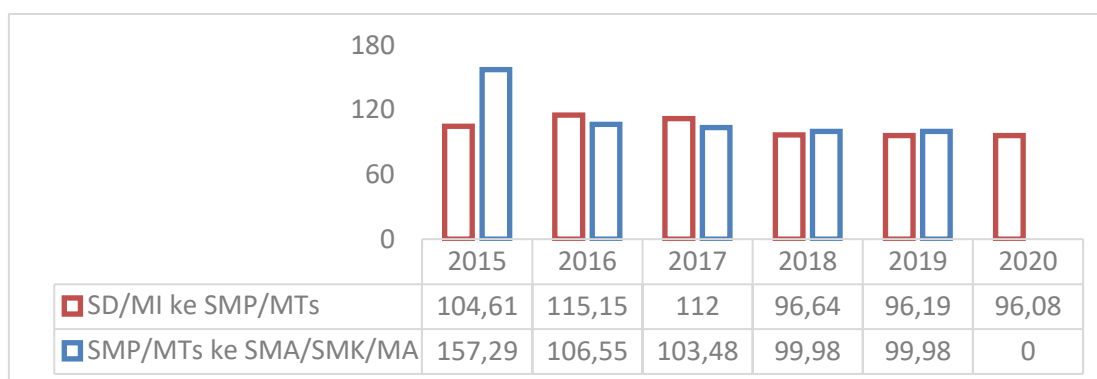
**Gambar 2.40**  
**Capaian Angka Putus Sekolah di Kota Malang Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, 2021

Turunnya angka putus sekolah baik SD maupun SMP tahun 2020 menunjukkan bahwa langkah yang diambil Pemerintah Kota Malang cukup berhasil di masa pandemi COVID 19.

## 6. Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan adalah persentase jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

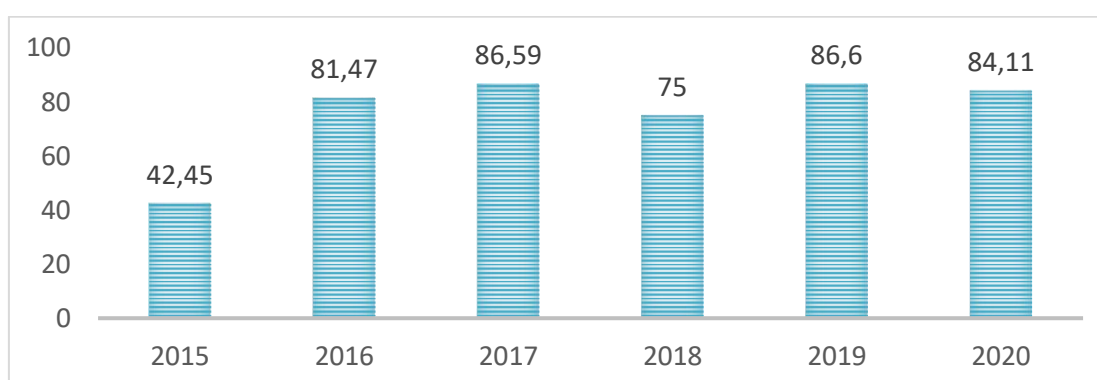


**Gambar 2.41**  
**Capaian Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan**  
**SMP/MTs ke SMA/SMK/MA**  
**Di Kota Malang Tahun 2015-2020**

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, 2021*

## 7. Persentase Guru yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik

Program sertifikasi ini akan dapat dilihat seberapa besar guru dalam menguasai kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Dengan adanya indikator ini maka akan dapat diketahui berapa jumlah sekolah yang sudah memiliki guru yang kompeten dan profesional.



**Gambar 2.42**  
**Capaian Persentase Guru yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik**  
**Di Kota Malang Tahun 2015-2020**

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, 2021*

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja “Persentase guru yang telah memiliki sertifikat pendidik” tahun

2015-2020 fluktuatif. Setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2019, capaian di tahun 2020 kembali mengalami penurunan.

## B. Kesehatan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kesehatan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

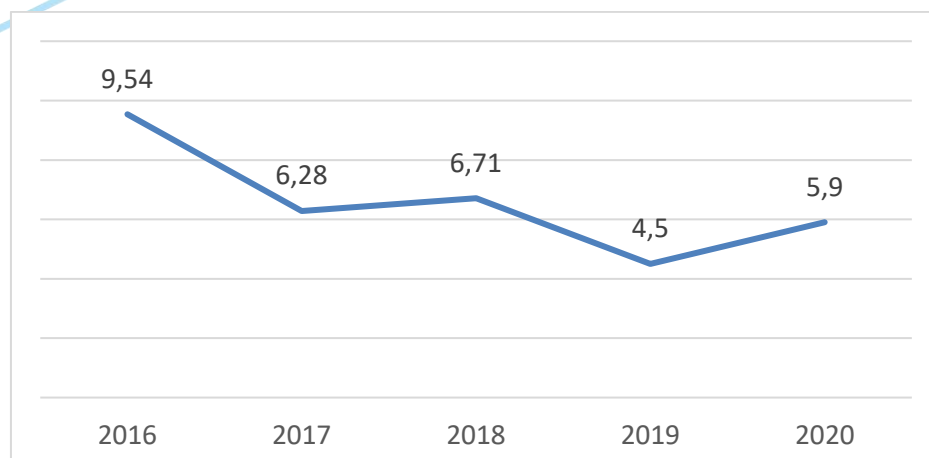
**Tabel 2.15**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Kesehatan**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
Kesehatan							
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000/KH	9.54	6.28	6.71	4.5	5,9
2.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	per 100.000/KH	75.29	115.72	83.89	75.1	76,01
3.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk (tiap 1.000 penduduk)	per 1.000 penduduk	0.14	0.14	0.14	0.121	0.15
4.	Rasio Rumah sakit terhadap penduduk (tiap 10.000 penduduk)	per 10.000 penduduk	0,28	0.29	0.28	0.299	0.29
5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	1.36	1.38	2.05	1.34	1.73
6.	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Jumlah kelurahan	71.93	82.46	71.93	93	71.9
7.	Cakupan penemuan pasien Baru TBC BTA Positif	Jumlah pasien	62.1	64.7	87.5	75.3	49.3
8.	Penemuan Jumlah Kasus HIV/AIDS	Kasus					
	a. Jumlah Kasus HIV	Kasus	310	467	508	573	432
	b. Jumlah Kasus AIDS	Kasus	200	292	495	121	21
9.	Jumlah Puskesmas	Puskesmas	16	16	16	16	16
10.	Jumlah Klinik/Balai Kesehatan	klinik	74	79	83	80	33

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2021

### 1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Malang selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

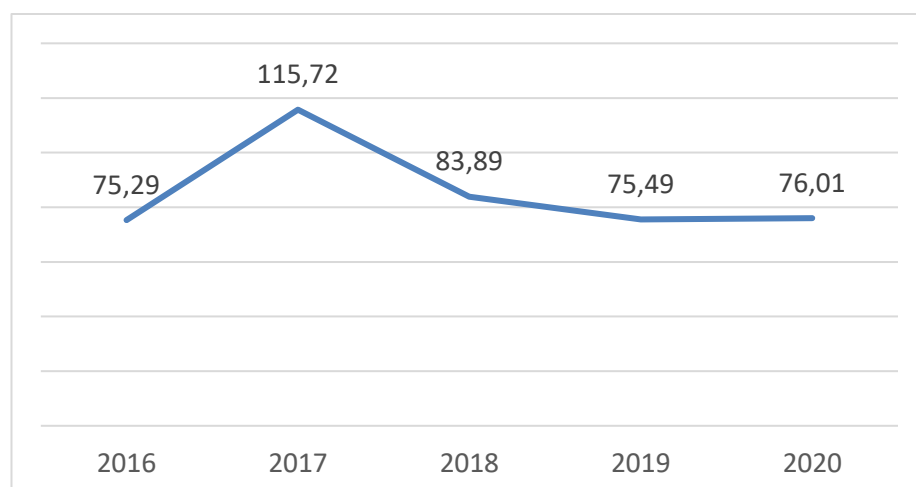


**Gambar 2.43**  
**Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB)**  
**Per 1.000 Kelahiran Hidup Di Kota Malang Tahun 2016-2020**  
*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2021*

Angka kematian bayi tahun 2020 mengalami kenaikan, hal ini berhubungan dengan anemia sejak remaja yang dialami si ibu bayi. Sehingga dalam penanganannya Dinas Kesehatan mengambil langkah menggandeng Kementerian Agama untuk sosialisasi kesehatan reproduksi dan nutrisi pra kehamilan bagi calon pengantin.

## 2. Angka Kematian Ibu

Kasus kematian yang menjadi perhatian khusus dalam bidang kesehatan adalah kematian ibu. Perkembangan kasus kematian ibu selama 5 tahun dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

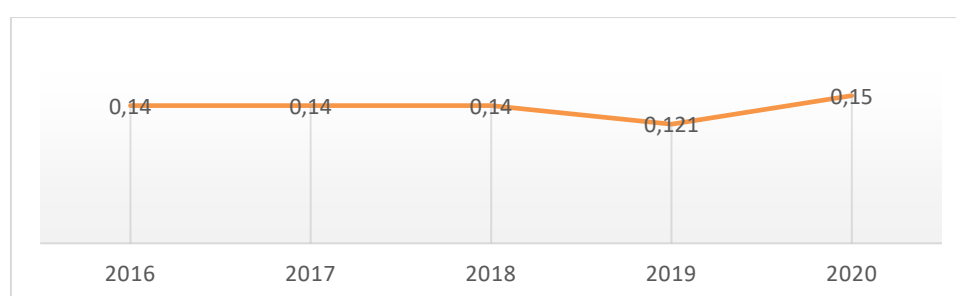


**Gambar 2.44**  
**Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000**  
**Kelahiran Hidup Di Kota Malang Tahun 2016-2020**  
*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2021*

Naik nya AKI taun 2020 karena kasus anemia sejak remaja yang dimiliki oleh calon ibu. Dinas Kesehatan sudah mengambil langkah dengan sosialisasi kesehatan reproduksi dan nutrisi pra kehamilan bagi calon pengantin.

### 3. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) Per Satuan Penduduk (Tiap 1.000 Penduduk)

Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu per satuan penduduk di Kota Malang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



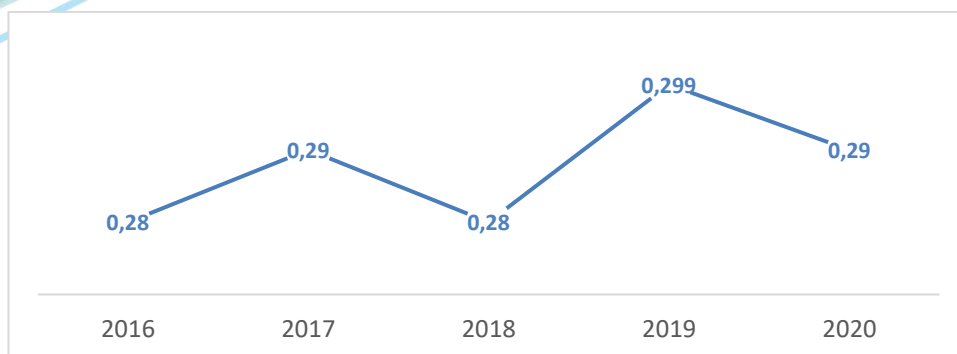
**Gambar 2.45**  
**Persentase Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk Di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2021*

Puskesmas dalam perkembangannya diupayakan terus meningkat dari sisi kualitas dan kuantitas. Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu terhadap jumlah penduduk di Kota Malang pada tahun 2020 mengalami kenaikan terkait adanya pandemi COVID 19.

### 4. Rasio Rumah Sakit Terhadap Penduduk (Tiap 10.000 Penduduk)

Perkembangan rasio rumah sakit terhadap penduduk mengalami penurunan di tahun 2020. Pertambahan jumlah penduduk dengan tidak bertambahnya jumlah rumah sakit menjadi faktor turunnya nilai tersebut.



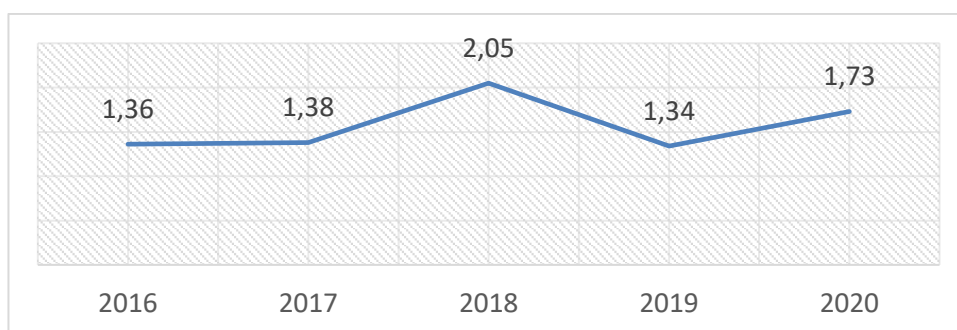
**Gambar 2.46**  
**Rasio Rumah Sakit Terhadap Penduduk (Tiap 10.000 penduduk)**  
**Di Kota Malang Tahun 2015-2020**

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2021*

Pada tahun 2019 jumlah Rumah Sakit Umum di Kota Malang berjumlah 12 (dua belas) unit rumah sakit yang terdiri dari 1 (satu) Rumah Sakit Pemerintah Propinsi Jawa Timur, 1 (satu) Rumah Sakit TNI/POLRI, 1 (satu) Rumah Sakit BUMN, 1 (satu) Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kota Malang dan 8 (delapan) Rumah Sakit swasta. Sedangkan Rumah Sakit Khusus berjumlah 14 (empat belas) rumah sakit dan jumlah tersebut tetap pada tahun 2020.

##### **5. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk (Per 1.000 Penduduk)**

Terjadi pertambahan jumlah perawat di tahun 2020 disebabkan adanya penambahan jumlah tenaga medis dalam masa penanganan pandemi COVID 19.



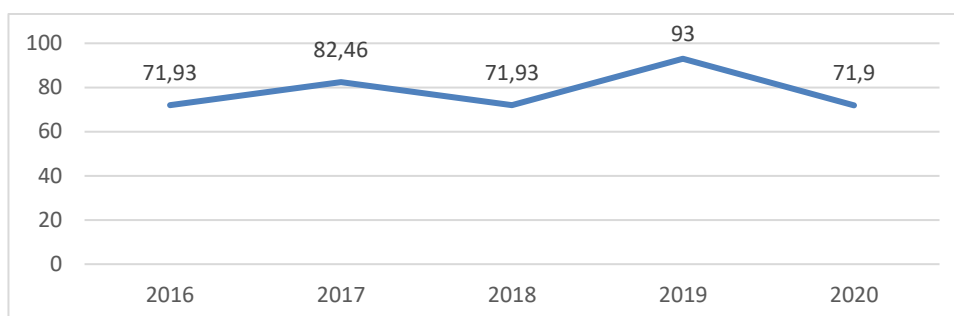
**Gambar 2.47**  
**Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kota Malang**  
**Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2021*

##### **6. Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)**

Pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) pada dasarnya merupakan proyeksi terhadap cakupan atas imunisasi secara lengkap

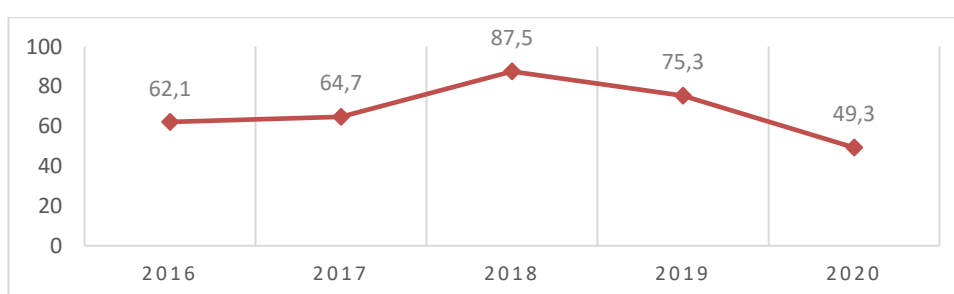
pada sekelompok bayi. Kelurahan UCI merupakan gambaran suatu Kelurahan yang telah mencapai target UCI di atas 80% bayi di Kelurahan tersebut telah mendapat imunisasi dasar lengkap.



**Gambar 2.48**  
**Perkembangan Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Malang Tahun 2016-2020**  
*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2021*

### 7. Cakupan penemuan pasien Baru TBC BTA Positif

Cakupan penemuan pasien baru Tuberculosis Basil Tahan Asam (TBC BTA) artinya pada setiap 100.000 penduduk terdapat pasien TBC BTA Positif baru yang terdiagnosa.



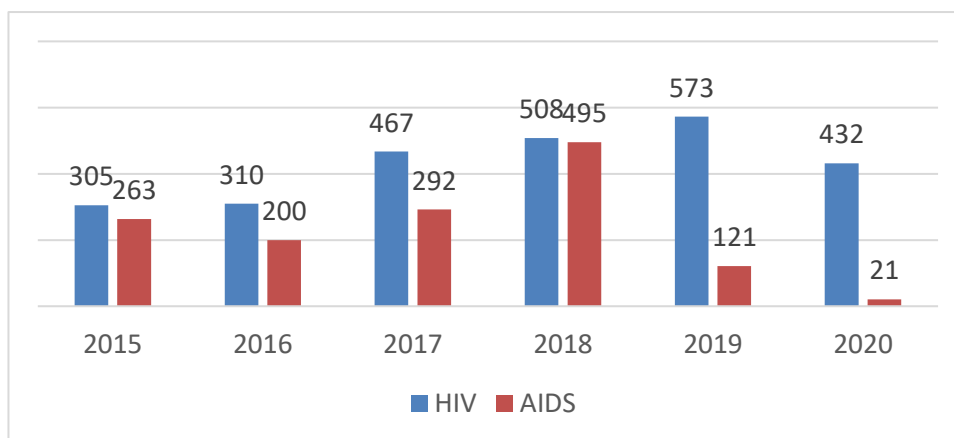
**Gambar 2.49**  
**Cakupan penemuan pasien Baru TBC BTA Positif di Kota Malang Tahun 2016-2020**  
*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2021*

### 8. Jumlah Kasus HIV/AIDS

HIV adalah *Human Immunodeficiency Virus*, yaitu jenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Seseorang yang terinfeksi virus HIV belum tentu mengalami AIDS. AIDS adalah singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, dimana seseorang yang terinfeksi HIV telah mengalami kondisi jumlah sel CD4 dalam tubuhnya turun hingga kurang dari 200 sel per 1 ml atau 1 cc darah. AIDS dianggap sebagai tahap akhir dari infeksi HIV jangka



panjang. Jumlah pengidap HIV dan AIDS di Kota Malang fluktuatif cenderung naik dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Akan tetapi di tahun 2020 jumlah pasien HIV turun drastic menjadi 432 jiwa dari sebelumnya tahun 2019 sebanyak 573 jiwa. Begitu juga pasien AIDS sangat signifikan turun menjadi 21 jiwa dari tahun sebelumnya yang berjumlah 121 kasus.

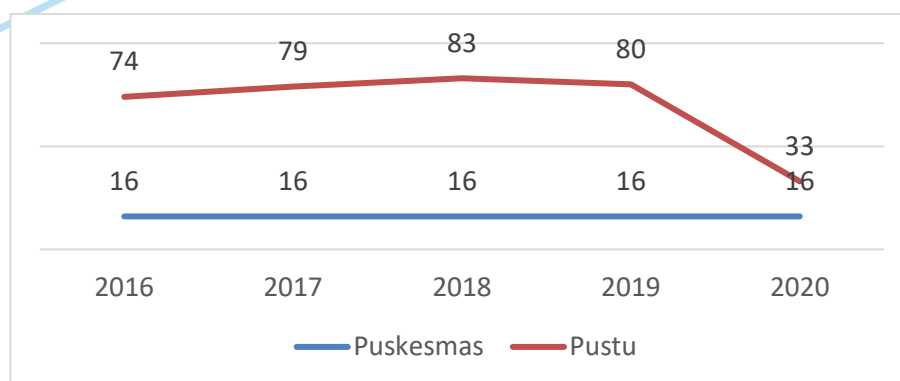


**Gambar 2.50**  
**Perkembangan Jumlah Kasus HIV/AIDS di Kota Malang**  
**Tahun 2015-2020**

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2021*

## 9. Jumlah Puskesmas dan Klinik/Balai Kesehatan

Puskesmas dalam perkembangannya diupayakan terus meningkat dari sisi kualitas dan kuantitas. Jumlah puskesmas di Kota Malang pada tahun 2016 hingga tahun 2020 tetap berjumlah 16 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Setiap kecamatan terdapat 3 buah puskesmas. Dari jumlah tersebut 4 puskesmas berstatus sebagai puskesmas perawatan dan 12 puskesmas sebagai puskesmas non perawatan. Puskesmas perawatan di Kota Malang adalah Puskesmas Kedungkandang, Kendalsari, Dinoyo dan Kendalkerep. Semua puskesmas yang ada di Kota Malang hingga tahun 2020 memiliki laboratorium kesehatan. Namun hanya empat puskesmas yang dapat memberikan pelayanan gawat darurat yaitu puskesmas dengan status puskesmas perawatan, yaitu Puskesmas Kedungkandang, Puskesmas Kendalsari, Puskesmas Dinoyo dan Puskesmas Kendalkerep.



**Gambar 2.51**  
**Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kota Malang**  
**Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang, 2021*

Jumlah klinik/balai kesehatan di Kota Malang terus meningkat setiap tahunnya mulai tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2016 jumlah klinik/balai kesehatan di Kota Malang sebanyak 74 klinik hingga pada tahun 2019 naik menjadi 80 klinik. Sedangkan jumlah puskesmas pembantu turun menjadi 33 klinik di tahun 2020.

### C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.16**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

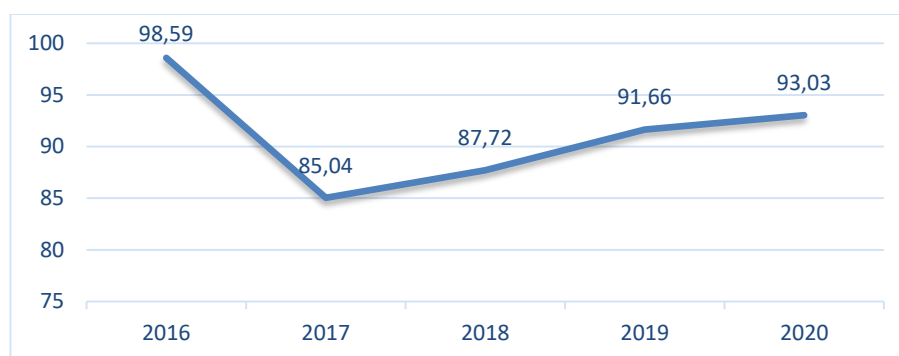
No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
A.	<b>Pekerjaan Umum</b>						
1.	Persentase jalan kota dalam kondisi baik	%	98.59	85.04	87.72	91.66	93.03
2.	Persentase drainase kota dalam kondisi baik	%	72.77	81.49	82.73	82.98	83.54
3.	Prosentase Keluarga yang memiliki air minum layak	%	87	92	93.12	91.84	93.29
B.	<b>Penataan Ruang</b>						
1.	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	%	100	100	106	100	88.03
2.	Prosentase Gedung Yang Memiliki Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	%	12	14.66	20.49	69.23	100

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, 2021*

## **Pekerjaan Umum**

### **1. Persentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik**

Sempat terjadi penurunan di tahun 2017 dikarenakan ditahun tersebut curah hujan lebih lama, sehingga beberapa jalan mengalami kerusakan. Adapun capaian indikator persentase jalan kota dalam kondisi baik selama kurun tahun pelaksanaan RPJMD yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan.

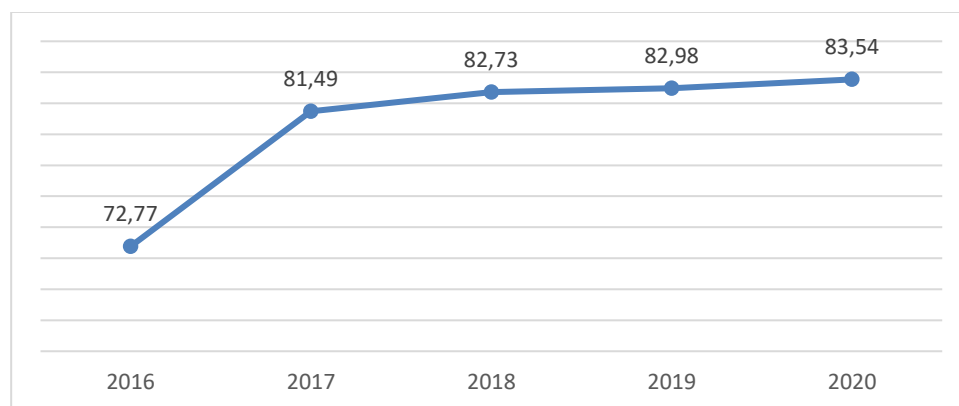


**Gambar 2.52**  
**Persentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik**  
**di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, 2021*

### **2. Persentase Drainase Kota dalam Kondisi Baik**

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dalam meningkatkan drainase di Kota Malang meningkat setiap tahunnya selama lima tahun terakhir, mulai tahun 2016 sampai 2020.

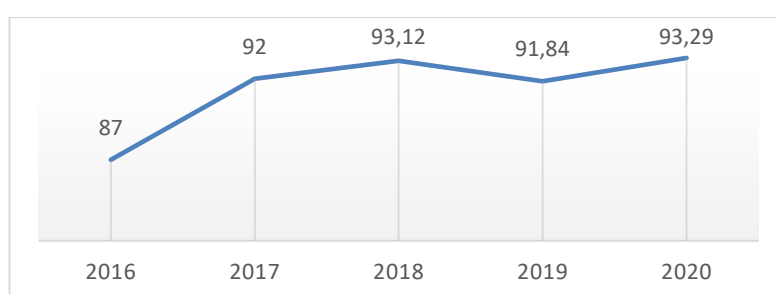


**Gambar 2.53**  
**Persentase Drainase Kota dalam Kondisi Baik**  
**di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, 2021*

### 3. Persentase Keluarga yang Memiliki Air Minum Layak

Target 100 akses Air Minum layak bagi masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam program 100-0-100 masih perlu upaya keras dari Pemerintah Kota Malang. Program pembangunan daerah Kota Malang untuk Bidang Cipta Karya baru menargetkan sebesar 93,71% rumah tinggal yang terlayani akses air bersih pada tahun 2020. Kendala yang terjadi yakni masih ada daerah yang berada di kawasan perkampungan sulit mendapatkan akses jaringan PDAM.



**Gambar 2.54**  
**Persentase Keluarga yang Memiliki Air Minum Layak di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, 2021*

Berdasarkan hasil analisis kajian Dokumen KLHS RPJMD Kota Malang Tahun 2018 (2018:50) bahwa terhadap daya dukung lingkungan dan ambang batas jasa ekosistem penyedia air didahului dengan menghitung kebutuhan dan ketersediaan jasa ekosistem penyedia air. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Kota Malang memiliki kapasitas penyediaan air bersih dari *Water Tank* PDAM sebanyak 40.271 m<sup>3</sup> yang tersedia dari Pemerintah Kota Malang melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang. Kebutuhan air di Kota Malang yang terus meningkat, namun sumber-sumber air permukaan di Kota Malang terbatas. Hal tersebut meningkatkan pemanfaatan air tanah di Kota Malang hingga lebih dari 50 menggunakan air tanah, yang pada dasarnya air tanah tidak dianjurkan terus menerus.

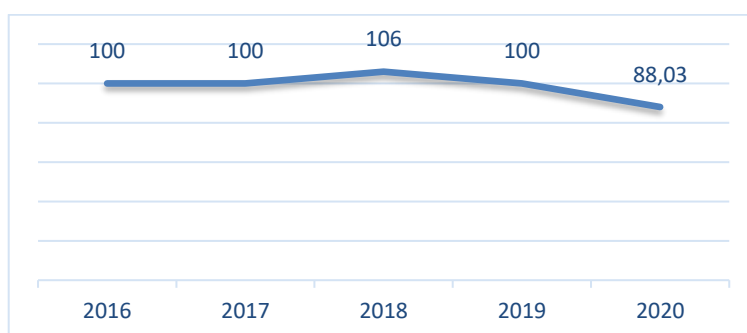
Ketersediaan air di Kota Malang tersebar di beberapa titik lokasi yang memiliki debit air terbanyak ada di Kecamatan Kedungkandang.

Sedangkan kecamatan yang memiliki ketersediaan air yang rendah ada di Kecamatan Klojen dan Kecamatan Blimbing.

## **Penataan Ruang**

### **1. Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang Tertangani**

Penurunan angka persentase jumlah pelanggaran tata ruang yang tertangani di tahun 2020 erat kaitannya dengan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi COVID 19.



**Gambar 2.55**

### **Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang Tertangani di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, 2021*

## **D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.17**

### **Hasil Kinerja Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2017-2020**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1.	Rasio rumah layak huni	80	86.86	86.93	98,90
2.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	54	62.07	20.69	NA
3.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	NA	1,94	1,88	0,63

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, 2021*

Rasio layak huni yang meningkat dan persentase luasan pemukiman kumuh yang berkurang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan keberhasilan pada program ini.

### **Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 indikatornya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.18**  
**Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Kota Malang Tahun 2018-2020**

No.	Indikator	2018	2019	2020
1.	Persentase rumah tinggal berakses air minum	93.12%	91.84%	93.29%
2.	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	84.81%	84.02%	84.12%

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, 2021*

Untuk rumah tinggal yang berakses air minum sudah menunjukkan angka di atas 90%. Nilai ini meskipun sudah baik, tetapi perlu terus ditingkatkan karena akses air minum merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Sedangkan untuk pengolahan air limbahnya diangka kisaran 80%. Pengolahan limbah domestik sangat penting karena dapat mengurangi polusi. Limbah domestik adalah sisa buangan yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Limbah ini berbahaya karena bisa mengandung bahan kimiawi yang berbahaya seperti sabun mandi, detergen cuci, minyak, kuman dan sebagainya. Jika terakumulasi dalam jumlah besar, tentu bisa mencemari lingkungan. Oleh karena itu perlu terus dilakukan peningkatan penanganan air limbah domestik.

**Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

**Tabel 2.19**  
**Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Malang Tahun 2018-2020**

No.	Indikator	2019	2020
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar	0%	0%
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar	0%	0%

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, 2021*

Untuk SPM urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman belum dilaksanakan. Pencapaian 0% dikarenakan memang belum ada masyarakat yang terkena bencana maupun yang terkena relokasi program pemerintah yang memerlukan rumah layak huni. Selain itu, perlu mendapat perhatian karena untuk pelaksanaan SPM penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana maupun fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah memerlukan anggaran untuk pelaksanaannya.

**E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

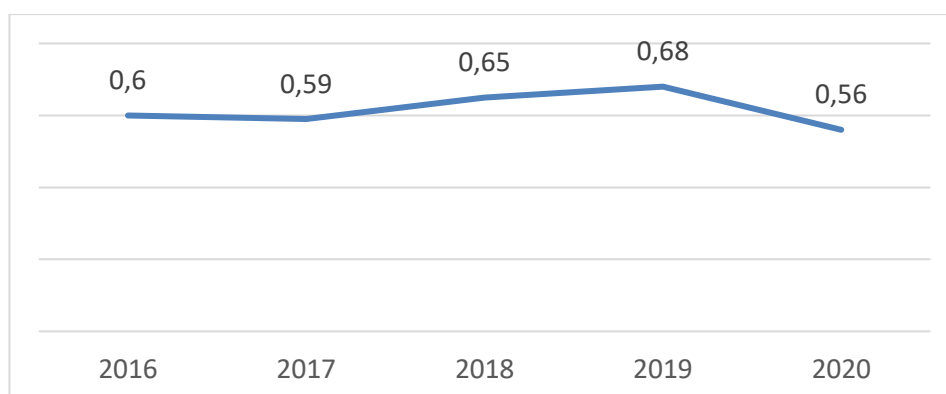
**Tabel 2.20**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum**  
**dan Perlindungan Masyarakat**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1.	Rasio Pos Kamling per 100 KK	0,6	0,59	0,65	0,68	0,56
2.	Rasio petugas linmas per RT	0,67	0,67	0,49	0,74	0,73
3.	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, 2021

### 1. Rasio Pos Kamling per 100 Kepala Keluarga (KK)

Penurunan rasio pos kamling per 100 KK disebabkan penambahan jumlah penduduk sehingga terjadi penurunan di tahun 2020.



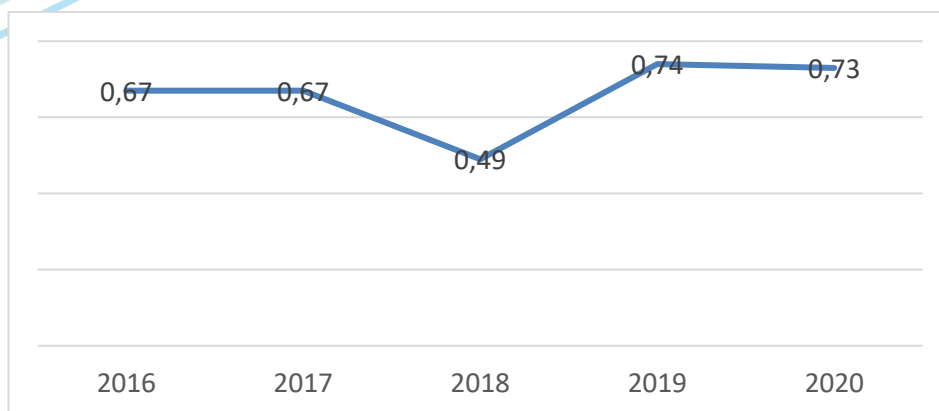
**Gambar 2.56**  
**Cakupan Rasio Pos Kamling per 100 KK**  
**Di Kota Malang Tahun 2016-2020**

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, 2021

### 2. Rasio Petugas Linmas per Rukun Tetangga (RT)

Pertambahan jumlah RT membuat rasio petugas linmas per RT turun, karena angka pembaginya lebih besar. Hal ini perlu adanya perhatian terkait target rasio Linmas per RT. Karena jika terus terjadi penambahan jumlah RT, maka target yang ditetapkan tidak akan tercapai. Selain itu jika ingin memenuhi target yang ditetapkan maka harus diimbangi dengan penambahan anggaran yang mencukupi.





**Gambar 2.57**  
**Cakupan Rasio Petugas Linmas per RT**  
**Di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, 2021*

### **3. Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran**

Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) diperoleh dari jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dibagi jumlah kebakaran dalam jangkauan WMK dikali 100%. Wilayah Kota Malang termasuk wilayah yang tidak begitu luas yaitu 114,2616 Km<sup>2</sup>, sehingga hal ini memudahkan dalam kecepatan tanggap terhadap bencana kebakaran di Kota Malang. Akan tetapi tetap harus mendapat perhatian karena Kota Malang adalah Kota yang setiap tahun jumlah penduduknya masih menunjukkan angka peningkatan, sehingga memungkinkan Kota Malang akan menjadi padat penduduk di wilayah-wilayah tertentu yang akan sulit dijangkau oleh mobil kebakaran. Oleh karena itu perlu pencegahan kebakaran dan penanganannya di wilayah padat penduduk.

#### **Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Berikut adalah data kebencanaan dengan indikator berdasarkan Permendagri Nomor 100 tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 2.21**  
**Data SPM Trantibunlinmas Tahun 2019-2020**

No	Indikator	Capaian Kinerja	
		2019	2020
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kebakaran	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, 2021

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibunlinmas untuk indikator pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan penyelamatan bencana kebakaran sudah mencapai 100%. Hal ini sangat bagus karena ini merupakan pelayanan dasar untuk masyarakat dalam hal kebencanaan. Capaian ini perlu dipertahankan dan perlu juga terus ditingkatkan inovasinya karena wilayah perkotaan adalah wilayah yang kompleks akan kebencanaan.

#### **F. Sosial**

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan sosial Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

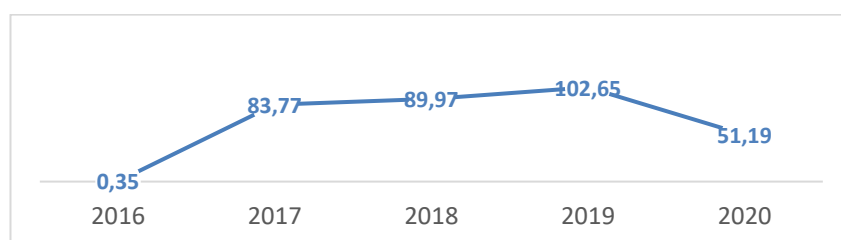
**Tabel 2.22**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Sosial**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	%	0,35	83,77	89,97	102,65	51,19
		Orang	7518	7518	7518	7518	N/A
2.	PMKS yang Memperoleh Bantuan Pemulihan/ Pengembangan Kemampuan dan Pelatihan Ketrampilan	%	1,36	83,77	0,08	0,02	20,17
		Orang	350	160	110	50	N/A
3.	PMKS yang mendapat bantuan Sarana dan Prasarana Sosial	%	0,54	60,54	0	0	0
		Orang	350	160	110	50	N/A
4.	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan	%	1,35	1,3*	1,35	1,35	24,25
		Orang	350	160	110	50	N/A
5.	Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina	%	1,35	210	210	210	8,89

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2021

### 1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan dan Perlindungan Sosial

Terjadi penurunan cukup tajam persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial ditahun 2020. Pandemi COVID 19 diinkasi penyebabnya bertambahnya jumlah PMKS sehingga persentase PMKS yang memperoleh menurun.



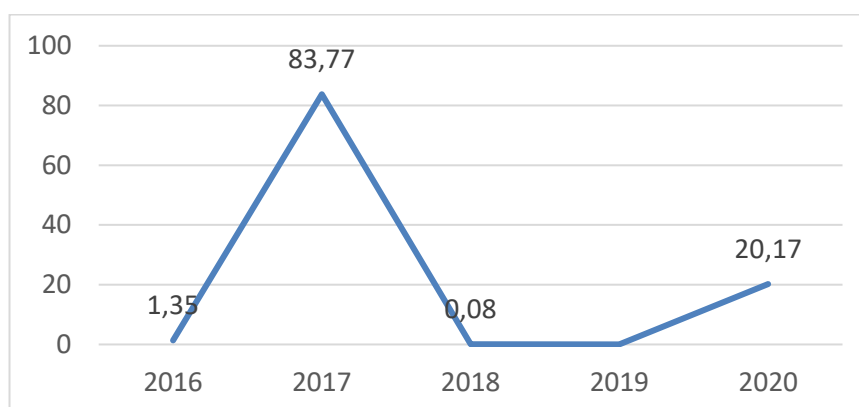
**Gambar 2.58**

#### **Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan dan Perlindungan Sosial di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2021*

### 2. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Pemulihan/ Pengembangan Kemampuan dan Pelatihan Keterampilan

Diketahui di Gambar 2.56 bahwa persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan bantuan sosial turun di tahun 2020, tapi hal ini diimbangi dengan naiknya PMKS yang mendapat bantuan pengembangan kemampuan dan latihan keterampilan. Hal ini dapat dilihat di Gambar 2.57 berikut:



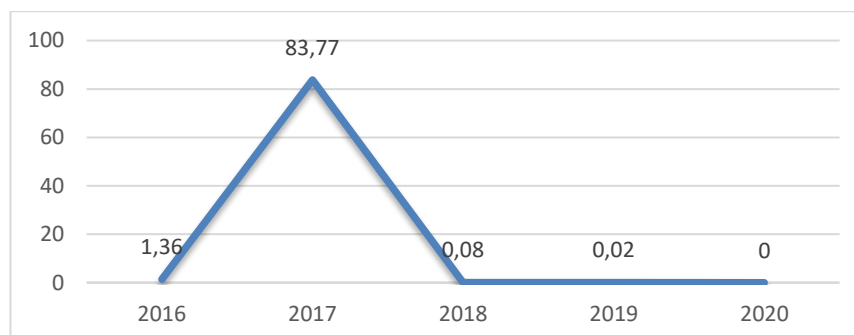
**Gambar 2.59**

#### **Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Pemulihan/Pengembangan Kemampuan dan Pelatihan Keterampilan di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2021*

### 3. Persentase PMKS yang Mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana Sosial

Pada tahun 2020 tercatat tidak ada PMKS yang mendapat bantuan sarana dan prasarana. Hal ini dikarenakan bantuan untuk PMKS dialihkan dalam bentuk lain.



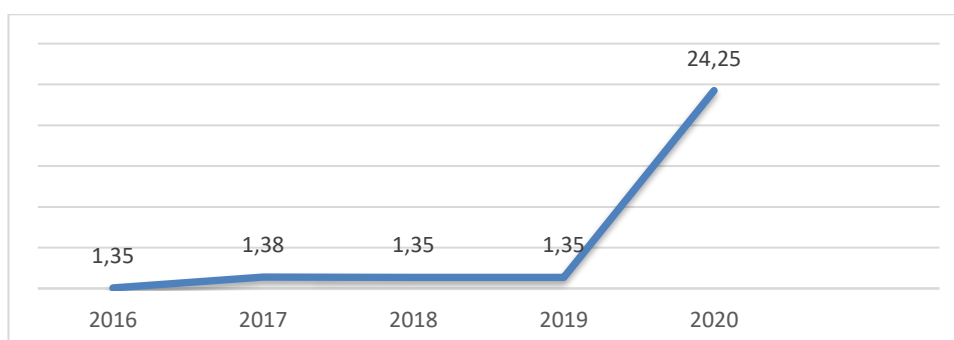
**Gambar 2.60**

#### **Persentase PMKS yang Mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana Sosial di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2021*

### 4. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Terjadi lonjakan angka persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial di tahun 2020. Hal ini merupakan salah satu pengamanan sosial terkait penanganan pandemi COVID 19.



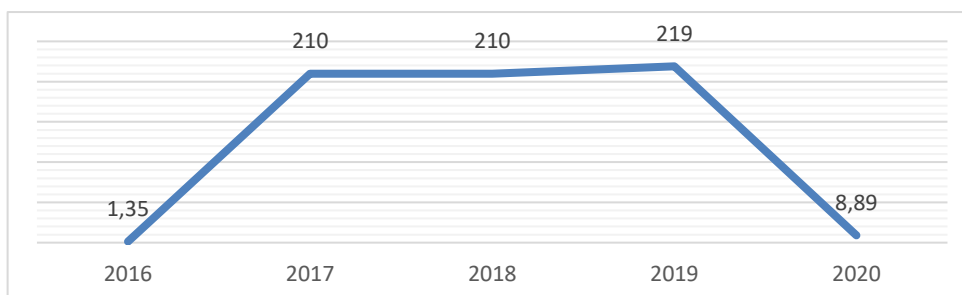
**Gambar 2.61**

#### **Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2021*

## 5. Jumlah Anak Jalanan, Anak Terlantar, Anak Penyandang Cacat dan Jompo yang Dibina

Terjadinya penurunan tajam pembinaan anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo di tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh pengalihan penanganan dengan pemberian bantuan langsung di masa pandemi COVID 19.



**Gambar 2.62**  
**Persentase Jumlah Anak Jalanan, Anak Terlantar, Anak Penyandang Cacat Dan Jompo Yang Dibina di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2021*

### 2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Adapun urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan dan Kearsipan. Berikut adalah capaian urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pemerintah Kota Malang.

#### A. Tenaga Kerja

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan tenaga kerja Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

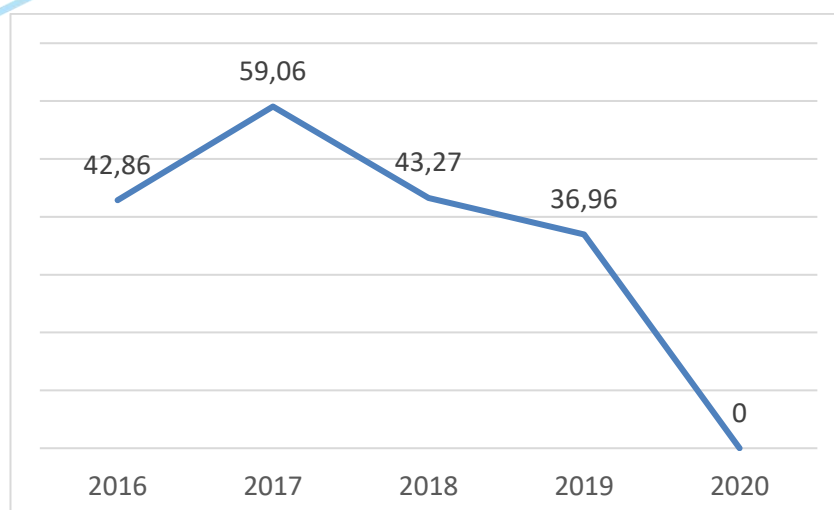
**Tabel 2.23**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
Tenaga Kerja							
1.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	42,86	59,06	43,27	36,96	0
2.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	72,92	59,06	64,59	62,48	0
3.	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	%	N.A	64,77	66,25	66,1	66,41

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, 2021*

### **1. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**

Pada tahun 2016 besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kota Malang sebesar 42,86%. Pada tahun 2017 besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi mengalami peningkatan menjadi sebesar 59,06%. Capaian indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan yaitu menjadi 43,27%. Pada tahun 2019 besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi kembali mengalami penurunan menjadi 36,39%. Sedangkan tahun 2020 pelatihan berbasis kompetensi capaiannya sebesar 0%, hal ini karena anggaran pelatihan mengalami *refocussing* karena pandemi COVID 19. Semakin menurunnya pelatihan berbasis kompetensi ini sangat perlu diperhatikan, karena kesiapan tenaga kerja yang berkompetensi juga berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.



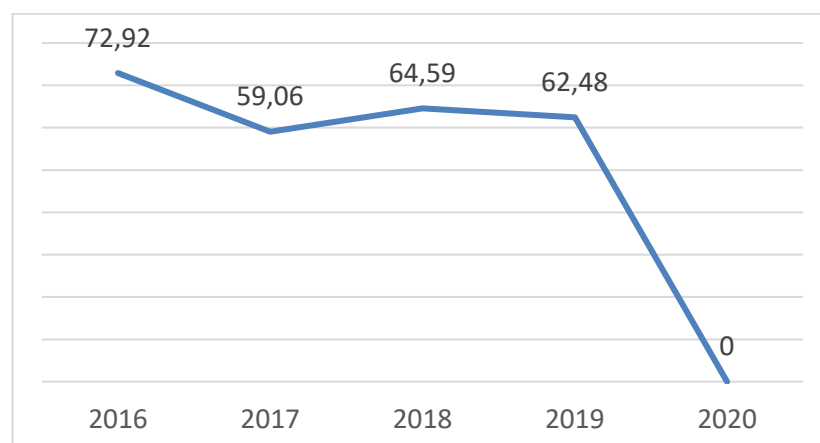
**Gambar 2.63**

**Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, 2021*

**2. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan**

Berikut adalah gambaran capaian besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kota Malang tahun 2016 sampai tahun 2020.



**Gambar 2.64**

**Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Di Kota Malang Tahun 2016-2020**

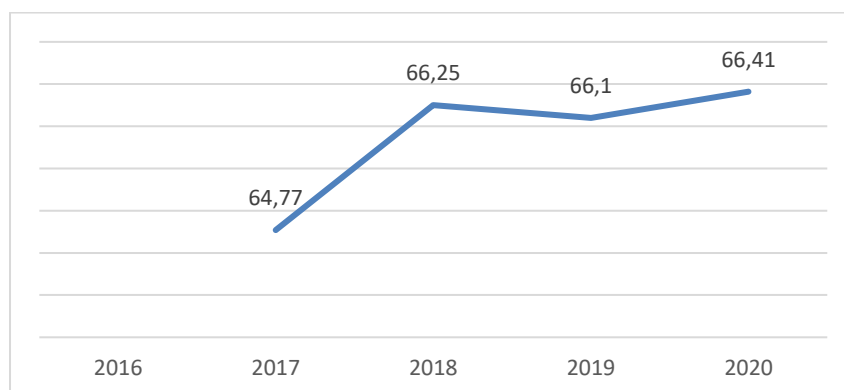
*Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, 2021*

Capaian pada tahun 2016 besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebesar 72,92%. Pada tahun 2017, capaian besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan

kewirausahaan kembali mengalami penurunan secara signifikan yaitu sebesar 59,06%. Pada tahun 2018 besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan naik sebesar 64,59%. Capaian kinerja besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 62,48%. Dan *refocussing* anggaran juga menyebabkan pelatihan kewirausahaan untuk tenaga kerja menjadi 0%.

### 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Malang sempat mengalami penurunan di tahun 2019. Hal ini selaras dengan menurunnya angka tingkat pengangguran terbuka yang akan dibahas lebih lanjut pada sub bab bahasan selanjutnya pada Bab II ini. Diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja adalah angka yang diperoleh dari jumlah penduduk angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100%. Dimana penduduk angkatan kerja sendiri merupakan jumlah penduduk bekerja dan pengangguran. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka membuat menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja di tahun 2019. Dan di tahun 2020, dimana terjadi Pandemi COVID 19 mempengaruhi sektor ekonomi dan mengakibatkan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Malang juga meningkat, sehingga nilai tingkat partisipasi angkatan kerja juga naik. Berikut adalah gambaran tingkat partisipasi angkatan kerja jika dilihat dalam bentuk grafik:



**Gambar 2.65**

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, 2021



## B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

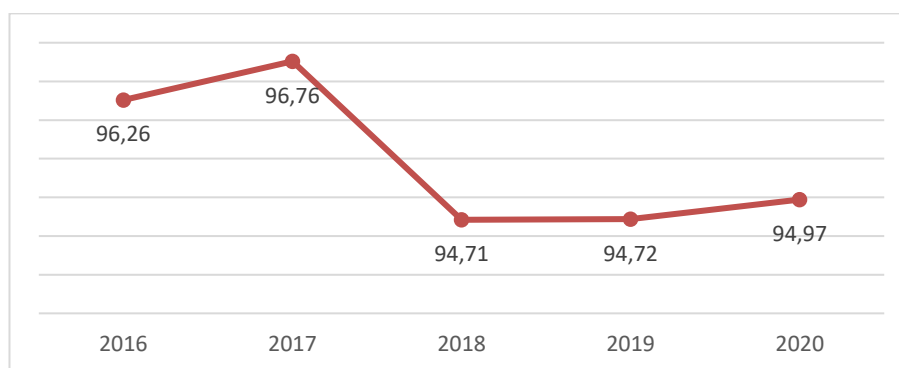
**Tabel 2.24**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		0.00	94.96	94.71	94.72	94,97
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		0.00	70.76	71.05	78.11	78,06
3.	Persentase penanganan kasus tindakan KDRT	%	100	100	100	100	100
4.	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
5.	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
6.	Persentase organisasi perempuan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	N/A
7.	Persentase Forum Anak yang Difasilitasi	%	83,33	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2021

### 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah perbandingan antara angka harapan hidup, lama sekolah dan pendapatan non buruh antara laki-laki dan perempuan. IPG menunjukkan kenaikan di Tahun RPJMD 2018 sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan program kegiatan untuk menaikkan IPG cukup berhasil.

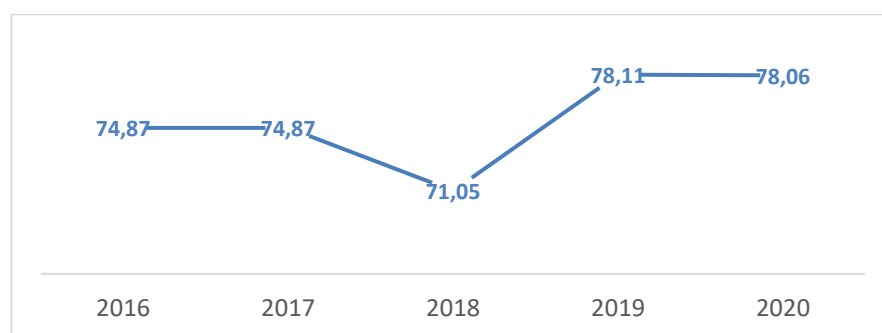


**Gambar 2.66**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Malang**  
**Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2021*

### 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah proporsi keterwakilan perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan antara laki-laki dan perempuan.

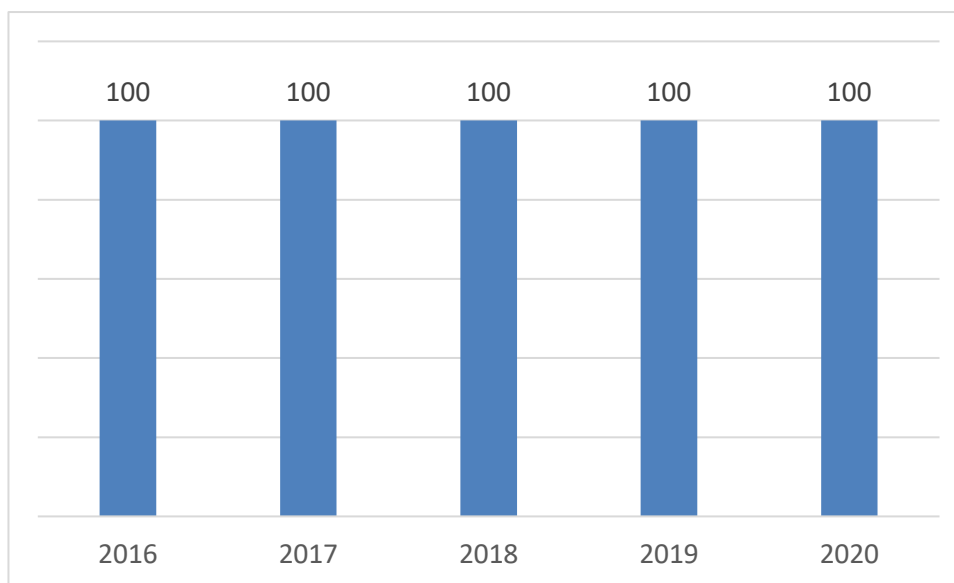


**Gambar 2.67**  
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Malang**  
**Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2021*

### 3. Persentase Penanganan Kasus Tindakan KDRT

Capaian persentase penanganan kasus tindakan KDRT di Kota Malang pada tahun 2016-2020 telah menunjukkan kinerja yang baik, yakni telah berhasil mencapai 100, artinya seluruh kasus KDRT yang terjadi di Kota Malang pada tahun 2016 hingga tahun 2020 telah berhasil mendapat penanganan.



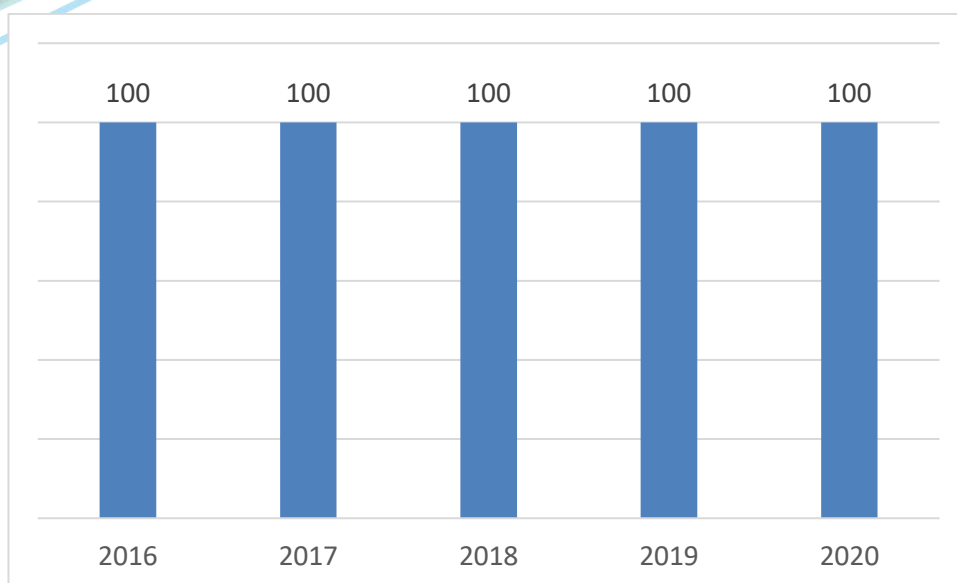
**Gambar 2.68**

#### **Persentase Penanganan Kasus Tindakan KDRT Di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2021*

### 4. Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Capaian kinerja indikator Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu persentase penanganan kasus tindakan KDRT di Kota Malang pada tahun 2016-2020 telah menunjukkan kinerja yang baik, yakni telah berhasil mencapai 100, artinya seluruh kasus kekerasan pada perempuan yang dilaporkan terjadi di Kota Malang pada tahun 2016 hingga tahun 2020 telah mendapat penanganan.



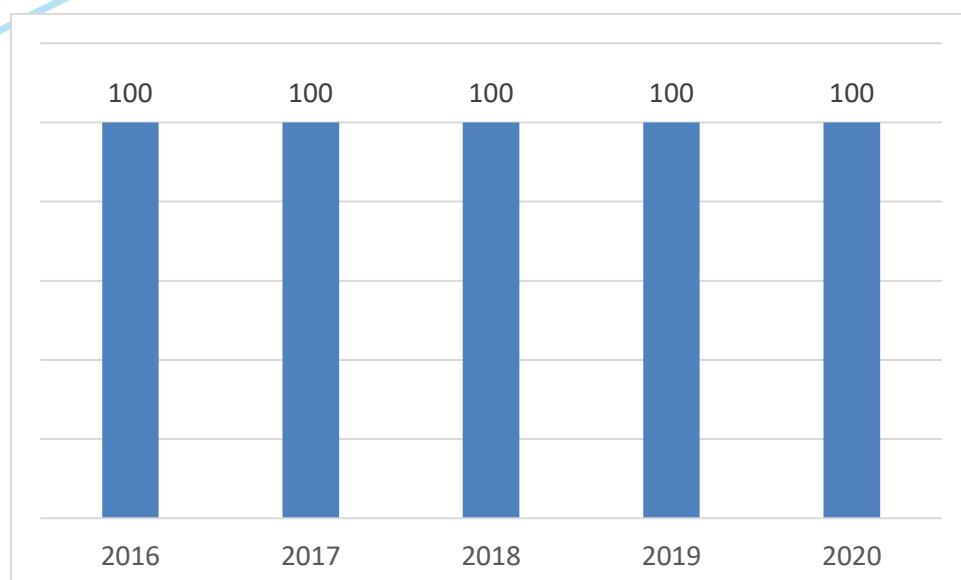
**Gambar 2.69**

**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2021*

**5. Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu**

Capaian kinerja indikator Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu persentase penanganan kasus tindakan KDRT di Kota Malang pada tahun 2016-2020 juga telah menunjukkan kinerja yang baik, yakni telah berhasil mencapai 100, artinya seluruh kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan terjadi di Kota Malang pada tahun 2016 hingga tahun 2020 telah mendapat penanganan.



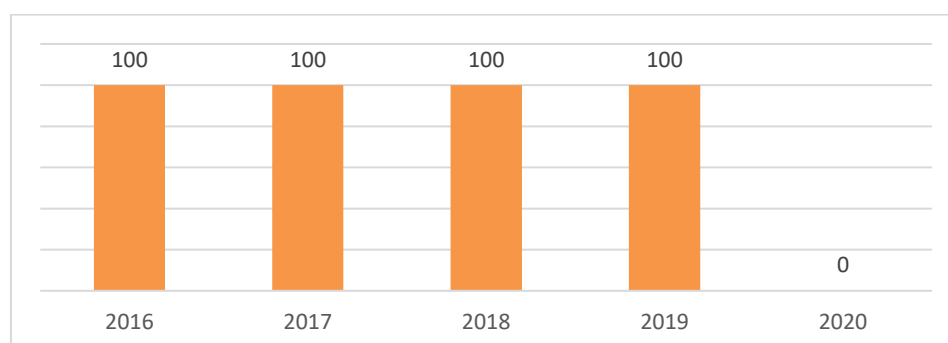
**Gambar 2.70**

**Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2021*

**6. Persentase Organisasi Perempuan yang Difasilitasi**

Pada tahun 2016 hingga tahun 2019 jumlah organisasi perempuan di Kota Malang terdapat 29 organisasi dan semuanya telah difasilitasi oleh dinas terkait sehingga capaian persentase organisasi perempuan yang di fasilitasi di Kota Malang pada tahun 2015-2019 sebesar 100. Di tahun 2020 jumlah organisasi perempuan tidak terukur akibat pandemi COVID-19.



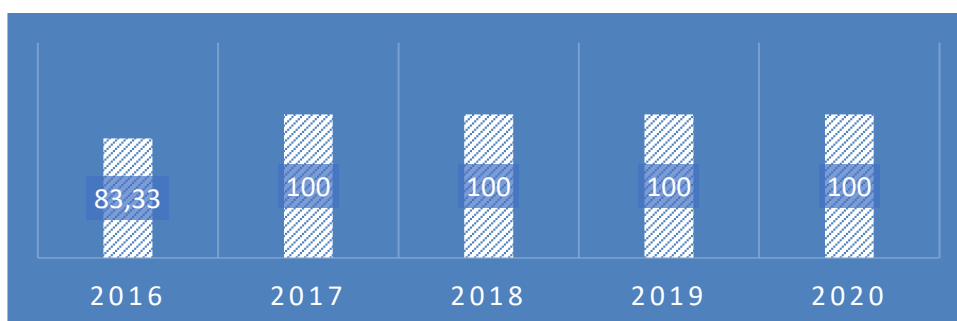
**Gambar 2.71**

**Persentase organisasi perempuan yang difasilitasi di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2021*

## 7. Persentase Forum Anak yang Difasilitasi

Di Kota Malang terdapat 6 forum anak yaitu 1 forum anak tingkat kota dan 5 forum anak tingkat kecamatan. Adapun pembentukan forum anak tingkat kelurahan masih dilakukan secara bertahap yaitu di 18 kelurahan di Kota Malang dan diharapkan pada beberapa tahun kedepan semua kelurahan sudah terbentuk forum anak.



**Gambar 2.72**  
**Presentase Forum Anak yang Difasilitasi di Kota Malang Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2021

## C. Pangan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

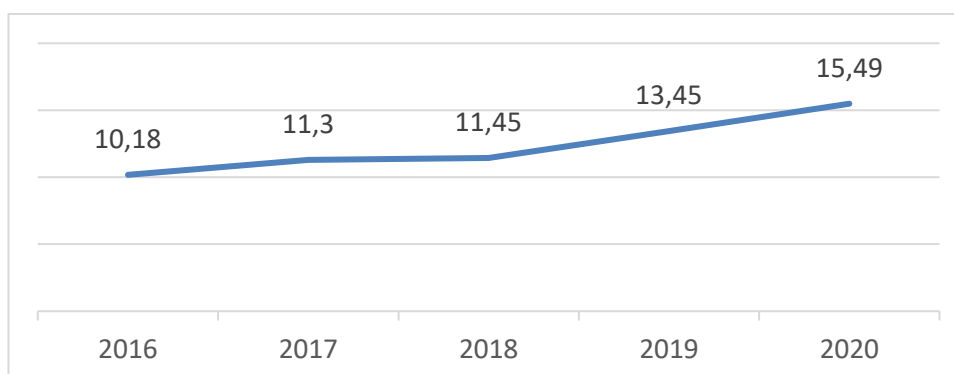
**Tabel 2.25**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Pangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
Pangan							
1.	Ketersediaan pangan utama ( <i>food availability</i> )	%	10,18	11,3	11,45	13,45	15,49
2.	Konsumsi dan keamanan pangan	Gizi/kapita/hari	N/A	N/A	2,8	2,9	N/A

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, 2021

### 1. Ketersediaan Pangan Utama (*Food Availability*)

Ketersediaan pangan utama menunjukkan peningkatan di lima tahun terakhir.



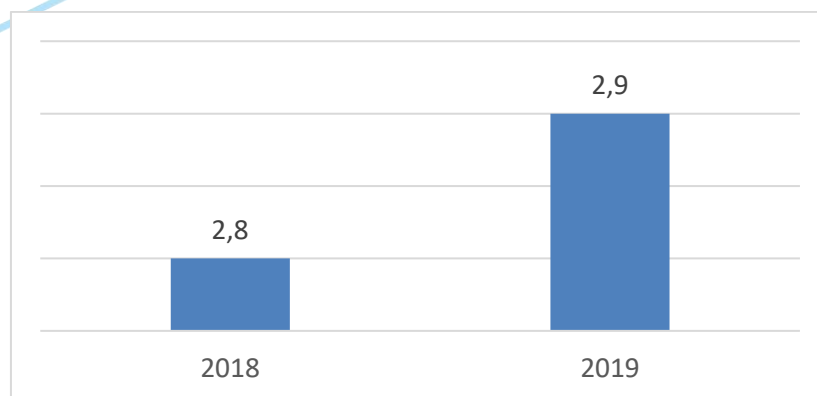
**Gambar 2.73**  
**Ketersediaan Pangan Utama (*Food Availability*)**  
**Di Kota Malang tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, 2021*

Berdasarkan hasil analisis kajian dokumen KLHS RPJMD Tahun 2018 (2018:47-48) menjelaskan bahwa keberhasilan ketersediaan pangan utama (*Food Availability*) di Kota Malang ditandai dengan harus adanya pemerataan di setiap kecamatan di Kota Malang. Kota Malang sendiri memiliki 5 Kecamatan yang harus di penuhi ketersediaan pangan.

### 2. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Terjadi kenaikan nilai konsumsi dan keamanan pangan dari tahun 2018 dengan nilai 2,8 menjadi 2,9 di tahun 2019. Ditahun 2018 Kota Malang sudah berhasil meraih penghargaan kategori bidang Keamanan Pangan sekaligus mendapat penghargaan dari TP PKK Provinsi Jawa Timur untuk Bidang Pemanfaatan Lahan untuk Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Gizi Keluarga. Prestasi ini semakin meningkat di tahun 2019 dengan naiknya nilai konsumsi dan keamanan pangan yang meningkat di tahun 2019.



**Gambar 2.74**  
**Konsumsi dan Keamanan Pangan di Kota Malang**  
**Tahun 2018-2019**

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, 2021*

#### **D. Pertanian**

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pertanian Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.26**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Pertanian**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2020**

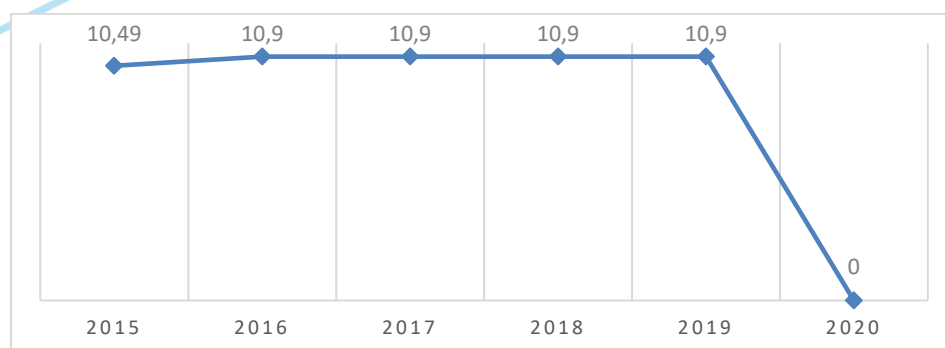
No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Pertanian</b>								
1.	Persentase Bidang Lahan Aset Daerah yang Bersertifikat	%	10,49	10,9	10,9	10,9	10,9	N.A
2.	Persentase penyelesaian sengketa lahan asset daerah	%	66,66	46,66	45,82	26,652	13,816	N.A

*Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang*

##### **1. Persentase Bidang Lahan Aset Daerah yang Bersertifikat**

Adapun persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat di Kota Malang pada tahun 2015-2019, dapat diketahui persentase tidak mengalami perubahan. Di tahun 2020 karena terbatasnya kegiatan yang dilaksanakan akibat pandemi COVID-19.





**Gambar 2.75**

**Persentase Data Aset Daerah Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntutannya Di Kota Malang Tahun 2015-2020**

*Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, 2021*

Pada tahun 2015, capaian persentase data aset daerah yang akurat sesuai pemanfaatan dan peruntutannya di Kota Malang adalah sebesar 35, pada tahun 2016 sebesar 48,25, pada tahun 2017 sebesar 62,69. Sedang pada tahun 2018 proyeksi capaian persentase data aset daerah yang akurat sesuai pemanfaatan dan peruntutannya di Kota Malang adalah sebesar 68,527 dan proyeksi pada tahun 2019 sebesar 78,14.

### **E. Lingkungan Hidup**

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan lingkungan hidup Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

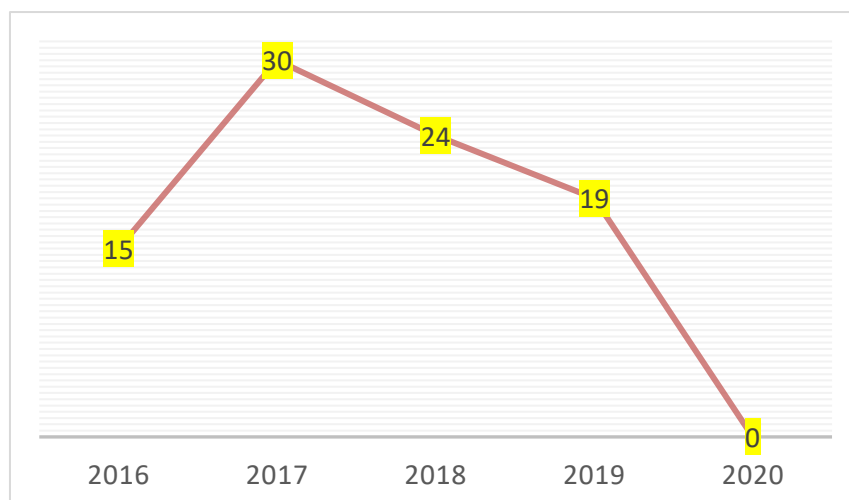
**Tabel 2.27**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Lingkungan Hidup**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase perusahaan dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).	%	15	30	24	19	N.A
2.	IKLHD	%	-	81,38	-	65,27	75,98

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 2021*

### 1. **Persentase Perusahaan dan/atau Kegiatan yang Memenuhi Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

Berikut adalah capaian indikator Persentase Perusahaan dan/atau Kegiatan yang Memenuhi Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Malang.



**Gambar 2.76**

### **Perusahaan dan/atau Kegiatan yang Memenuhi Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 2021*

Menurunnya angka pemenuhan syarat pengelolaan limbah B3 di Kota Malang taun 2017 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman pengelolaan limbah bahan B3. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup perlu untuk melakukan sosialisasi dan inovasi dalam hal kesadaran penanganan limbah B3.

### 3. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kota Malang (IKLHD) mengalami peningkatan di tahun 2020. Meningkat di tahun 2020. Berikut data IKLH dibandingkan dengan IKLH provinsi dan juga nasional:

**Tabel 2.28**  
**Data IKLH Kota Malang, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020**

Tahun	Kota Malang	Jawa Timur	Nasional
2016	-	66,81	65,73
2017	81,38	66,29	66,46
2018	82,15	66,36	66,5
2019	65,27	67,10	66,55
2020	75,98	67,70	70,27

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021*

Data IKLH Kota Malang yang diperoleh dari sumber data tidak lengkap lima tahun karena pada tahun tersebut tidak ada penghitungan. Jika dibandingkan dengan Jawa Timur dan juga Nasional, maka nilai IKLH Kota Malang lebih tinggi. Baik di tahun 2017, 2018, 2019 maupun di tahun 2020. Akan tetapi capaian IKLH yang tinggi di Kota Malang ini dibandingkan Provinsi dan Nasional, belum mencapai target yang ditetapkan pada RPJMD Kota Malang dimana tahun 2019 menetapkan target 82,92 dan tahun 2020 menetapkan target 83,69. Sedangkan di Provinsi Jawa Timur angka IKLH yang dicapai sudah memenuhi target pada ditetapkan oleh provinsi.

Lingkungan hidup erat kaitannya dengan kebersihan dan pengelolaan sampah, berikut adalah data timbunan sampah di Kota Malang.

**Tabel 2.29**  
**Data Timbunan Sampah Kota Malang Tahun 2018-2020**

Tahun	Timbunan Sampah Kota Pertahun (Ton/Tahun)
2018	597.079,41
2019	244.720,24
2020	246.050,00

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 2021*

Data timbunan sampah yang diperoleh dari sumber data hanya tiga tahun. Data timbunan sampah ini menunjukkan ada pengurangan yang sangat signifikan di dari tahun 2018 ke tahun 2019. Akan tetapi timbunan ini kembali meningkat di tahun 2020. Data timbunan sampah

ini akan lebih terbaca jika disandingkan dengan data sampah yang tertangani.

**Tabel 2.30**  
**Data Penanganan Sampah Kota Malang Tahun 2018-2020**

Tahun	Timbulan Sampah Kota Pertahun (Ton/Tahun)
2018	192.464,50
2019	186.936,58
2020	185.701,24

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 2021*

Setelah disandingkan maka akan diperoleh timbulan sampah yang tertangani. Dimana tahun 2018 yaitu 32,23% sampah yang tertangani, tahun 2019 sebanyak 76,39%. Dan ditahun 2020 sebanyak 75,47% sampah yang tertangani. Penurunan penanganan sampah sebesar 0,92% ini perlu mendapat perhatian

#### **F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

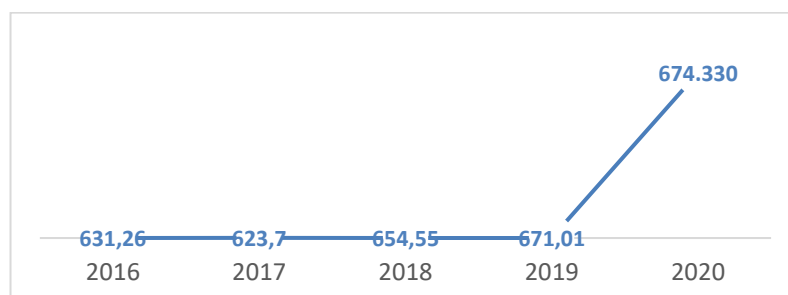
**Tabel 2.31**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1.	Jumlah penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Jiwa	631,26	623,7	654,55	671,01	674.330
2.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Lembar	19.675	19.617	18.229	17.741	19.422
3.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	Lembar	69.172	65.000	69.816	69.963	933.739
4.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	Lembar	4,379	5,835	5,835	5,835	526,33
5.	Cakupan Penertbitan KIA	Lembar	-	-	16,731	25,938	24,091

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2021*

### 1. Jumlah Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk

Tahun 2020 jumlah penduduk ber KTP per satuan penduduk meningkat tajam. Hal ini menandai sosialisasi kesadaran untuk mempunyai KTP dirasa cukup berhasil.

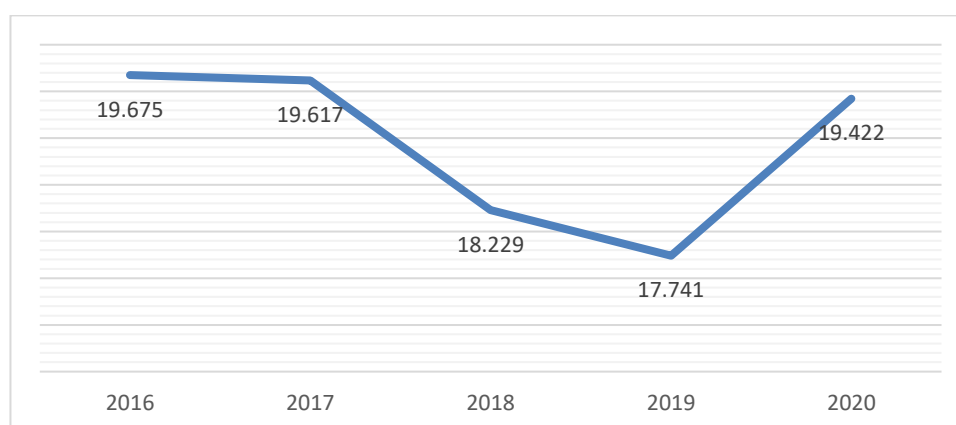


**Gambar 2.77**  
**Capaian Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk**  
**Di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2021*

### 2. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Cakupan penerbitan akta kelahiran juga meningkat tajam di tahun 2020 setelah mengalami penurunan di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang meskipun di masa pandemic covid-19 tetap maksimal.

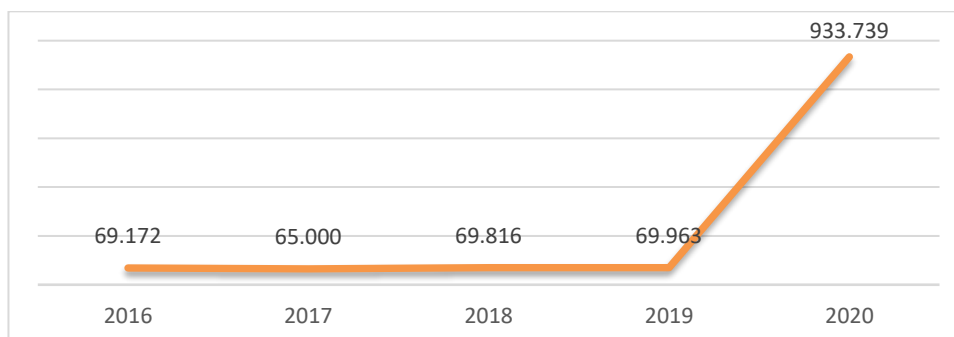


**Gambar 2.78**  
**Capaian Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Malang**  
**Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2021*

### 3. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Cakupan penerbitan Kartu Keluarga juga mengalami lonjakan di tahun 2020. Hal ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap tertib administrasi kependudukan.

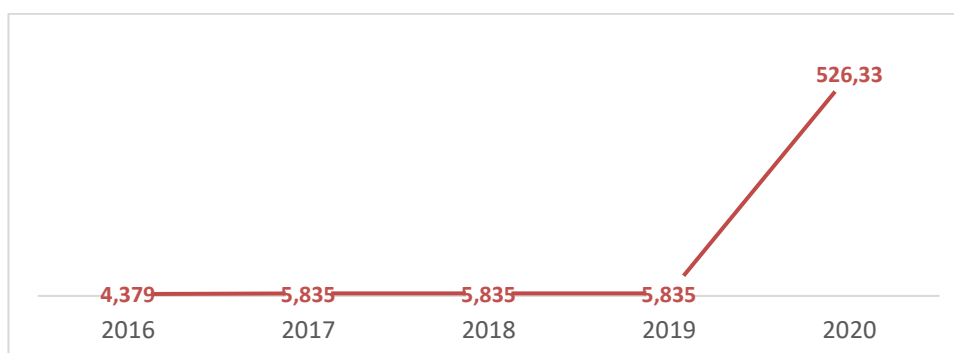


**Gambar 2.79**  
**Capaian Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga di Kota Malang Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2021

### 4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

Pandemi COVID 19 yang terjadi tahun 2020 juga menyebabkan melonjaknya angka cakupan penerbitan Akta kematian.



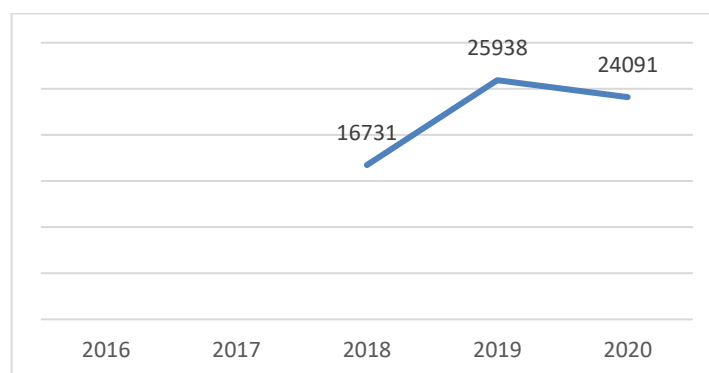
**Gambar 2.80**  
**Capaian Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian di Kota Malang Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2021

### 5. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) mempunyai manfaat yang sangat penting dalam pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan dan transportasi. Penerbitan KIA ini dimulai tahun 2018. Di masa pandemi COVID 19 jumlah cakupan penerbitan KIA mengalami penurunan sebanyak 7,21% dari tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan dalam masa pandemic orang tua cenderung ingin membatasi anaknya dalam hal pelayanan publik dan tempat umum, sehingga merasa belum perlu mengurus KIA. Selain itu, ditahun 2020 Kota Malang belum mensyaratkan KIA dalam pendaftaran pendidikan meskipun sudah dilakukan sosialisasi bekerjasama dengan bidang pendidikan untuk sosialisasinya. Persyaratan KIA untuk pendaftaran sekolah baru berlaku di taun 2021.



**Gambar 2.81**  
**Capaian Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Malang Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2021

### G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.32**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2020**

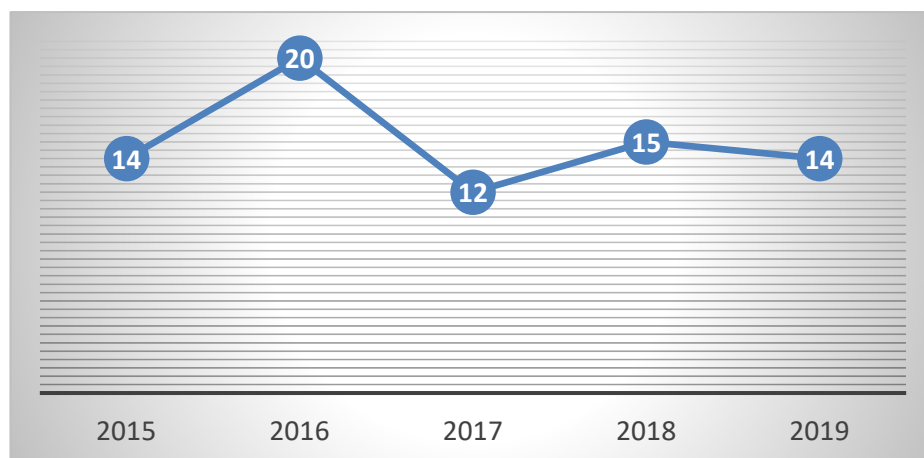
No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pemberdayaan Masyarakat								
1.	Jumlah LSM Aktif	LSM	14	20	12	15	14	96
2.	Jumlah LSM dan Ormas yang mengikuti pembinaan	Organisasi	170	170	170	111	125	

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, 2021

#### 1. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aktif

Pada tahun 2015 jumlah LSM aktif di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 14 LSM. Pada tahun 2016 jumlah LSM aktif di

Kota Malang kembali mengalami peningkatan menjadi 20 LSM. Namun pada tahun 2017 jumlah LSM Aktif di Kota Malang mengalami penurunan, menjadi 12 LSM. Pada tahun 2018 jumlah LSM aktif di Kota Malang kembali mengalami peningkatan menjadi sebanyak 14 LSM. Pada tahun 2019 jumlah LSM aktif di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 14 LSM.



**Gambar 2.82**

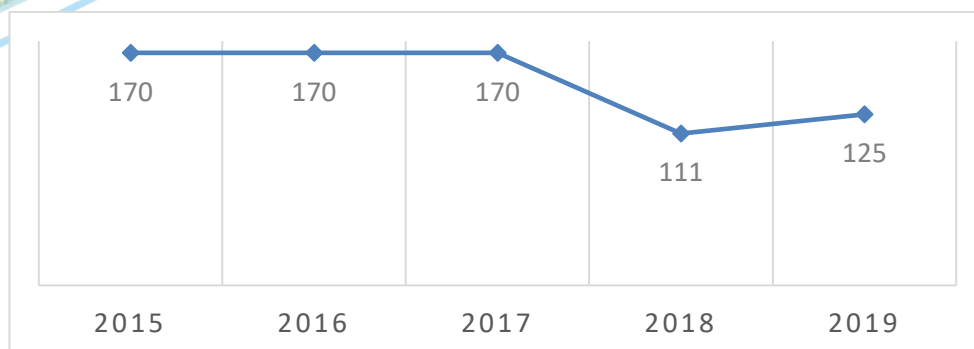
**Jumlah LSM Aktif di Kota Malang Tahun 2015-2019**

*Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, 2021*

## 2. Jumlah LSM dan Ormas yang Mengikuti Pembinaan

Pada tahun 2015 terdapat penambahan jumlah LSM dan Ormas di Kota Malang menjadi 170 organisasi dan seluruhnya telah mengikuti pembinaan pula. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 jumlah LSM dan Ormas di Kota Malang masih sama dengan tahun 2015, yakni 170 organisasi dan seluruhnya telah mengikuti pembinaan. Pada tahun 2018 jumlah LSM dan Ormas di Kota Malang adalah 111 organisasi dan seluruhnya telah mengikuti pembinaan. Pada tahun 2019 jumlah LSM dan Ormas di Kota Malang adalah 125 organisasi dan seluruhnya telah mengikuti pembinaan.





**Gambar 2.83**  
**Persentase LSM dan Ormas yang Mengikuti Pembinaan**  
**Di Kota Malang Tahun 2015-2019**

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, 2021

Pada tahun 2020, LSM dan Ormas digabung menjadi satu dan jumlahnya adalah 96.

#### H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.33**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan**  
**Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2016-2020**

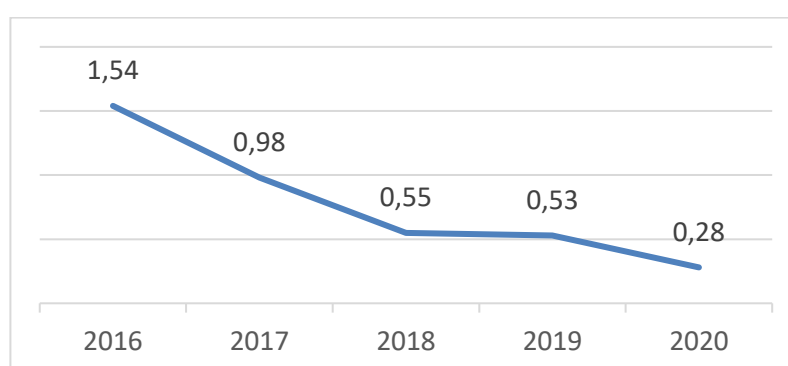
No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1.	Persentase Laju pertumbuhan penduduk	%	1,54	0,98	0,55	0,53	0,28
2.	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif	%	77,36	78,8	80,02	81,13	73,89
3.	Ratio petugas Lapangan (PLKB/PKB)		0,89	0,89	0,8	0,75	0,72
4.	Ratio petugas pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBD) di setiap kelurahan		1,1	1,1	1,098	1,096	1,16
5.	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) yang ber-KB	%	100	100	104,526	108,472	70,5
6.	jumlah kegiatan pembinaan keluarga	Kegiatan	14	18	15	14	0
7.	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( unmet need )	%	24,9	22,53	24,2	22,24	25,59
8.	Angka kelahiran remaja ( perempuan usia 15 - 19 ) per 1000 perempuan usia 15 - 19 tahun ( ASFR 15 - 19 )		15	-	-	39	52
9.	Total Fertility Rate ( TFR )		1,79	1,8	1,8	1,68	1,79

10.	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 29 tahun	%	77,21	77,47	77,96	75,49	73,90
-----	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

### 1. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

Adapun capaian indikator kinerja Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Malang pada tahun 2016-2020 relatif mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana.

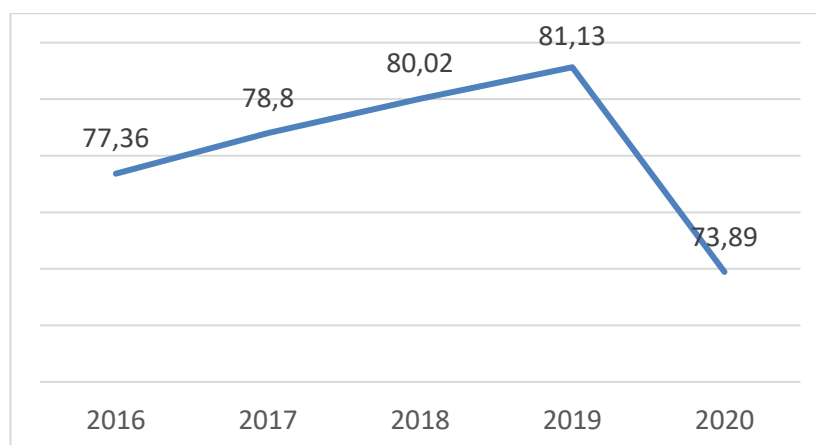


**Gambar 2.84**  
**Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Malang Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2021

### 2. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Menjadi Peserta KB Aktif

Persentase pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif di tahun 2020 mengalami penurunan cukup tajam, adanya pembatasan sosial *distancing* dikira sebagai pemicu penurunan angka ini.

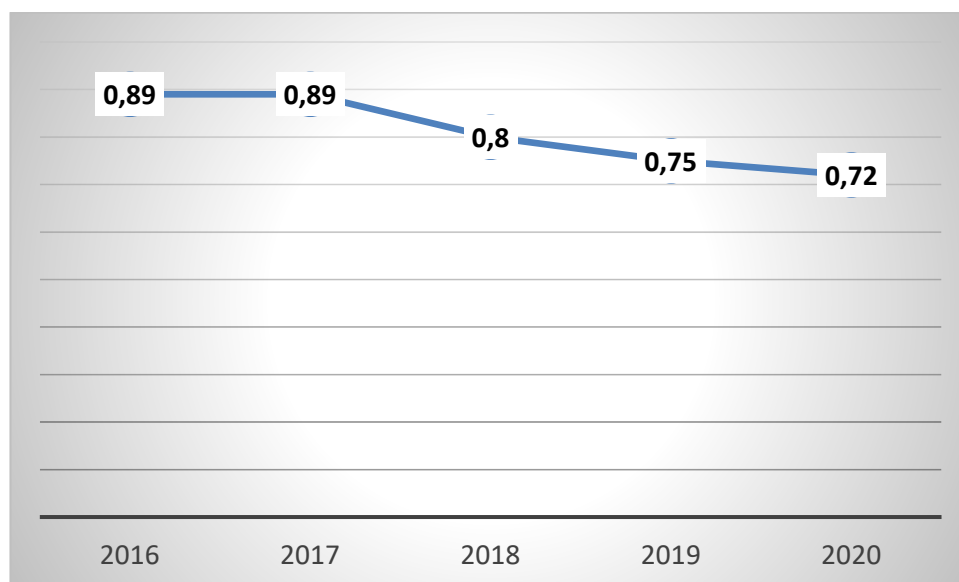


**Gambar 2.85**  
**Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Menjadi Peserta KB Aktif di Kota Malang Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2021

### 3. Ratio Petugas Lapangan (PLKB/PKB) Di Setiap Kelurahan

Turunnya rasio petugas lapangan PLKB/PKB juga merupakan salah satu penyebab terjadi kenaikan cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi di tahun 2020 selaras dan menurunnya persentase PUS menjadi peserta KB aktif.

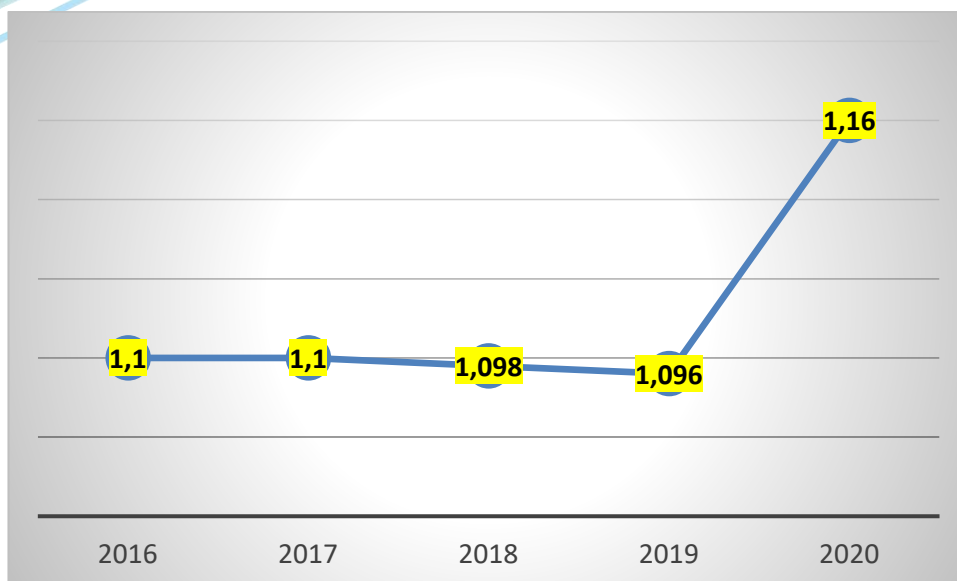


**Gambar 2.86**  
**Ratio Petugas Lapangan (PLKB/PKB) Di Setiap Kelurahan di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2021*

### 4. Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBD) Di Setiap Kelurahan

Berikut adalah gambaran capaian kinerja ratio petugas pembantu pembina KB kelurahan (PPKBD) di setiap kelurahan di Kota Malang.



**Gambar 2.87**

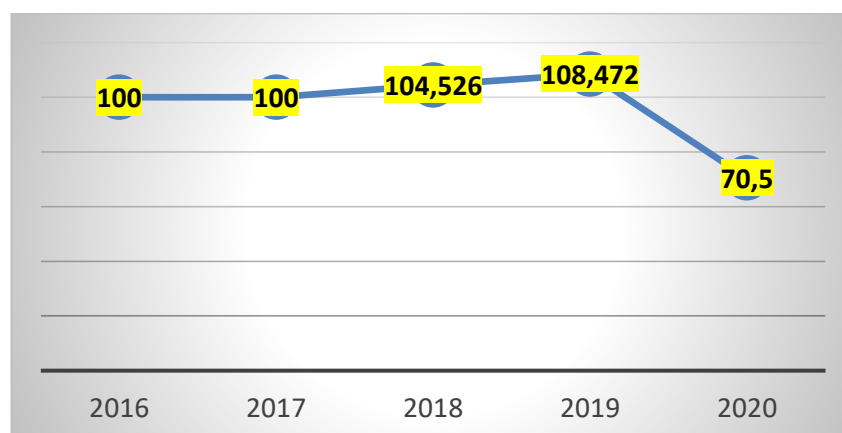
**Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBD) Di Setiap Kelurahan di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2021*

Kenaikan PPKBD di setiap kelurahan merupakan langkah substitusi untuk menangani menurunnya PLKB/PKB.

**5. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)**

Pandemic COVID 19 menyebabkan angka cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS menurun.



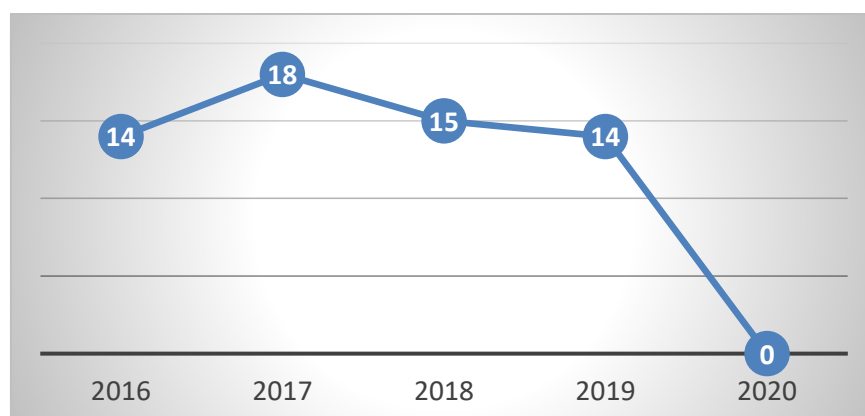
**Gambar 2.88**

**Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) Masyarakat di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2021*

## 6. Jumlah Kegiatan Pembinaan Keluarga

Tidak adanya kegiatan pembinaan keluarga tahun 2020 karena anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan pandemi COVID 19.

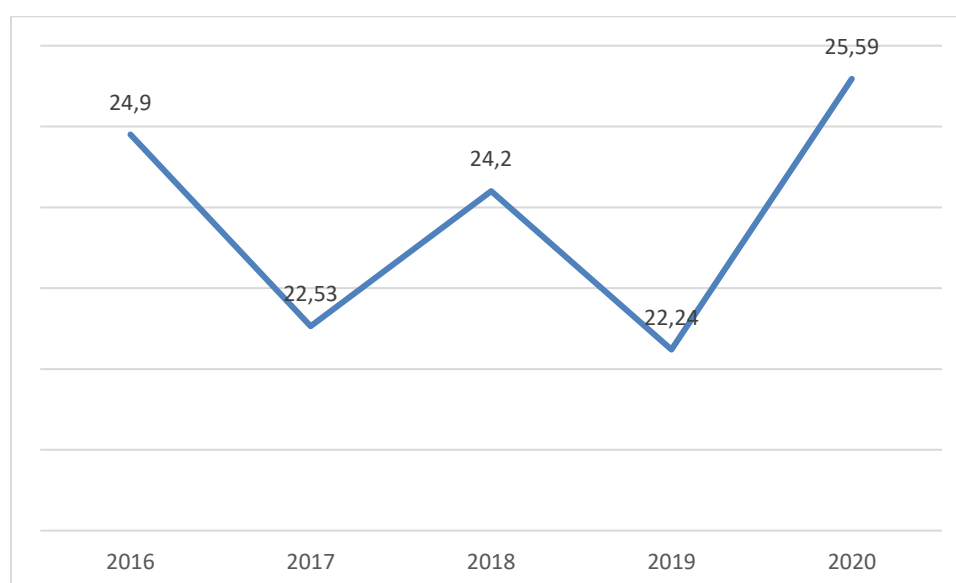


**Gambar 2.89**  
**Jumlah Kegiatan Pembinaan Keluarga di Kota Malang Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2021

## 7. Jumlah PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (UNMET Need)

Terjadi kenaikan cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi di tahun 2020 selaras dengan menurunnya persentase PUS menjadi peserta KB aktif. Banyaknya pengurangan tenaga kerja dan masyarakat yg harus tinggal dirumah sehingga lupa akan saatnya ber KB sehingga banyak PUS yang gagal dan akhirnya hamil.



**Gambar 2.90**  
**UNMET NEED Kota Malang Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2021

### **8. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15 - 19) Per 1000 Perempuan Usia 15 - 19 Tahun (ASFR 15 - 19)**

ASFR adalah angka yang menunjukkan jumlah kelahiran pada wanita usia 15-19 tahun. Data yang didapatkan dari dinas terkait tidak lengkap 5 tahun. Akan tetapi dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi kenaikan angka ASFR. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh angka Unmed Need yang juga naik.

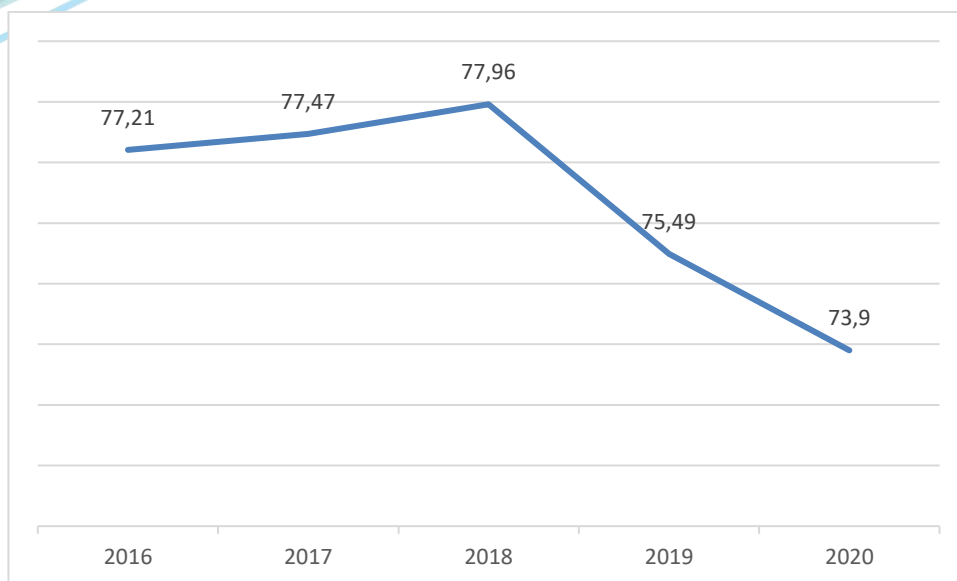
### **9. Total Fertility Rate (TFR)**

Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. TFR adalah indikator yang digunakan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan penurunan tingkat kelahiran.

Angka TFR Kota Malang dapat diinterpretasikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara rata-rata mempunyai 1-2 anak selama masa suburnya. Akan tetapi angka tahun 2020 sebesar 1,79 lebih tinggi daripada tahun 2019 yaitu 1,68. Hal ini berarti tahun 2020 lebih mendekati angka 2. Hal ini perlu juga diperhatikan mengingat angka ASFR dan juga Unmet Need juga naik di tahun 2020.

### **10. Angka Pemakaian Kontrasepsi/ Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 29 Tahun**

Angka pemakai kontrasepsi/Cpr bagi perempuan menikah usia 15-29 tahun ini mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Tentu saja hal ini kurang baik, mengingat pemakaian kontrasepsi ini erat kaitannya dengan program keluarga berencana. Dan tentu saja akan berpengaruh pada hal lainnya seperti pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.



**Gambar 2.91**

**Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15-29 Tahun di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2021*

### I. Perhubungan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perhubungan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.34**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Perhubungan**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
Perhubungan							
1.	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum	Orang	3.485.717	2.448.000	1.550.660	1.550.660	1.451.200

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Malang, 2021*

#### 1. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini selain adanya perubahan kebiasaan dan perkembangan jaman, angkutan umum kurang diminati. Selain pelayanannya yang kurang maksimal, adanya

angkutan berbasis aplikasi juga menjadi salah satu sebab berkurangnya penumpang di angkutan umum. Selain itu, Penurunan tersebut dikarenakan adanya aturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan terminal Tipe B, yang menyatakan bahwa Terminal Tipe B menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh karenanya data jumlah orang yang Terangkut Angkutan Umum di dua Terminal Tipe B yang ada di Kota Malang pada tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak lagi tercatat di Dinas Perhubungan Kota Malang.

#### **J. Komunikasi dan Informatika**

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.35**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

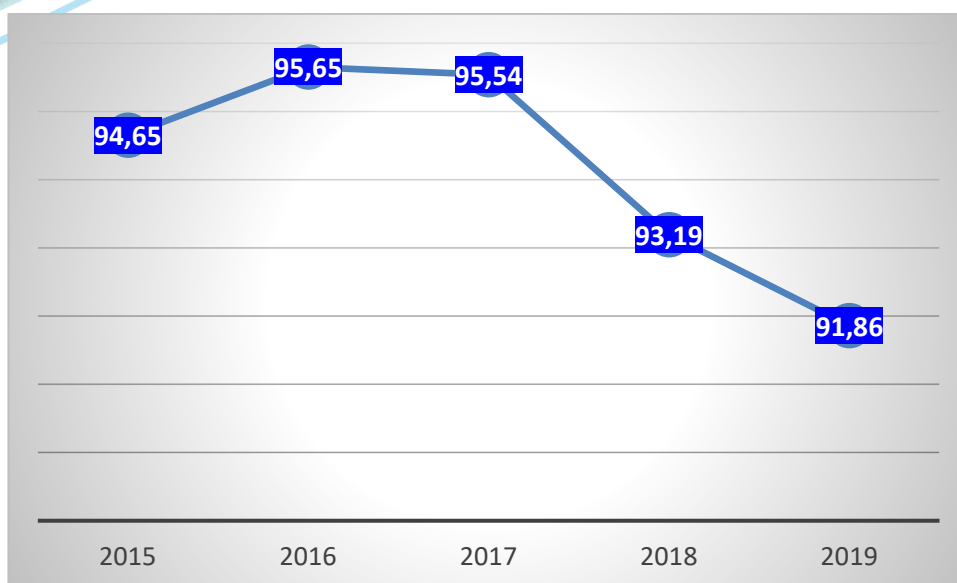
No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase pengguna informasi publik yang terlayani	%	94,65	95,65	95,54	93,19	91,86

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, 2021*

#### **1. Persentase Pengguna Informasi Publik yang Terlayani**

Persentase pengguna informasi publik yang terlayani mengalami penurunan dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2020, hal ini perlu ada perhatian untuk peningkatan pelayanan informasi publik.





**Gambar 2.92**

**Capaian Persentase Pengguna Informasi Publik yang Terlayani di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, 2020*

**K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.36**

**Hasil Kinerja Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

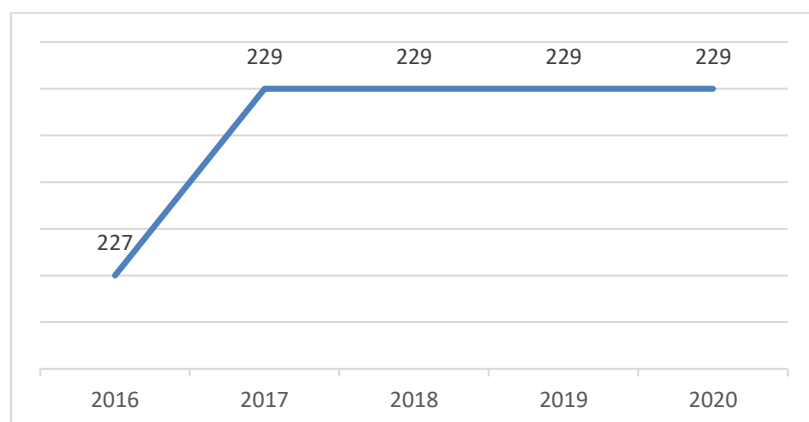
No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah KUMKM yang telah mendapat pembinaan dalam prosedur mengakses permodalan	227	229	229	229	229
2.	Persentase wirausaha mikro binaan yang berkembang	4,65	4,67	4,88	5	5
3.	Jumlah Koperasi Aktif	549	539	329	322	341
4.	Jumlah Koperasi tidak aktif	169	205	463	390	418
5.	Jumlah Koperasi Sehat	-	-	N.A	N.A	123
6.	Jumlah Anggota Koperasi	92.666	91.749	115.340	65.178	70.758

7.	Jumlah Permodalan Sendiri (Koperasi)	424.092.372	621.382.016	640.236.043	442.329.162	476.017.966
8.	Jumlah Permodalan Luar (Koperasi)	584.460.406	870.746.402	899.002.742	588.556.006	763.717.728
9.	Jumlah Usaha Mikro	2764	2999	3294	8870	9870

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2021

### 1. Jumlah KUMKM yang Telah Mendapat Pembinaan dalam Prosedur Mengakses Permodalan

Jumlah KUMKM yang memperoleh binaan stagnan dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2020. Hal ini perlu mendapat evaluasi lebih lanjut apakah program yang mendukung indikator ini sudah berjalan dengan baik atau perlu dilakukan inovasi atau diversifikasi pembinaan.



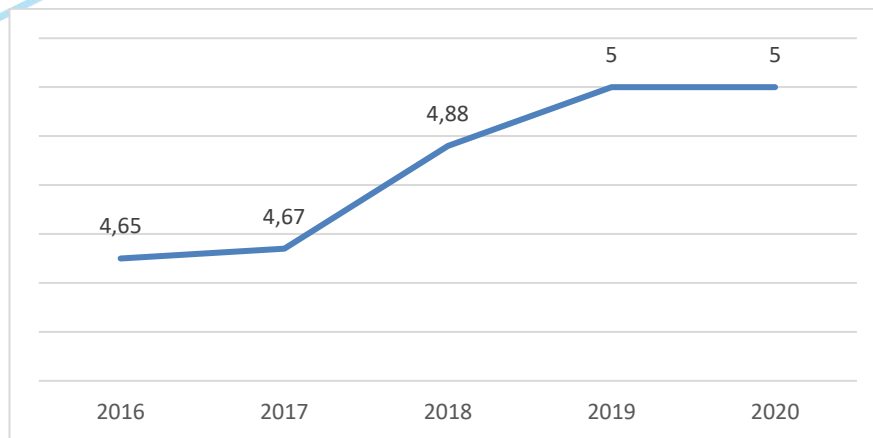
Gambar 2.93

### Jumlah KUMKM yang Telah Mendapat Pembinaan dalam Prosedur Mengakses Permodalan di Kota Malang Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2021

### 2. Persentase Wirausaha Mikro Binaan yang Berkembang

Kecilnya angka wirausaha mikro binaan yang berkembang menunjukkan bahwa perlu adanya pendekatan khusus kepada usaha mikro. Pendekatan tersebut bisa berupa penyuluhan, kemitraan atau klinik bisnis dengan *progress* yang terarah dan terukur.

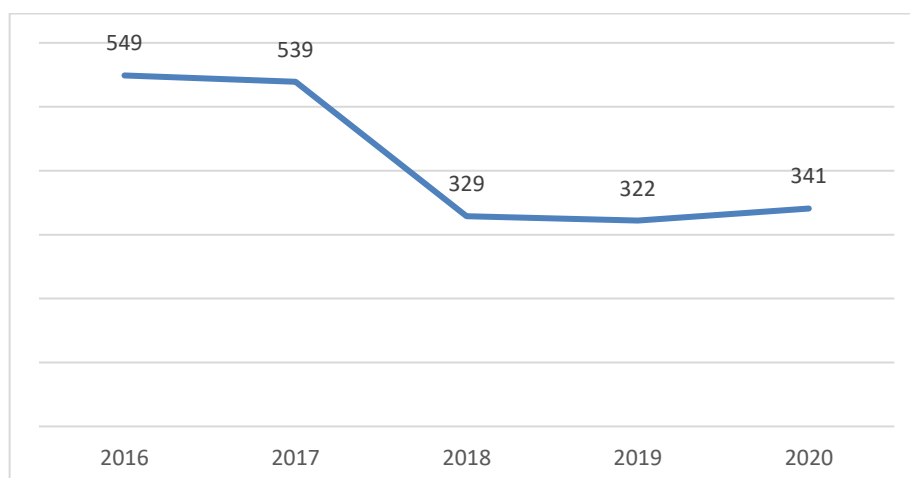


**Gambar 2.94**  
**Persentase Wirausaha Mikro Binaan yang Berkembang**  
**di Kota Malang Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2021

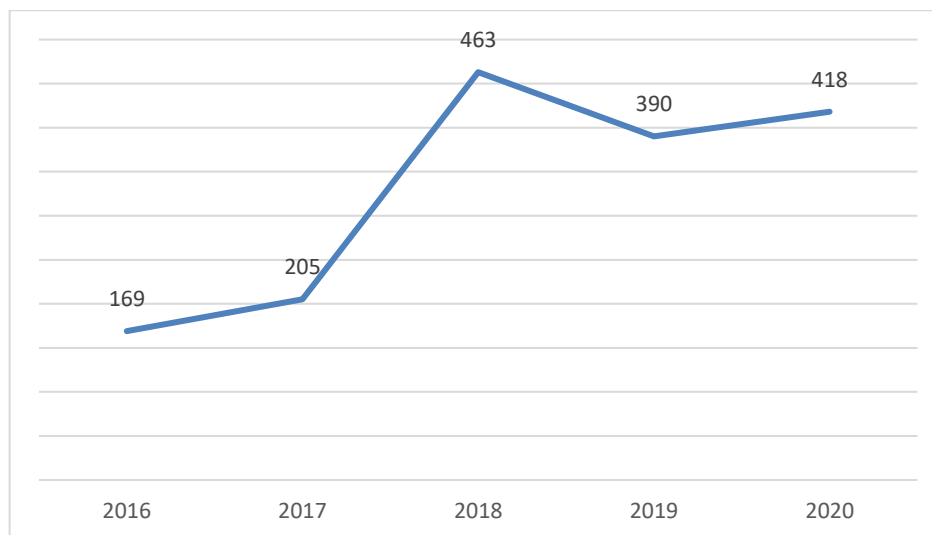
### 3. Jumlah Koperasi Aktif

Koperasi aktif di Kota Malang mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2019 yaitu sebesar 329 koperasi daripada tahun sebelumnya 2018 sebanyak 539 koperasi aktif. Pada masa RPJMD 2018-2023 jumlah koperasi aktif sempat mengalami penurunan di tahun 2019 akan tetapi kemudian mengalami kenaikan kembali di tahun 2020. Meningkatnya angka koperasi aktif, terutama koperasi simpan pinjam di masa pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu indikasi bahwa koperasi merupakan lembaga yang dekat dengan masyarakat. Koperasi lebih dipercaya dan lebih memberi rasa aman dalam hal pembiayaan dengan asas kekeluargaan.



**Gambar 2.95**  
**Jumlah Koperasi Aktif di Kota Malang Tahun 2016-2020**  
 Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2021

#### 4. Jumlah Koperasi Tidak Aktif



**Gambar 2.96**

#### **Jumlah Koperasi Tidak Aktif di Kota Malang Tahun 2016-2020**

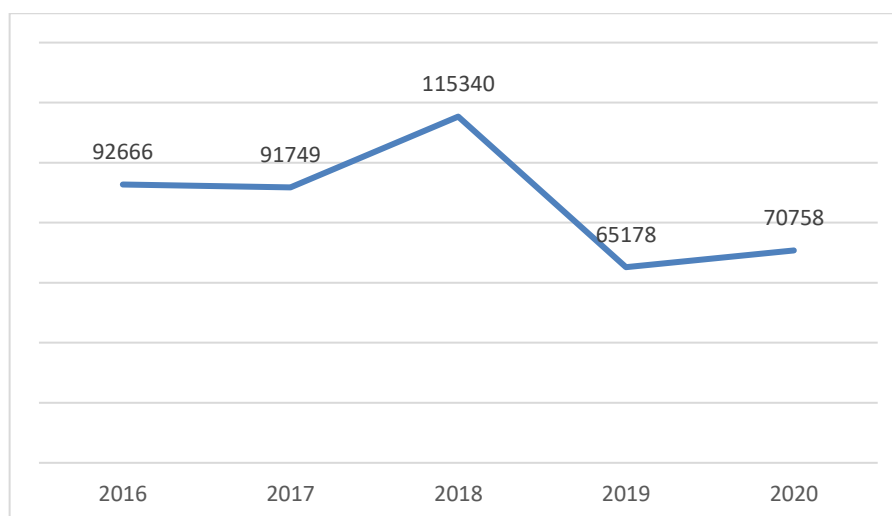
*Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2021*

Jumlah koperasi yang tidak aktif ini selaras dengan jumlah koperasi yang aktif. Yang menarik dari data ini adalah adanya kenaikan jumlah koperasi yang cukup banyak di tahun 2020. Karena meskipun data koperasi tidak aktif menunjukkan angka naik, tapi sebelumnya kita ketahui bahwa jumlah koperasi aktif juga naik.

#### 5. Jumlah Koperasi Sehat

Jumlah koperasi sehat Kota Malang ditahun 2020 berjumlah 123 koperasi. Jumlah ini didapatkan merupakan kumulasi yang terdaftar dan berbadan hukum dari mulai tahun 2018. Sayangnya pada dinas terkait, data koperasi ini belum dibagi dalam series data per tahun. Sehingga tidak diketahui perkembangan jumlah koperasi sehat. Selanjutnya akan dilakukan rekam data series mulai tahun 2018 dimana di tahun ini koperasi sehat menjadi indikator program bidang koperasi. Sehingga dapat dianalisis kenapa dan apa yang menyebabkan berkembang atau menurunnya jumlah koperasi sehat di Kota Malang.

## 6. Jumlah Anggota Koperasi



**Gambar 2.97**

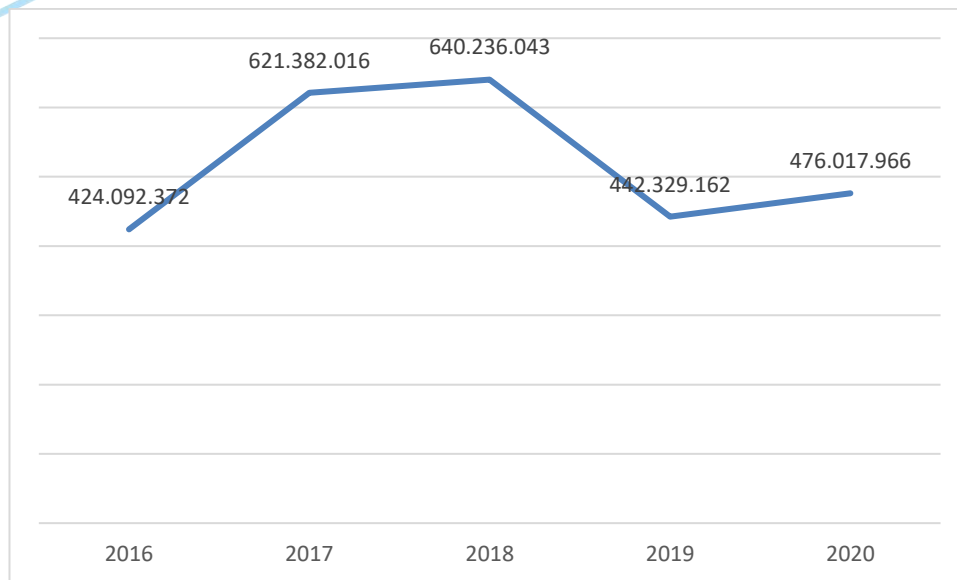
### **Jumlah Anggota Koperasi Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2021*

Jumlah anggota koperasi selaras dengan perkembangan jumlah koperasi aktif. Dimana di tahun 2019 mengalami penurunan karena banyak koperasi. Sedangkan jumlah peningkatan di tahun 2020 masih dibawah capaian jumlah anggota koperasi tertinggi yang dicapai di tahun 2018. Sehingga perlu dilakukan pendampingan dan monitoring agar terus meningkat dan semakin banyak koperasi yang aktif dan diharapkan menjadi koperasi yang sehat.

## 7. Jumlah Permodalan Sendiri

Jumlah koperasi yang pemodalannya sendiri menunjukkan keselarasan dengan jumlah bertambahnya koperasi aktif. Ada penurunan di tahun 2019 selaras dengan turunnya koperasi aktif di tahun tersebut. Dan juga naik karena banyak koperasi baru yang aktif di tahun 2020. Perbandingan dengan permodalan luar akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

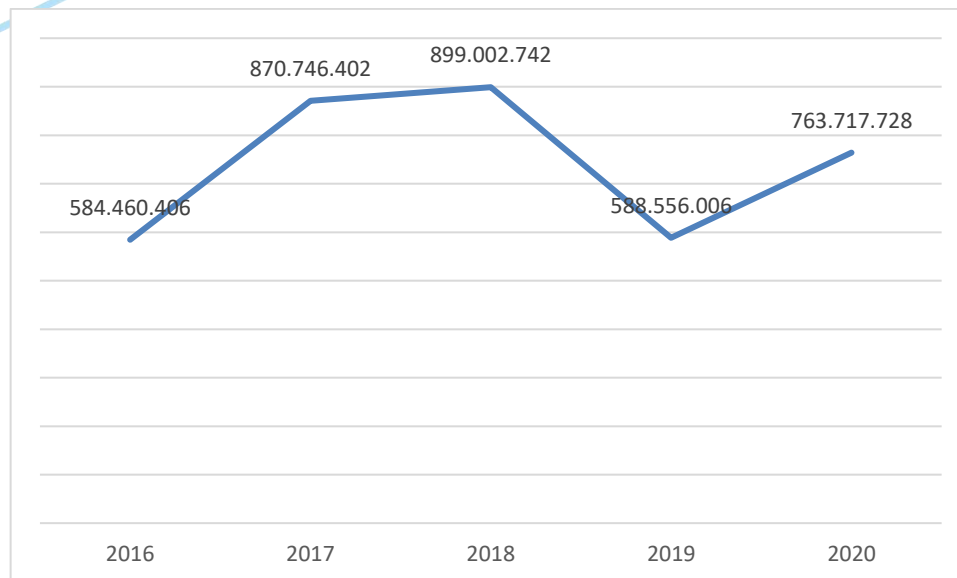


**Gambar 2.98**  
**Jumlah Permodalan Sendiri Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2021*

### 8. Jumlah Permodalan Luar

Perkembangan jumlah permodalan luar ini juga selaras dengan jumlah koperasi aktif. Jumlah koperasi dengan pemodal luar menunjukkan angka yang lebih besar dari tahun ke tahun dibandingkan dengan pemodal sendiri. Permodalan luar adalah modal pinjaman yang bersifat sementara. Modal ini diperoleh dari pihak luar yang diperhitungkan sebagai hutang yang harus dibayarkan kembali sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Karena hal ini, maka akan lebih baik jika modal koperasi berasal dari permodalan sendiri. Sehingga perlu bimbingan bagaimana cara menjadi koperasi sehat mengelola koperasi dengan modal sendiri.

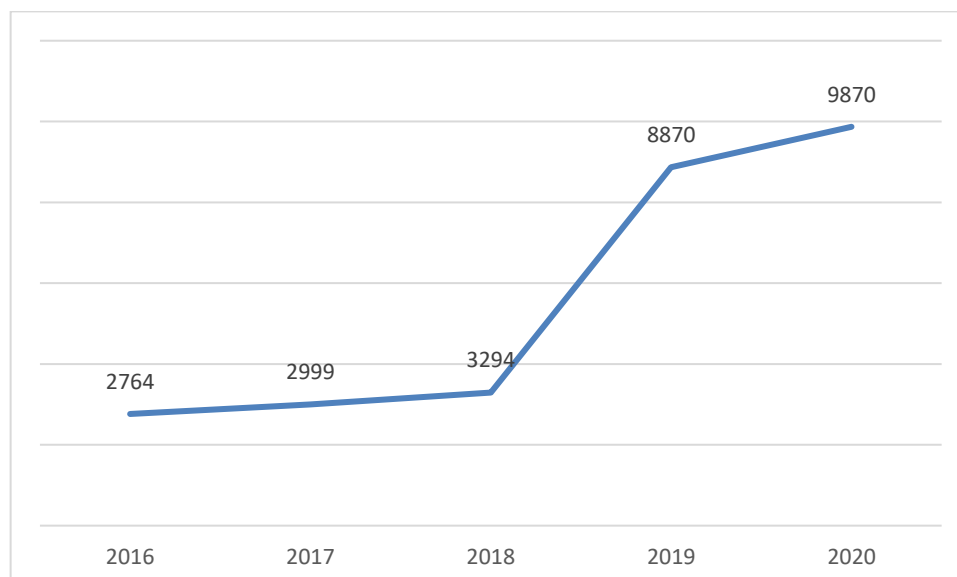


**Gambar 2.99**

**Jumlah Permodalan Luar Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2021

**9. Jumlah Usaha Mikro**



**Gambar 2.100**

**Jumlah Usaha Mikro Kota Malang Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2021

Kota Malang merupakan kota industri dan perdagangan. Dalam hal ini memang didominasi oleh usaha mikro dan kecil. Jumlah usaha mikro ini bertambah dari tahun ke tahun. Meskipun ada usaha yang mati tapi jumlah yang tumbuh juga bertambah. Ini menunjukkan bahwa Kota Malang merupakan kota yang mempunyai iklim bagus untuk berusaha. Usaha mikro ini perlu mendapat perhatian khusus

untuk bisa ditingkatkan menjadi usaha kecil, menengah dan selanjutnya besar. Pengembangan usaha mikro akan membantu juga membuka lapangan kerja sehingga pengangguran berkurang.

### Data Industri Kreatif

**Tabel 2.37**  
**Jumlah Industri Kreatif Kota Malang**

No.	Jenis Industri Kreatif	Jumlah
1.	Desain Interior	9
2.	Desain Komunikasi Visual	17
3.	Desain Produk	668
4.	Film, Video, dan Animasi	43
5.	Kriya	802
6.	Kuliner	5513
7.	Fesyen	3177
8.	Aplikasi dan Game Developer	76
9.	Periklanan	52
<b>Jumlah</b>		<b>10357</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021*

Data industri kreatif Kota Malang bersumber pada sensus ekonomi Kota Malang tahun 2016. Dari data tersebut terlihat bahwa industry kreatif yang paling banyak mendominasi di Kota Malang adalah industry Kuliner, selanjutnya adalah industry fesyen dan disusul oleh industry kriya.

### L. Penanaman Modal

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan penanaman modal Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



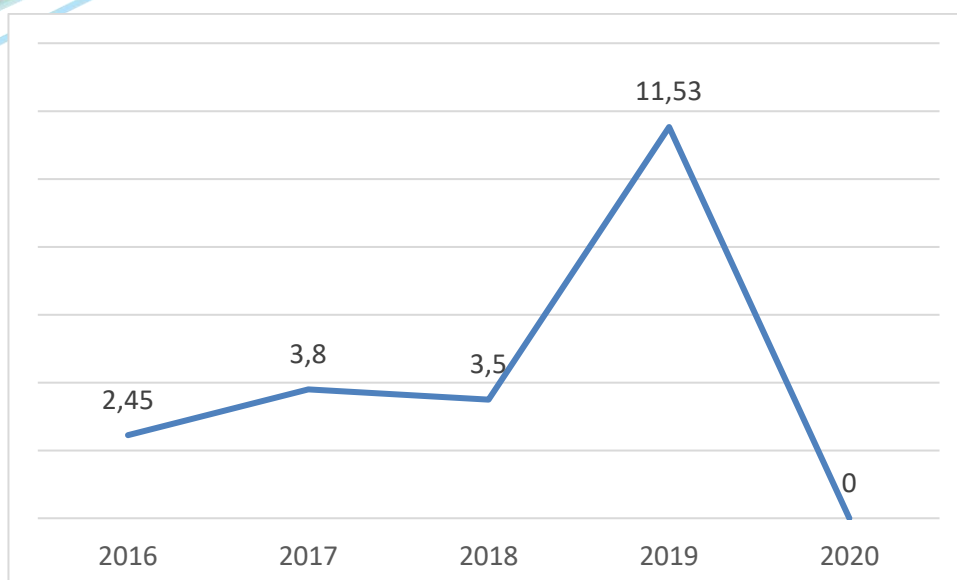
**Tabel 2.38**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Penanaman Modal**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
Penanaman Modal							
1.	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	%	2,45	3,8	3,5	11,53	0,00
2.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Investor	-	-	-	816	515

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021*

### **1. Persentase Peningkatan Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah**

Pada tahun 2016 persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah di Kota Malang sebesar 2,45, dan capaian ini mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu menjadi sebesar 3,8. Dengan meningkatkan kinerja penanaman modal dan investasi daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di kota Malang dan dapat menciptakan daya saing Kota Malang. Pada tahun 2018 persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah di Kota Malang sebesar 3,5. Capaian kinerja urusan penanaman modal dan investasi daerah Pemerintah Kota Malang mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019. Pada tahun 2019 capaian persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah di Kota Malang adalah sebesar 11,52. Akan tetapi di tahun 2020 pandemi COVID-19 menyebabkan persentase peningkatan nilai penanaman modal di Kota Malang terhenti. Situasi perekonomian sangat mempengaruhi akibat adanya pandemi ini. Sehingga nilainya 0%.



**Gambar 2.101**  
**Capaian Persentase Peningkatan Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021*

## 2. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Data jumlah investor yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya diperoleh data tahun 2019 dan tahun 2020. Dimana jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) turun drastis ditahun 2020 sejumlah 515, sebelumnya investor berskala nasional (PMDN/PMA) sejumlah 816 ditahun 2019. Turunnya jumlah investor ini erat kaitannya dengan pandemi COVID 19. Dimana sektor ekonomi sangat terpengaruh dan mengalami kontraksi.

### M. Kepemudaan dan Olahraga

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kepemudaan dan olahraga Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

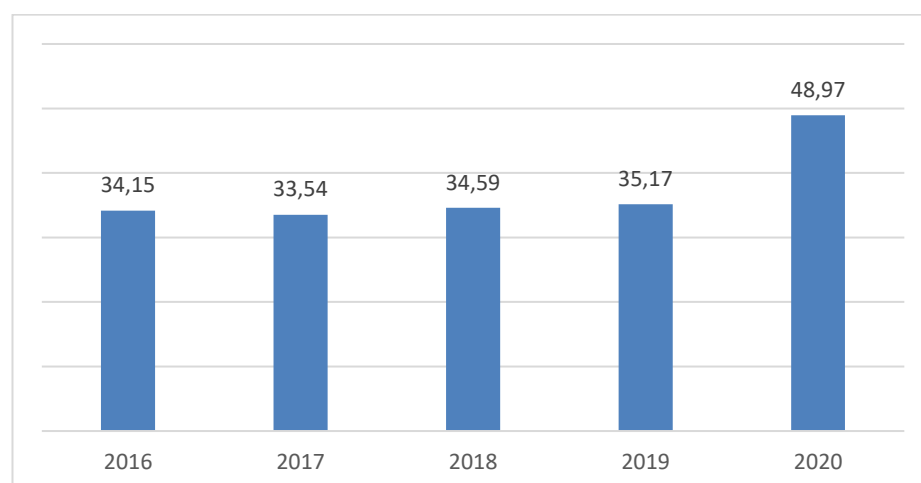
**Tabel 2.39**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
Kepemudaan dan Olahraga							
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	34,15	33,54	34,59	35,17	48,97
2.	Persentase wirausaha muda	%	0,42	0,67	0,606	0,66	0,66
3.	Cakupan pembinaan olahraga	Pembinaan	97	97	97	97	0
4.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Pelatihan	78	80	110	113	113
5.	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	15	11	11	44	0
6.	Sarana dan Prasarana Olahraga	Tempat	-	-	-	-	13

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, 2021

### 1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Tahun 2020 terlihat meningkatnya organisasi pemuda yang aktif. Peningkatan organisasi pemuda ini erat kaitannya dengan adanya pandemic COVID 19, yang menyebabkan organisasi pemuda bermunculan dan bereaksi untuk menyumbangkan tenaga dan fikiran mereka.

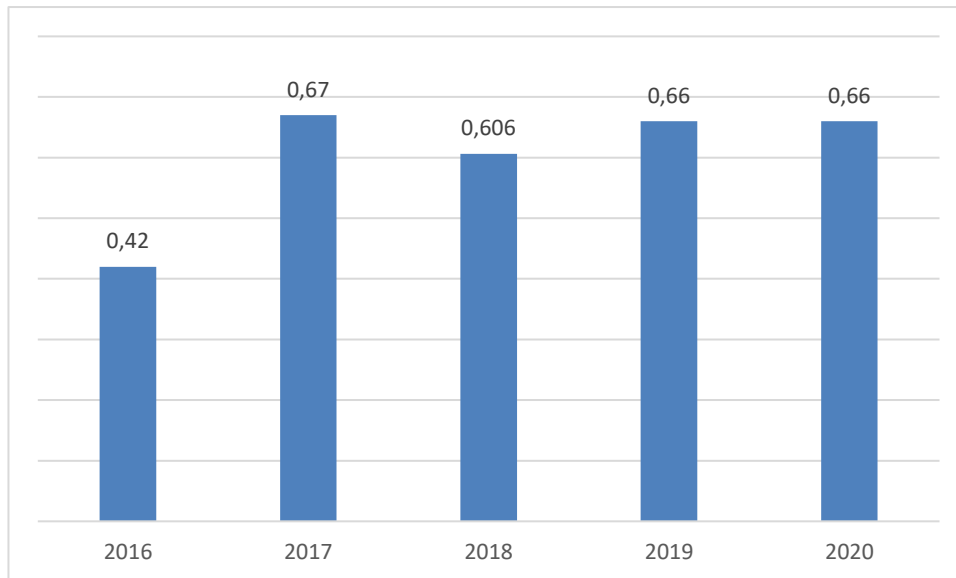


**Gambar 2.102**  
**Capaian Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif**  
**Kota Malang Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kota Malang, 2021

## 2. Persentase Wirausaha Muda

Peningkatan persentase wirausaha muda di Kota Malang ini seiring semakin berkembangnya ekonomi kreatif di Kota Malang yang didominasi oleh para wirausaha muda. Hanya saja untuk tahun 2020 tidak ada perkembangan persentase wirausaha muda di Kota Malang, dan juga tidak dilakukan monitoring dikarenakan pandemi.



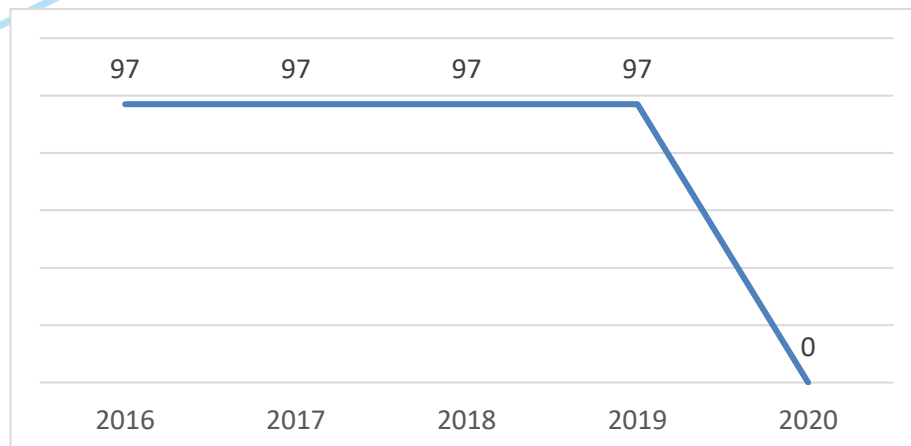
**Gambar 2.103**

### **Persentase Wirausaha Muda di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, 2021*

## 3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Adapun cakupan pembinaan olahraga di Kota Malang pada tahun 2015-2019 mencapai 97 Pembinaan. Hal ini dikarenakan sistem pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang terhadap atlet muda tidak dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan namun dilakukan apabila ada even perlombaan saja, sedangkan di tahun 2020 event olahraga ditiadakan sehingga capaiannya 0 atau tidak ada pembinaan dikarenakan situasi pandemi COVID-19 melarang adanya *event* yang memicu kerumunan masal.



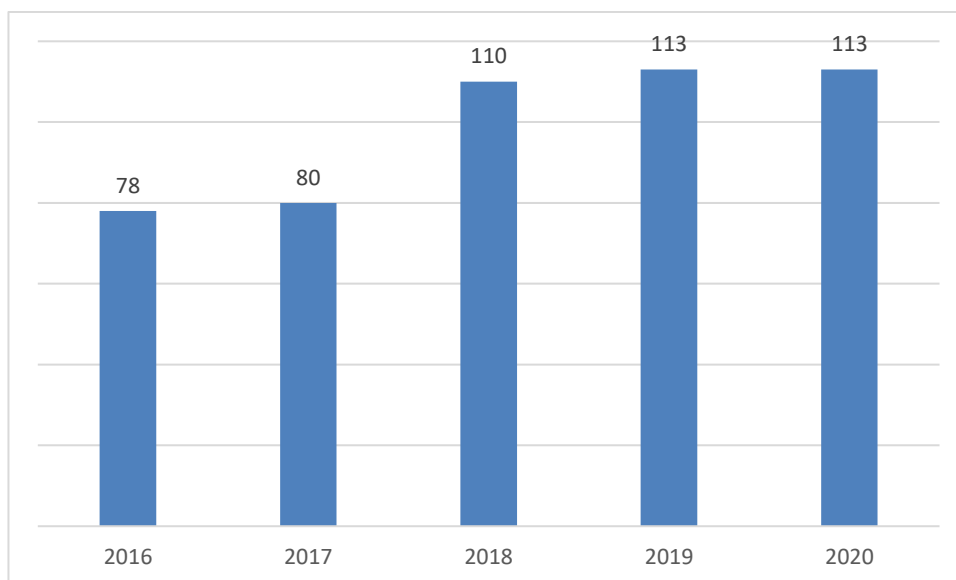
**Gambar 2.104**

**Cakupan Pembinaan Olahraga Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, 2021

#### 4. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Jumlah pelatih yang bersertifikasi meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2019, akan tetapi di tahun 2020 kegiatan sertifikasi pelatih mengalami *refocussing* karena adanya pandemi COVID 19. Sehingga tidak ada pelatihan di tahun tersebut sehingga jumlah pelatih yang bersertifikasi tetap seperti tahun sebelumnya yaitu 113.



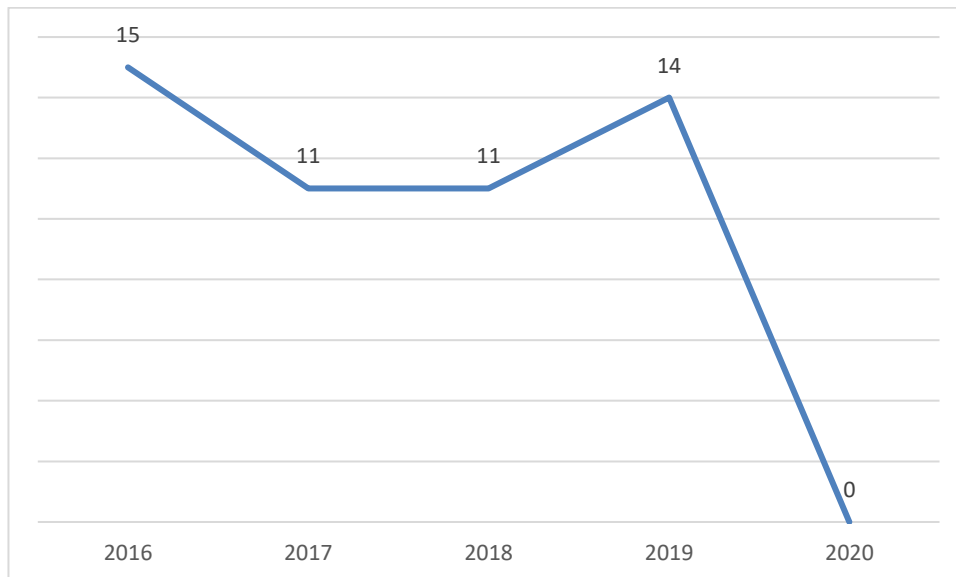
**Gambar 2.105**

**Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kota Malang Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, 2021

## 5. Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi olahraga Kota Malang mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2018 yang berjumlah 11 prestasi menjadi 44 prestasi di tahun 2019. Di tahun 2020 tidak ada peraih prestasi karena *event* olahraga ditiadakan akibat adanya pandemi COVID-19.



**Gambar 2.106**

### **Jumlah Prestasi Olahraga di Kota Malang Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, 2021

## 6. Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah sarana dan prasarana olahraga hanya diperoleh data terakhir 2020 dari Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yaitu 13. Dengan rincian 13 (tiga belas) itu antara lain Lapangan IKIP, Lapangan Rampal, Lapangan Tembalangan, Lapangan Taman Gayam, Lapangan Armada, Stadion Blimbing, Lapangan Blimbing, Stadion Luar Gajayana, Gor Ken Arok, Velodrom, Lapangan AL, Lapangan Dinoyo, dan Stadion Gajayana.

## N. Statistik

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan statistik Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.40**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Statistik**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Statistik						
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku "kota dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2021*

Pada indikator kinerja pembangunan daerah bidang urusan statistik yang pertama yakni tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi di Kota Malang baru tersedia sejak tahun 2016. Sedangkan pada indikator kinerja pembangunan daerah bidang urusan statistik yang kedua yakni Terdapatnya buku "Kota dalam Angka" di Kota Malang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah memilikinya. Begitu juga pada indikator kinerja pembangunan daerah bidang urusan statistik yang ketiga, yakni terdapatnya buku "PDRB" di Kota Malang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 juga telah memilikinya.

#### **O. Persandian**

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan persandian Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

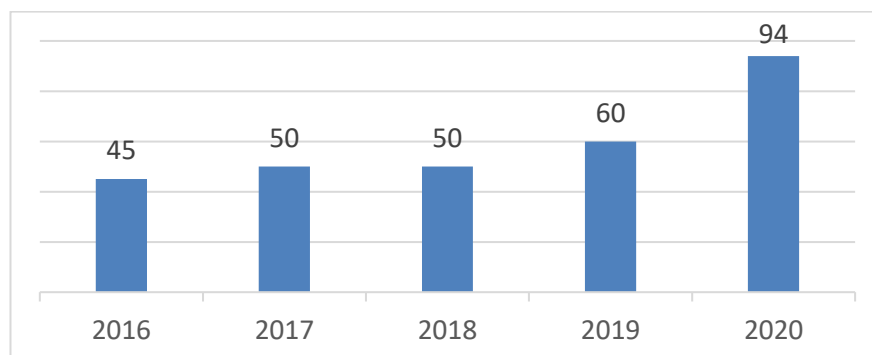
**Tabel 2.41**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Persandian**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
Persandian							
1.	Jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan	Dokumen	45	50	50	60	94

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, 2021*

Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang telah melakukan pengelolaan pengendalian dan pengamanan dokumen persandian pada tahun 2016 sebanyak 45 dokumen, tahun 2017 sebanyak 50 dokumen, tahun 2018 sebanyak

50 dokumen dan tahun 2019 sebanyak 60 dokumen. Sedangkan data tahun 2020 meningkat menjadi 94 dokumen.



**Gambar 2.107**  
**Capaian Jumlah dokumen yang wajib dirahasiakan di Kota Malang Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, 2021

## P. Kebudayaan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kebudayaan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.42**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
Kebudayaan							
1.	Persentase budaya tradisional yang ditampilkan sebagai potensi wisata Kota Malang	%	25	31	31,9	34,4	46,15
2.	Persentase Cagar Budaya yang terjaga	%	81	100	100	100	100
3.	Persentase tradisi dan adat istiadat budaya yang terjaga	%	73	80	70,5	63,8	100
4.	Persentase kelompok kebudayaan yang masih aktif yang dibina	%	73	76	93,47	93,47	91,18

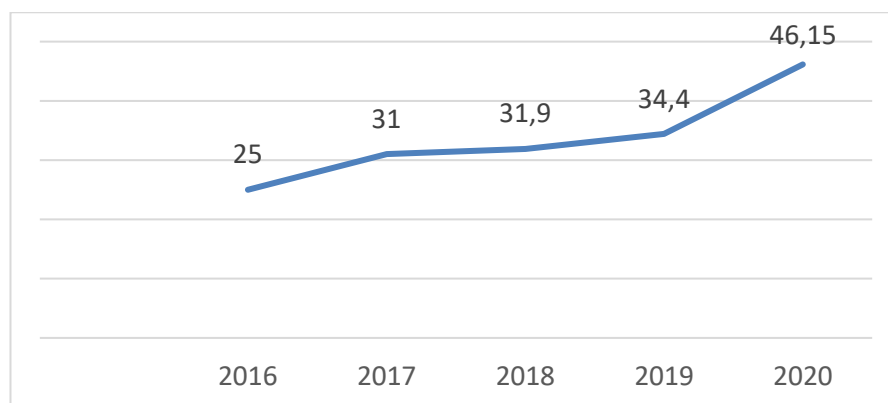
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, 2021



### 1. Persentase Budaya Tradisional yang Ditampilkan Sebagai Potensi Wisata Kota Malang

Persentase budaya tradisional yang ditampilkan sebagai potensi wisata di Kota Malang meningkat dari mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa budaya tradisional sangat dihargai dan juga mulai digemari oleh masyarakat sebagai suatu kebanggaan.

Pada tahun 2020 tampilan seni tradisional tetap mengalami kenaikan di masa pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan penggiat seni di Kota Malang mengalami dampak yang cukup signifikan, sehingga sebagai sebuah dukungan pemerintah terhadap para seniman, dibuat sebuah konsep penampilan secara virtual dengan protokol kesehatan dengan menampilkan seni tradisional. Dengan harapan membantu penggiat seni di Kota Malang dan juga menjaga potensi wisata di Kota Malang.

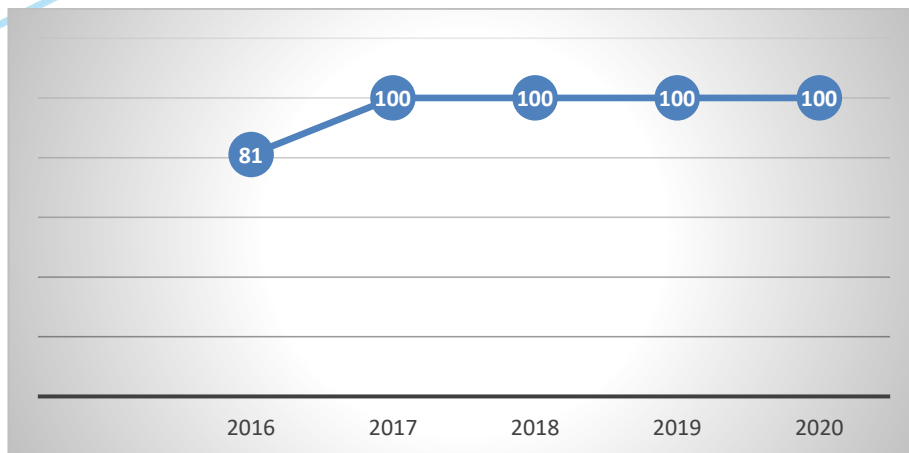


**Gambar 2.108**  
**Capaian Persentase Budaya Tradisional yang Ditampilkan**  
**Sebagai Potensi Wisata Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, 2021*

### 2. Persentase Cagar Budaya yang Terjaga

Persentase cagar budaya yang terjaga terus meningkat ditahun 2016 sampai tahun 2017 yang mencapai capaian maksimal 100%. Capaian 100% dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2020 merupakan capaian maksimal yang harus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Tahun 2018 Pemerintah Kota Malang melalui Surat Keputusan Walikota Malang menetapkan 32 Cagar Budaya.



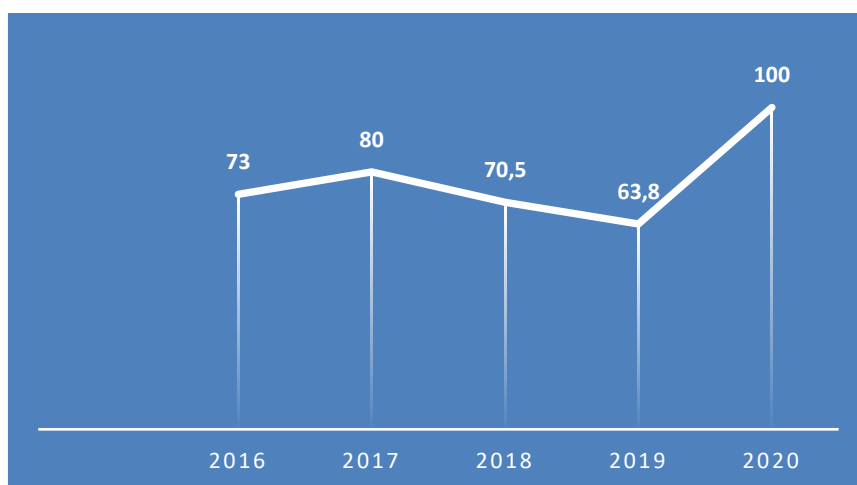
**Gambar 2.109**

**Capaian Persentase Cagar Budaya yang Terjaga di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, 2021*

**3. Persentase Tradisi dan Adat Istiadat Budaya Yang Terjaga**

Persentase tradisi dan adat istiadat budaya yang terjaga mengalami penurunan kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2019. Hal ini segera mendapat perhatian Pemerintah Kota Malang sehingga di tahun 2020 kembali naik secara signifikan. Sehingga bisa mencapai capaian yang maksimal yaitu 100%. Hal ini juga menandakan penataan Organisasi di Pemerintah Kota Malang berjalan efisien dan maksimal.



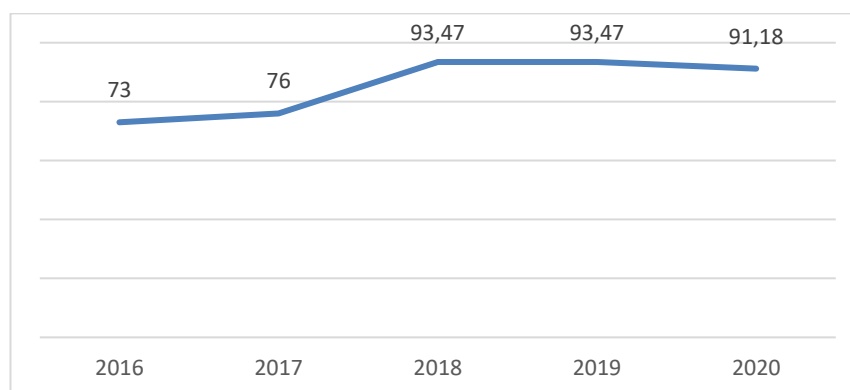
**Gambar 2.110**

**Capaian Persentase Tradisi dan Adan Istiadat Terjaga di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, 2021*

#### 4. Persentase Kelompok Kebudayaan Yang Masih Aktif dan Dibina

Persentase kelompok kebudayaan yang masih aktif dan dibina mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Di tahun 2019 tidak terjadi perubahan angka atau stagnan sama seperti tahun 2018 yaitu sebesar 93,47%. Tapi di tahun 2020 terjadi penurunan persentase menjadi sebesar 91,18%. Pandemi COVID 19 menyebabkan kegiatan pembinaan dikurangi sehingga angka persentase turun.



**Gambar 2.111**  
**Capaian Persentase Cagar Budaya yang Terjaga di Kota Malang Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, 2021

#### Q. Perpustakaan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perpustakaan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

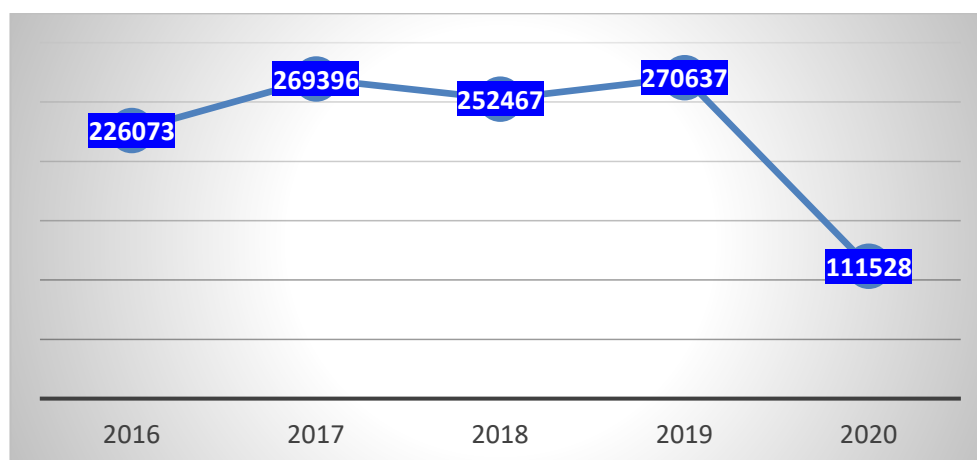
**Tabel 2.43**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
Perpustakaan							
1.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	orang	226.073	269.396	252.467	270.637	111.528

Sumber: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, 2021

### Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Hal ini perlu mendapat perhatian untuk membuat kegiatan yang mendukung bertumbuhnya minat baca dan literasi. Juga perlunya inovasi, hal ini penting sekali karena di era 4.0 kecenderungan membaca lewat sebuah aplikasi lebih dirasa mudah.



**Gambar 2.112**

### Capaian Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Malang Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, 2021

### R. Kearsipan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kearsipan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

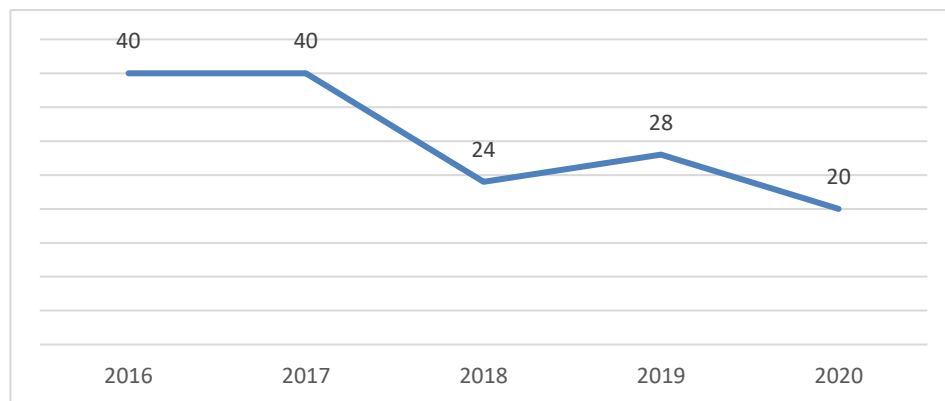
**Tabel 2.44**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Kearsipan**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
Kearsipan							
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	40	40	24	28	20
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kali	2	1	1	1	1

Sumber: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, 2021

### 1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Turunnya jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dari tahun 2019 sejumlah 28 menjadi 20 di tahun 2020 ini merupakan hasil evaluasi. Oleh karena itu perlu adanya bimtek kearsipan untuk perangkat daerah untuk dapat mengolah arsipnya secara baku.



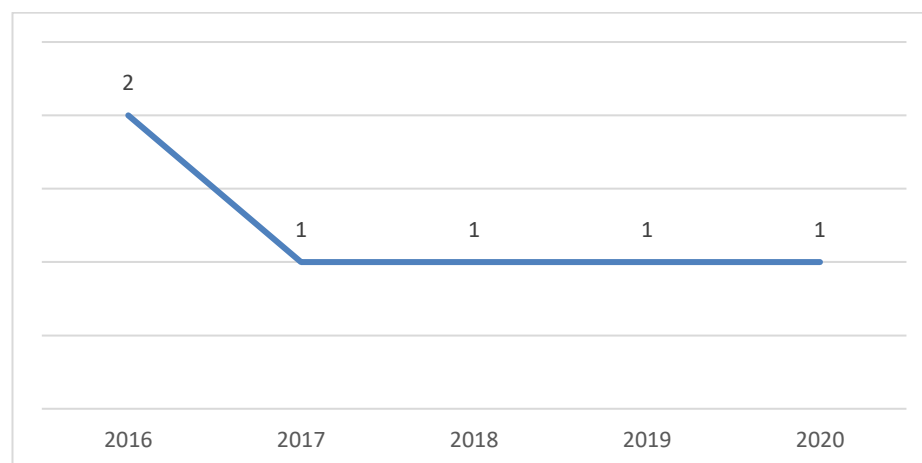
**Gambar 2.113**

#### Capaian Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kota Malang Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, 2021

### 2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Kurangnya SDM pengelola arsip di Kota Malang yang hanya berjumlah 1 (satu) orang. Perlunya penambahan pengelola arsip untuk lebih maksimalnya penanganan kearsipan.



**Gambar 2.114**

#### Capaian Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Malang Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, 2021

### 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pemerintahan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Pemerintah Daerah Kota Malang, yaitu bidang urusan pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, serta kelautan dan perikanan. Adapun rincian capaian kinerja atas layanan urusan pemerintahan pilihan adalah sebagai berikut:

#### A. Pariwisata

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pariwisata Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.45**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Pariwisata**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
Pariwisata							
1.	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Malang	%	21	24	25,3	25,2	0
2.	Kunjungan wisatawan di obyek daya tarik wisata	Orang	4	4,7	5,4	6,1	1,8

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, 2021

#### 1. Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Kota Malang

Pandemi COVID 19 tahun 2020 sangat berdampak signifikan pada sector pariwisata. tidak adanya peningkatan kunjungan pariwisata dikota malang karena adanya pembatasan demi pemutusan mata rantai COVID 19.

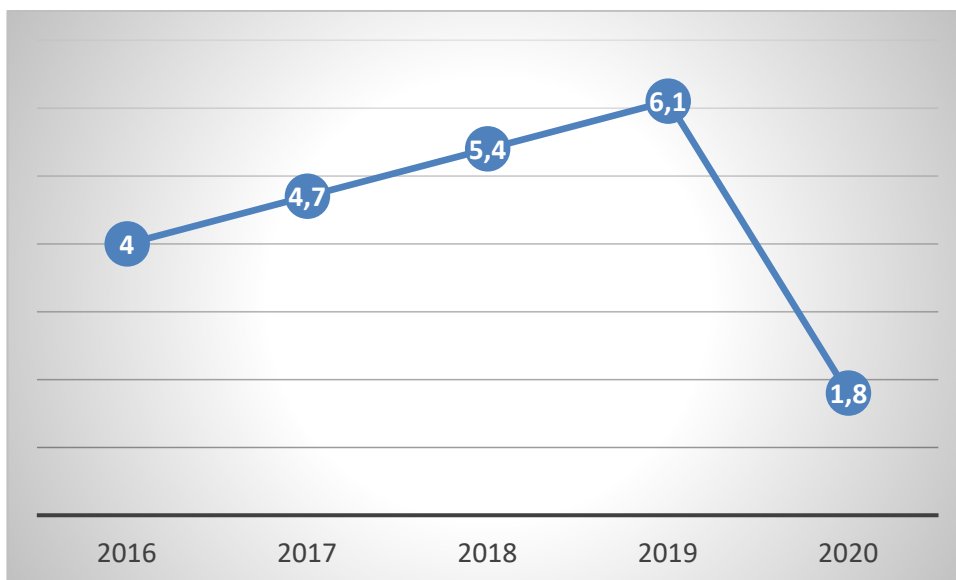


**Gambar 2.115**  
**Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Kota Malang**  
**di Kota Malang tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, 2021

## 2. Kunjungan Wisatawan di Obyek Daya Tarik Wisata

Kunjungan wisatawan di objek daya Tarik wisata menurun tajam di tahun 2020 karena adanya pandemic COVID-19.



**Gambar 2.116**  
**Kunjungan Wisatawan di Obyek Daya Tarik Wisata**  
**di Kota Malang tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, 2021

## B. Pertanian

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pertanian Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

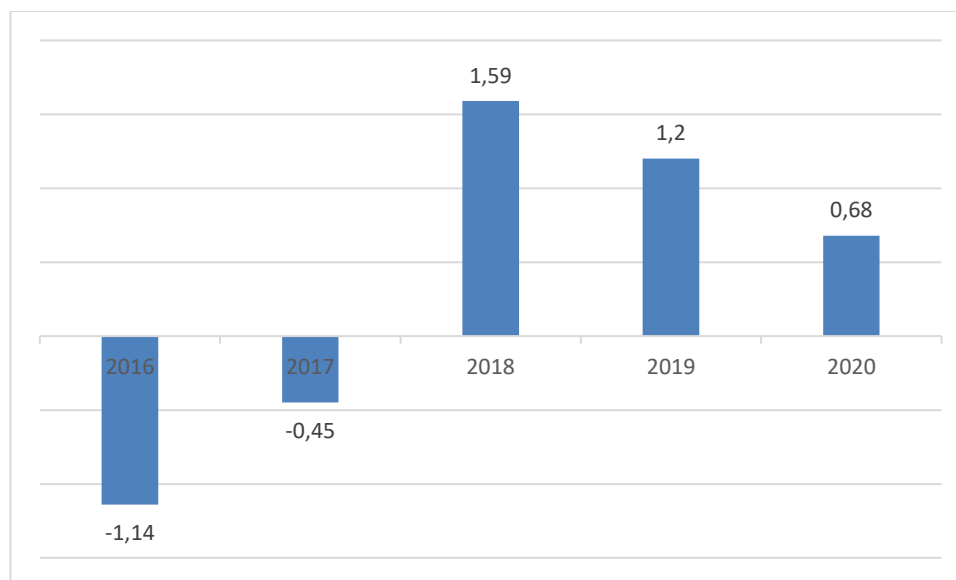
**Tabel 2.46**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Pertanian**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian							
1.	Rata-rata peningkatan produktivitas hasil pertanian	%	-1,14	-0,45	1,59	1,2	0,68
2.	Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kw/ha	71,43	70,98	72,57	73,77	74,45

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, 2021

### 1. Rata-rata Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian

Berikut adalah gambaran capaian indikator rata-rata peningkatan produktivitas hasil pertanian di Kota Malang tahun 2016 sampai tahun 2020.



**Gambar 2.117**  
**Jumlah Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian**  
**Di Kota Malang tahun 2016-2020**

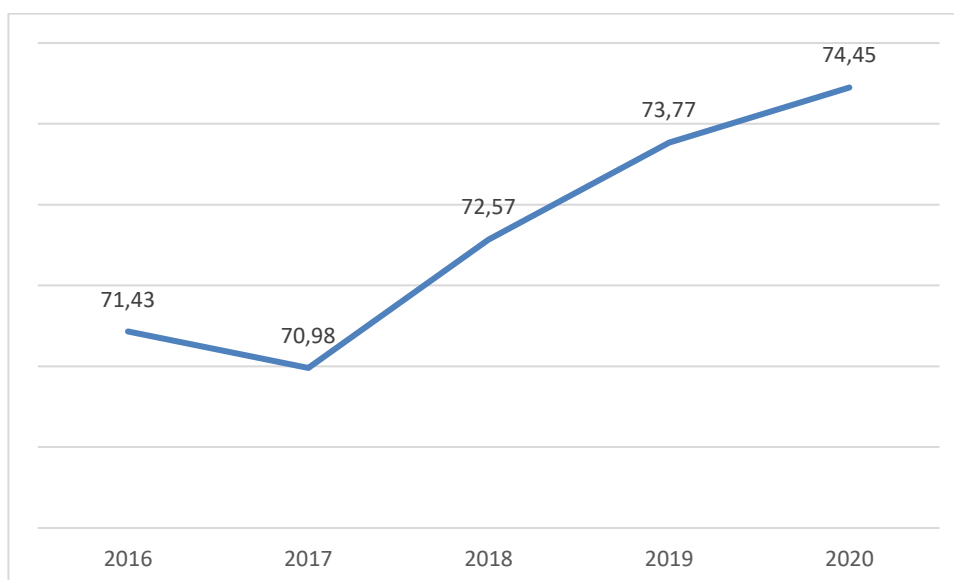
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, 2021  
Pada tahun 2016 nilainya minus 1,14%. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah nilai produksi hasil pertanian di Kota Malang



mengalami peningkatan tapi masih diangka minus yaitu minus 0,45%. Pada tahun 2018 peningkatan produktivitas hasil pertanian di Kota Malang naik signifikan dan tidak minus sebesar 1,59%. Akan tetapi capaian ini kembali menurun di tahun 2019 menjadi 1,2% dan 2020 sebesar 0,68. Meskipun persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian menurun ditahun 2019 dan 2020, mengingat Kota Malang bukanlah Kota yang mengandalkan pertanian tetap adanya peningkatan ini masih dirasa positif. Akan tetapi perlu adanya inovasi untuk meningkatkannya karena lahan yang ada banyak beralih fungsi.

### **Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar**

Sempat mengalami penurunan di tahun 2017 di angka 70,98%, produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per hektar naik ditahun 2018 menjadi 72,57% , tahun 2019 naik lagi menjadi 73,77% hingga tahun 2020 menjadi 74,45%. Hal ini berarti menurunnya produktivitas hasil pertanian di Kota Malang tidak termasuk di sector padi dan bahan pangan utama karena sektor ini malah cenderung naik.



**Gambar 2.118**  
**Jumlah Nilai Produksi Hasil Perkebunan**  
**Di Kota Malang tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, 2021*

### **C. Perdagangan**

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perdagangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

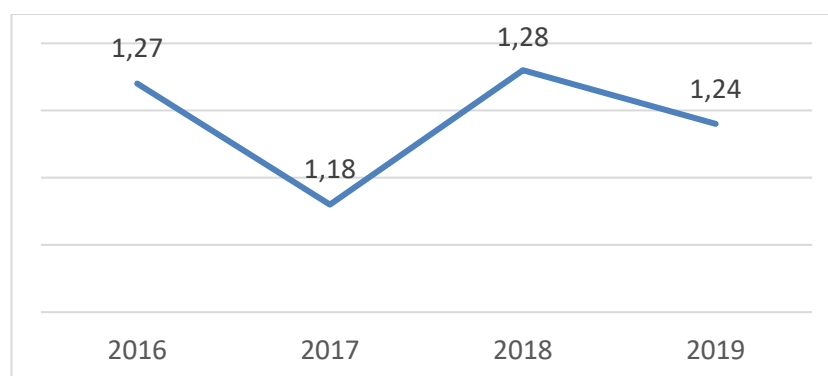
**Tabel 2.47**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Perdagangan**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
Perdagangan							
1.	Persentase kontribusi retribusi pasar terhadap PAD	%	1,27	1,18	1,28	1,24	N.A
2.	Cakupan Pengembangan dan peningkatan pelayanan pasar	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase Pemeliharaan Pasar Tradisional	Pasar Tradisional	6	7	19	7	14

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2021

### 1. Persentase Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD

Capaian indikator persentase kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di Kota Malang tahun 2015 adalah sebesar 1,18. Kemudian mengalami peningkatan di tahun 2016 yaitu menjadi sebesar 1,27. Pada tahun 2017 capaian indikator persentase kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di Kota Malang adalah sebesar 1,18. Capaian indikator ini kembali mengalami peningkatan di tahun 2018 yaitu menjadi sebesar 1,28. Pada tahun persentase kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di Kota Malang adalah sebesar 1,24. Sedangkan tahun 2020 terjadi pandemi COVID 19, Pemerintah Kota Malang mengambil kebijakan khusus terkait retribusi pasar untuk mengurami dampak ekonomi usaha mikro.



**Gambar 2.119**

### **Persentase Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Di Kota Malang tahun 2015-2019**

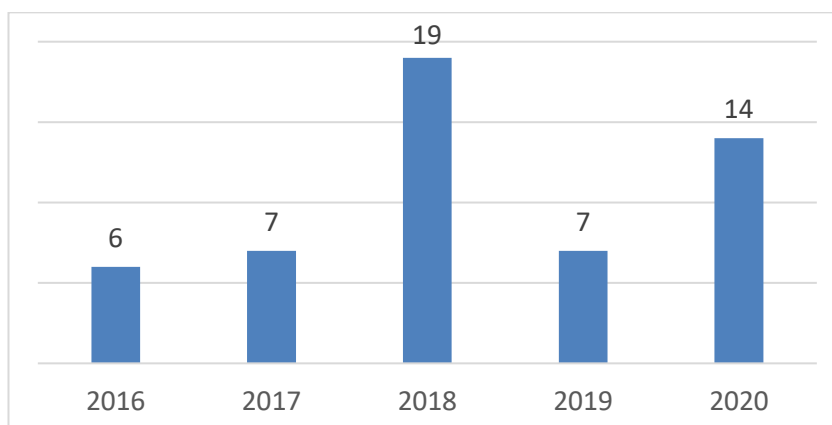
*Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2021*

#### **2. Cakupan Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar**

Adapun capaian indikator kinerja cakupan pengembangan dan peningkatan pelayanan pasar di Kota Malang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 100. Pengembangan dan peningkatan pelayanan pasar setiap tahunnya dilakukan untuk mendukung peningkatan pelayanan di pasar tradisional.

#### **3. Jumlah Pemeliharaan Pasar Tradisional**

Jumlah pasar tradisional di Kota Malang adalah 26. Jumlah ini berubah di tahun 2020 karena ada penggabungan pasar bunga dan pasar burung. Dari 26 pasar tradisional tersebut pada tahun 2016 pemeliharaan pasar tradisional di Kota Malang yang dilakukan sebanyak 6 pasar tradisional. Pada tahun 2017 pemeliharaan pasar tradisional di Kota Malang sebanyak 7 pasar tradisional. Pada tahun 2018 capaian indikator pemeliharaan pasar tradisional di Kota Malang kembali mengalami peningkatan menjadi sebanyak 19 pasar tradisional. Pada tahun 2019 jumlah pemeliharaan pasar tradisional di Kota Malang sebanyak 7 pasar tradisional. Dan tahun 2020 sebanyak 14 pasar. Tentu saja pemeliharaan pasar didasarkan pada prioritas.



**Gambar 2.120**  
**Jumlah Pemeliharaan Pasar Tradisional Di Kota Malang**  
**Tahun 2016-2020**

*Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2021*

## D. Perindustrian

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perindustrian Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

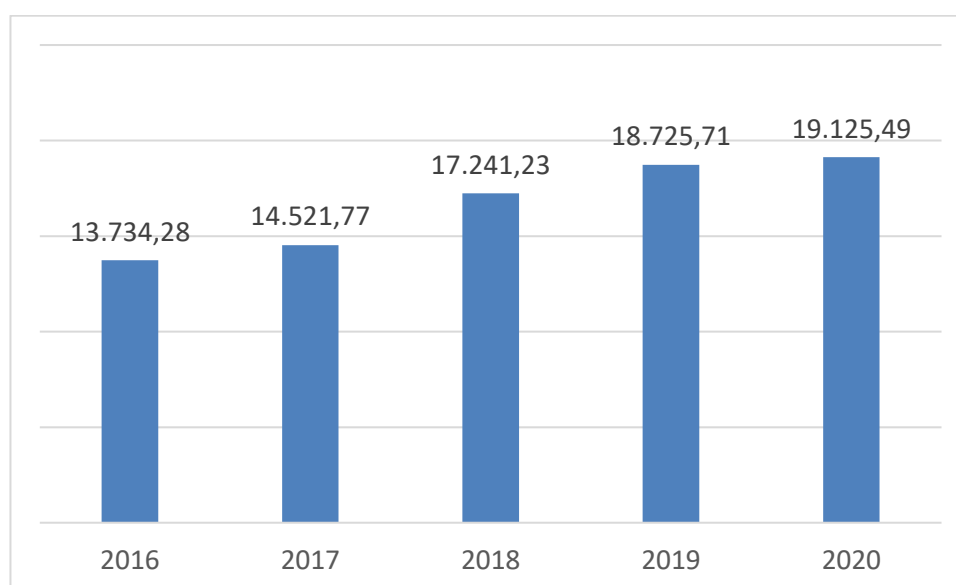
**Tabel 2.48**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Perindustrian**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
Perindustrian							
1.	PDRB Sektor Industri	miliar rupiah	13.734,28	14.521,77	17.241,23	18.725,71	19.125,49
2.	Persentase industri yang menguasai teknologi	%	33,8	35	37,119	34,724	N.A
3.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Jumlah	2780	1293	510	1121	1312

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2021

### 1. PDRB Sektor Industri

Capaian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sektor industri di Kota Malang mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016 sebesar 13.734,28 miliar rupiah. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 14.521,77 miliar rupiah. Pada tahun 2018 Capaian PDRB sektor industri di Kota Malang adalah sebesar 17.241,23 miliar rupiah. Pada tahun 2019 PDRB sektor industri di Kota Malang mencapai 18.725,71 miliar rupiah. Dan tahun 2020 menjadi 19.125,49 miliar rupiah.



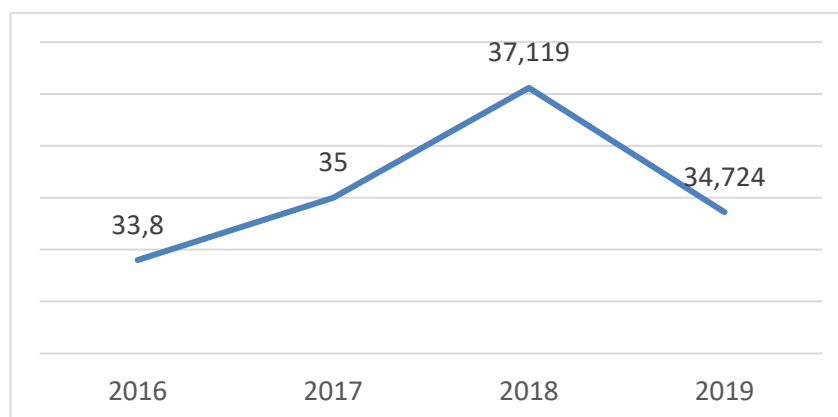
**Gambar 2.121**

## PDRB Sektor Industri di Kota Malang Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2021

### 2. Persentase Industri yang Menguasai Teknologi

Capaian kinerja indikator persentase industri yang menguasai teknologi di Kota Malang tergambar dalam grafik gambar dibawah. Capaian kinerja indikator persentase industri yang menguasai teknologi di Kota Malang berturut-turut mulai tahun 2016 adalah 33,8%, tahun 2017 meningkat sebesar 35. Pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 37,119. Sedangkan di tahun 2019 turun menjadi 34,72%. Sedangkan data tahun 2020 tidak diperoleh. Penurunan di tahun 2019 seharusnya segera mendapat perhatian mengingat Kota Malang sedang bergiat untuk Industri 4.0.



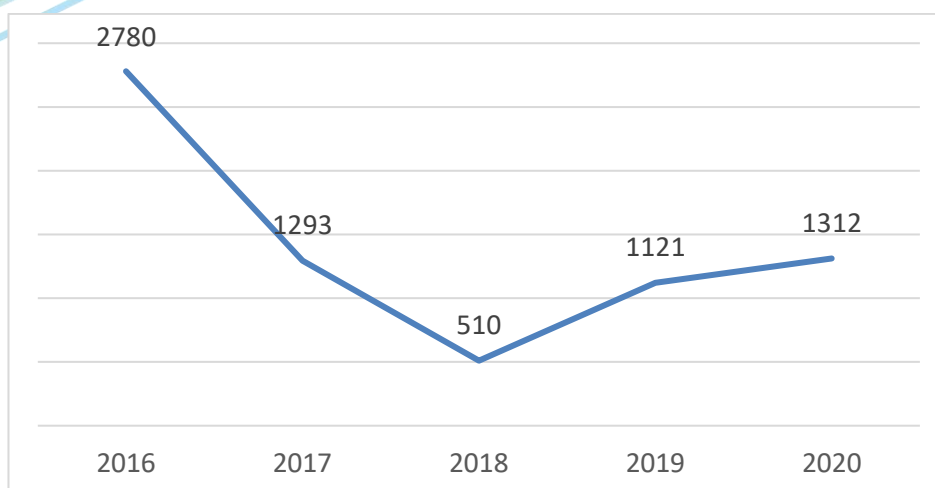
**Gambar 2.122**

### Persentase Industri yang Menguasai Teknologi

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2020

### 3. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin sempat mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Di tahun 2019 dan tahun 2020 kembali mengalami kenaikan. Adanya kenaikan di tahun 2020 di masa pandemi COVID 19 menggambarkan bahwa Kota Malang berkonsentrasi dalam pengurangan dampak pandemic pada kelompok pengrajin dengan terus meningkatkan pembinaan.



**Gambar 2.123**  
**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**  
**di Kota Malang Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2021

#### E. Kelautan dan Perikanan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kelautan dan perikanan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.49**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019**

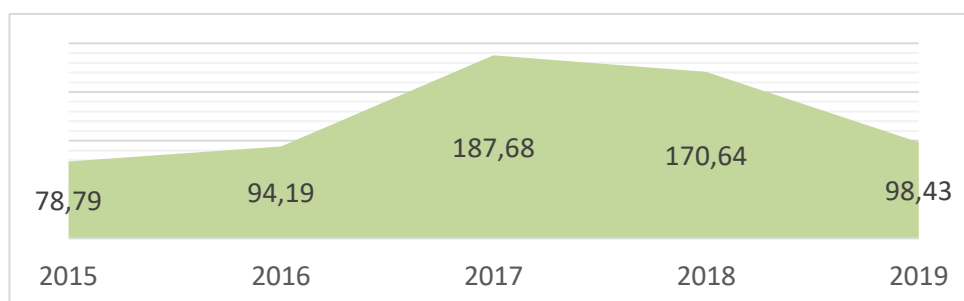
No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
Kelautan dan Perikanan							
1.	Persentase nilai produksi hasil perikanan	%	78,79	94,19	187,68	170,64	98,43

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, 2020

##### 1. Jumlah nilai produksi hasil perikanan

Pada tahun 2015 jumlah nilai produksi hasil perikanan di Kota Malang sebesar 78,79%. Kemudian meningkat di tahun 2016, jumlah nilai produksi hasil perikanan di Kota Malang sebesar 94,19%. Pada tahun 2017 jumlah nilai produksi hasil perikanan di Kota Malang mengalami peningkatan kembali, sehingga menjadi 187,68%. Pada tahun 2018 jumlah nilai produksi hasil perikanan di Kota Malang

sebesar 170,64%. Pada tahun 2019 jumlah nilai produksi hasil perikanan di Kota Malang sebesar 98,43%. Sedangkan data tahun 2020 belum diperoleh dari dinas terkait.



**Gambar 2.124**  
**Jumlah Nilai Produksi Hasil Perikanan**  
**Di Kota Malang tahun 2015-2019**

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, 2020*

### 2.3.3 Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan

Analisis kinerja atas layanan penunjang urusan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Pemerintah Daerah Kota Malang, yaitu bidang urusan Perencanaan Pembangunan, Keuangan, Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan dan Pengawasan. Adapun uraian capaian kinerja atas layanan penunjang urusan adalah sebagai berikut:

#### A. Perencanaan Pembangunan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.50**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
Perencanaan Pembangunan							
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan kota	%	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, 2020

## B. Keuangan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.51**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Keuangan**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
Keuangan							
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Besaran SILPA	Rp	305.005.70 5.627,07	400.598.44 0.985,66	489.523.03 3.616,78	742.764.42 1.538,17	567.886.07 1.352,26
3.	Penetapan APBD	Rp	1.710.077. 444.259,97	1.813.923. 922.301,54	2.360.831. 551.277,57	2.654.691. 198.906,71	2.103.467. 535.397,26

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, 2021

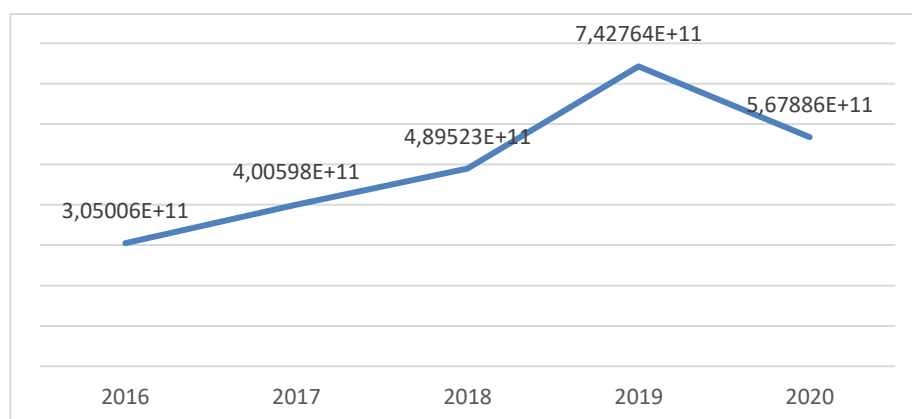
### 1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Capaian indikator kinerja Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016 hingga tahun 2020 selama 5 (lima) tahun berturut-turut mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.



## 2. Besaran SILPA

Berikut adalah besaran SILPA Kota Malang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020:



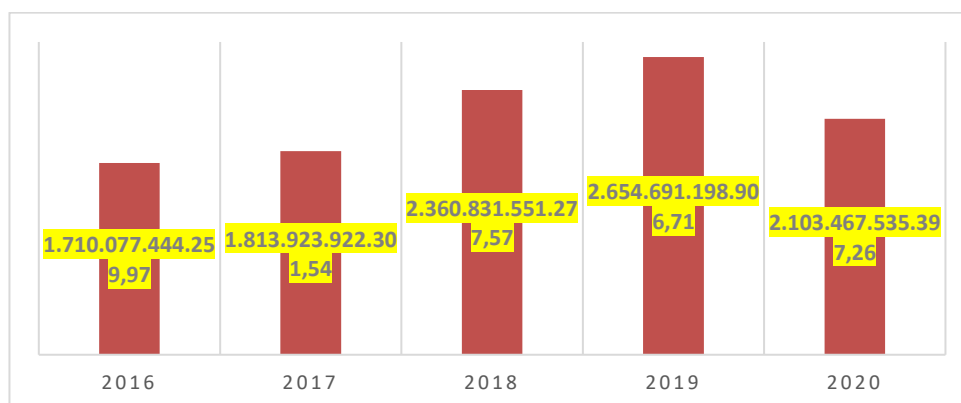
**Gambar 2.125**

### Capaian Penetapan APBD Kota Malang Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, 2021

## 3. Penetapan APBD

Apabila mengacu pada keenam prinsip penyusunan APBD, maka sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 penetapan APBD Kota Malang telah menerapkan prinsip tepat waktu. Berikut adalah gambaran besaran APBD Kota Malang yang sudah ditetapkan dalam lima tahun terakhir.



**Gambar 2.126**

### Capaian Penetapan APBD Kota Malang Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, 2021

## C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

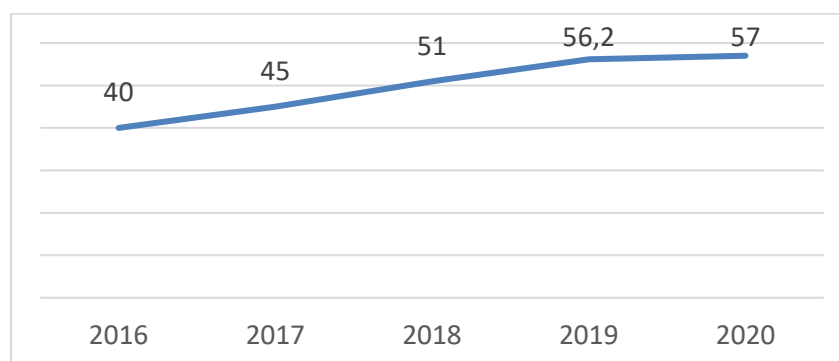
**Tabel 2.52**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Kepegawaian serta**  
**Pendidikan dan Pelatihan**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	40	45	51	56,2	57
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	63	65	67,7	52,80	60,1
3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	85	90	95	88,2	84,1

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang 2021

### 1. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja indikator Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan selama lima tahun terakhir, mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya.



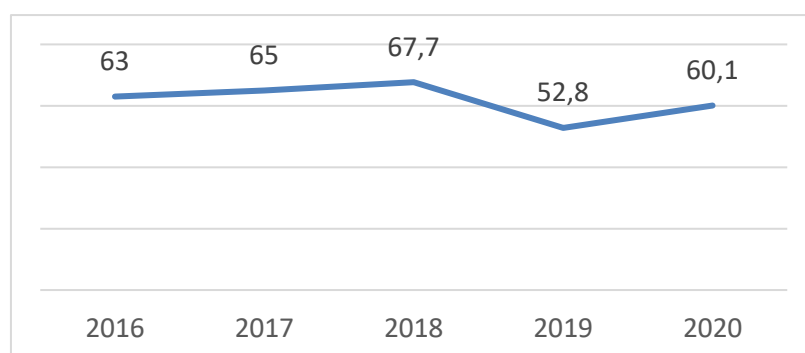
**Gambar 2.127**  
**Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan**  
 Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang, 2021

Pada tahun 2016 rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 40 JP, kemudian kembali meningkat di tahun 2017 menjadi

45 JP. Capaian rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kota Malang selama tahun 2018 adalah sebesar 51 JP. Pada tahun 2019, capaian indikator kinerja rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kota Malang kembali mengalami peningkatan, yaitu sebesar 56,2 JP. Dan di tahun 2020 kembali meningkat 57 JP. Kenaikan setiap tahun JP pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu birokrasi Kota Malang.

## 2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Capaian kinerja indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kota Malang mengalami kenaikan mulai tahun 2016 sampai tahun 2018. Akan tetapi di tahun 2019 angka ini turun menjadi 52,8 setelah di tahun 2018 sempat pada angka rata-rata 67,7. Selanjutnya di tahun 2020 angka naik lagi menjadi 60,1. Kenaikan ini bahkan masih dibawah tahun 2016, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan lagi. Pemberian informasi dan sosialisasi terhadap pentingnya pendidikan formal serta kemudahan izin belajar perlu ditingkatkan.



**Gambar 2.128**

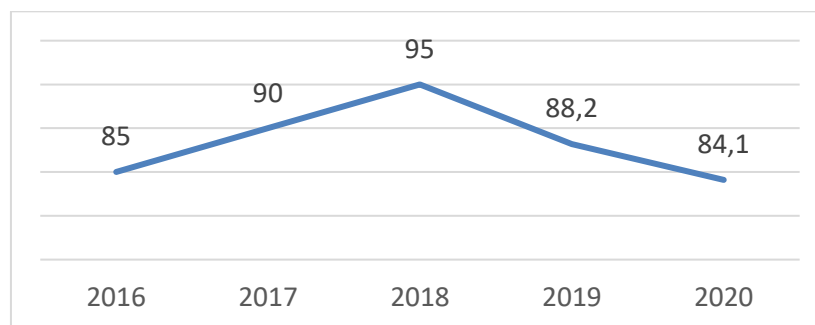
### **Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal**

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang, 2021*

## 3. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Capaian kinerja persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kota Malang mengalami

kenaikan dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Akan tetapi di tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini erat kaitannya dengan perampingan organisasi Pemerintah Kota Malang dalam rangka efisiensi.



**Gambar 2.129**  
**Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural**

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang, 2021*

#### D. Pengawasan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pengawasan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.53**  
**Hasil Kinerja Bidang Urusan Pengawasan**  
**Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2020**

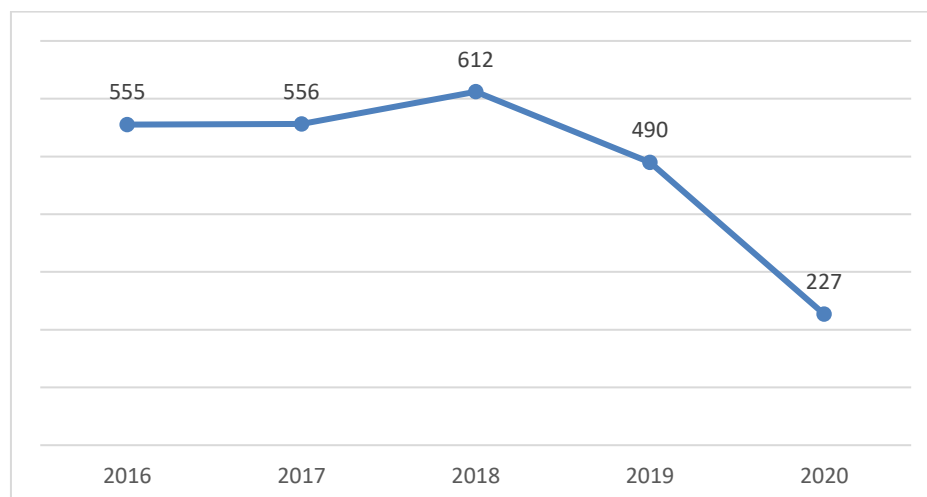
Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah tindak lanjut temuan	Tindak lanjut	555	556	612	490	227

*Sumber: Inspektorat Kota Malang, 2021*

#### Jumlah Tindak Lanjut Temuan

Pada tahun 2016 jumlah tindak lanjut temuan di Kota Malang sejumlah 555 tindak lanjut temuan, kemudian meningkat di tahun 2017 menjadi 556 tindak lanjut temuan. Pada tahun 2018 capaian jumlah tindak lanjut temuan di Kota Malang sebesar 612 tindak lanjut temuan. Pada tahun 2019 capaian jumlah tindak lanjut temuan di Kota Malang sebesar 490 tindak lanjut temuan. Dan di tahun 2020 menurun drastic menjadi 227 tindak lanjut temuan. Pencapaian

signifikan di tahun 2020 ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun berikutnya.



**Gambar 2.130**  
**Jumlah Tindak Lanjut Temuan**  
*Sumber: Inspektorat Kota Malang, 2021*

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Pada aspek daya saing ini terklasifikasi menjadi 4 (empat) fokus yakni fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita.

#### A. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita

Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat (*Hukum Engel/Engel law*).

**Tabel 2.54**  
**Persentase Pengeluaran Rumah Tangga**  
**Dirinci Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan**  
**di Kota Malang Tahun 2015-2020**

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Makan	%	39,21	38,63	37,85	36,87	38,29	37,04
2.	Non Makanan	%	60,79	61,37	62,15	63,13	61,71	62,96
Total			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kota Malang, 2021

### **B. Manajemen Daerah Terhadap Revolusi**

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menyusun “*Making Indonesia 4.0*” dalam menghadapi Revolusi Industri keempat. *Road Map Making Indonesia 4.0* memberikan arah dan strategi yang jelas bagi pergerakan industri Indonesia di masa yang akan datang, termasuk di sektor makanan dan minuman; sektor tekstil dan pakaian; sektor otomotif; sektor kimia; dan sektor elektronik yang menjadi fokus dan 10 prioritas nasional dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia, yaitu :

- a. Perbaikan alur aliran barang dan material;
- b. Desain ulang zona industri;
- c. Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (*sustainability*);
- d. Memberdayakan UMKM;
- e. Membangun infrastruktur digital Indonesia;
- f. Menarik minat investasi asing;
- g. Peningkatan kualitas SDM;
- h. Pembangunan ekosistem inovasi;
- i. Insentif untuk investasi teknologi; dan
- j. Harmoniasi aturan dan kebijakan

Bagi Indonesia, revolusi industri akan memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia dan menjadi salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia untuk menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia. Hingga tahun 2016, industri manufaktur berkontribusi sebesar 20 persen PDB Indonesia dan membuka lebih dari 14 juta lapangan pekerjaan.

Perubahan perekonomian Indonesia dari ekonomi berbasis sumberdaya alam menjadi ekonomi berbasis jasa, membawa dampak menurunnya kontribusi manufaktur Indonesia menjadi 22 persen pada tahun 2016 berbanding terbalik pada tahun 2001 yang mencapai 26 persen dan diperkirakan akan terus menurun pada tahun 2030 jika tidak melakukan intervensi apapun. Guna menyikapi tantangan internasional tersebut maka kebijakan pemerintah Kota Malang memberlakukan strategi dan upaya kebijakan melalui Pengembangan industri kreatif dan IKM potensial lainnya Kota Malang menghadapi Revolusi Industri 4.0.

### C. Realisasi Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan

Berikut adalah data realisasi Pengelolaan Daerah yang dipisahkan bersumber dari BUMD:

**Tabel 2.55**  
**Realisasi Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan**  
**di Kota Malang Tahun 2016-2020**

No.	Nama BUMD	Realisasi Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perumda Air Minum Tugu Tirta	11.042.028.301,00	11.609.794.402,00	19.938.996.407,00	23.604.543.251,00	28.112.397.253,00
2.	Perumda Tugu Aneka Usaha	72.604.539,00	139.345.443,00	62.566.753,00	0,00	0,00
3.	PT. BPR Tugu Artha Sejahtera (Perseroda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, 2020

Dari data tersebut diketahui bahwa tahun 2019 dan 2020 bahwa yang menyumbang realisasi hanya dari BUMD Perumda Air Minum Tugu Tirta.

#### 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisa kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator berikut ini:

##### A. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Adapun panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Malang tahun 2019-2020 seperti pada tabel berikut ini:

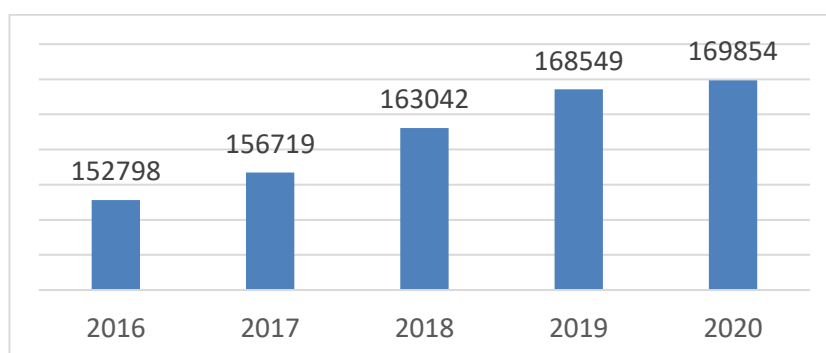
**Tabel 2.56**  
**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan**  
**di Kota Malang Tahun 2019-2020**

No	Uraian	Satuan	2019	2020
	Rasio (km/10.000 kendaraan)		0,19	0,18

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Malang, 2021*

### B. Layanan Air Bersih

Layanan air bersih yang digunakan oleh masyarakat diukur dari besaran jumlah layanan Perumda Air Minum Tugu Tirta bagi masyarakat Kota Malang. Berdasarkan Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, luas wilayah pelayanan adalah 80% dari luas wilayah kota Malang atau sebanyak 90,03% masyarakat Kota Malang telah terlayani. Berikut ini perkembangan jumlah pelanggan PDAM di Kota Malang pada tahun 2016-2020.



**Gambar 2.131**  
**Jumlah Pelanggan PDAM di Kota Malang Tahun 2016-2020**

*Sumber: PDAM Kota Malang, 2021*

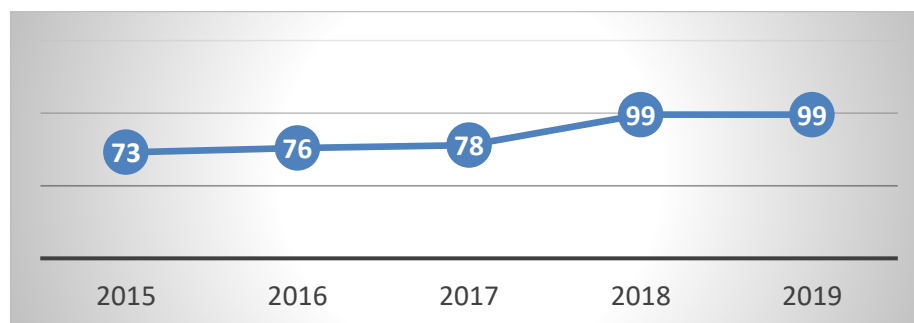
Pada tahun 2016 jumlah pelanggan PDAM di Kota Malang adalah sebanyak 152.798 saluran pelanggan, atau meningkat sebesar 4,09% jika dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2017, jumlah pelanggan PDAM Kota Malang meningkat sebanyak 2,57% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebanyak 156.719 saluran pelanggan. Pada tahun 2018 jumlah pelanggan PDAM di Kota Malang adalah 163.042 saluran pelanggan, atau meningkat sebesar 4,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 jumlah pelanggan PDAM di Kota Malang adalah 168.549 saluran pelanggan,



atau meningkat sebesar 3,38% dibandingkan tahun 2018 dan tahun 2020 kembali meningkat menjadi 169.854 saluran pelanggan.

### C. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Berikut perkembangan capaian persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon di Kota Malang Tahun 2015-2019:



**Gambar 2.132**  
**Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon**  
**Kota Malang Tahun 2015-2019**

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, 2020*

Capaian Indikator Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon di Kota Malang mengalami kenaikan setiap tahun mulai tahun 2015 sampai tahun 2019. Pada tahun 2015, capaian Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon di Kota Malang sebesar 73, tahun 2016 sebesar 76, tahun 2017 sebesar 78, tahun 2018 sebesar 99 dan tahun 2019 sebesar 99.

#### 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas fokus iklim berinvestasi dilakukan terhadap 5 (lima) indikator, yaitu angka kriminalitas, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, serta jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim investasi.

##### A. Lama Proses Perijinan

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, standar waktu pelayanan perizinan ditentukan sebagai berikut:

**Tabel 2.57**  
**Standar Waktu Pelayanan Perizinan di Kota Malang**

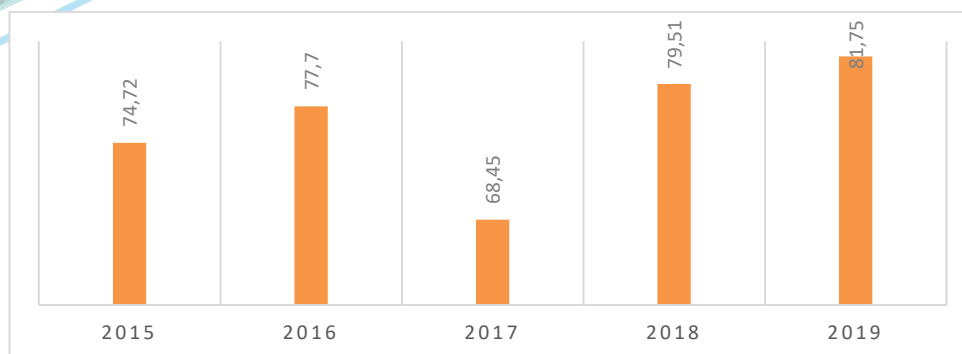
No	Jenis Izin	Standar Waktu
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	4 hari kerja
2.	Izin Pemasangan Reklame Sementara/Insidental	1 hari kerja
3.	Izin Pemasangan Reklame Tetap/Permanen (Ukuran 8m <sup>2</sup> )	7 hari kerja
4.	Izin Pemasangan Reklame Tetap/Permanen (Ukuran >8m <sup>2</sup> dan >12m <sup>2</sup> )	8 hari kerja
5.	Izin Usaha Angkutan	4 hari kerja
6.	Izin Trayek	4 hari kerja
7.	Izin Kegiatan yang Berdampak pada Keramaian umum/ Tontonan	4 hari kerja
8.	Izin Penggunaan Tanah Makam	1 hari kerja
9.	Izin Usaha Percetakan	4 hari kerja
10.	Izin Usaha Konstruksi	22 hari kerja
11.	Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata	5 hari kerja
12.	Izin Usaha Perdagangan (IUP/SIUP)	8 hari kerja
13.	Izin Tanda Daftar Industri (TDI)	8 hari kerja
14.	Izin Usaha Industri (IUI)	8 hari kerja
15.	Izin Perluasan Industri	8 hari kerja

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, 2021*

## **B. Jumlah dan Macam Pajak dan Reribusi Daerah**

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan daerah dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber PAD diantaranya adalah hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah.

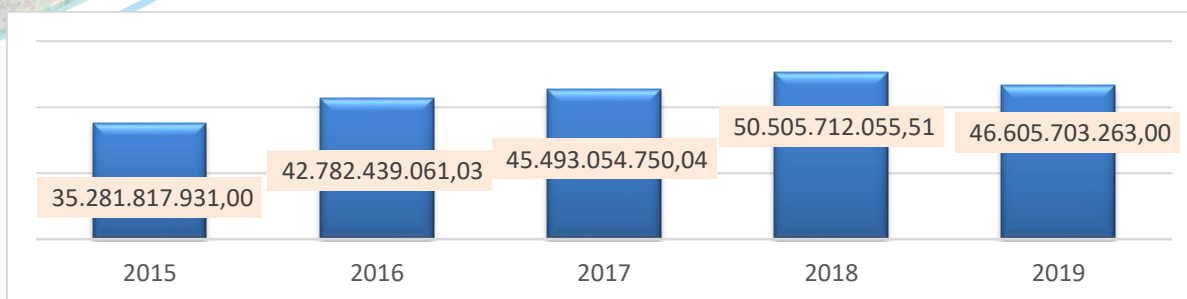
Jenis pajak daerah di Kota Malang sebanyak 9 jenis pajak yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang meliputi: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Parkir; (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; (8) Pajak Air Tanah; dan (9) Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun perkembangan proporsi nilai pajak daerah dalam realisasi PAD Kota Malang pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 2.133**  
**Proporsi Nilai Pajak Daerah dalam Realisasi PAD Kota Malang**  
**Tahun Anggaran 2015-2019**

*Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, 2020*

Sedangkan Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kota Malang terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum, meliputi: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (4) Retribusi Pelayanan Pasar; (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (6) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (7) Retribusi Pengolahan Limbah Domestik; dan (8) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Retribusi Jasa Usaha, meliputi: (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; (2) Retribusi Terminal; (3) Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan (4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi: (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minol; dan (3) Retribusi Ijin Trayek. Adapun perkembangan proporsi nilai retribusi daerah dalam realisasi PAD Kota Malang pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 2.134**  
**Proporsi Nilai Retribusi Daerah dalam Realisasi PAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015-2019**

*Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, 2020*

#### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas fokus sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan di Kota Malang pada Tahun 2016-2020.

##### A. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Perkembangan indikator rasio ketergantungan Kota Malang pada Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.58**  
**Rasio Ketergantungan Kota Malang Tahun 2016-2020**

No.	Tingkat Ketergantungan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
a.	Penduduk Usia <15 tahun	Orang	184.521	186.666	196.429	197.680	187.846
b.	Penduduk Usia >64 tahun	Orang	48.294	48.936	71.609	75.840	63.997
c.	Penduduk usia tidak produktif	Orang	232.815	235.602	268.038	273.520	251.823
d.	Penduduk Usia 15-64 tahun	Orang	618.483	625.812	648.004	653.765	591.987
e.	<b>Rasio Ketergantungan</b>	%	<b>37,643</b>	<b>37,647</b>	<b>41,364</b>	<b>41,838%</b>	<b>37,65%</b>

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2021*

Pada tahun 2016 rasio ketergantungan di Kota Malang sebesar 37,643. Pada tahun 2017 rasio ketergantungan di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 37,647. Capaian rasio ketergantungan di Kota Malang Kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 rasio ketergantungan di Kota Malang sebesar 41,364 dan tahun 2019 sebesar 41,838. Sedangkan di tahun 2020 sebesar 37,65%.

# BAB-III

GAMBARAN KEUANGAN

**DAERAH**



## **BAB III**

### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan merupakan salah satu poin penting dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena pada poin inilah dapat terlihat kemampuan suatu daerah dalam menghidupi rumah tangga dan kebutuhannya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

#### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana

diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Sebelum disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020, pengelolaan keuangan daerah masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas aspek Pendapatan, aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

#### **A. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Pendapatan Daerah di bagi ke dalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Malang tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

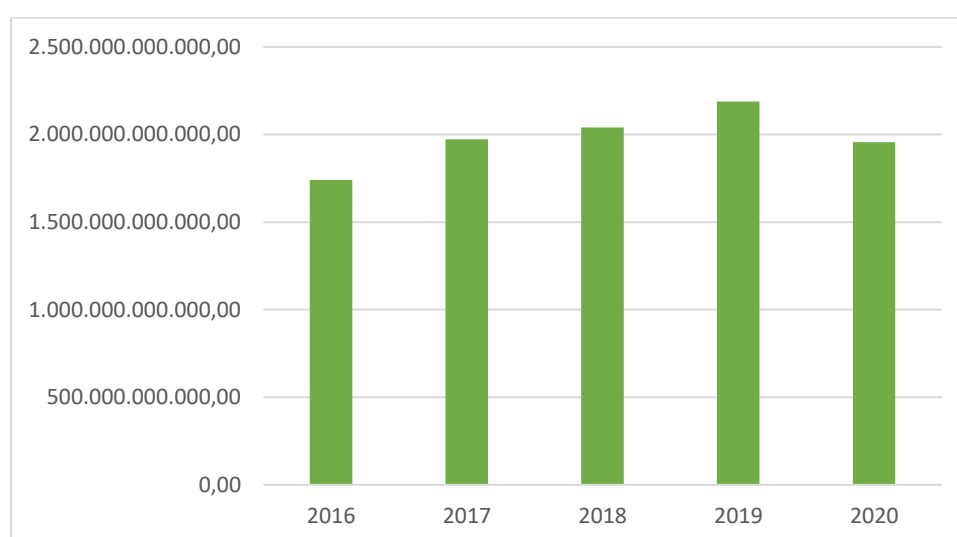
**Tabel 3.1**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kota Malang**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.741.394.250.709,64</b>	<b>1.971.916.657.660,13</b>	<b>2.040.194.240.906,67</b>	<b>2.187.985.479.986,01</b>	<b>1.956.090.185.104,35</b>	<b>3,34%</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>477.541.556.464,64</b>	<b>588.276.962.084,13</b>	<b>556.888.383.143,67</b>	<b>588.066.042.351,01</b>	<b>491.189.243.955,35</b>	<b>1,74%</b>
1.1.1	Hasil Pajak daerah	374.641.673.419,65	414.961.528.718,04	434.678.309.679,54	460.047.450.664,60	351.759.920.903,49	-0,55%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	42.782.439.061,03	45.493.054.750,04	50.505.712.055,51	46.605.703.263,00	38.449.140.906,00	-1,97%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	15.785.980.797,00	16.490.014.841,36	24.792.410.715,90	28.559.431.165,39	33.348.652.404,80	21,69%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	44.331.463.186,96	111.332.363.774,69	46.911.950.692,72	52.853.457.258,02	67.631.529.741,06	33,47%
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.069.366.446.979,00</b>	<b>1.174.719.580.753,00</b>	<b>1.181.289.819.588,00</b>	<b>1.203.245.896.321,00</b>	<b>1.098.463.668.428,00</b>	<b>0,89%</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	114.874.411.979,00	113.684.568.188,00	152.360.194.093,00	130.860.343.795,00	132.227.815.517,00	4,98%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	859.678.208.000,00	844.576.426.000,00	844.477.164.310,00	886.503.661.000,00	805.071.632.000,00	-1,49%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	94.813.827.000,00	216.458.586.565,00	184.452.461.185,00	185.881.891.526,00	161.164.220.911,00	25,25%
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>194.486.247.266,00</b>	<b>208.920.114.823,00</b>	<b>302.016.038.175,00</b>	<b>396.673.541.314,00</b>	<b>366.437.272.721,00</b>	<b>18,93%</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	12.606.000.000,00	10.305.000.000,00	68.817.280.000,00	67.075.400.000,00	90.756.375.316,00	145,58%
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan	171.619.907.266,00	188.341.184.823,00	204.361.428.175,00	252.268.704.314,00	169.329.629.405,00	2,20%



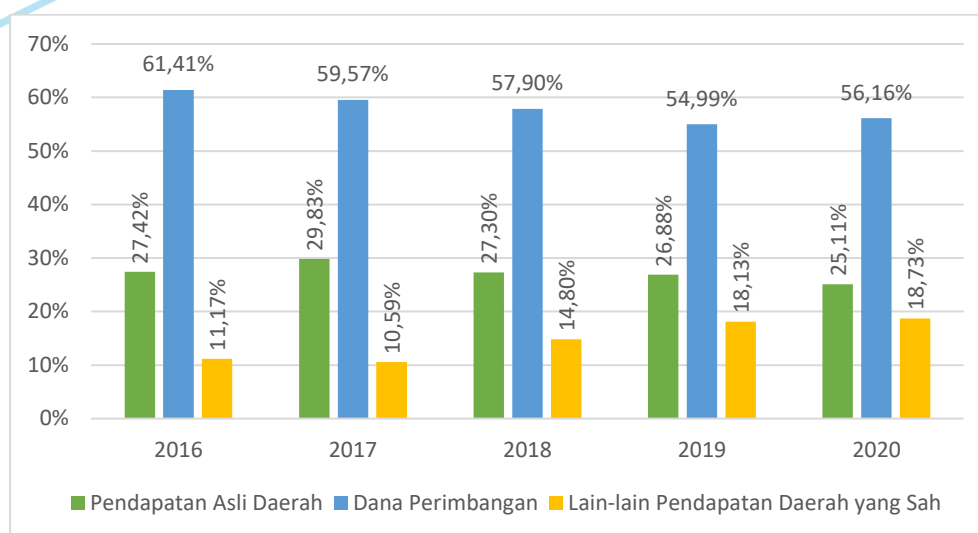
No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Pemerintah Daerah Lainnya						
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	25.500.000.000,00	73.871.078.000,00	73.440.909.000,00	119,78%
1.3.4	Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.260.340.000,00	2.773.930.000,00	3.337.330.000,00	3.458.359.000,00	32.910.359.000,00	207,07%

Berdasarkan data selama tahun 2016-2020 perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kota Malang cukup baik dan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016, total pendapatan daerah Kota Malang sebesar Rp 1.741.394.250.709,64, angka tersebut terus mengalami peningkatan hanya di tahun 2020 yang mengalami penurunan akibat pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia dan Dunia. Pada tahun 2020 pendapatan daerah mencapai Rp 1.956.090.185.104,35, dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 3,34%. Ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Malang dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami kemajuan kecuali tahun 2020. Kemajuan tersebut direpresentasikan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi sebelum masa pandemi yang cukup tinggi, yaitu pada tahun 2019 sebesar 5,72% atau di atas Jawa Timur sebesar 5,52%.



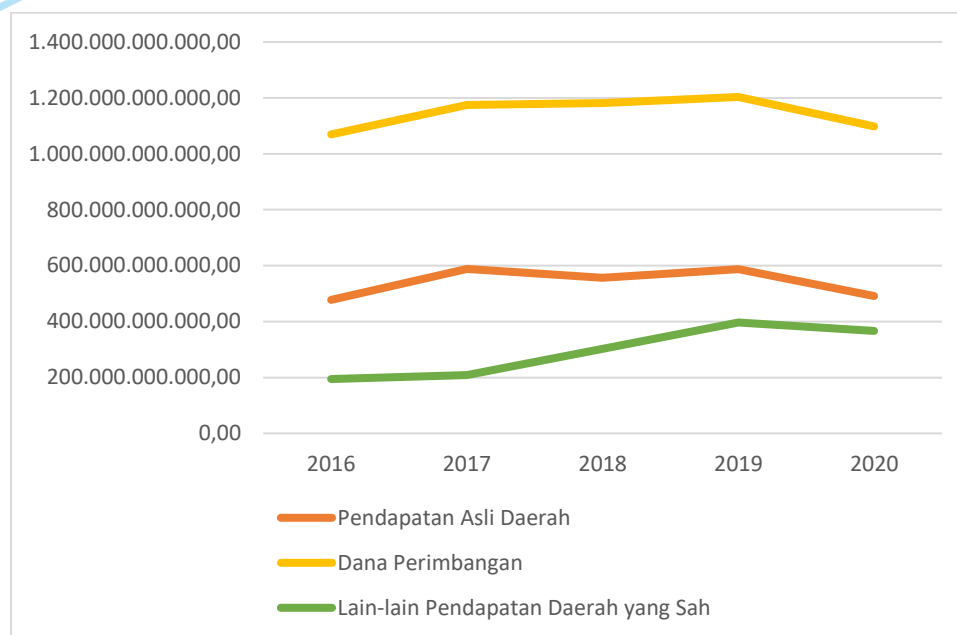
**Gambar 3.1**  
**Realisasi Pendapatan Kota Malang Tahun 2016-2020**

Secara terperinci, komposisi pendapatan daerah selama periode Tahun Anggaran 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut:



**Gambar 3.2**  
**Persentase Komponen Pendapatan Kota Malang**  
**Tahun 2016-2020**

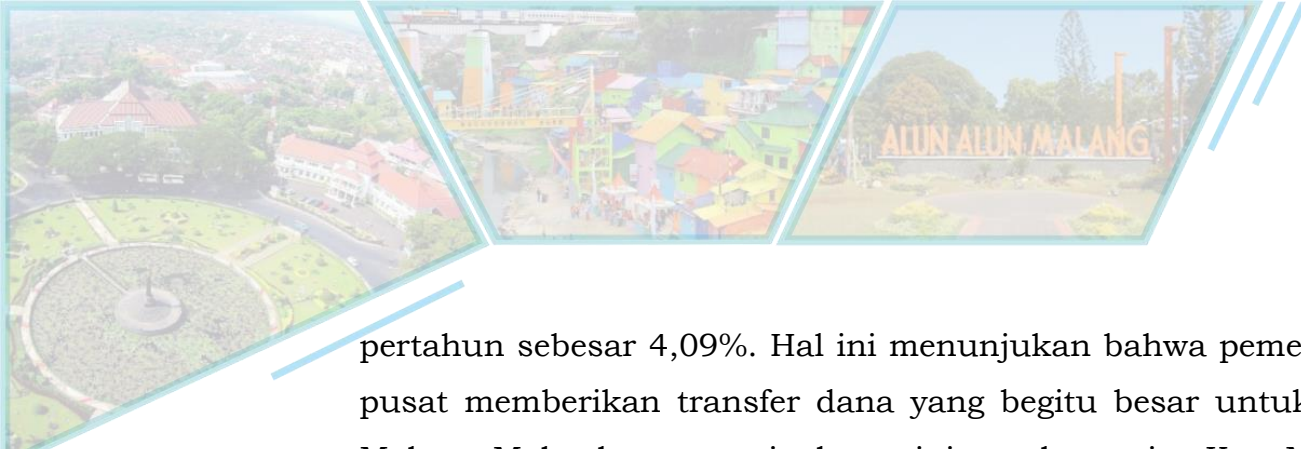
Berdasarkan Gambar 3.2 selama tahun 2016-2020 perkembangan pendapatan Kota Malang berdasarkan komponen pendapatan diketahui penyumbang terbanyak berasal dari dana perimbangan sebesar 61,45% pada tahun 2016 dan turun menjadi 56,16% di tahun 2020, penyumbang pendapatan terbesar kedua diperoleh dari pendapatan asli daerah sebesar 27,42% pada tahun 2016 dan turun menjadi 25,11% di tahun 2020. Penyumbang terakhir adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 11,71% di tahun 2016 meningkat menjadi 18,73% di tahun 2020. Distribusi pendapatan daerah yang didominasi oleh dana perimbangan bukanlah merupakan kondisi yang baik bagi keuangan daerah karena menunjukkan semakin rendahnya kemandirian fiskal akibat kontribusi pendapatan asli daerah yang semakin kecil persentasenya.



**Gambar 3.3**  
**Rincian Pendapatan Kota Malang Tahun 2016-2020**

Salah satu komponen penting dari pendapatan daerah adalah Pendapatan asli Daerah, berdasarkan gambar 3.3 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilainya mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2016 nilai PAD Kota Malang masih sekitar Rp 477.541.556.464,64, nilai per tahun cenderung meningkat dengan kenaikan rata-rata 7,82% per tahun, dan tahun 2019 nilai PAD menjadi Rp 588.066.042.351,01. Perkembangan PAD yang signifikan ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah berkembang dengan cukup baik dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pemerintah daerah. Namun, akibat pandemi yang melanda sejumlah potensi pajak menjadi hilang akibat adanya kebijakan PSBB yang mewajibkan beberapa sektor tutup. Tahun 2020 pendapatan asli daerah turun signifikan menjadi Rp 491.189.243.955,35 atau hampir sama dengan pendapatan asli daerah di tahun 2016.


Pada sisi dana perimbangan, nilainya juga cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2016 masih sebesar Rp 1.069.366.446.979,00, pada tahun 2019 nilai meningkat menjadi Rp 1.203.245.896.321,00 dengan peningkatan rata-rata



pertahun sebesar 4,09%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan transfer dana yang begitu besar untuk Kota Malang. Maka dengan peningkatan ini, perekonomian Kota Malang dapat tumbuh dengan baik, dan dapat mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan oleh pejabat pemerintah di Kota Malang juga telah berjalan cukup baik. Akan tetapi, pandemi *Covid-19* yang melanda telah menimbulkan dampak besar bagi keuangan nasional yang menyebabkan dana perimbangan dari pemerintah pusat turun drastis yakni di tahun 2020 dana perimbangan hanya sebesar Rp 1.098.463.668.428,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, nilainya juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2016 nilainya Rp 194.486.247.266,00, terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 menjadi Rp 396.673.541.314,00, sedangkan pada tahun 2020 nilainya turun menjadi Rp 366.437.272.721,00.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang tahun 2016-2020, masih didominasi oleh pajak daerah, dimana pajak daerah pada tahun 2016 sebesar Rp 374.641.673.419,65, hingga pada tahun 2019 meningkat tajam menjadi sebesar Rp 460.047.450.664,60, dan tahun 2020 turun menjadi Rp 351.759.920.903,49 akibat pandemi *Covid-19*. Urutan kedua adalah Retribusi Daerah yang mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2016 senilai Rp 42.782.439.061,03, terus tumbuh hingga tahun 2018 mencapai Rp 50.505.712.055,51 akan tetapi pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan hingga menjadi sebesar Rp 38.449.140.906,00. Berikutnya adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2016 sebesar Rp 44.331.463.186,96, naik signifikan di tahun 2017 menjadi Rp 111.332.363.774,69. Namun, pada tahun berikutnya turun tajam hingga tahun 2020 nilainya hanya menjadi sebesar Rp 67.631.529.741,06. Terakhir adalah hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan Tahun 2016 sebesar



Rp 15.785.980.797,00 terus mengalami peningkatan hingga pada Tahun 2020 mencapai Rp 33.348.652.404,80.

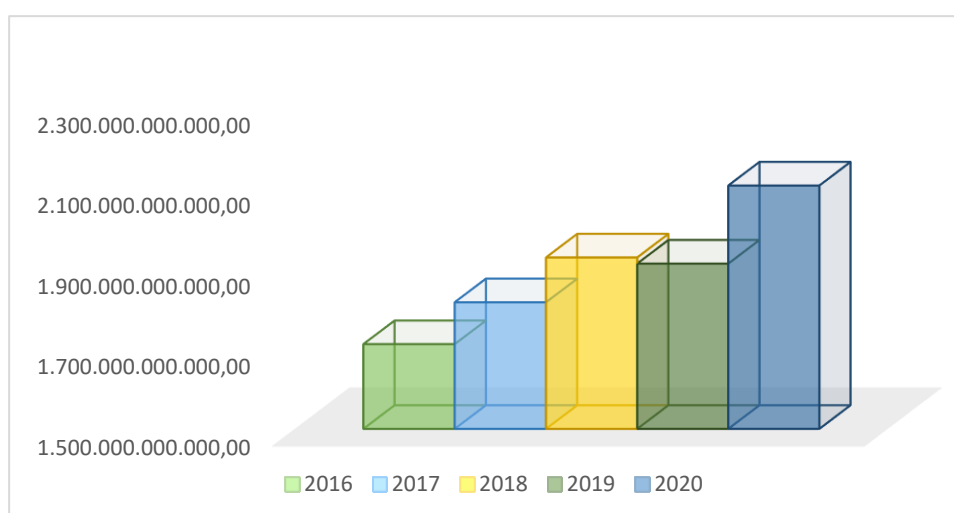
### **B. Belanja Daerah**

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perkembangan realisasi belanja daerah Kota Malang tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah**  
**Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kota Malang**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
<b>2</b>	<b>Belanja</b>	<b>1.710.077.444.259,97</b>	<b>1.813.923.922.301,54</b>	<b>1.925.070.651.868,55</b>	<b>1.909.775.302.319,19</b>	<b>2.103.467.535.397,26</b>	<b>5,39%</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>921.030.657.951,21</b>	<b>778.379.835.897,26</b>	<b>820.885.409.623,28</b>	<b>851.778.932.165,88</b>	<b>890.082.252.087,77</b>	<b>-0,44%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	862.559.055.658,81	691.770.586.889,86	747.277.079.953,01	776.048.486.767,88	729.276.551.486,77	<b>-3,49%</b>
2.1.2	Belanja Hibah	57.425.620.000,00	85.967.500.000,00	72.938.985.333,27	73.710.379.600,00	98.172.201.249,00	<b>17,20%</b>
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0	0	0	8.018.690.000,00	<b>0,00%</b>
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	78.766.200,00	6.484.050,00	0	0	0	<b>0,00%</b>
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik	635.264.957,40	635.264.957,40	635.263.795,00	662.694.733,00	0,00	<b>-23,92%</b>
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	331.951.135,00	0,00	34.080.542,00	1.357.371.065,00	54.614.809.352,00	<b>0,00%</b>
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>789.046.786.308,76</b>	<b>1.035.544.086.404,28</b>	<b>1.104.185.242.245,27</b>	<b>1.057.996.370.153,31</b>	<b>1.213.385.283.309,49</b>	<b>12,09%</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	131.171.515.513,47	175.276.985.652,52	163.616.967.935,57	190.967.861.890,00	161.676.675.462,00	<b>7,09%</b>
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	464.208.106.403,99	519.772.745.584,90	589.365.005.412,84	628.502.968.908,65	688.481.383.207,74	<b>10,39%</b>
2.2.3	Belanja Modal	193.667.164.391,30	340.494.355.166,86	351.203.268.896,86	238.525.539.354,66	363.227.224.639,75	<b>24,79%</b>

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi belanja langsung merupakan jenis belanja yang mendominasi total belanja daerah. Belanja langsung selama periode 2016-2020, setiap tahunnya cenderung menunjukkan tren positif dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 12,09%. Selanjutnya, belanja langsung sebagian besar dipergunakan untuk belanja barang dan jasa, selama periode 2016-2020, setiap tahunnya juga mengalami pertumbuhan dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 10,39%. Selain untuk belanja barang dan jasa, belanja langsung juga dipergunakan untuk belanja modal dan pegawai, dimana pada tahun 2016-2020 belanja untuk kedua kebutuhan ini mengalami fluktuatif. Sedangkan, untuk Belanja Tidak Langsung mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2017 yang dikarenakan penurunan pada belanja pegawai. Meskipun begitu untuk tahun 2018-2020 belanja langsung nilainya terus mengalami peningkatan walaupun tidak secepat belanja langsung. Secara keseluruhan, perkembangan realisasi total belanja daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 3.4**  
**Total Belanja Pemerintah Kota Malang Tahun 2016-2020**

Berdasarkan Gambar 3.4 realisasi belanja daerah pada tahun 2016-2020 cenderung untuk terus mengalami pertumbuhan, kecuali pada tahun 2019 yang mengalami sedikit penurunan sebesar -0,01%. Pada tahun 2016 total belanja daerah Kota Malang sebesar



Rp 1.710.077.444.259,97 dan tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp 2.103.467.535.397,26 dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 5,39%.

### **C. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi pembiayaan daerah tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah**  
**Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kota Malang**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
<b>3</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>273.688.899.177,40</b>	<b>242.605.705.627,07</b>	<b>374.399.444.578,66</b>	<b>464.554.243.871,35</b>	<b>715.264.421.538,17</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>316.838.899.177,40</b>	<b>305.005.705.627,07</b>	<b>400.598.440.985,66</b>	<b>489.359.571.730,35</b>	<b>742.764.421.538,17</b>
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	316.838.899.177,40	305.005.705.627,07	400.598.440.985,66	489.359.571.730,35	742.764.421.538,17
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>43.150.000.000,00</b>	<b>62.400.000.000,00</b>	<b>26.198.996.407,00</b>	<b>24.805.327.859,00</b>	<b>27.500.000.000,00</b>
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	330.327.859,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	43.150.000.000,00	62.400.000.000,00	26.198.996.407,00	24.475.000.000,00	27.500.000.000,00
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dari tabel terlihat bahwa pada tahun 2016-2020 pembiayaan Pemerintah Kota Malang mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 30,25%. Adanya nilai pembiayaan yang terus tumbuh ini menandakan surplus akibat anggaran belanja yang tidak terserap seutuhnya atau kurang dari 100%. Selain itu, tingginya pembiayaan neto daerah disebabkan oleh pengeluaran pembiayaan Kota Malang yang umumnya digunakan untuk penyertaan modal ke BUMD juga cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 pembiayaan neto daerah sebesar Rp 273.688.899.177,40, namun pada tahun 2020 pembiayaan neto daerah telah mencapai Rp 715.264.421.538,17 atau hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2016.

### **3.1.2. Neraca Daerah**

Guna melihat posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana maka dapat dilihat dari laporan neraca daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kota Malang selama kurun waktu 2016-2020 seperti terlihat pada Tabel 3.4 dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah**  
**Kota Malang**

No.	Uraian	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>1.</b>	<b>ASET</b>	<b>5.909.774.604.328,97</b>	<b>6.216.978.363.673,12</b>	<b>6.396.564.384.412,46</b>	<b>6.391.773.253.297,18</b>	<b>6.553.478.439.703,86</b>	<b>2,64</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>389.415.540.365,23</b>	<b>559.685.495.944,74</b>	<b>597.996.156.213,51</b>	<b>860.429.262.272,04</b>	<b>702.459.581.869,24</b>	<b>19,02</b>
1.1.1	Kas di Kas Daerah	296.225.470.222,07	396.403.157.248,60	484.167.785.594,53	732.518.691.596,23	552.257.089.862,88	20,66
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	23.348.770,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	8.758.886.634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Kas di Bendahara FKTP	0,00	4.077.756.460,63	2.693.638.550,82	2.606.583.460,30	0,00	0,00
1.1.5	Kas di Bendahara Dana BOS	763.998.122,51	547.556.537,49	3.157.840.546,67	3.118.259.712,27	4.667.142.007,41	124,20
1.1.6	Kas di Bendahara BLUD	0,00	0,00	0,00	4.526.792.584,14	10.961.839.481,97	0,00
1.1.7	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	Piutang Pajak Daerah	177.094.312.163,30	201.004.741.391,23	220.829.820.451,02	234.109.824.236,26	251.771.488.237,46	9,23
1.1.9	Piutang Retribusi Daerah	7.636.113.901,00	9.245.811.442,62	10.899.996.919,88	11.550.653.250,88	10.315.657.788,88	8,56
1.1.10	Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	37.013.750.245,00	0,00	12.681.249.689,00	0,00	0,00
1.1.11	Piutang Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Piutang Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.13	Penyisihan Piutang	-119.333.355.698,40	-135.201.241.185,35	-152.012.641.539,73	-165.290.633.273	-177.461.741.711	10,46

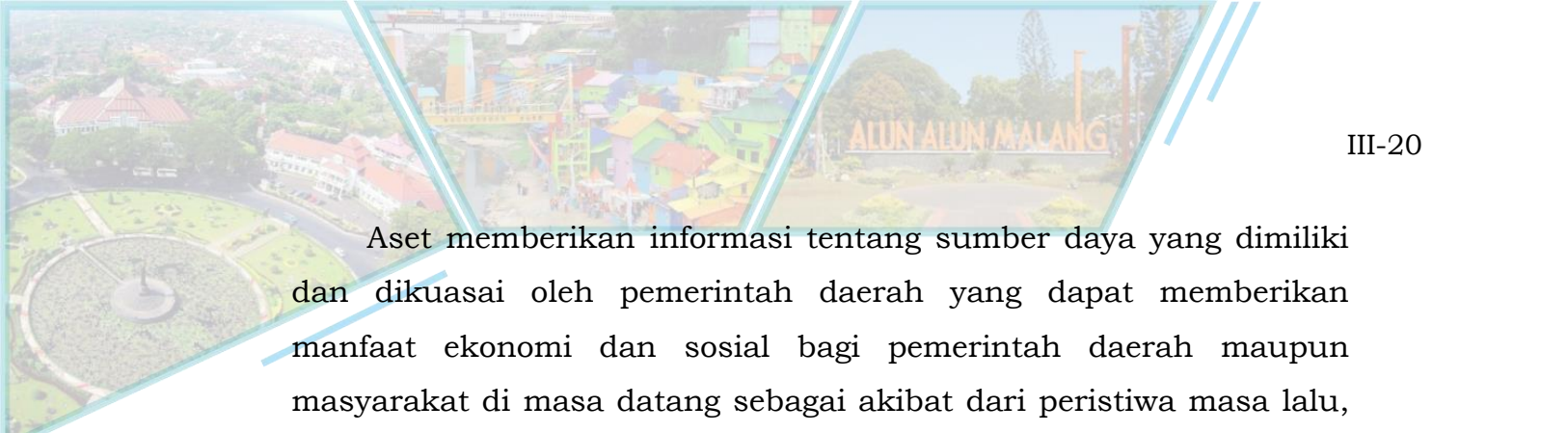
No.	Uraian	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.1.14	Beban Dibayar Dimuka	329.191.291,64	382.638.990,81	378.044.309,48	694.628.866,39	847.790.750,92	30,21
1.1.15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.17	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.18	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.19	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.20	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.21	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.22	Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.23	Piutang Lainnya	4.023.976.065,37	28.764.037.110,27	4.161.625.116,76	4.060.156.713,50	6.831.463.616,41	148,78
1.1.24	Persediaan	13.893.598.892,74	17.447.287.703,44	23.720.046.264,08	19.853.055.436,49	42.268.851.834,48	39,53
<b>1.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>267.589.635.215,00</b>	<b>414.470.402.466,00</b>	<b>326.146.283.411,00</b>	<b>374.508.909.229,00</b>	<b>388.109.717.065,00</b>	<b>13,01</b>
1.2.1	Investasi NonPermanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.2.2	Investasi Permanen	267.589.635.215,00	414.470.402.466,00	326.146.283.411,00	374.508.909.229,00	388.109.717.065,00	13,01
<b>1.3.</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>5.123.854.482.152,62</b>	<b>5.034.828.277.049,51</b>	<b>5.320.020.256.867,29</b>	<b>5.004.550.872.144,19</b>	<b>5.323.478.039.082,52</b>	<b>1,09</b>
1.3.1	Tanah	2.838.174.684.519,00	2.774.207.557.213,00	2.660.808.950.981,00	2.646.600.381.267,00	2.682.280.149.267,00	-1,38
1.3.2	Peralatan dan Mesin	556.750.085.934,97	606.557.168.429,63	767.267.896.794,71	852.192.730.277,51	973.913.983.918,64	15,20
1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.297.395.098.893,22	1.167.874.193.609,68	1.217.954.244.534,74	1.293.138.813.847,05	1.522.628.959.560,26	4,56
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.834.150.864.016,31	1.955.878.092.605,28	2.936.534.806.454,27	1.991.556.907.021,28	2.121.963.290.700,12	7,79
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	47.836.246.159,75	57.001.760.860,01	62.189.152.930,01	65.588.044.383,01	68.119.049.369,00	9,40
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	31.664.269.400,00	33.976.971.400,00	34.463.337.400,00	32.635.869.400,00	28.190.184.000,00	-2,55
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-1.482.116.766.770,63	-1.560.667.467.068,09	-2.359.198.132.227,44	-1.877.161.874.051,66	-2.073.617.577.732,50	11,62
<b>1.4</b>	<b>DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>128.914.946.596,12</b>	<b>207.994.188.212,86</b>	<b>152.401.687.920,66</b>	<b>152.284.209.651,95</b>	<b>139.431.101.687,10</b>	<b>6,52</b>
1.5.1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Tuntutan Ganti Rugi	52.105.000,00	52.105.000,00	52.105.000,00	50.105.000,00	65.290.000,00	6,62
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	106.449.318.000,00	106.449.318.000,00	106.449.318.000,00	106.449.318.000,00	98.842.318.000,00	-1,79
1.5.4	Aset Tak Berwujud	6.377.244.054,50	7.350.245.659,25	8.730.276.765,25	8.449.293.987,50	7.594.794.658,75	5,18

No.	Uraian	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.5.5	Aset Lain yang Dibatasi Penggunaannya	345.935.911,79	323.000.151,54	318.494.746,46	483.999.255,50	509.112.439,18	12,28
1.5.6	Aset Lain-lain	15.690.343.629,83	93.819.519.402,07	36.851.493.408,95	36.851.493.408,95	32.419.586.589,17	106,30
<b>2.</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>51.749.802.661,28</b>	<b>13.001.857.255,52</b>	<b>13.915.474.059,94</b>	<b>12.096.894.513,23</b>	<b>7.977.522.376,69</b>	<b>-28,74</b>
<b>2.1.</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>51.749.802.661,28</b>	<b>13.001.857.255,52</b>	<b>13.915.474.059,94</b>	<b>12.096.894.513,23</b>	<b>7.977.522.376,69</b>	<b>-28,74</b>
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Utang bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	1.110.365.567,08	977.091.227,88	924.148.419,70	851.525.261,12	2.303.120.751,51	36,30
2.1.5	Utang Belanja	50.284.506.869,41	11.701.249.613,10	12.672.320.630,78	9.679.341.348,85	5.164.778.923,00	-34,67
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.994.313,00	510.263,00	510.263,00	1.566.027.903,26	509.622.702,18	76.661,47
2.1.7	Utang Pihak Ketiga Lainnya	345.935.911,79	323.006.151,54	318.494.746,46	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Utang Dalam Negeri-Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Premium (Diskonto) Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.2.4	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>EKUITAS DANA</b>	<b>5.858.024.801.667,69</b>	<b>6.203.976.506.417,60</b>	<b>6.382.648.910.352,52</b>	<b>6.379.676.358.783,95</b>	<b>6.545.500.917.327,17</b>	<b>2,83</b>
<b>3.1.</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>5.858.024.801.667,69</b>	<b>6.203.976.506.417,60</b>	<b>6.382.648.910.352,52</b>	<b>6.379.676.358.783,95</b>	<b>6.545.500.917.327,17</b>	<b>2,83</b>
3.1.1	Ekuitas	5.858.024.801.667,69	6.203.976.506.417,60	6.382.648.910.352,52	6.379.676.358.783,95	6.545.500.917.327,17	2,83
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>5.909.774.604.328,97</b>	<b>6.216.978.363.673,12</b>	<b>6.396.564.384.412,46</b>	<b>6.391.773.253.297,18</b>	<b>6.553.478.439.703,86</b>	<b>2,64</b>





Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya. Pada tahun 2016, Kota Malang memiliki aset senilai Rp 5,9 triliun dan cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai Rp 6,55 triliun pada tahun 2020, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 2.64% per tahun. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2020 mencapai Rp 5.2 triliun dan rata-rata tumbuh 1,09 persen per tahun. Aset tetap ini meliputi 81,23% dari seluruh aset pemerintah Kota Malang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 51,75 milyar. Dari tahun 2016 hingga 2020, jumlah kewajiban cenderung terus mengalami penurunan, terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp 7,98 milyar. Rata-rata pertumbuhan kewajiban antara tahun 2016-2020 sebesar -28,74% dimana tanda negatif tersebut menunjukkan tren negatif kewajiban yang harus dibayar oleh Kota Malang.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Nilai ekuitas dana Kota Malang Tahun 2016 mencapai Rp 5,8 triliun, dan mengalami pertumbuhan dari 2016-2020 dengan rata-rata 2,83 persen. Sehingga, pada tahun 2020 nilai ekuitas dana Kota Malang telah mencapai 6,55 triliun.

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang

digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Malang dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kota Malang mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas di Kota Malang semakin membaik dari tahun ke tahun karena aset lancar cenderung terus tumbuh, sebaliknya kewajiban jangka pendeknya cenderung mengalami penurunan sehingga rasio likuiditasnya semakin besar yang menunjukkan semakin baiknya kapasitas aset lancar Kota Malang untuk menutup kewajiban jangka pendeknya.

### **3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 49 sampai dengan pasal 54 menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi

merupakan pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan, belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran Kinerja (Performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (*pro-poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan perluasan lapangan kerja (*pro-job*). Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan yang mencakup :

### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja yang telah dialokasikan diharapkan untuk dapat direalisasikan, sehingga penggunaannya optimal dan tidak menimbulkan SiLPA. Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kota Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kota Malang**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
1	Belanja Pegawai	92,47	88,71	90,5	91,69	73,24
2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
4	Belanja Hibah	84,69	95,39	77,66	91,4	84,85
5	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	62,55
6	Belanja Bagi Hasil	78,77	6,48	0	0	0
7	Belanja Bantuan Keuangan	95,71	95,71	95,71	94,84	0

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
8	Belanja Tidak Terduga	48,13	0	0,22	0,35	27,3
B	BELANJA LANGSUNG					
1	Belanja Pegawai	90,85	92,33	90,88	86,84	92,56
2	Belanja Barang dan Jasa	87,23	85,41	81,39	86,02	87,27
3	Belanja Modal	65,45	80,5	67,52	61,81	86,51

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa proporsi realisasi tertinggi adalah Belanja Pegawai yakni di atas 85% baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Sedangkan, realisasi yang rendah dimiliki oleh Belanja Tidak Terduga karena diperuntukkan untuk belanja yang tidak dianggarkan sebelumnya dan umumnya belanja tersebut digunakan untuk suatu hal yang mendesak. Disisi lain, belanja bunga dan subsidi proporsi nya 0% karena memang tidak ada anggaran untuk belanja kedua hal tersebut.

Selanjutnya, perlu dilakukan penghitungan terkait belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk diketahui seberapa besar belanja yang dikeluarkan oleh Kota Malang dalam rangka memenuhi hak-hak dan kebutuhan aparatur di Kota Malang.

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Malang**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	745.118.071.916,00	582.528.025.710,00	571.641.753.184,00	579.290.484.716,00	552.008.983.678,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan	99.732.838.585,96	86.579.773.265,75	146.435.318.162,75	168.869.619.231,50	149.286.680.629,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	3.402.000.000,00	5.100.100.000,00	7.497.000.000,00	8.516.797.400,00	8.452.321.000,00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	13.171.291.686,00	15.988.218.640,00	19.792.542.061,00	17.294.877.000,00	17.982.604.534,00
B	BELANJA LANGSUNG					
1	Belanja Honorarium PNS	33.427.572.974,93	40.355.351.831,30	47.145.272.965,03	43.253.629.478,00	22.427.346.962,00
2	Belanja Uang Lembur	13.369.359.900,00	13.175.814.877,00	13.934.652.450,00	15.459.786.350,00	0
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0	0	0		0
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	3.193.702.130,00	5.495.856.405,00	5.929.215.000,00	6.351.001.050,00	1.818.060.360,00
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	6.224.925.260,00	7.397.010.767,00	9.606.336.562,00	14.749.189.600,00	70.170.578.931,00
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	21.461.037.767,00	30.235.227.534,00	32.512.071.645,00	31.429.144.786,00	19.287.451.187,90
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.208.644.650,00	1.639.471.445,00	1.453.953.300,00	1.543.424.000,00	1.485.015.400,00

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.915.681.730,00	2.970.738.500,00	5.069.018.720,00	3.505.068.700,00	589.102.000,00
9	Belanja Perjalanan Dinas	59.462.406.753,86	73.931.226.995,28	76.707.800.276,74	75.852.062.542,15	43.488.372.520,94
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0	47.565.000,00	0	0	0
11	Belanja Pemulangan Pegawai	0		0	0	0
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Mebeul, Peralatan, Perlengkapan, dll)	193.667.164.391,30	340.494.355.166,86	351.203.268.896,86	238.525.539.354,66	363.227.224.639,75
	<b>TOTAL</b>	<b>1.195.354.697.745,05</b>	<b>1.205.938.736.137,19</b>	<b>1.288.928.203.223,38</b>	<b>1.204.640.624.208,31</b>	<b>1.250.223.741.842,59</b>

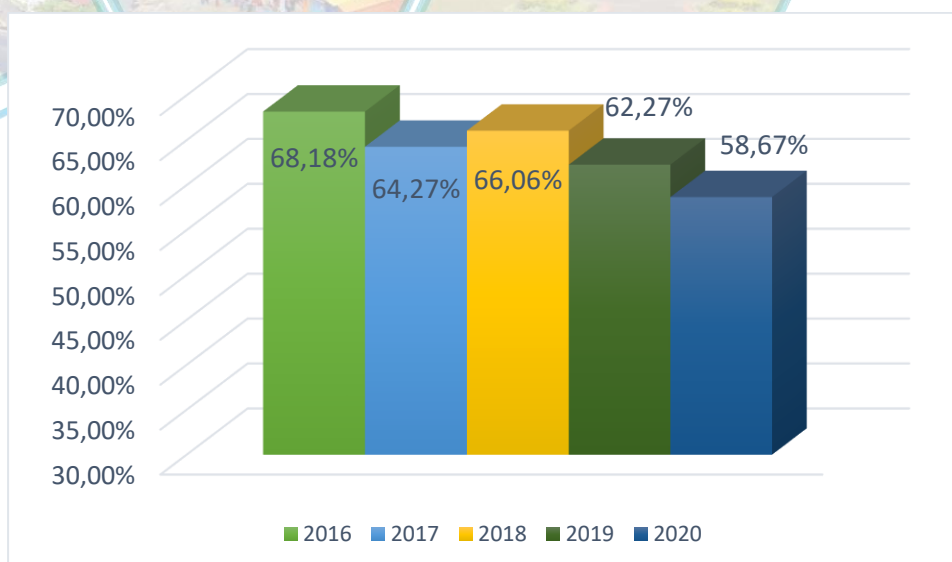
Berdasarkan tabel berikut dapat diketahui bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terbesar digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan. Belanja gaji dan tunjangan tahun 2016 sebesar Rp 745.118.071.916,00 turun menjadi Rp 552.008.983.678,00 di tahun 2020. Sedangkan, belanja kebutuhan aparatur terbesar kedua digunakan untuk Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Mebeul, Peralatan, Perlengkapan, dll) cenderung mengalami peningkatan dari Rp 193.667.164.391,30 di tahun 2016 menjadi Rp 363.227.224.639,75 di tahun 2020. Sedangkan, tertinggi ketiga digunakan untuk Belanja Tambahan Penghasilan, di tahun 2016 nilainya sebesar Rp 99.732.838.585,96 berubah menjadi Rp 149.286.680.629,00 di tahun 2020.

Setelah diketahui jumlah Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur maka perlu untuk dilakukan perbandingan antara total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total pengeluaran. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana belanja digunakan untuk pembangunan daerah dan masyarakat. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Malang**

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
		(Rp)	(Rp)	
		(a)	(b)	
1	Tahun anggaran 2016	1.195.354.697.745,05	1.753.227.444.259,97	68,18
2	Tahun anggaran 2017	1.205.938.736.137,19	1.876.323.922.301,54	64,27
3	Tahun anggaran 2018	1.288.928.203.223,38	1.951.269.648.275,55	66,06
4	Tahun anggaran 2019	1.204.640.624.208,31	1.934.580.630.178,19	62,27
5	Tahun anggaran 2020	1.250.223.741.842,59	2.130.967.535.397,26	58,67

Berdasarkan Tabel 3.7 dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2016-2020, total belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur pada tahun 2016 sebesar Rp 1.195.354.697.745,05. Tahun-tahun berikutnya total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tumbuh berfluktuatif dengan tren positif. Tercatat pada tahun 2020 total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai Rp 1.250.223.741.842,59.



**Gambar 3.5**  
**Persentase Perbandingan Belanja Pemenuhan Kebutuhan**  
**Aparatur dengan Total Belanja**

Berdasarkan gambar 3.5 persentase perbandingan belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dengan total belanja Kota Malang mengalami fluktuatif dari awal tahun 2016 sebesar 68,18%, turun di tahun 2020 yakni hanya sebesar 58,67%. Hal ini menunjukkan apabila jumlah belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur menurun yang berarti alokasi belanja untuk pembangunan daerah semakin besar. Semakin rendah anggaran belanja pegawai maka semakin banyak program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (*pro-poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan perluasan lapangan kerja (*pro-job*).

Selain belanja pemenuhan kebutuhan aparatur perlu juga dilakukan penghitungan terkait pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Malang. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.8**  
**Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Malang**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A	Belanja Tidak Langsung						
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	745.118.071.916,00	582.528.025.710,00	571.641.753.184,00	579.290.484.716,00	552.008.983.678,00	606.117.463.841
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	3.402.000.000,00	5.100.100.000,00	7.497.000.000,00	8.516.797.400,00	8.452.321.000,00	6.593.643.680
3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	-
4	Belanja Bagi Hasil	78.766.200,00	6.484.050,00	0	0	0	17.050.050
B	Pembiayaan Pengeluaran						-
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	-
2	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	330.327.859,00	0	66.065.572
3	Penyertaan Modal	43.150.000.000,00	62.400.000.000,00	26.198.996.407,00	24.475.000.000,00	27.500.000.000,00	36.744.799.281
	<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>791.748.838.116,00</b>	<b>650.034.609.760,00</b>	<b>605.337.749.591,00</b>	<b>612.612.609.975,00</b>	<b>587.961.304.678,00</b>	<b>649.539.022.424,00</b>

Belanja Wajib di Kota Malang setidaknya meliputi belanja gaji dan tunjangan, belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH, belanja bunga, belanja bagi hasil, pembentukan dana cadangan, pembayaran pokok utang, dan penyertaan modal. Belanja wajib terbesar merupakan belanja pegawai dan tunjangan. Selanjutnya, ada pembiayaan yang digunakan untuk penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah Kota Malang yang terdiri atas Tugu Tirta (PDAM), Tugu Arta (BPR), dan Aneka Usaha. Pada Tahun 2016 penyertaan modal sebesar Rp 43.150.000.000,00 dan mengalami fluktuasi dengan tren pertumbuhan negatif, dimana tahun 2020 nilainya hanya sebesar Rp 36.744.799.281.

### **3.3.2. Analisis Pembiayaan**

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; penerimaan piutang daerah; dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Perkembangan defisit anggaran pemerintah Kota Malang dalam kurun tahun 2016-2020 dapat digambarkan pada Tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**Defisit Riil Anggaran Kota Malang**

No.	Uraian	2016 Rp.	2017 Rp.	2018 Rp.	2019 Rp.	2020 Rp.
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.741.394.250.709,64	1.971.916.657.660,13	2.040.194.240.906,67	2.187.985.479.986,01	1.956.090.185.104,35
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.710.077.444.259,97	1.813.923.922.301,54	1.925.070.651.868,55	1.909.775.302.319,19	2.037.924.434.010,95
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	43.150.000.000,00	62.400.000.000,00	26.198.996.407,00	24.805.327.859,00	27.500.000.000,00
<b>A.</b>	<b>Defisit/Surplus riil</b>	<b>(11.833.193.550,33)</b>	<b>95.592.735.358,59</b>	<b>88.924.592.631,12</b>	<b>253.404.849.807,82</b>	<b>(109.334.248.906,60)</b>

Berdasarkan tabel defisit riil anggaran di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 11.833.193.550,33. Namun, pada tahun 2017 hingga tahun 2019 Pemerintah Kota Malang memperoleh surplus anggaran masing-masing sebesar Rp 95.592.735.358,59; Rp 88.924.592.631,12; dan Rp 253.404.849.807,82. Besarnya surplus anggaran pada tahun 2019 menandakan rendahnya penyerapan anggaran. Rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah mencerminkan kinerja anggaran yang tidak optimal. Anggaran pendapatan daerah harusnya diserap secara optimal oleh pemerintah daerah, dengan demikian diharapkan dapat membantu perputaran perekonomian masyarakat. Berputarnya perekonomian daerah pada tahap berikutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Tahun 2020 anggaran pemerintah Kota Malang kembali mengalami defisit, namun kali ini nilainya cukup tinggi yakni Rp 109.334.248.906,60. Hal ini tidak terlepas dari pandemi *Covid-19* yang menyebabkan pendapatan daerah turun drastis. Sehingga, tidak mampu memenuhi belanja daerah yang telah dianggarkan sebelumnya.

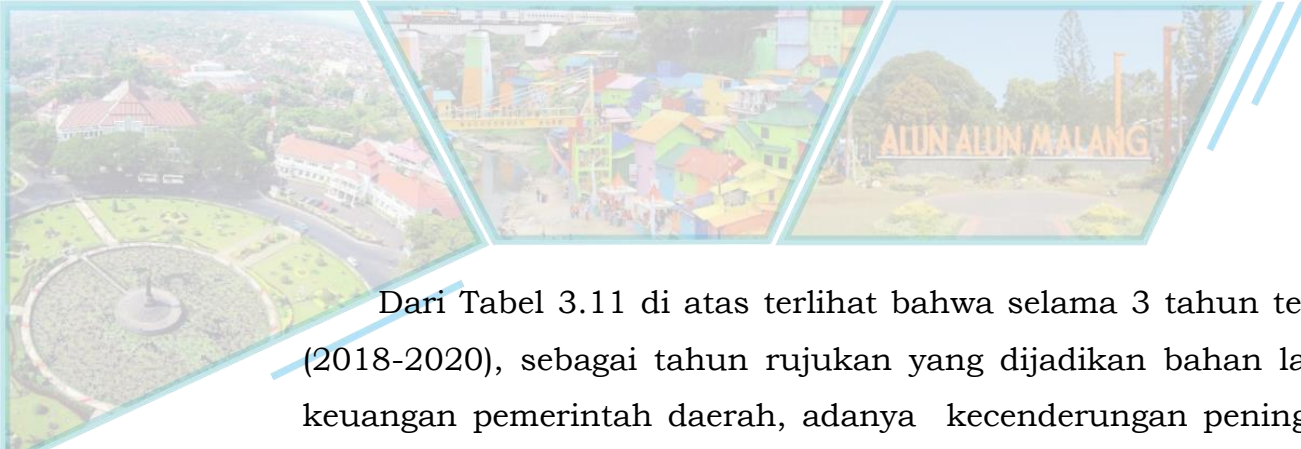
**Tabel 3.10**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Malang**

No.	Uraian	2016 Rp.	2017 Rp.	2018 Rp.	2019 Rp.	2020 Rp.
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	316.838.899.177,40	305.005.705.627,07	400.598.440.985,66	489.359.571.730,35	742.764.421.538,17
2	Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Total Realisasi Penerimaan pembiayaan Daerah</b>	<b>316.838.899.177,40</b>	<b>305.005.705.627,07</b>	<b>400.598.440.985,66</b>	<b>489.359.571.730,35</b>	<b>742.764.421.538,17</b>

Dari tabel 3.10 tersebut, terlihat bahwa terdapat defisit riil anggaran pada tahun 2016 dan tahun 2020. Defisit anggaran tersebut dapat ditutup oleh komponen penerimaan pembiayaan. Hingga saat ini, umumnya, penutup defisit anggaran di Kota Malang bersumber dari akumulasi SiLPA tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Tabel 3.10 dapat diketahui bahwa SiLPA di Kota Malang tahun 2018 sebesar Rp 400.598.440.985,66 dan nilai tersebut terus mengalami pertumbuhan, hingga pada tahun 2020 SiLPA di Kota Malang telah mencapai Rp 742.764.421.538,17. Jumlah SiLPA yang tinggi bukanlah merupakan suatu pertanda yang baik bagi Pemerintah Kota Malang karena hal ini menunjukkan adanya sejumlah dana yang tidak teralokasikan untuk belanja sejumlah program pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelidikan terkait sumber pembentuk SiLPA itu sendiri yang dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut:

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**  
**Kota Malang**

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA
	Jumlah SILPA	<b>305.005.705.627,07</b>		<b>400.598.440.985,66</b>		<b>489.359.571.730,35</b>		<b>742.764.421.538,17</b>		<b>567.886.071.352,26</b>	
1	Pelampauan penerimaan PAD	90.109.985.250,09	<b>29,54</b>	73.313.517.118,57	<b>18,30</b>	28.680.445.286,76	<b>5,86</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2	Pelampauan penerimaan dana pendapatan transfer	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	49.814.968.338,00	<b>10,18</b>	0,00	<b>0,00</b>	10.673.157.000,00	<b>1,88</b>
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	214.895.720.376,98	<b>70,46</b>	327.284.923.867,09	<b>81,70</b>	410.864.158.105,59	<b>83,96</b>	742.764.421.538,17	<b>100,00</b>	557.212.914.352,26	<b>98,12</b>
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
6	Kegiatan lanjutan	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>



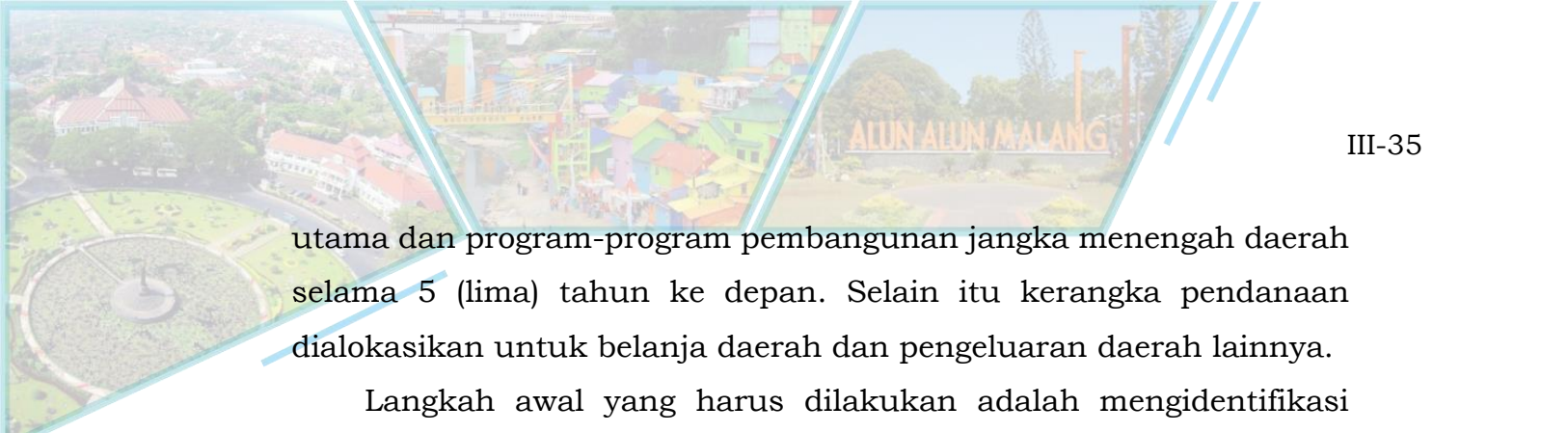
Dari Tabel 3.11 di atas terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir (2018-2020), sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, adanya kecenderungan peningkatan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Kebijakan yang diterapkan dalam optimalisasi pembiayaan yakni dengan cara menganggarkan kembali SiLPA ke dalam perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Dalam proses penganggaran kembali SiLPA, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, harus dilakukan pemilahan terhadap sumber SiLPA. Kedua, setelah diketahui sumber-sumber SiLPA, ditindaklanjuti dengan penganggaran kembali SiLPA sesuai juknis yang ada, seperti SiLPA BLUD harus diserahkan kembali ke Unit Kerja penghasil BLUD, SiLPA DAK harus dianggarkan kembali pada belanja yang bersumber dana DAK, dll. Ketiga, bagi SiLPA yang tidak ada peraturan terkait juknis penggunaan maka dapat dianggarkan sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah yang ada.

Di masa mendatang diharapkan SiLPA harus semakin menurun, karena dengan semakin menurunnya SiLPA merupakan salah satu indikasi semakin sinergisnya antara perencanaan dengan penganggaran. Selain itu semakin besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan memiliki *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang.

### **3.3 Kerangka Pendanaan**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas



utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu kerangka pendanaan dialokasikan untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

### **3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Secara keseluruhan proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2018-2023 disajikan pada Tabel 3.12 berikut:



**Tabel 3.12**  
**Proyeksi Awal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Malang**

No.	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.101.830.272.383,09</b>	<b>2.169.180.948.398,09</b>	<b>2.298.561.759.613,09</b>	<b>2.427.957.453.838,34</b>	<b>2.600.138.790.436,05</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>533.511.294.685,00</b>	<b>740.306.528.700,00</b>	<b>869.687.339.915,00</b>	<b>999.083.034.140,25</b>	<b>1.171.264.370.737,96</b>
1.1.1	Pajak daerah	430.000.000.000,00	621.900.000.000,00	739.200.000.000,00	855.400.000.000,00	1.009.800.000.000,00
1.1.2	Retribusi daerah	42.963.819.700,00	52.882.566.500,00	60.946.172.135,00	70.837.440.844,25	83.065.385.027,46
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	25.014.262.985,00	25.750.000.000,00	27.100.000.000,00	28.500.000.000,00	32.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	35.533.212.000,00	40.673.962.200,00	42.441.167.780,00	44.345.593.296,00	46.398.985.710,50
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.215.649.394.188,00</b>	<b>1.120.075.914.188,00</b>	<b>1.120.075.914.188,00</b>	<b>1.120.075.914.188,00</b>	<b>1.120.075.914.188,00</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak dan non pajak	113.684.568.188,00	113.684.568.188,00	113.684.568.188,00	113.684.568.188,00	113.684.568.188,00
1.2.2	Dana alokasi umum	886.503.661.000,00	886.503.661.000,00	886.503.661.000,00	886.503.661.000,00	886.503.661.000,00

No.	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.2.3	Dana alokasi khusus	215.461.165.000,00	119.887.685.000,00	119.887.685.000,00	119.887.685.000,00	119.887.685.000,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>352.669.583.510,09</b>	<b>308.798.505.510,09</b>	<b>308.798.505.510,09</b>	<b>308.798.505.510,09</b>	<b>308.798.505.510,09</b>
1.3.1	Hibah	66.393.280.000,00	66.393.280.000,00	66.393.280.000,00	66.393.280.000,00	66.393.280.000,00
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dan non pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	208.600.575.510,09	208.600.575.510,09	208.600.575.510,09	208.600.575.510,09	208.600.575.510,09
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	73.871.078.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3.337.330.000,00	3.337.330.000,00	3.337.330.000,00	3.337.330.000,00	3.337.330.000,00

No.	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>2</b>	<b>Belanja</b>	<b>2.206.747.280.578,09</b>	<b>2.243.430.948.398,09</b>	<b>2.371.461.759.613,09</b>	<b>2.499.457.453.838,34</b>	<b>2.668.138.790.436,05</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>935.907.737.278,09</b>	<b>976.210.015.401,09</b>	<b>1.003.926.539.212,24</b>	<b>1.032.169.529.765,34</b>	<b>1.062.987.814.770,08</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	842.944.367.125,09	898.365.869.501,09	926.082.393.312,24	954.325.383.865,34	985.143.668.870,08
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	81.883.217.200,00	81.883.217.200,00	81.883.217.200,00	81.883.217.200,00	81.883.217.200,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	663.728.700,00	663.728.700,00	663.728.700,00	663.728.700,00	663.728.700,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	20.119.224.253,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.270.839.543.300,00</b>	<b>1.267.220.932.997,00</b>	<b>1.367.535.220.400,85</b>	<b>1.467.287.924.073,00</b>	<b>1.605.150.975.665,96</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	225.129.125.675,00				

No.	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	679.449.337.741,91				
2.2.3	Belanja Modal	355.590.959.883,09				
<b>3</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>104.917.008.195,00</b>	<b>74.250.000.000,00</b>	<b>72.900.000.000,00</b>	<b>71.500.000.000,00</b>	<b>68.000.000.000,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>129.392.008.195,00</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>100.000.000.000,00</b>
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	129.392.008.195,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>24.475.000.000,00</b>	<b>25.750.000.000,00</b>	<b>27.100.000.000,00</b>	<b>28.500.000.000,00</b>	<b>32.000.000.000,00</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	24.475.000.000,00	25.750.000.000,00	27.100.000.000,00	28.500.000.000,00	32.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabel 3.13**  
**Realisasi Pendapatan Belanja Daerah Kota Malang**


No.	Uraian	Realisasi			Pagu	Proyeksi	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.040.194.240.906,67</b>	<b>2.187.985.479.986,01</b>	<b>1.956.090.185.104,35</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>556.888.383.143,67</b>	<b>588.066.042.351,01</b>	<b>491.189.243.955,35</b>			
1.1.1	Pajak daerah	434.678.309.679,54	460.047.450.664,60	351.759.920.903,49			
1.1.2	Retribusi daerah	50.505.712.055,51	46.605.703.263,00	38.449.140.906,00			
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	24.792.410.715,90	28.559.431.165,39	33.348.652.404,80			
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	46.911.950.692,72	52.853.457.258,02	67.631.529.741,06			
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.181.289.819.588,00</b>	<b>1.203.245.896.321,00</b>	<b>1.098.463.668.428,00</b>			
1.2.1	Dana bagi hasil	152.360.194.093,00	130.860.343.795,00	132.227.815.517,00			

No.	Uraian	Realisasi			Pagu	Proyeksi	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.2.2	Dana alokasi umum	844.477.164.310,00	886.503.661.000,00	805.071.632.000,00			
1.2.3	Dana alokasi khusus	184.452.461.185,00	185.881.891.526,00	161.164.220.911,00			
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>302.016.038.175,00</b>	<b>396.673.541.314,00</b>	<b>366.437.272.721,00</b>			
1.3.1	Hibah	68.817.280.000,00	67.075.400.000,00	90.756.375.316,00			
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	204.361.428.175,00	252.268.704.314,00	169.329.629.405,00			
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	25.500.000.000,00	73.871.078.000,00	73.440.909.000,00			
1.3.4	Bantuan Keuangan dan	3.337.330.000,00	3.458.359.000,00	32.910.359.000,00			


No.	Uraian	Realisasi			Pagu	Proyeksi	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya						
<b>2</b>	<b>Belanja</b>	<b>1.925.070.651.868,55</b>	<b>1.909.775.302.319,19</b>	<b>2.103.467.535.397,26</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>820.885.409.623,28</b>	<b>851.778.932.165,88</b>	<b>890.082.252.087,77</b>			
2.1.1	Belanja Pegawai	747.277.079.953,01	776.048.486.767,88	729.276.551.486,77			
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00			
2.1.4	Belanja Hibah	72.938.985.333,27	73.710.379.600,00	98.172.201.249,00			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	8.018.690.000,00			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	635.263.795,00	662.694.733,00	0,00			



No.	Uraian	Realisasi			Pagu	Proyeksi	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	34.080.542,00	1.357.371.065,00	54.614.809.352,00			
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.104.185.242.245,27</b>	<b>1.057.996.370.153,31</b>	<b>1.213.385.283.309,49</b>			
2.2.1	Belanja Pegawai	163.616.967.935,57	190.967.861.890,00	161.676.675.462,00			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	589.365.005.412,84	628.502.968.908,65	688.481.383.207,74			
2.2.3	Belanja Modal	351.203.268.896,86	238.525.539.354,66	363.227.224.639,75			
<b>3</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>374.399.444.578,66</b>	<b>464.554.243.871,35</b>	<b>715.264.421.538,17</b>			
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>400.598.440.985,66</b>	<b>489.359.571.730,35</b>	<b>742.764.421.538,17</b>			
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	400.598.440.985,66	489.359.571.730,35	742.764.421.538,17			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00			




No.	Uraian	Realisasi			Pagu	Proyeksi	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00			
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00			
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>26.198.996.407,00</b>	<b>24.805.327.859,00</b>	<b>27.500.000.000,00</b>			



No.	Uraian	Realisasi			Pagu	Proyeksi	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00			
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	26.198.996.407,00	24.475.000.000,00	27.500.000.000,00			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	330.327.859,00	0,00			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00			

**Tabel 3.14**  
**Perubahan Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Malang**

No.	Uraian	Realisasi			Pagu	Proyeksi		Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>				<b>1.994.187.716.717,00</b>	<b>2.076.977.264.844,00</b>	<b>2.415.789.275.628,00</b>	7,47%
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>				<b>614.067.445.482,00</b>	<b>752.795.828.609,00</b>	<b>1.163.000.192.869,00</b>	34,03%
1.1.1	Pajak daerah				462.000.000.000,00	606.000.000.000,00	1.009.800.000.000,00	43,05%
1.1.2	Retribusi daerah				45.542.791.500,00	52.898.685.400,00	60.643.706.541,00	16,41%
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan				25.217.322.874,00	28.891.896.459,00	25.217.322.874,00	-7,51%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah				81.307.331.108,00	65.005.246.750,00	67.339.163.454,00	1,25%
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>				<b>1.310.515.071.235,00</b>	<b>1.220.864.636.235,00</b>	<b>1.186.969.982.759,00</b>	-4,75%



No.	Uraian	Realisasi			Pagu	Proyeksi		Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat				1.173.956.677.000,00	1.084.306.242.000,00	1.020.101.498.900,00	-4,46%
1.2.1.1	Dana Perimbangan				1.095.167.275.000,00	1.053.217.327.000,00	950.101.498.900,00	-4,64%
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum				914.791.440.000,00	897.545.579.000,00	819.586.188.900,00	-4,32%
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus				180.375.835.000,00	155.671.748.000,00	130.515.310.000,00	-5,98%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah				78.789.402.000,00	31.088.915.000,00	70.000.000.000,00	23,97%
1.2.2	Transfer Antar Daerah				136.558.394.235,00	136.558.394.235,00	166.868.483.859,00	-3,43%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil				135.703.910.235,00	134.322.200.235,00	164.632.289.859,00	0,56%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan				854.484.000,00	2.236.194.000,00	2.236.194.000,00	21,43%
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan</b>				<b>69.605.200.000,00</b>	<b>103.316.800.000,00</b>	<b>65.819.100.000,00</b>	<b>-3,72%</b>


No.	Uraian	Realisasi			Pagu	Proyeksi		Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	<b>Daerah yang Sah</b>							
1.3.1	Hibah				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	Dana darurat				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan				69.605.200.000,00	103.316.800.000,00	65.819.100.000,00	6,07%
<b>2</b>	<b>Belanja Daerah</b>				<b>2.552.074.787.962,00</b>	<b>2.219.287.390.137,00</b>	<b>2.530.415.888.391,33</b>	7,44%
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>				<b>2.148.115.942.868,00</b>	<b>1.889.834.264.412,00</b>	<b>2.136.209.239.436,94</b>	9,48%
2.1.1	Belanja Pegawai				992.158.665.158,00	880.109.966.760,00	880.109.966.760,00	8,25%

No.	Uraian	Realisasi			Pagu	Proyeksi		Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa				1.024.240.812.710,00	892.248.145.652,00	1.148.891.276.540,63	14,01%
2.1.3	Belanja Bunga				0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi				0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah				96.017.865.000,00	104.809.112.000,00	92.042.771.136,30	-10,89%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial				35.698.600.000,00	12.667.040.000,00	15.165.225.000,00	100,13%
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>				<b>322.573.922.112,00</b>	<b>243.993.726.554,00</b>	<b>304.479.771.366,74</b>	-3,59%
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>				<b>81.384.922.982,00</b>	<b>85.459.399.171,00</b>	<b>89.726.877.587,66</b>	19,67%
<b>2.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil				0,00	0,00	0,00	0,00%

No.	Uraian	Realisasi			Pagu	Proyeksi		Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan				0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Pembiayaan</b>				<b>557.887.071.245,00</b>	<b>142.310.125.293,00</b>	<b>114.626.612.763,33</b>	-38,65%
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				<b>567.887.071.245,00</b>	<b>149.585.125.293,00</b>	<b>134.626.612.763,33</b>	-35,73%
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)				567.887.071.245,00	149.585.125.293,00	134.626.612.763,33	-35,73%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				0,00	0,00	0,00	0,00%



No.	Uraian	Realisasi			Pagu	Proyeksi		Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				<b>10.000.000.000,00</b>	<b>7.275.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	28,01%
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok				0,00	0,00	0,00	0,00%



No.	Uraian	Realisasi			Pagu	Proyeksi		Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Utang yang Jatuh Tempo							
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah				10.000.000.000,00	7.275.000.000,00	20.000.000.000,00	28,01%
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan				0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan				0,00	0,00	0,00	0,00%

## A. Kebijakan Pendapatan

Pada Tabel 3.12 hingga Tabel 3.14 menampilkan proyeksi awal APBD Kota Malang, realisasai pendapatan dan belanja Tahun 2018-2020, serta proyeksi akhir APBD Kota Malang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Tahun 2021 dan Tahun 2022 adalah pagu indikatif yang dimasukkan dalam SIPD, sedangkan Tahun 2023 merupakan hasil proyeksi. Untuk kolom Tahun 2021, di akun pendapatan nilainya sebesar Rp 1.994.187.716.717,00 bila dibandingkan dengan proyeksi RPJMD sebelumnya yakni Rp 2.298.561.759.613,09 maka proyeksi pendapatan tahun 2021 di perubahan RPJMD berada di bawah proyeksi awal.

Sama halnya dengan tahun 2022, proyeksi pendapatan di tahun 2022 juga lebih rendah dari jumlah yang telah diproyeksikan dalam RPJMD 2018-2023. Pada tahun 2022, akun pendapatan sebesar Rp 1.997.420.857.901,00 bila dibandingkan dengan proyeksi RPJMD sebelumnya sebesar Rp 2.427.957.453.838,34 maka terdapat selisih kurang sebesar Rp 350.980.188.994,34 atau 14,46% di bawah jumlah yang telah diproyeksikan dalam RPJMD 2018-2023. Begitu pula dengan tahun 2023 yakni pada RPJMD awal diproyeksikan sebesar Rp 2.600.138.790.436,05 sedangkan di Perubahan RPJMD 2018-2023 untuk tahun 2023 hanya diproyeksikan sebesar Rp 2.415.789.275.628,00 atau lebih rendah Rp 184.349.514.808,05 dari proyeksi awal. Salah satu penyebab proyeksi di perubahan RPJMD ini lebih rendah dibanding proyeksi awal yakni karena pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia sejak awal Tahun 2020. Sehingga, perlu dilakukan penyesuaian proyeksi pendapatan daerah yang lebih realistis dengan memperhatikan kondisi terkini.

Meskipun begitu Pemerintah Kota Malang tetap optimis bahwa perekonomian Indonesia pada Tahun 2021 perlahan-lahan akan kembali membaik. Hal ini dibuktikan dengan pagu pendapatan asli daerah Kota Malang Tahun 2021 yang ditargetkan akan terus meningkat hingga tahun 2023. Tahun 2021 pendapatan asli daerah Kota Malang awalnya hanya diproyeksikan sebesar Rp 614.067.445.482,00 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 nilainya menjadi sebesar Rp 1.163.000.192.869,00.

Untuk mencapai pendapatan daerah sebagaimana yang diproyeksikan pada Tabel 3.14 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada:

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi.
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
5. Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
8. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, PBB dan BPHTB. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini,

masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan.

Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, khususnya dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi sumber – sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

## **B. Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja yang dikeluarkan oleh Kota Malang pada Tahun 2021 awalnya diproyeksikan sebesar Rp 2.371.461.759.613,09 bila dibandingkan dengan proyeksi RPJMD pada Perubahan RPJMD yang menjadi sebesar Rp 2.552.074.787.962,00 maka nilainya mengalami peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan proyeksi awal di RPJMD 2018-2023. Hal ini sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat dalam rangka pemulihan ekonomi, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan belanja daerahnya masing-masing. Belanja ini ditujukan untuk masa pemulihan ekonomi, sehingga pemerintah diharapkan dapat memberi stimulus bagi perekonomian masyarakat saat ini yang mengalami kemerosotan pasca pandemi *Covid-19*.

Berbeda dengan tahun 2021, pada tahun 2022 dan 2023 proyeksi belanja di Kota Malang akan lebih rendah dibanding proyeksi awal. Tahun 2023 awalnya belanja diproyeksikan mencapai Rp 2.668.138.790.436,05 namun pada perubahan RPJMD ini belanja tahun 2023 hanya diproyeksikan sebesar Rp 2.530.415.888.391,33. Proyeksi yang lebih rendah ini tidak lain disebabkan oleh pendapatan daerah yang diprediksi akan jauh di bawah dari proyeksi awal, sehingga menyebabkan kapasitas dana yang dapat dibelanjakan lebih rendah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka

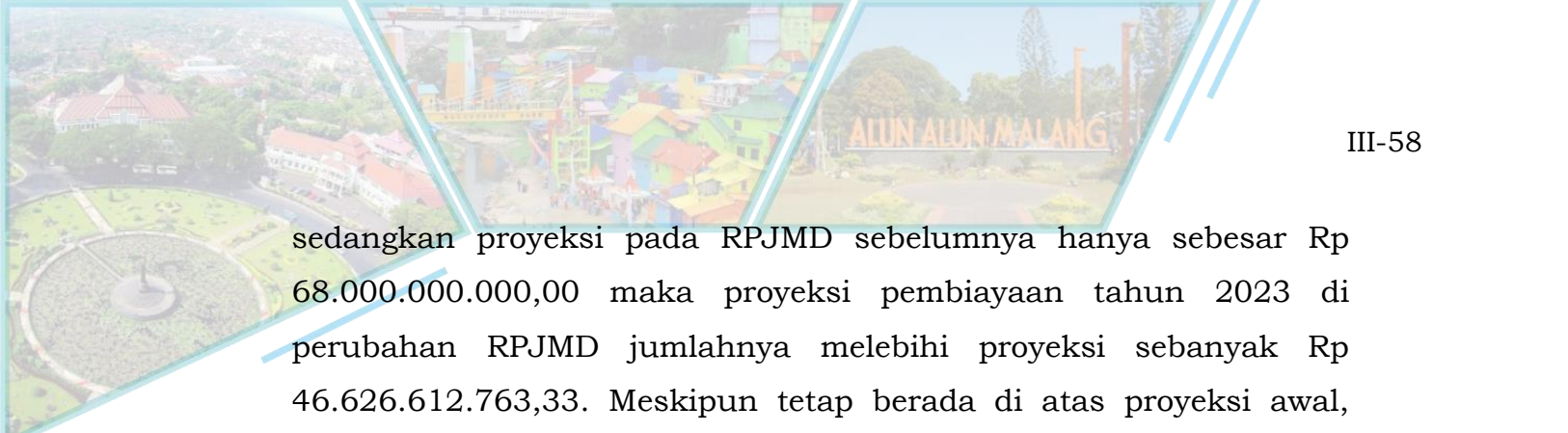
mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2018-2023 sebagai berikut :

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Malang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
4. Belanja daerah bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan pandemi *Covid-19* dengan sasaran optimalnya kepada penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 2 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I dan Prioritas II.

### **C. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

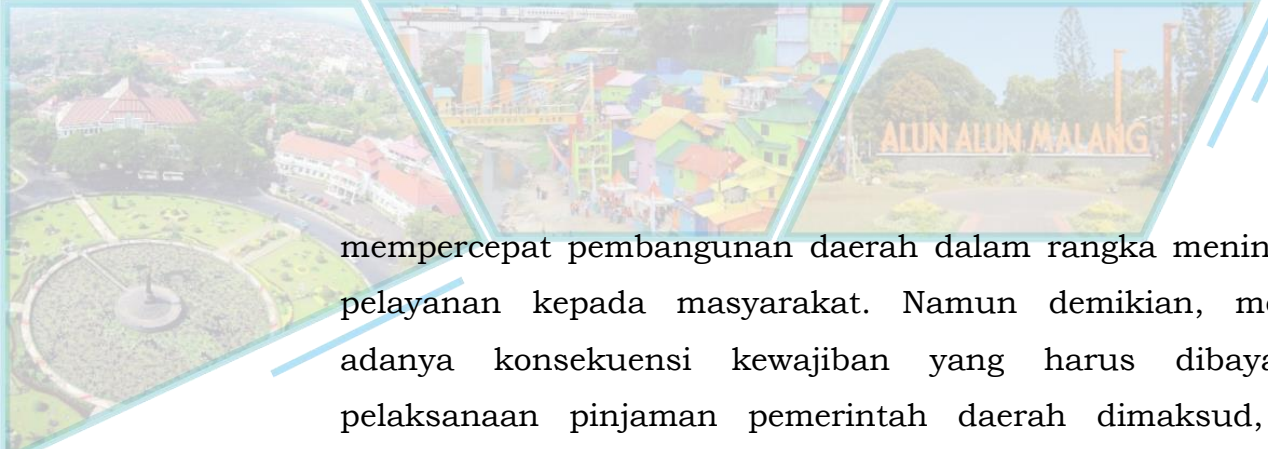
Pada Tahun 2021 di akun pembiayaan nilainya sebesar Rp 557.887.071.245,00 bila dibandingkan dengan proyeksi RPJMD sebelumnya sebesar Rp 72.900.000.000,00 maka nilai proyeksi di perubahan RPJMD ini lebih besar Rp 484.987.071.245,00 atau lebih tujuh kali lipat dari apa yang telah dianggarkan pada RPJMD 2018-2023. Sejalan dengan Tahun 2021, pada Tahun 2022 dan 2023 pembiayaan juga melebihi proyeksi RPJMD. Pada Tahun 2023, di akun pembiayaan proyeksinya sebesar Rp 114.626.612.763,33



sedangkan proyeksi pada RPJMD sebelumnya hanya sebesar Rp 68.000.000.000,00 maka proyeksi pembiayaan tahun 2023 di perubahan RPJMD jumlahnya melebihi proyeksi sebanyak Rp 46.626.612.763,33. Meskipun tetap berada di atas proyeksi awal, namun proyeksi pembiayaan tahun 2023 pada perubahan RPJMD telah mengalami penurunan yang signifikan dibanding proyeksi tahun 2021. Hal ini dapat dijadikan sebagai sinyal bahwa Pemerintah Kota Malang telah berusaha untuk mengoptimalkan belanja daerah sehingga SiLPA cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Realisasi belanja yang tidak optimal dikarenakan pedoman pelaksanaan dana alokasi khusus datangnya sering terlambat sehingga mempengaruhi capaian realisasi penyerapan, efisiensi pelaksanaan kegiatan (sisa lelang), dan Penggunaan DBHCHT dibatasi oleh Peraturan Menteri Keuangan. Namun, dengan adanya prioritas dalam pemulihan ekonomi diharapkan Belanja Kota Malang bisa jauh lebih besar dan terjadi efisiensi di SiLPA Tahun 2022 dan 2023. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka sejumlah kebijakan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
2. SiLPA tahun 2018-2023 diproyeksikan akan cenderung mengalami penurunan, pada tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk



mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Pada aspek pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD, Dana Bergulir (Kredit Program), Belanja Modal BUMD, dll. Terdapat 3 BUMD di Kota Malang yang akan memperoleh penyertaan modal diantaranya Tugu Tirta (PDAM), Tugu Artha (BPR), dan Aneka Usaha. Dengan adanya penyertaan modal terhadap ketiga BUMD ini, diharapkan kedepannya BUMD di Kota Malang dapat terus berkembang dan mampu berkontribusi lebih terhadap pembangunan daerah melalui sistem bagi hasil yang diterapkan.
6. Selain skema pembiayaan di atas, terdapat bentuk pelibatan dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan, yaitu skema *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sejauh ini, sudah cukup banyak layanan publik dan fasilitas kepada masyarakat yang diperoleh dari skema CSR. Namun demikian, masih ada peluang untuk optimalisasi CSR dalam rangka Pembangunan Daerah.

### **3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Secara keseluruhan kerangka pendanaan daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2018-2023 disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 3.15**  
**Proyeksi Awal Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Malang**

NO.	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	2.101.830.272.383,09	2.169.180.948.398,09	2.298.561.759.613,09	2.427.957.453.838,34	2.600.138.790.436,05
2	Pencairan dana cadangan (sesuai perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	129.392.008.195,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	Total Penerimaan	2.231.222.280.578,09	2.269.180.948.398,09	2.398.561.759.613,09	2.527.957.453.838,34	2.700.138.790.436,05
	Dikurangi					
4	Belanja Tidak Langsung	935.907.737.278,09	976.210.015.401,09	1.003.926.539.212,24	1.032.169.529.765,34	1.062.987.814.770,08
5	Pengeluaran Pembiayaan	24.475.000.000,00	25.750.000.000,00	27.100.000.000,00	28.500.000.000,00	32.000.000.000,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.270.839.543.300,00	1.267.220.932.997,00	1.367.535.220.400,85	1.467.287.924.073,00	1.605.150.975.665,96

**Tabel 3.16**  
**Realisasi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Malang**

NO.	URAIAN	Realisasi			Pagu	Proyeksi	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	2.040.194.240.906,67	2.187.985.479.986,01	1.956.090.185.104,35			
2	Pencairan dana cadangan (sesuai perda)	0	0	0			
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	400.598.440.985,66	489.359.571.730,35	742.764.421.538,17			
	Total Penerimaan	2.440.792.681.892,33	2.677.345.051.716,36	2.698.854.606.642,52			
	Dikurangi						
4	Belanja Tidak Langsung	820.885.409.623,28	851.778.932.165,88	890.082.252.087,77			
5	Pengeluaran Pembiayaan	26.198.996.407,00	24.805.327.859,00	27.500.000.000,00			
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.593.708.275.862,05	1.800.760.791.691,48	1.781.272.354.554,75			

**Tabel 3.17**  
**Perubahan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Malang**

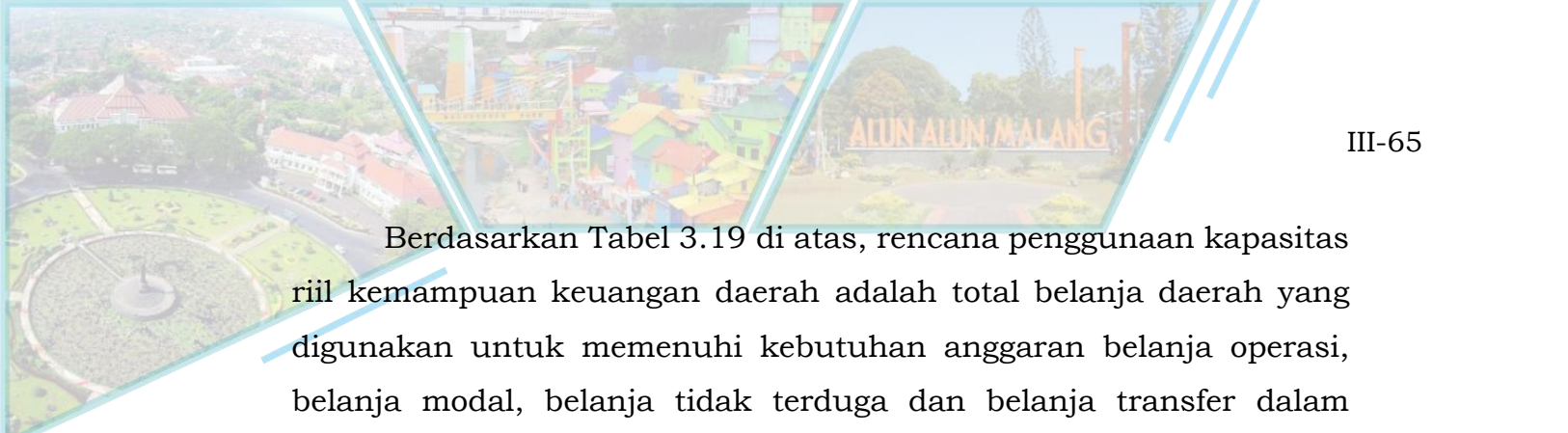
NO.	URAIAN	Realisasi			Pagu	Proyeksi	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan				1.994.187.716.717,00	2.076.977.264.844,00	2.415.789.275.628,00
2	Pencairan dana cadangan (sesuai perda)				0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran				567.887.071.245,00	149.585.125.293,00	134.626.612.763,33
	Total Penerimaan				2.562.074.787.962,00	2.226.562.390.137,00	2.550.415.888.391,33
	Dikurangi						
4	Pengeluaran Pembiayaan				10.000.000.000,00	7.275.000.000,00	20.000.000.000,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan				2.552.074.787.962,00	2.219.287.390.137,00	2.530.415.888.391,33

**Tabel 3.18**  
**Rencana Awal Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Malang**

NO	URAIAN	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.270.839.543.300,00	1.267.220.932.997,00	1.367.535.220.400,85	1.467.287.924.073,00	1.605.150.975.665,96
	Prioritas I	762.503.725.980,00	753.157.738.400,00	1.028.890.440.540,00	1.251.309.699.693,00	1.471.320.364.994,00
	Prioritas II	508.335.817.320,00	514.063.194.597,00	338.644.779.860,85	215.978.224.379,60	133.830.610.671,96

**Tabel 3.19**  
**Realisasi dan Perubahan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Malang**

NO	URAIAN	Realisasi			Pagu	Proyeksi	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.593.708.275.862,05	1.800.760.791.691,48	1.781.272.354.554,75	2.552.074.787.962,00	2.219.287.390.137,00	2.530.415.888.391,33
	Prioritas I	474.517.643.455,23	479.310.750.964,88	873.691.836.191,60	1.248.973.978.661,20	1.366.429.680.163,00	1.559.465.509.095,40
	Prioritas II	1.119.190.632.406,82	1.321.450.040.726,60	907.580.518.363,15	1.303.100.809.300,80	852.857.709.974,00	970.950.379.295,93



Berdasarkan Tabel 3.19 di atas, rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah total belanja daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, dan prioritas II, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II.

Prioritas I (utama) merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen). Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan, bersifat mendukung program prioritas utama. Disamping itu Program prioritas II berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan masing-masing Perangkat Daerah.

# BAB-IV

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

## BAB IV

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan isu-isu strategis pembangunan Kota Malang untuk periode 2018-2023 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Kota Malang. Pembentukan isu-isu strategis di Kota Malang ini dilakukan berdasarkan komponen terhadap analisis hasil pembangunan periode sebelumnya; telaah terhadap dokumen RPJPD Kota Malang 2005-2025; telaah terhadap dokumen RPJMN 2020-2024; telaah terhadap RPJM Provinsi Jawa Timur 2019-2024; telaah terhadap isu internasional; telaah terhadap Platform Walikota Terpilih; telaah terhadap dokumen Kualitas Lingkungan Hidup; analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, dan lain sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan dalam bentuk skematik disajikan dalam gambar di bawah ini:

**Gambar 4.1**

#### Skematik Penetapan Isu-isu Strategis Kota Malang 2018-2023





#### 4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara hal yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perbedaan tersebut diperoleh berdasarkan perbandingan capaian setiap indikator kinerja pembangunan dengan standar (SPM/SDG's/Standar Nasional/target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya atau tren), sebagaimana telah dibahas pada bagian Analisis Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bab II).

Penyelesaian permasalahan pembangunan yang ada pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 ini merupakan sebuah keniscayaan. Salah satu indikator keberhasilan Pemerintahan adalah capaian kinerja pada RPJMD. Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 ini dilaksanakan pada tahun ketiga periode RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023. Capaian target RPJMD pada tahun pertama dan kedua tertuang pada lampiran dokumen Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.

Dalam pembahasan ini, permasalahan pembangunan yang dijabarkan ialah indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/SDG's/Standar Nasional/ dengan target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya atau tren). Berikut permasalahan pembangunan yang ada di Kota Malang:

##### 1. Urusan Pendidikan

Permasalahan yang muncul dalam urusan pendidikan diantaranya;

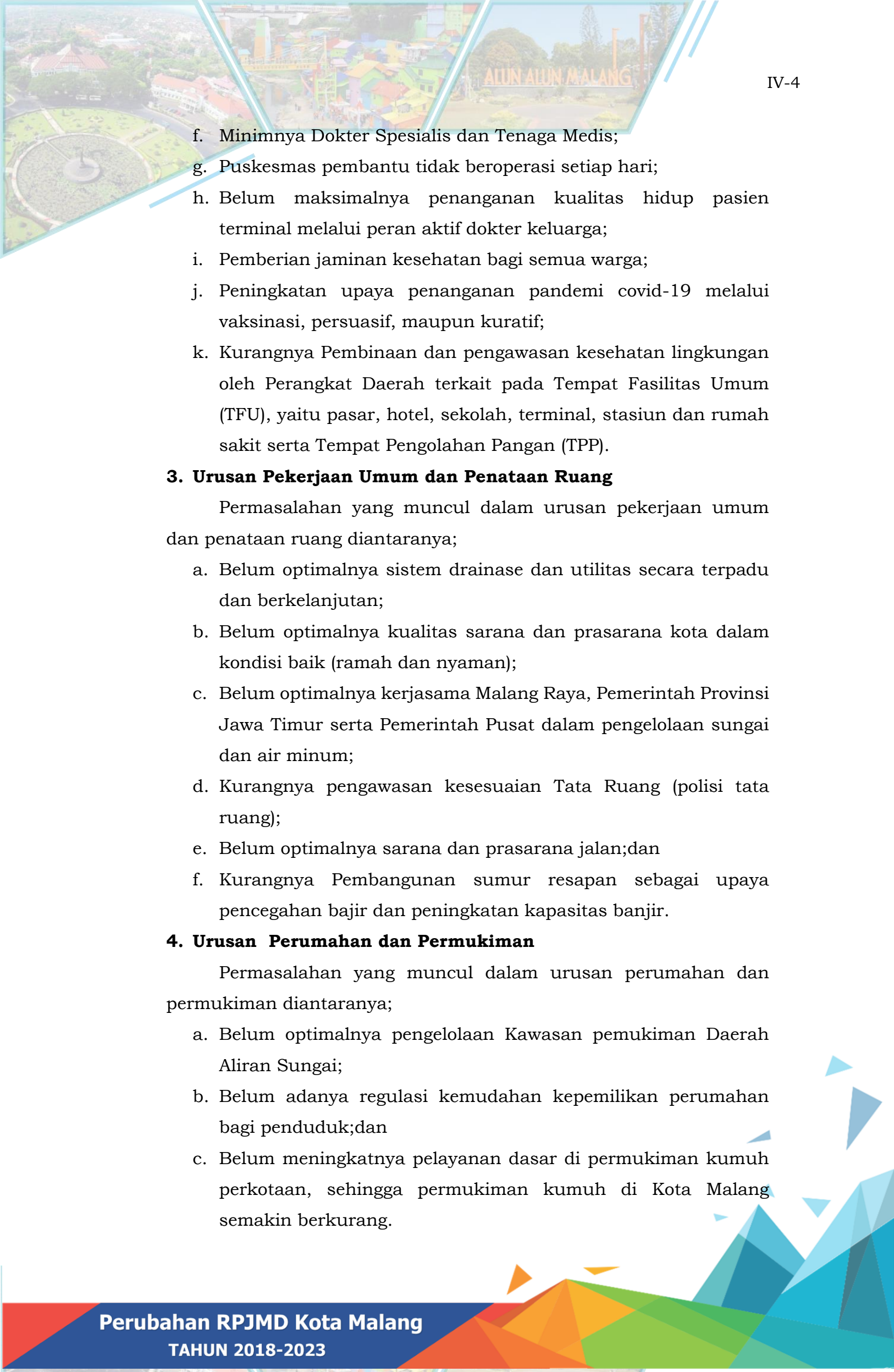
- a. Kurangnya pemerataan kualitas serta jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. Belum ada data yang valid mengenai pemetaan dan pemerataan guru;

- c. Belum maksimalnya kesempatan belajar, partisipasi dan keberlanjutan pendidikan;
- d. Belum meratanya akses pendidikan;
- e. Masih tingginya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang belum terakreditasi;
- f. Masih terdapat siswa melanjutkan ke pondok pesantren maupun melanjutkan ke paket A dan/atau B tanpa pemberitahuan;
- g. Minimnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik dan perlu peningkatan kapasitas sesuai dengan standar;
- h. Kurangnya jumlah tenaga pendidik untuk kaum disabilitas;
- i. Penambahan dan perbaikan sekolah inklusif bagi penyandang disabilitas;
- j. Perlunya peningkatan kualitas sekolah dengan sarana *daring* di tengah kondisi pandemi covid-19;
- k. Angka melek huruf di Kota Malang tergolong sangat baik, namun mengingat status Kota Malang sebagai kota pendidikan, maka hal ini harus menjadi perhatian bersama agar angka melek huruf semakin meningkat; dan
- l. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah harus lebih ditingkatkan.

## **2. Urusan Kesehatan**

Permasalahan yang muncul dalam urusan kesehatan diantaranya:

- a. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi sehingga diperlukan penanganan secara intens dan berkesinambungan;
- b. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan belum optimal;
- c. Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal;
- d. Belum optimalnya Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi;
- e. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kesehatan dirinya dan keluarga atas penyakit tidak menular, terutama orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di fasilitas kesehatan;

- 
- f. Minimnya Dokter Spesialis dan Tenaga Medis;
  - g. Puskesmas pembantu tidak beroperasi setiap hari;
  - h. Belum maksimalnya penanganan kualitas hidup pasien terminal melalui peran aktif dokter keluarga;
  - i. Pemberian jaminan kesehatan bagi semua warga;
  - j. Peningkatan upaya penanganan pandemi covid-19 melalui vaksinasi, persuasif, maupun kuratif;
  - k. Kurangnya Pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan oleh Perangkat Daerah terkait pada Tempat Fasilitas Umum (TFU), yaitu pasar, hotel, sekolah, terminal, stasiun dan rumah sakit serta Tempat Pengolahan Pangan (TPP).

### **3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan yang muncul dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diantaranya;

- a. Belum optimalnya sistem drainase dan utilitas secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana kota dalam kondisi baik (ramah dan nyaman);
- c. Belum optimalnya kerjasama Malang Raya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Pusat dalam pengelolaan sungai dan air minum;
- d. Kurangnya pengawasan kesesuaian Tata Ruang (polisi tata ruang);
- e. Belum optimalnya sarana dan prasarana jalan; dan
- f. Kurangnya Pembangunan sumur resapan sebagai upaya pencegahan banjir dan peningkatan kapasitas banjir.

### **4. Urusan Perumahan dan Permukiman**

Permasalahan yang muncul dalam urusan perumahan dan permukiman diantaranya;

- a. Belum optimalnya pengelolaan Kawasan permukiman Daerah Aliran Sungai;
- b. Belum adanya regulasi kemudahan kepemilikan perumahan bagi penduduk; dan
- c. Belum meningkatnya pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan, sehingga permukiman kumuh di Kota Malang semakin berkurang.

## **5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan yang muncul dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diantaranya;

- a. Belum adanya Pengembangan sistem pengamanan lingkungan *online*;
- b. Penambahan jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan personil Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- c. Kurangnya sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran, khususnya untuk jalan-jalan kecil.

## **6. Urusan Sosial**

Permasalahan yang muncul dalam urusan sosial diantaranya:

- a. Kurang maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan PMKS;
- b. Masih terbatasnya tempat penampungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (khususnya rumah lansia);
- c. Belum adanya sistem distribusi bantuan sosial darurat secara non-tunai;
- d. Belum adanya sistem informasi penghubung warga yang ingin membantu dengan sasaran anak kurang mampu dan berkebutuhan khusus; dan
- e. Masih terdapat anak jalanan yang datang dari luar daerah Kota Malang.
- f. Belum optimalnya Verifikasi dan Validasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

## **7. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan yang muncul dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya;

- a. Belum maksimalnya Penanganan komprehensif terhadap tindakan kekerasan perempuan dan anak (menggunakan sistem informasi);
- b. Kurang optimalnya Penguatan karakter berbasis keluarga (salah satunya dengan sekolah ibu);
- c. Belum adanya regulasi Sistem Perlindungan Anak dan Perempuan (SPARTA) hingga tingkat RT dan RW;
- d. Belum optimalnya peran organisasi perempuan dalam proses pembangunan di Kota Malang.



## 8. Urusan Pangan

Permasalahan yang muncul dalam urusan pangan diantaranya;

- a. Belum adanya diversifikasi pangan;
- b. Belum optimalnya strategi stabilisasi harga bahan pokok;
- c. Belum optimalnya subsidi bahan pangan bagi warga miskin; dan
- d. Kurang keberpihakan belanja pada pasar tradisional.

## 9. Urusan Pertanian

Permasalahan yang muncul dalam urusan pangan diantaranya;

- a. Semakin menyempitnya lahan pertanian aktif yang disebabkan masifnya alih fungsi lahan menjadi permukiman dan kawasan industri; dan
- b. Masih minimnya jumlah aset pemerintah Kota Malang yang dikelola (berupa) sawah pertanian.

## 10. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang muncul dalam urusan lingkungan hidup diantaranya;

- a. Belum maksimalnya Pengelolaan dan Pemanfaatan sampah dan limbah secara terpadu;
- b. Dibutuhkan Integrasi PAM dan PAL atas kebutuhan air dan pengelolaan limbah;
- c. Masih terdapatnya kasus perusahaan maupun industri di Kota Malang yang membuang limbah ataupun sampah di aliran sungai di Kota Malang;
- d. Belum maksimalnya Pengelolaan IPAL di bangunan pemerintah, swasta dan rumah tangga berbasis komunal; dan
- e. Perlu adanya pengelolaan taman edukasi dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau secara kreatif.

## 11. Urusan Perhubungan

Permasalahan yang muncul dalam urusan perhubungan diantaranya;

- a. Tingginya tingkat kemacetan di Kota Malang;
- b. Kurang optimalnya rekayasa lalu lintas penanggulangan kemacetan;
- c. Kurang optimalnya konektivitas wilayah (Jalan Lingkar Luar Kota); dan

- d. Perbaiki sarana dan prasarana pelengkap jalan serta pengembangan teknologi LLAJ.

## **12. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Permasalahan yang muncul dalam urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah diantaranya;

- a. Belum maksimalnya fasilitasi UMKM, serta pendampingan dalam mengembangkan produk unggulan;
- b. Belum optimalnya promosi produk-produk lokal dari Kota Malang;
- c. Kurangnya penguatan *digital marketing*, penguatan teknologi, dan penguatan jaringan internet di sentra-sentra industri, dan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk beradaptasi dalam menghadapi industri 4.0;
- d. Kurangnya optimalisasi pelaku industri kreatif; dan
- e. Peningkatan upaya pembinaan wirausaha baru sebagai alternatif pemulihan dampak covid-19 dalam penyerapan tenaga kerja terdampak covid-19.

## **13. Urusan Kebudayaan**

Permasalahan yang muncul dalam urusan kebudayaan diantaranya:

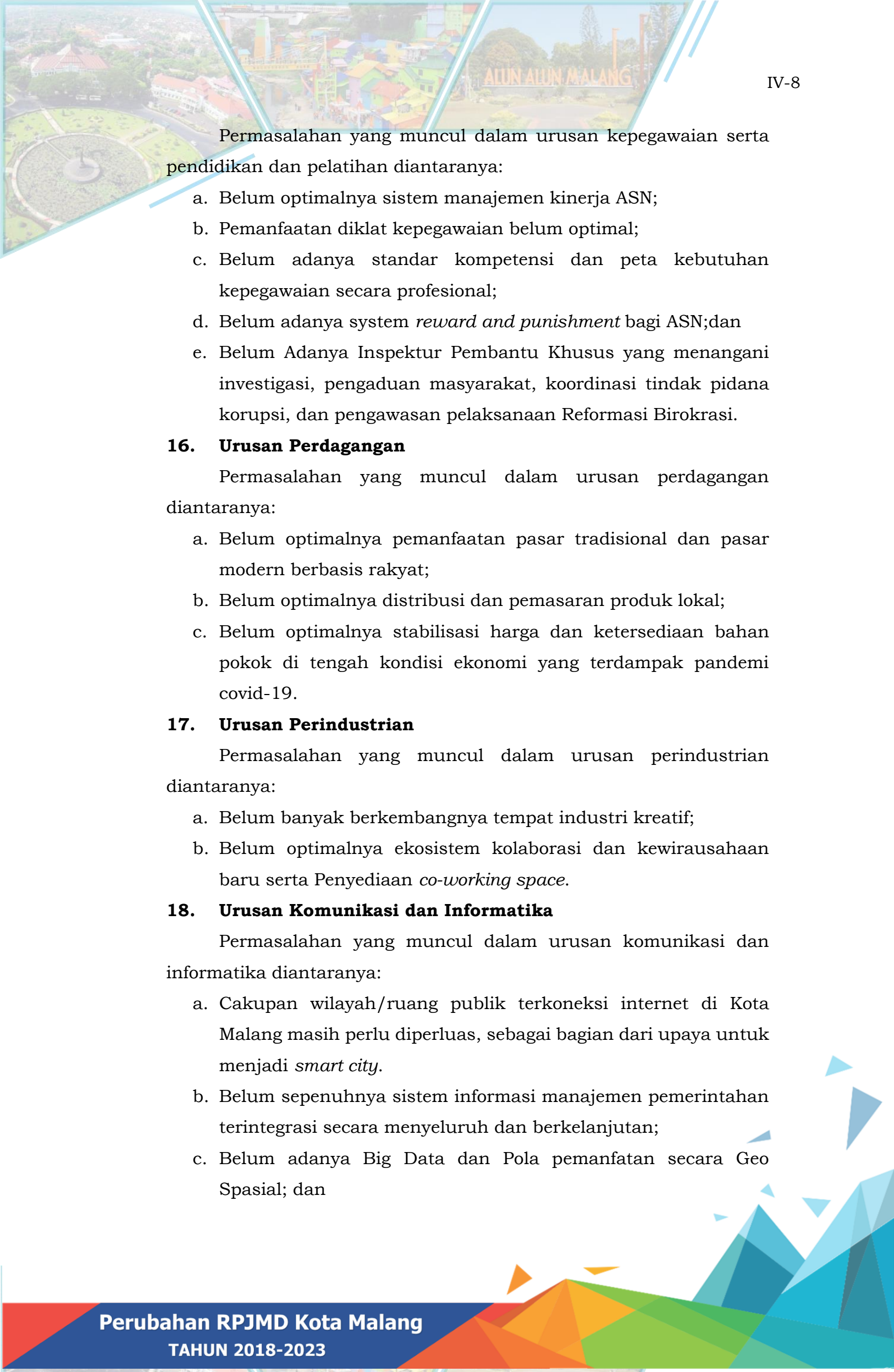
- a. Belum maksimalnya Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya.

## **14. Urusan Pariwisata**

Permasalahan yang muncul dalam urusan kebudayaan diantaranya:

- a. Masih minimnya kalender even-even pemberdayaan komunitas sebagai destinasi edukasi dan wisata; dan
- b. Masih minimnya Pengembangan Kawasan pemberdayaan tematik;
- c. Perlu ada upaya maksimal dalam mengembalikan kunjungan wisata di Kota Malang, sebagai akibat pandemi covid-19;
- d. Pembinaan dan fasilitasi upaya tumbuh kembang dan pemasaran sub sektor ekonomi kreatif terdampak covid-19 perlu ditingkatkan.

## **15. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**



Permasalahan yang muncul dalam urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan diantaranya:

- a. Belum optimalnya sistem manajemen kinerja ASN;
- b. Pemanfaatan diklat kepegawaian belum optimal;
- c. Belum adanya standar kompetensi dan peta kebutuhan kepegawaian secara profesional;
- d. Belum adanya system *reward and punishment* bagi ASN; dan
- e. Belum Adanya Inspektur Pembantu Khusus yang menangani investigasi, pengaduan masyarakat, koordinasi tindak pidana korupsi, dan pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

#### **16. Urusan Perdagangan**

Permasalahan yang muncul dalam urusan perdagangan diantaranya:

- a. Belum optimalnya pemanfaatan pasar tradisional dan pasar modern berbasis rakyat;
- b. Belum optimalnya distribusi dan pemasaran produk lokal;
- c. Belum optimalnya stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah kondisi ekonomi yang terdampak pandemi covid-19.

#### **17. Urusan Perindustrian**

Permasalahan yang muncul dalam urusan perindustrian diantaranya:

- a. Belum banyak berkembangnya tempat industri kreatif;
- b. Belum optimalnya ekosistem kolaborasi dan kewirausahaan baru serta Penyediaan *co-working space*.

#### **18. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan yang muncul dalam urusan komunikasi dan informatika diantaranya:

- a. Cakupan wilayah/ruang publik terkoneksi internet di Kota Malang masih perlu diperluas, sebagai bagian dari upaya untuk menjadi *smart city*.
- b. Belum sepenuhnya sistem informasi manajemen pemerintahan terintegrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. Belum adanya Big Data dan Pola pemanfaatan secara Geo Spasial; dan

- d. Belum adanya sistem respon cepat dan monitoring pembangunan, serta optimalisasi *Ngalam Command Center* (NCC);
- e. Perlu upaya mengharmonisasikan industry 4.0 dengan society 5.0.

### **19. Urusan Keuangan Daerah**

Permasalahan yang muncul dalam urusan keuangan daerah diantaranya:

- a. Belum maksimalnya sistem pengelolaan aset daerah;
- b. Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah; dan
- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem keuangan yang bersih dan transparan.

### **20. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Permasalahan yang muncul dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik diantaranya:

- a. Belum optimalnya Penguatan peran Forum Tokoh Agama dan masyarakat;
- b. Masih adanya konflik sosial yang terjadi di masyarakat;

### **21. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Permasalahan yang muncul dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diantaranya:

- a. Adaptasi digital dalam pelayanan kependudukan.

### **22. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan yang muncul dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diantaranya;

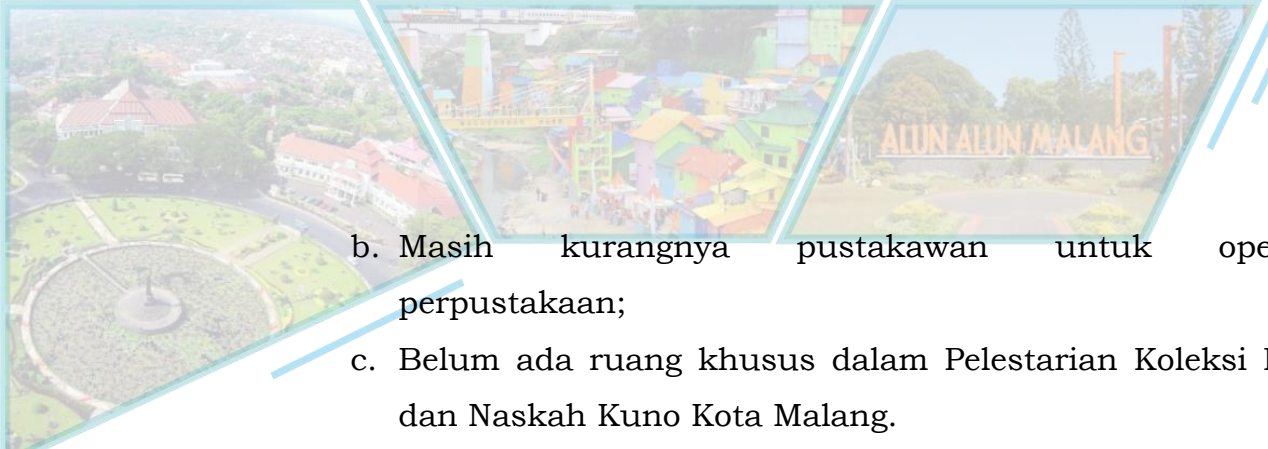
- a. Keterbatasan *database* data dan informasi;
- b. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif semakin menurun, sehingga diperlukan perhatian dari pemerintah;
- c. Jumlah Petugas Lapangan (PLKB/PKB) semakin menurun.

### **23. Urusan Perpustakaan**

Permasalahan yang muncul dalam urusan Perpustakaan diantaranya;

- a. Minat baca masyarakat malang masih tergolong rendah;



- 
- b. Masih kurangnya pustakawan untuk operasional perpustakaan;
  - c. Belum ada ruang khusus dalam Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Kota Malang.

#### **24. Urusan Kearsipan**

Permasalahan yang muncul dalam urusan Kearsipan diantaranya;

- a. Belum tercukupinya jumlah tenaga arsiparis;
- b. Rendahnya kapasitas daerah dalam upaya penguatan *database*; dan
- c. Belum tersedianya sarana penyimpanan arsip (depo arsip).

#### **25. Urusan Pertanahan**

Permasalahan yang muncul dalam urusan Pertanahan diantaranya;

- a. Kepengurusan izin lokasi belum menyesuaikan perkembangan masyarakat karena masih menggunakan peraturan yang lama;
- b. Belum terdapatnya pemisahan lebih rinci antara tugas pokok dan fungsi di seksi pertanahan aset dan satu atap; dan
- c. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait urusan pertanahan DPUPRPKP karena pertanahan DPUPRPKP berbeda dengan Kantor Pertanahan.

#### **26. Urusan Penanggulangan Bencana Daerah**

Permasalahan yang muncul dalam urusan Penanggulangan Bencana Daerah diantaranya:

- a. Kurangnya alat evakuasi bencana;
- b. Kendala dalam melakukan mitigasi longsor karena masih terdapat masyarakat yang membangun rumah di sepadan sungai;
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan bencana;
- d. Kurangnya pos pengamatan dan pengendalian bencana di Kota Malang, khususnya untuk mengantisipasi *Respon Time Rate* penanganan kebakaran, penyelamatan korban, maupun bencana lain;
- e. Koordinasi dan sinergi penanggulangan bencana non alam melalui reaksi cepat penanganan covid-19.

## **27. Urusan Tenaga Kerja**

Permasalahan yang muncul dalam urusan Tenaga Kerja diantaranya:

- a. Pengangguran masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan, khususnya bagi mereka yang terdampak Pandemi Covid-19, hal ini dibuktikan dengan tingkat pengangguran terbuka Kota Malang jauh melebihi dari TPT Nasional dan Provinsi;
- b. Penguatan kompetensi, daya saing dan fasilitasi pengangguran baru terdampak covid-19;
- c. Belum adanya pengkajian terkait pelatihan yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan;
- d. Keberadaan Perguruan Tinggi, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang cukup banyak, belum mampu mendukung terciptanya tenaga kerja potensial.

## **28. Urusan Statistik**

Permasalahan yang muncul dalam urusan Statistik diantaranya;

- a. Kurang terpadunya data antara kominfo dan BPS mengenai statistik;
- b. Data Statistik sektoral yang di peroleh dari OPD masih belum maksimal dan belum terintegrasikan;
- c. Terbatasnya jaringan dan kemampuan SDM dalam penguasaan internet dan intranet di setiap SKPD-Data dari jaringan konfigurasi Malang;
- d. Belum terintegrasikan data antara Kominfo dan OPD terkait statistik; dan
- e. Perolehan data statistik sektoral dari OPD belum maksimal dan terintegrasikan.

## **29. Urusan Persandian**

Permasalahan yang muncul dalam urusan Persandian diantaranya;

- a. Masih tingginya ancaman keamanan data dan informasi; dan
- b. Belum efektifnya penanganan persandian dan keamanan informasi.

## **30. Urusan Penanaman Modal**

Permasalahan yang muncul dalam urusan Penanaman Modal diantaranya:

- a. Perlu meningkatkan kemudahan mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
- b. Belum terintegrasinya sistem aplikasi untuk penanaman modal dan perizinan; dan
- c. Letak strategis Kota Malang sebagai salah satu lokasi penanaman modal potensial, masih belum menjadi daya Tarik bagi investor dalam dan luar negeri.

### **31. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah**

Permasalahan yang muncul dalam Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah diantaranya:

- a. Penyelesaian sengketa hukum;
- b. Belum optimalnya harmonisasi dan sinkronisasi Properda sesuai kebutuhan pembangunan daerah; dan
- c. Penyelesaian sengketa hukum.

## **4.2 Isu Strategis**

### **4.2.1 Isu Internasional**

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan merupakan tahun transisi dari berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs). SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Oleh karena itu SDGs memiliki cakupan yang lebih luas dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan yaitu: pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan.

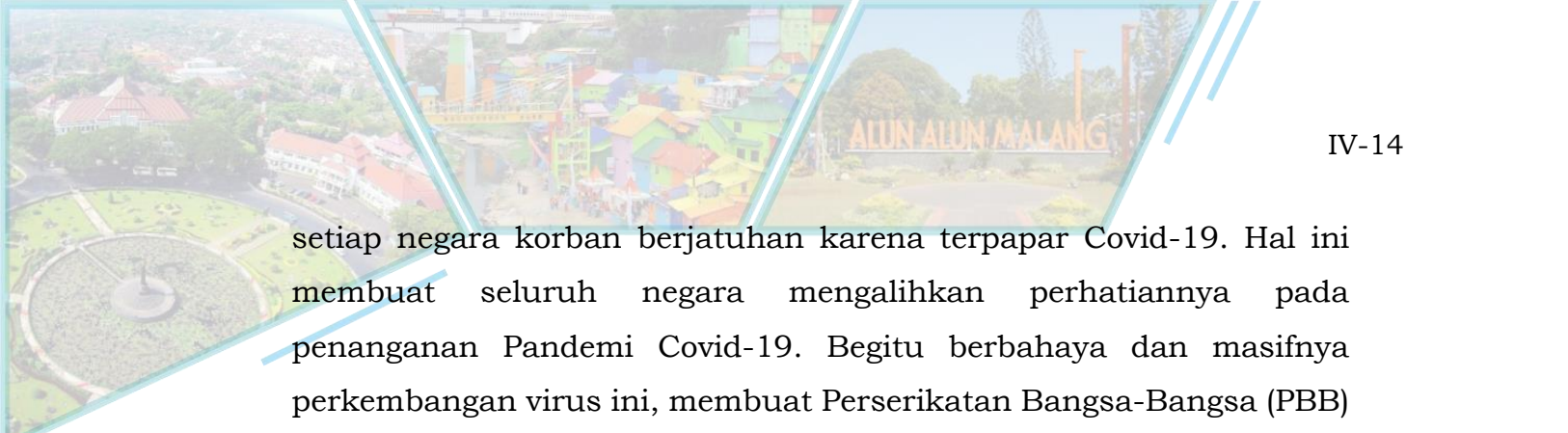
SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030 maka disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut : 1) Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*); 2) Tanpa

Kelaparan (*Zero Hunger*); 3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-being*); 4) Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*); 5) Kesetaraan Gender (*Gender Equality*); 6) Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*); 7) Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*); 8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*); 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*); 10) Mengurangi Kesenjangan (*Reduced Inequalities*); 11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*); 12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*); 13) Aksi Terhadap Iklim (*Climate Action*); 14) Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*); 15) Kehidupan di Darat (*Life on Land*); 16) Institusi Keadilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions*); 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goals*).

Berdasarkan tujuan tersebut, Kota Malang memiliki keinginan kuat untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan SDGs. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terkait tujuan pembangunan berkelanjutan dimana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah memiliki unsur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Rencana aksi (RENAKSI) SDGs Daerah merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah kemudian harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi ke dalam dua rencana besar, yaitu bagaimana fokus dan sasaran khusus SDGs di daerah; dan bagaimana SDGs diurus utamakan ke dalam seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah. Konsistensi dalam perwujudan tujuan dari SDGs adalah menerapkan seluruh prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam setiap strategi perencanaan pembangunan di Kota Malang.

Isu internasional selanjutnya yang berdampak cukup signifikan pada perencanaan pembangunan adalah munculnya virus yang menyerang pernapasan manusia dan dapat menyebabkan kematian, yakni virus Covid-19 yang berasal dari Wuhan, China. Hampir di



setiap negara korban berjatuhan karena terpapar Covid-19. Hal ini membuat seluruh negara mengalihkan perhatiannya pada penanganan Pandemi Covid-19. Begitu berbahaya dan masifnya perkembangan virus ini, membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi baru berjudul "*Global Solidarity to Fight Covid-19*" di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Resolusi pertama yang dihasilkan sejak ditetapkan pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret lalu itu, digagas oleh Indonesia bersama Ghana, Liechtenstein, Norwegia, Singapura, dan Swiss. Resolusi ini menekankan pesan politis tentang pentingnya persatuan, solidaritas, dan kerja sama internasional dalam upaya mitigasi pandemi global Covid-19.

Sebagai organisasi universal, PBB memiliki peran sentral untuk mengkoordinasi respons global. Selain itu, PBB juga harus dapat memberikan harapan kepada komunitas internasional bahwa dengan kerja sama, solidaritas, serta kebijakan yang tepat, setiap negara dapat mengatasi krisis ini. Di dalam resolusi, PBB berperan dengan meminta kerja sama negara-negara untuk menahan laju penyebaran virus, mitigasi dampak melalui pertukaran informasi, kerja sama pengetahuan para ilmuwan, serta praktik baik dari tiap negara. Resolusi juga menegaskan peran sentral WHO di garda depan koordinasi dengan semua elemen masyarakat internasional.

#### **4.2.2 Isu Nasional**

Isu-isu Nasional menjadi perhatian dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah maupun nasional. Bagaimanapun isu-isu yang dirumuskan kedepannya berusaha untuk menjawab serta mengantisipasi tantangan serta ancaman dalam jangka panjang. Dalam pembangunan di Kota Malang berikut isu-isu nasional yang menjadi perhatian dalam perumusan RPJMD Kota Malang yaitu:

##### **1. Infrastruktur**

Untuk mengatasi permasalahan infrastruktur serta dalam rangka mendukung pencapaian target infrastruktur *Middle Income Country* maka, percepatan pembangunan bidang infrastruktur menekankan enam prioritas Utama yaitu: 1) Percepatan Pembangunan Perumahan; 2) Pembangunan Infrastruktur/Prasarana

Dasar Kawasan Permukiman serta Energi dan Ketenagalistrikan; 3) Menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional; 4) Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan; 5) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan; dan 6) Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur.

Dengan prioritas tersebut Kota Malang berusaha mewujudkan sistem transportasi yang berdaya saing untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mengurangi kesenjangan melalui pemerataan aksesibilitas infrastruktur/prasarana. Pemerintah daerah kedepannya dapat berkolaborasi dengan *Private Sector* dalam usaha mewujudkan pembangunan sistem sarana infrastruktur yang terintegrasi.

## **2. Permasalahan Persiapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Target pencapaian SPM tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, yang merupakan salah satu bagian dari prioritas pertama dari 11 prioritas nasional, yaitu Reformasi Birokrasi dan tata kelola. Prioritas Reformasi Birokrasi dan tata kelola menginginkan terjadinya pematapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Hal itu kemudian didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai dan data kependudukan yang baik.

Kebijakan terkait dengan pelaksanaan SPM di daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Untuk mempercepat penerapan SPM di daerah, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

2018 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengatur penerapan standar pelayanan minimal di daerah melalui 4 tahapan, yaitu: pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

### **3. Kebijakan Nasional**

Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan  
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan  
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing  
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan  
Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

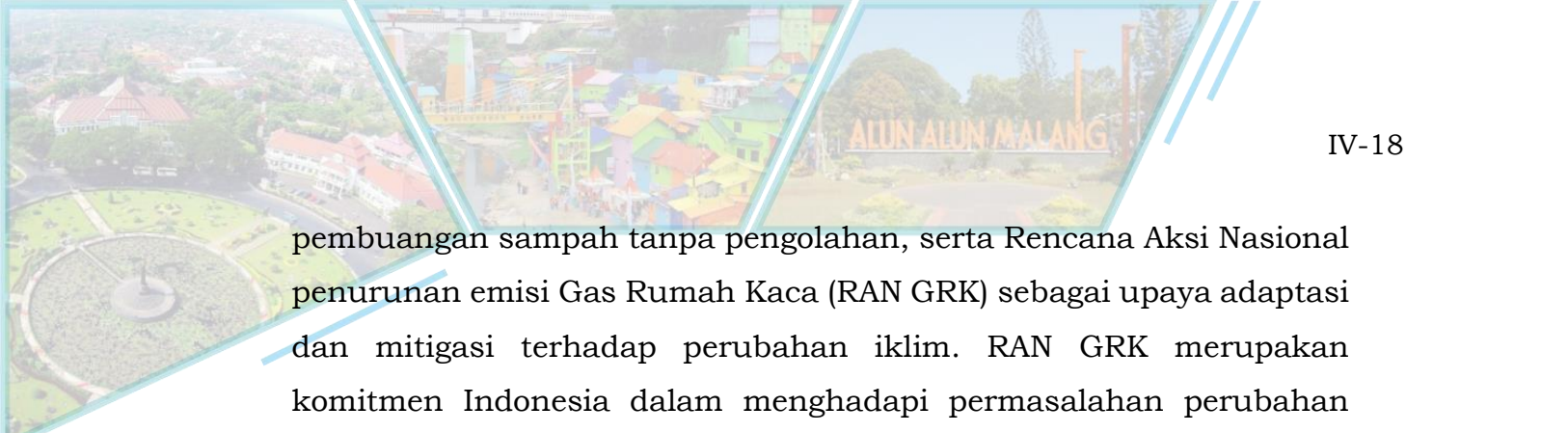
Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat.

Terciptanya stabilitas ekonomi yang kokoh juga akan melindungi masyarakat dari penurunan daya beli karena kenaikan harga. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, diperlukan berbagai upaya yang mendorong peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan yang mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju. Selain itu diperlukan pula berbagai upaya agar semua masyarakat dapat menikmati kemajuan ekonomi yang terjadi secara berkeadilan. Dengan demikian tujuan untuk memajukan perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

#### 4. Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup secara nasional meliputi perusakan/kebakaran hutan, banjir/longsor, kemarau panjang, perburuan/perdagangan hewan dilindungi; penghancuran terumbu karang, polusi air dari limbah industri, polusi udara, limbah B3,





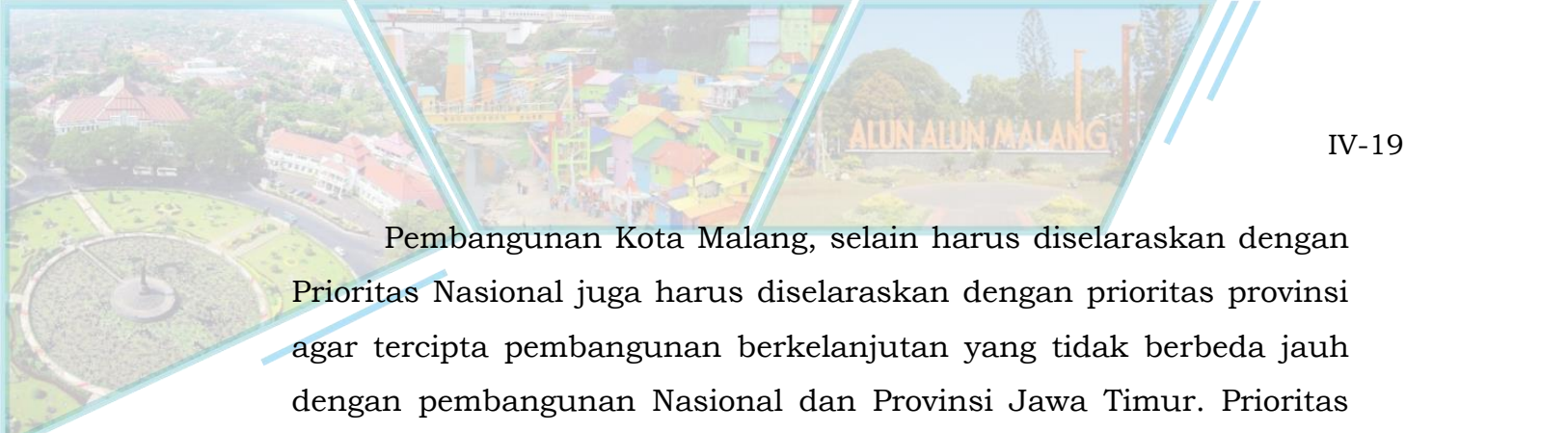
pembuangan sampah tanpa pengolahan, serta Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. RAN GRK merupakan komitmen Indonesia dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim, untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat dukungan internasional pada tahun 2020.

## **5. Revolusi Industri 4.0**

Bagi Indonesia, revolusi industri akan memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia dan menjadi salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia untuk menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia. Hingga tahun 2016, industri manufaktur berkontribusi sebesar 20 persen PDB Indonesia dan membuka lebih dari 14 juta lapangan pekerjaan. Perubahan perekonomian Indonesia dari ekonomi berbasis sumberdaya alam menjadi ekonomi berbasis jasa, membawa dampak menurunnya kontribusi manufaktur Indonesia menjadi 22 persen pada tahun 2016 berbanding terbalik pada tahun 2001 yang mencapai 26 persen dan diperkirakan akan terus menurun pada tahun 2030 jika tidak melakukan intervensi apapun.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menyusun “*Making Indonesia 4.0*” dalam menghadapi Revolusi Industri keempat. *Road Map Making Indonesia 4.0* memberikan arah dan strategi yang jelas bagi pergerakan industri Indonesia di masa yang akan datang, termasuk di sektor makanan dan minuman; sektor tekstil dan pakaian; sektor otomotif; sektor kimia; dan sektor elektronik yang menjadi fokus dan 10 prioritas nasional dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia, yaitu: 1) Perbaikan alur aliran barang dan material; 2) Desain ulang zona industri; 3) Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (*sustainability*); 4) Memberdayakan UMKM; 5) Membangun infrastruktur digital Indonesia; 6) Menarik minat investasi asing; 7) Peningkatan kualitas SDM; 8) Pembangunan ekosistem inovasi; 9) Insentif untuk investasi teknologi; dan 10) Harmoniasi aturan dan kebijakan.

### **4.2.3 Isu Regional**



Pembangunan Kota Malang, selain harus diselaraskan dengan Prioritas Nasional juga harus diselaraskan dengan prioritas provinsi agar tercipta pembangunan berkelanjutan yang tidak berbeda jauh dengan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Prioritas Provinsi Jawa Timur meliputi Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan; Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi; Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal; Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur; Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup; dan Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Pembangunan Kota Malang tidak hanya memperhatikan isu-isu internasional maupun nasional saja. Isu Regional juga menjadi perhatian dalam kajian RPJMD Kota Malang. Berikut ini isu-isu regional yang menjadi perhatian dalam perumusan isu-isu strategis Kota Malang:

### **1. Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrument penggerak perubahan menuju pembangunan berkelanjutan. Sumber Daya Manusia yang unggul harus didukung dengan pendidikan yang berkualitas. Dalam isu strategis Provinsi Jawa Timur ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.

Perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Timur dimulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidiknya, sehingga menciptakan guru yang tidak hanya mampu mengajar dari sisi akademik saja, namun juga memiliki karakter religious dan memegang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

## **2. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat**

Semakin tumbuh dan berkembangnya ekonomi suatu daerah, menunjukkan semakin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu berupaya untuk menciptakan strategi agar perekonomian Jawa Timur semakin tumbuh. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018, tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,50%, lebih tinggi 0,05% dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2017 yang hanya mencapai 5,45%. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur meningkat sebesar 5,52%. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur menurun menjadi - 2,39% (sumber: Provinsi Jawa Timur dalam angka Tahun 2021).

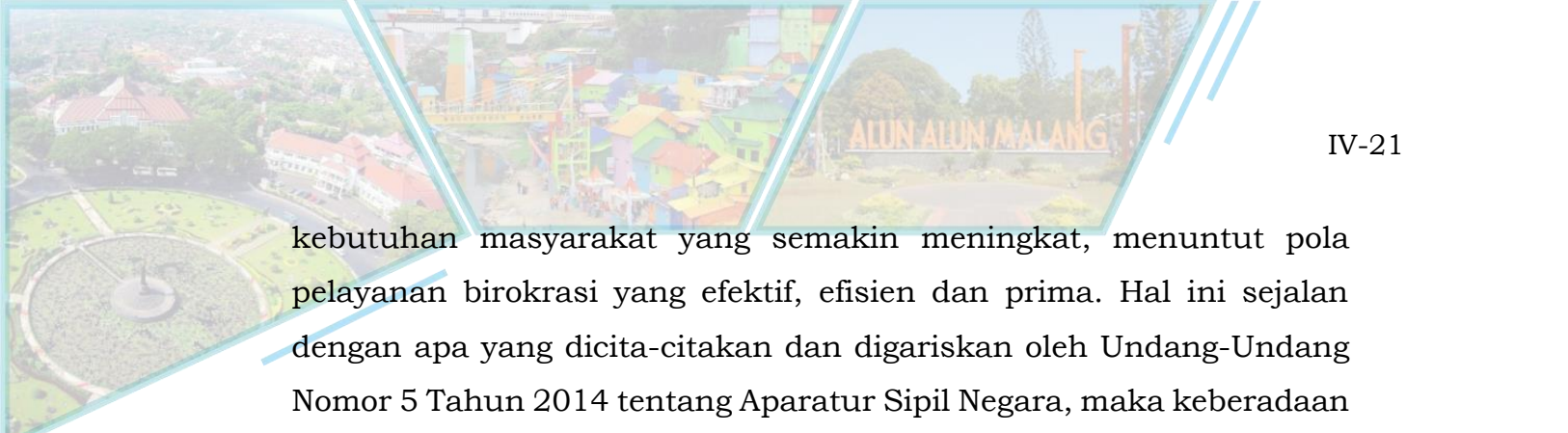
Pada tahun 2020, secara nominal besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Jawa Timur mencapai Rp. 2.299, 46 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 1.610, 42 triliun.

Terkait dengan kesejahteraan masyarakat, kemiskinan masih menjadi isu utama dalam kehidupan masyarakat Jawa Timur. Berdasarkan perkembangan persentase penduduk miskin di Jawa Timur. Pada tahun 2018, angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 10,98 persen, lalu pada tahun 2019 angka kemiskinan sebesar 10,37 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 11,09 persen.

Berbicara mengenai kemiskinan, maka tidak bisa lepas dari pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur (TPT) pada tahun 2018 sebesar 3,91 persen, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 3,82 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 5,84 persen.

## **3. Tata Kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi**

Perkembangan teknologi yang diiringi dengan perkembangan pola pikir masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat serta



kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, menuntut pola pelayanan birokrasi yang efektif, efisien dan prima. Hal ini sejalan dengan apa yang dicita-citakan dan digariskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Mengacu pada hal-hal seperti yang tersebut diatas, maka saat ini dibutuhkan keseriusan dan komitmen Bupati/Walikota dan Sekretaris Daerah guna mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi. Kepala Daerah diharapkan memberikan perhatian untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus berorientasi hasil.


#### **4. Demokrasi Kewargaan**

Demokrasi kewargaan berhubungan dengan hak demokrasi dan kewajiban Negara dalam menjalankan aktifitasnya dengan mendapatkan perlakuan adil di depan hukum dan pemerintahan. Demokrasi meliputi komponen yaitu Kebebasan Sipil, hak-hak politik dan partisipasi politik. Demokrasi kewargaan juga mengutamakan hak-hak perempuan dan anak, orang terlantar dan kelompok marjinal lainnya.

Isu strategis lainnya antara lain: berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak belum menjadi dasar/prioritas pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur; masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak; rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang; masih tingginya laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur dan masih rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan.

#### **5. Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan**

Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar dalam pengembangan sistem struktur ruang yang diperlukan untuk jaminan



ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Isu strategis terkait infrastruktur terdiri dari: 1) Peningkatan konektivitas dan penyediaan jaringan transportasi; 2) Pengembangan keterpaduan antarmoda dan pengembangan transportasi multimoda; 3) Penurunan biaya transportasi dan biaya logistik; 4) Pengelolaan jaringan irigasi dalam mendukung kedaulatan pangan; 5) Penanganan Bencana banjir dan kekeringan; 6) Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional; dan 7) Pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif infrastruktur (non APBD).

Isu strategis utama Provinsi Jawa Timur adalah mengembangkan dan mengoptimalkan potensi di Kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Bromo, Lingkar Ijen, Gerbangkertasusila, Koridor Maritim Jawa Madura, dan Koridor Maritim Selatan Jawa. Di wilayah Mataraman, potensi pariwisata dan industry berbasis agro dan maritim di pesisir selatan, belum didukung dengan ketersediaan akses pelabuhan barang dan bandara.

Isu pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dapat tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai ruang ekologi. Namun kelestarian lingkungan ini juga bergantung kepada perubahan iklim, kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan dan lain sebagainya, serta aktifitas manusia. Untuk dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pihak, agar keberlangsung pelestarian alam ini dapat terjaga dengan baik.

#### **4.2.4 Telaah Dokumen Lainnya**

##### **1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 telah menelaah Revisi RTRW Kota Malang


Tahun 2021-2041. Adapun telaah keselarasan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 dengan Revisi RTRW Kota Malang Tahun 2021-2041 program pada Perubahan RPJMD telah selaras dengan perwujudan struktur ruang, perwujudan pola ruang, dan perwujudan kawasan strategis kota pada Revisi RTRW. Perwujudan pusat-pusat kegiatan dan perwujudan sistem prasarana pada struktur ruang Kota Malang; perwujudan kawasan peruntukan lindung dan perwujudan kawasan peruntukan budidaya pada pola ruang; dan perwujudan kawasan strategis ekonomi, perwujudan kawasan strategis sosial budaya, perwujudan kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kota pada kawasan strategis kota menjadi program di Perubahan RPJMD yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD hingga tahun 2023.

## **2. Telaahan RPJMD Daerah Sekitar**

Sebagaimana pada Pasal 216 Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota lainnya. Keselarasan antara RPJMD Kota Malang dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu terdapat bidang Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan. Tahapan perumusan isu strategis RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas. Isu strategis RPJMD tersebut telah dipetakan berdasarkan pilihan Tema Pembangunan Prioritas Kota Malang, dan menjadi dasar dalam menentukan Kebijakan Prioritas dan Program Prioritas Kota Malang.

## **3. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Penyusunan KLHS untuk RPJMD sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dan lebih dijelaskan secara khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tata



Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta secara teknis penyusunan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dimana mengharuskan adanya analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2018-2023 didapati bahwa analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Malang ditentukan dengan melihat pada capaian masing-masing indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dilaksanakan di Kota Malang berjumlah 220 indikator. Dari indikator tersebut terdapat 85 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 56 indikator sudah dilaksanakan dan belum mencapai target, 71 indikator tidak mempunyai data, 10 indikator tidak sesuai dengan kewenangan daerah. Hasil identifikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ada 15 indikator yang menjadi isu strategis pembangunan berkelanjutan.

#### **4.2.5 Isu Strategis Kota Malang**

Isu strategis merupakan kondisi atau permasalahan daerah bersifat mendesak yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Isu strategis ini disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kota Malang. Secara konseptual, isu strategis memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Adapun tahapan perumusan isu strategis RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 melalui tahapan Penentuan dan Pembobotan. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. Isu strategis RPJMD tersebut telah dipetakan berdasarkan pilihan Tema Pembangunan Prioritas Kota Malang, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan Kebijakan Prioritas dan Program Prioritas RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023. Adapun pembobotan dari isu strategis prioritas kemudian disesuaikan dengan visi misi dari kepala daerah terpilih, sehingga dihasilkan isu strategis prioritas Kota Malang.

### **1. Sumber Daya Manusia**

Kota Malang memiliki jumlah penduduk kedua terbanyak diantara kota-kota di Jawa Timur, hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kota Malang mampu bersaing secara global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait belum optimalnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya. Dengan permasalahan tersebut dapat disimpulkan isu strategis prioritas yang terjadi di Kota Malang antara lain:

- a. Pemerataan pelayanan pendidikan formal;
- b. Peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dapat dijangkau masyarakat tidak mampu; dan
- c. Penanganan wabah Covid-19 di Kota Malang.

### **2. Ekonomi**

Perumbuhan ekonomi Kota Malang mengalami penurunan selama pandemi covid-19 sehingga berdampak buruk terhadap perekonomian Kota Malang ditambah belum optimalnya peningkatan produktivitas dan daya saing yang merata dan berkelanjutan. Beberapa isu strategis prioritas yang mempengaruhi perekonomian di Kota Malang antara lain:

- a. Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang unggul dan berdaya saing;



- b. Pengembangan industri kreatif potensial Kota Malang;
- c. Penataan ulang sistem (saluran) drainase yang terintegrasi dan holistik; dan
- d. Optimalisasi strategi stabilisasi harga bahan pokok;
- e. Subsidi bahan pangan bagi masyarakat pra sejahtera;
- f. Optimalisasi rekayasa lalu lintas sebagai upaya penanggulangan kemacetan;
- g. Optimalisasi konektivitas wilayah, pembangunan jalan lingkar luar kota;
- h. Optimalisasi sarana dan prasarana jalan;
- i. Pengelolaan dan penambahan taman edukasi serta Ruang Terbuka Hijau secara kreatif;
- j. Penambahan sumur resapan sebagai upaya pencegahan banjir.




### **3. Sosial dan Budaya**

Besarnya dampak pandemi covid-19 berpengaruh terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat Kota Malang. Beberapa permasalahan yang terjadi di Kota Malang adalah belum optimalnya kualitas perlindungan sosial, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas, belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak serta stabilitas lingkungan sosial belum terjaga dengan maksimal. Dari beberapa permasalahan tersebut dapat ditarik beberapa isu strategis prioritas yang terjadi di Kota Malang antara lain:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan warisan seni dan budaya Kota Malang sebagai komunitas jasa;
- b. Penanganan masalah pengangguran, khususnya bagi mereka yang terdampak PHK karena pandemi covid-19;
- c. Pengangguran masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan, khususnya bagi mereka yang terdampak Pandemi Covid-19, hal ini dibuktikan dengan tingkat pengangguran terbuka Kota Malang jauh melebihi dari TPT Nasional dan Provinsi.

### **4. Pemerintahan**

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi masih terdapat beberapa permasalahan yaitu belum maksimalnya penegakan dan tertib hukum, kurang optimalnya kualitas sistem kelembagaan yang



efektif, belum optimalnya kualitas meritokrasi manajemen ASN, belum sepenuhnya integrasi teknologi informasi. Sedangkan isu strategis yang terjadi di Kota Malang yaitu Pembaharuan manajemen sistem kepegawaian secara profesional guna mendukung gerakan antikorupsi, budaya kerja dan pelayanan publik yang prima.

# BAB-V

**VISI, MISI, TUJUAN  
DAN SASARAN**



## BAB V

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada. Sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan merupakan cerminan dari urgensi permasalahan yang akan diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Prioritas yang dirumuskan dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, akan tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN untuk menjamin konsistensi arahan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Visi dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah. Visi dan misi ini akan menjadi arahan pembangunan Kota Malang selama lima tahun yang terjabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih khusus dan terfokus. Perubahan RPJMD 2018-2023 tidak melakukan perubahan pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, akan tetapi mempertajam strategi atau arah kebijakan serta pengambilan keputusan dan menyesuaikan target kinerja untuk mencapai tujuan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2019-2020, kondisi pandemik COVID-19 dan Tujuh Agenda Pembangunan sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Perubahan juga dilakukan terhadap nomenklatur program menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana

dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## 5.1 VISI

RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode keempat RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025. Tema pembangunan RPJPD periode keempat menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kota Malang untuk tahun 2018-2023. Visi pembangunan Kota Malang Tahun 2018-2023 berdasarkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Malang adalah sebagai berikut:

### **“Kota Malang Bermartabat”**

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Bermartabat hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab manusia sebagai pemimpin kepada masyarakat yang dipimpin. Istilah “martabat” menunjuk pada tingkat harkat kemanusiaan dan sebuah nilai harga diri. Sehingga, dengan visi “Kota Malang Bermartabat” diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tantangan dan karakter yang mulia bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baladun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah “kota bermartabat”, adalah sebuah profil Kota Malang yang memiliki masyarakat yang paripurna, terdidik dan berkarakter, lembut dan tegas, aman dan nyaman, serta penuh kesadaran positif. Dalam arti yang lebih luas adalah Kota yang aman dari segala bentuk ancaman, senantiasa tertib, terlihat bersih dan asri. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kota Malang yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki berbagai keunggulan dan daya saing

tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka, prestasi di berbagai bidang. Visi “Kota Malang Bermartabat”.

## 5.2 MISI

Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Untuk mewujudkan Visi “**Kota Malang Bermartabat**” dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

### **Misi 1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang.

### **Misi 2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.

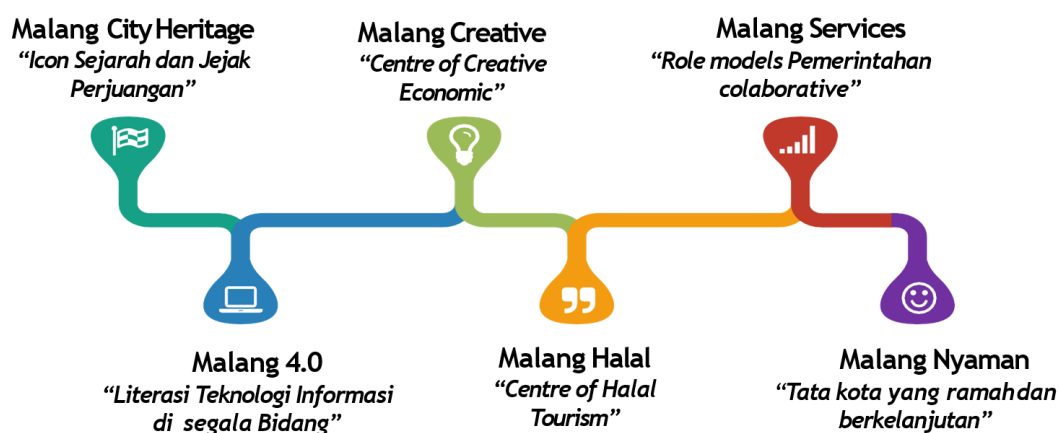
### **Misi 3. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender**

Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyeteraan gender, serta kerukunan sosial.

### **Misi 4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel**

Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas, pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Berkaitan dengan Visi dan Misi tersebut dirumuskanlah *Malang Future*. Di mana *The Future Of Malang* terdapat 6 konsep yang dibangun dari ikhtiar pemahaman terhadap karakter dan potensi kota dan selanjutnya ingin diwujudkan “wajah” Kota Malang di masa mendatang melalui pencanangan visi pembangunan kota.



**Gambar 5.1**  
**The Future of Malang**

### 1. **Malang City Heritage (Icon Sejarah dan Jejak Perjuangan)**

Konsep *Malang City Heritage* diwujudkan melalui 5 langkah:

1) Penegakan Regulasi Cagar Budaya

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya untuk meningkatkan perlindungan keberadaan cagar budaya (*tangible* dan *intangible*) serta menjadi payung hukum upaya pelestariannya.

2) Pengembangan Destinasi dan Paket Wisata *Heritage*

Kayutangan "*Malioboronya Malang*", Sentra Batik, Pecinan, Kauman, Museum, Ijen Boulevard, Alun-Alun, dll.

3) Pemberdayaan Masyarakat

Membangun rasa memiliki cagar budaya melibatkan masyarakat.

4) Penguatan Peran Perguruan Tinggi, Komunitas, Media dan Pelaku Bisnis

Mendorong lahirnya terobosan-terobosan inovatif dalam setiap aspek pelestarian sejarah dan budaya kota.

5) Penguatan Edukasi Sejarah dan Budaya di Setiap Jenjang Sekolah

Menanamkan pengetahuan kepada generasi muda akan kekayaan sejarah dan budaya kota.

## **2. Malang 4.0 (Literasi Teknologi Informasi di segala Bidang)**

Malang berkomitmen mengoptimalkan karakteristik uniknya sebagai Kota Pendidikan untuk menjawab tantangan penguasaan teknologi informasi, efisiensi bisnis, *internet of things*, dan rekayasa robotika yang menjadi karakteristik era Revolusi Industri 4.0. Melalui melekat teknologi kuat karakter dan ingat budaya mendorong tidak hanya menguasai teknologi tetapi Kota Malang juga ingin menghasilkan generasi yang kuat karakternya dan tak lupa pada budaya dan kearifan lokal, melalui:

- 1) Hapus calistung di usia emas anak-anak;
- 2) Memperkuat pendidikan karakter;
- 3) Sekolah ibu/*parenting*;
- 4) Gerakan sholat berjamaah;
- 5) Mendorong *Entrepreneurship* dan pengembangan IKM;
- 6) Reorientasi pendidikan dan peningkatan kapasitas berbasis skill dan kompetensi era Industri 4.0;
- 7) Menyuburkan ekosistem inovasi dan teknologi;
- 8) Meningkatkan kemudahan berusahan dan berinvestasi; dan
- 9) Menyiapkan infrastruktur digital.

## **3. Malang Creative (Centre of Creative Economic)**

Semenjak tahun 2015, komitmen dan fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif di Kota Malang mengalami akselerasi yang signifikan. Pembentukan kelembagaan, penyelenggaraan berbagai event, termasuk menjadi Tuan Rumah ICCC kedua, hingga penetapan *Roadmap* Ekonomi Kreatif 2018-2022 menjadi Peraturan Walikota adalah modal membangun sektor Ekonomi Kreatif sebagai salah satu katalis pertumbuhan ekonomi bersama sektor pariwisata. Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2018, Substansi kebijakan *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif 2018-2022 adalah penyediaan infrastruktur, pengembangan ekosistem dan peningkatan pemasaran. Untuk subsektor prioritas adalah game



dan aplikasi sedangkan unggulan adalah kuliner, film, video dan animasi. Berikut ini langkah yang disiapkan dalam *Malang Creative*:

- 1) Tahun 2016
  - a. Komite Ekonomi Keratif;
  - b. *Malang Creative Fusion*;
  - c. *Indonesia Creative Cities Conference 2<sup>nd</sup>*; dan
  - d. Festival Malang Mbois 1<sup>st</sup>.
- 2) Tahun 2017
  - a. Uji Petik Subsektor Prioritas dan Unggulan;
  - b. Festival Malang Mbois 2<sup>st</sup>; dan
  - c. Makot Kota Malang.
- 3) Tahun 2018
  - a. Perwal Nomor 12 Tahun 2018 (*Roadmap* Ekonomi Kreatif 2018-2022); dan
  - b. Festival Malang Mbois 3<sup>st</sup>.
- 4) Tahun Selanjutnya
  - a. Penetapan Ekraf sebagai salah satu Sasaran Strategis RPJMD;
  - b. *Co-Working Space* di 5 Kecamatan; dan
  - c. Mall UMKM.

#### **4. Malang Halal (*Centre of Halal Tourism*)**

Konsep Malang Halal diwujudkan melalui:

- 1) Pengembangan destinasi wisata halal;
- 2) Event wisata halal;
- 3) Kerjasama pencapaian standar hotel halal;
- 4) Destinasi kuliner halal;
- 5) Penguatan kapasitas SDM Pariwisata halal; dan
- 6) Promosi paket wisata halal.

#### **5. Malang Services (*Role models Pemerintahan collaborative*)**

Berdasarkan fakta bahwa saat ini Kota Malang telah menyiapkan *Roadmap Smart City 2019-2023* untuk diselaraskan dengan konsepsi *Malang Services*. Rating Akuntabilitas Kinerja Kota Malang berdasarkan evaluasi Kementerian PAN RB pada

tahun 2017 adalah BB. Pemerintah Kota telah menetapkan SK Walikota 2013/2018 tentang Tim Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kota Malang telah mengembangkan lebih dari 60 aplikasi untuk fungsi administrasi pemerintahan maupun layanan publik. Berikut langkah dalam mewujudkan Malang *Services*:

- 1) Penegakan Perda dan Tertib Hukum  
Penyelesaian sengketa hukum, harmonisasi properda dengan kebutuhan pembangunan, penguatan koordinasi untuk penanganan permasalahan lintas kewenangan, penguatan monev, pengendalian dan penertiban pelaksanaan Perda, sistem pengaduan.
- 2) Membangun Sistem Kelembagaan Efektif  
Penataan struktur kelembagaan, penyempurnaan sistem perencanaan, anggaran, dan evaluasi pembangunna, penguatan sistem layanan publik, optimalisasi sumber pendapatan daerah, penataan aset, transparansi keuangan, mendorong inovasi.
- 3) Mendorong Meritokrasi Manajemen ASN  
Mekanisme *reward and punishment* berbasis kinerja, membangun mental aparatur berintegritas dan berjiwa melayani, Pengembangan Karir ASN secara Profesional, Membangun Standar Kompetensi, Sistem *Talent Pool* untuk kebutuhan jabatan.
- 4) Perecepatan Integrasi Teknologi Informasi  
Sistem respon cepat, pemanfaatan *Big Data* dan Geo Spasial, Optimalisasi *Command Center*, Pembentukan Tim Koordinasi Daerah untuk SPBE, Penguatan SOP seluruh Aplikasi berbasis IT, Kerjasama Aplikasi berbagi Pakai, Kemitraan dengan Perguruan Tinggi.

## **6. Malang Nyaman (Tata kota yang ramah dan berkelanjutan)**

Konsep Malang Nyaman diwujudkan melalui:

- 1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang  
Penertiban, arah kebijakan pusat pertumbuhan baru, kerjasama tata ruang perbatasan daerah.



2) Pengelolaan Transportasi Modern

Jalan lingkar, rekayasa lalu lintas ATCS, penataan parkir, revitalisasi angkutan umu/pengembangan transportasi massal.

3) Revitalisasi Sistem Drainase

*Eco-Drainage*, Sistem Informasi Drainase, Pembangunan Drainase terintergrasi.

4) Pengelolaan Kawasan Permukiman DAS dan Kumuh

Peremajaan, pengembangan Rusunawa, pengurangan rumah tidak layak huni, koordinasi implementasi kewenangan DAS Sungai Strategis Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan Kapasitas Ketangguhan Kebencanaan.

5) Penyediaan Sarpras Kota yang Nyaman

Pedestrian, jalur sepeda, penerangan jalan, kualitas perkerasan jalan, sarana sosial ekonomi, dan lain-lain.

6) Pengelolaan Air Minum, Sampah dan Limbah

Modernisasi TPA, pengurangan sampah plastik, perluasan manfaat Bank Sampah Malang, pengelolaan Limbah B3, pengamanan air baku, pemenuhan target cakupan 100% air minum dan akses sanitasi layak.

7) Pemenuhan Kebutuhan RTH Publik

Taman ramah anak, taman rumah lansia dan hutan kota tersebar merata dan semakin memenuhi target 20% RTH Publik.

### 5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*)

dalam penyusunan RPJMD. Bilamana visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan, maka program Walikota dan Wakil Walikota terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan pembangunan Kota Malang tahun 2018-2023:

### **1. Terwujudnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya**

Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya merupakan tujuan dari misi pertama, yaitu Menjamin Akses Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga. Hal yang ingin dicapai yaitu kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang yang adil dan merata. Pembangunan diprioritaskan pada pembangunan sumberdaya manusia (SDM) dengan tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang berkualitas serta pendapatan perkapita yang terus meningkat. Dimensi pembangunan SDM yang juga memberikan kesempatan dan kesetaraan yang proporsional pada sektor pembangunan tanpa

membedakan jenis kelamin agar laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan.

## **2. Terwujudnya Produktifitas dan Daya Saing Daerah yang Merata dan Berkelanjutan**

Terwujudnya produktifitas dan Daya Saing Daerah yang merata dan berkelanjutan merupakan tujuan dari misi kedua, yaitu Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan. Pembangunan daya saing daerah yaitu melalui pembangunan ekonomi, iklim usaha berbasis keunggulan lokal. Prioritas pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah berlandaskan keunggulan kompetitif berbasis pada potensi ekonomi lokal, kreatif, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja yang didukung oleh keberadaan kawasan industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

## **3. Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang Berpihak Masyarakat Rentan dan Gender**

Terwujudnya Kesejahteraan Dan Kerukunan Sosial yang Berpihak Masyarakat Rentan dan Gender merupakan tujuan dari misi ketiga, yaitu Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan Terhadap Masyarakat Rentan dan Gender. Pada hakikatnya kerukunan sosial sebagai bentuk aktualisasi dari pilar iman dan taqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga tercipta peningkatan kesadaran kehidupan berbudaya dan beradat, dan keharmonisan dalam hidup yang majemuk serta ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat Kota Malang mampu menghasilkan karya-karya budaya yang luhur serta yang lebih penting lagi adalah tatanan masyarakat Kota Malang memiliki nilai-nilai dan tata hubungan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang kuat, dihormati, dan diakui secara luas oleh

masyarakat di daerah lain, baik dalam skala provinsi, nasional ataupun dunia.

#### **4. Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel**

Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel merupakan tujuan dari misi empat, yaitu Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel. Tujuan ini berfokus pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik sesuai agenda reformasi birokrasi. Berprioritas dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta memiliki pelayanan publik berkualitas. Penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain itu pemerintahan daerah yang dinamis dengan mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Hasil rumusan sasaran pembangunan Kota Malang Tahun 2018-2023 berdasarkan misi dan tujuan adalah sebagai berikut:

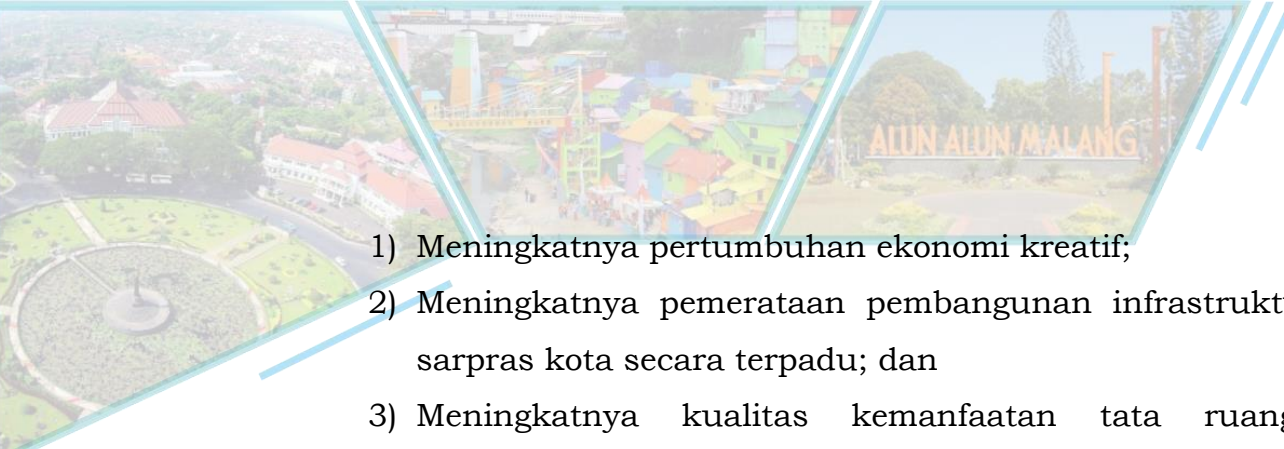
##### **1. Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya**

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter;
- 2) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan; dan
- 3) Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan.

##### **2. Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan**

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 
- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif;
  - 2) Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu; dan
  - 3) Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup.

### **3. Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender**

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas perlindungan sosial; dan
- 2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan.

### **4. Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel**

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum;
- 2) Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif;
- 3) Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN; dan
- 4) Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi.

**Tabel 5.1**  
**Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Malang Tahun 2018-2023**  
**VISI: Kota Malang Bermartabat**

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Perubahan	Target	Perubahan	Target	Perubahan		
1.	Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,000	81,430	81,320	81,860	81,450	83,000	81,705	83,800	82,000	84,900	82,248	82,248	
			Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,770	0,780	0,770	0,790	0,768	0,820	0,770	0,840	0,771	0,870	0,772	0,772	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,814	0,814	0,816	0,816	0,819	0,818	0,818	0,828	0,821	0,825	0,823	0,823	Dinas Kesehatan





No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Perubahan	Target	Perubahan	Target	Perubahan		
			Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,846	0,847	0,847	0,848	0,856	0,850	0,850	0,851	0,851	0,852	0,852	0,852	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.	Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan	Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	5,72%	5,75%	5,73%	5,80%	- 2,26%	5,85%	5,00%	5,90%	5,40%	5,95%	5,80%	5,80%	
				Gini Rasio	0,410	0,380	0,392	0,370	0,395	0,370	0,392	0,370	0,391	0,360	0,390	0,390	

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Perubahan	Target	Perubahan	Target	Perubahan		
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	N/A	6,00 %	8,10%	6,10 %	- 13,50 %	6,20 %	6,20%	6,30 %	6,30%	6,45 %	6,45%	6,45%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)	3,75	3,90	4,14	4,05	4,06	4,20	4,20	4,35	4,35	4,50	4,50	4,50	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Perubahan	Target	Perubahan	Target	Perubahan		
			Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	82,15	82,92	65,27	83,69	75,54	84,46	67,57	85,23	67,60	86,00	67,63	67,63	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender	Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Angka Kemiskinan	4,10%	3,91%	4,07%	3,76%	4,44%	3,59%	3,98%	3,43%	3,87%	3,27%	3,77%	3,77%		
			Indeks Modal Sosial	79,20	81,36	80,880	83,52	81,20	85,68	85,68	87,84	87,84	90,00	90,00	90,00		
			Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	-	-	5,88%	-	9,61%	-	8,20%	-	7,50%	-	6,24%	6,24%	6,24%	Disnaker, PMPTSP
			Persentase penurunan PMKS	-2,23%	5,00%	3,31%	5,00%	5,02%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	Dinas Sosial, P3AP2KB

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Perubahan	Target	Perubahan	Target	Perubahan		
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,820	0,836	0,850	0,852	0,830	0,868	0,868	0,884	0,884	0,900	0,900	0,900	Kecamatan
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,71	96,80	94,71	96,90	94,58	97,00	97,00	97,10	97,10	97,20	97,20	97,20	Dinas Sosial, P3AP2KB
4.	Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	68,05	72,00	69,67	74,00	69,72	76,00	71,66	78,00	72,58	80,00	73,51	73,51	
			Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase perda yang ditegakkan	21%	25%	26,37%	40%	54%	60%	60%	82%	82%	100%	100%	100%	Satpol PP
			Meningkatnya Kualitas Sistem	Nilai SAKIP	70,96	75,65	75,00	80,5	80,05	82,05	82,05	83,50	83,50	84,90	84,90	84,90	Sekretariat Daerah
				Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD

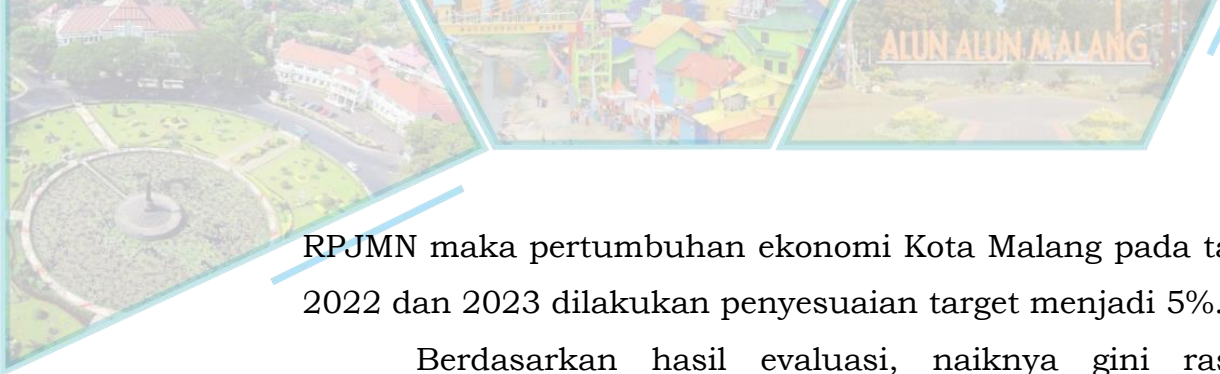
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2018	2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Perubahan	Target	Perubahan	Target	Perubahan		
			Kelembagaan yang Efektif	Maturitas SPIP	3,045	3,500	3,045	4,000	3,045	4,100	3,100	4,200	3,150	4,300	3,200	3,200	Inspektorat Daerah
				Rasio PAD	0,22	0,24	0,30	0,26	0,25	0,28	0,28	0,30	0,30	0,33	0,33	0,33	Bapenda
			Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	64,00	71,46	66,61	72,92	67,06	74,38	74,38	75,84	75,84	77,10	77,10	77,10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	N/A	3,80	2,85	4,09	3,70	4,21	4,21	4,45	4,45	4,54	4,54	4,54	Dinas Komunikasi dan Informatika



Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 tidak merubah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta indikator kinerjanya. Perubahan hanya terbatas pada perubahan target beberapa indikator tujuan dan sasaran antara lain pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, Gini Rasio, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, Angka Kemiskinan, Indeks Reformasi Birokrasi dan Maturitas SPIP. Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur melalui Bappeda Provinsi Jawa Timur dan ditambahkan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Malang mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga 2020, namun selalu di bawah target yang ditetapkan, pada tahun 2019 dari target 81,43 realisasinya sebesar 81,32, dengan capaian 99,73%. Pada tahun 2020 dari target 81,86 realisasinya sebesar 81,45 dengan capaian sebesar 99,50%. Sehingga dilakukan penyesuaian target pada tahun 2021 menjadi 81,705, pada tahun 2022 menjadi 82,00 dan pada tahun 2023 menjadi 82,248. Pada indikator Indeks Pendidikan, pada tahun 2019 dari target 0,780 realisasinya sebesar 0,767, dengan capaian 98,33%. Pada tahun 2020 dari target 0,79 realisasinya sebesar 0,768 dengan capaian sebesar 97,21%. Capaian realisasinya terus menurun sehingga dilakukan penyesuaian target pada tahun 2021 menjadi 0,77, pada tahun 2022 menjadi 0,771 dan pada tahun 2023 menjadi 0,772. Pada indikator Indeks Kesehatan, berdasarkan hasil evaluasi serta menyesuaikan kondisi pandemi covid-19, sehingga dilakukan penyesuaian target pada tahun 2022 menjadi 0,821 dan pada tahun 2023 menjadi 0,823.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Malang pada tahun 2019 dari target sebesar 5,75% realisasinya sebesar 5,73% dengan capaian sebesar 99,65% dan pada tahun 2020 dari target 5,80% realisasinya sebesar -2,26% atau turun sangat jauh, hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan adanya pembatasan aktifitas masyarakat. Pendapatan masyarakat menurun karena adanya pembatasan tersebut, yang berdampak pada berkurangnya transaksi dagang, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dikarenakan begitu besarnya pengaruh pandemi terhadap realisasi pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Malang, serta menyesuaikan target pada

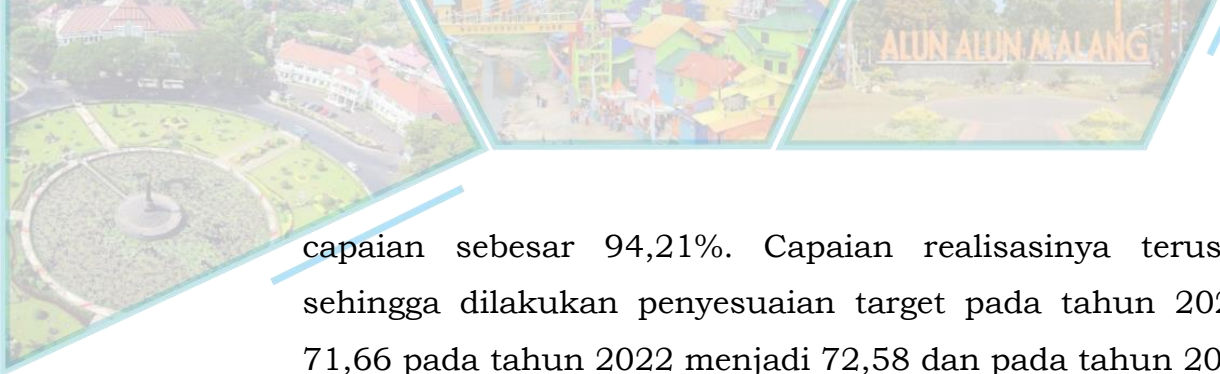


RPJMN maka pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2021, 2022 dan 2023 dilakukan penyesuaian target menjadi 5%.

Berdasarkan hasil evaluasi, naiknya gini rasio, angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 sangat dipengaruhi adanya pandemi covid-19, pembatasan aktifitas masyarakat berujung pada pemutusan hubungan kerja dan berhentinya aktifitas ekonomi masyarakat, yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan dan jarak antara warga perpenghasilan tinggi dengan warga miskin. Oleh karena itu dilakukan penyesuaian target dari ketiga indikator tersebut. Gini Rasio di Kota Malang pada tahun 2019 dari target sebesar 0,38 realisasinya sebesar 0,342, capaiannya melampaui target dan pada tahun 2020 dari target 0,37 realisasinya sebesar 0,395, capaiannya tidak mencapai target. Sehingga dilakukan penyesuaian target pada tahun 2021 menjadi 0,392, pada tahun 2022 menjadi 0,391, dan pada tahun 2023 menjadi 0,390. Angka Kemiskinan di Kota Malang pada tahun 2019 dari target sebesar 3,91% realisasinya sebesar 4,07%, capaiannya tidak mencapai target dan pada tahun 2020 dari target 3,76% realisasinya sebesar 4,44%, capaiannya tidak mencapai target. Sehingga dilakukan penyesuaian target pada tahun 2021 menjadi 3,98%, pada tahun 2022 menjadi 3,87%, dan pada tahun 2023 menjadi 3,77%. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikator baru yang ditambahkan sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur, dimana pada tahun 2019 realisasinya sebesar 5,88%, dan realisasinya naik drastis sebesar 9,61 %. Sehingga dilakukan peetapan target pada tahun 2021 menjadi 8,20%, pada tahun 2022 menjadi 7,50%, dan pada tahun 2023 menjadi 6,24%.

Untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD), mulai tahun 2021 terdapat perubahan terhadap pola atau metode perhitungannya, sehingga untuk menyesuaikan dengan metode perhitungan yang baru maka dilakukan penyesuaian target kinerja pada tahun 2021 menjadi 67,57, pada tahun 2022 menjadi 67,60, dan pada tahun 2023 menjadi 67,63.

Pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi, pada tahun 2019 dari target 72,00 realisasinya sebesar 69,67, dengan capaian 96,76%. Pada tahun 2020 dari target 74,00 realisasinya sebesar 69,72 dengan



capaian sebesar 94,21%. Capaian realisasinya terus menurun sehingga dilakukan penyesuaian target pada tahun 2021 menjadi 71,66 pada tahun 2022 menjadi 72,58 dan pada tahun 2023 menjadi 73,51. Dan Maturitas SPIP, pada tahun 2019 dari target 3,5 realisasinya sebesar 3,045, dengan capaian 87%. Pada tahun 2020 dari target 4,00 realisasinya sebesar 3,045 dengan capaian sebesar 76,12%. Capaian realisasinya terus menurun sehingga dilakukan penyesuaian target pada tahun 2021 menjadi 3,1 pada tahun 2022 menjadi 3,15 dan pada tahun 2023 menjadi 3,2.



# BAB-VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN  
**DAN PROGRAM**  
PEMBANGUNAN DAERAH



## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Strategi dan arah kebijakan merupakan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Pendekatan dengan komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Capaian pembangunan yang sudah dilakukan oleh Kota Malang harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui adaptasi terhadap perkembangan internal maupun eksternal Kota Malang. Disamping itu, lingkungan internal juga menjadi hal penting karena didalamnya berisi sumber daya yang dimiliki sehingga sasaran, tujuan, misi, dan visi yang dirumuskan harus berdasarkan kondisi riil.

#### **6.1 Strategi**

Perumusan Perubahan RPJMD 2018-2023 Kota Malang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi capaian RPJMD periode sebelumnya termasuk tahapan-tahapan yang dirumuskan di dalamnya dan analisis faktor internal maupun faktor eksternal berdasarkan hasil telaah visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Analisis faktor-faktor internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sedangkan analisis faktor-faktor eksternal diperlukan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi Kota Malang dalam mencapai tujuan pembangunan.

Perumusan strategi hasil analisis menggunakan metode SWOT disesuaikan dengan isu strategis dan rumusan visi, misi, tujuan sasaran Kota Malang pada tabel berikut.

**Tabel 6.1**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi**  
**Kota Malang**

<b>VISI : KOTA MALANG BERMARTABAT</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
<b>MISI 1 : Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga</b>		
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang merata didukung dengan sarana dan prasarana sesuai standar serta mengoptimalkan sarana digital untuk akses pelayanan pendidikan
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Peningkatan layanan kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, dan partisipasi masyarakat untuk sadar akan pentingnya menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan sekitar di masa pandemi Covid-19
	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Peningkatan daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non pangan melalui stabilisasi harga, subsidi, dan pengembangan produk lokal
<b>MISI 2 : Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan</b>		
Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Optimalisasi perekonomian melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, bernilai tambah tinggi, pengembangan pengelolaan pasar, pariwisata dan UMKM yang <i>go digital</i>

	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras Kota secara terpadu	Peningkatan dan pembenahan infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan dengan menjamin kualitas dan penambahan kuantitas transportasi, drainase, dan utilitas
	Meningkatkan kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Pengelolaan persampahan dan pengembangan pola tata ruang serta peningkatan kualitas lingkungan hidup
<b>MISI 3 : Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender</b>		
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Optimalisasi pendampingan, pembinaan serta pemberdayaan PMKS dan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Menciptakan kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk perempuan dan anak serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan stabilitas lingkungan
<b>MISI 4 : Pemerintahan yang Tertib Hukum, Profesional dan Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Akuntabel</b>		
Terwujudnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Meningkatkan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Peningkatan layanan publik melalui penataan kelembagaan dalam mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien dan proporsional
	Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Meningkatkan sistem penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya

Meningkatnya integrasi teknologi informasi

Pengembangan Big Data Informasi yang terintegrasi

## 6.2 Arah Kebijakan

**Tabel 6.2**  
**Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan**

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Tercapainya masyarakat terdidik dan berkarakter	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang merata didukung dengan sarana dan prasarana sesuai standar serta mengoptimalkan sarana digital untuk akses pelayanan pendidikan
		Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Peningkatan layanan kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, dan partisipasi masyarakat untuk sadar akan pentingnya menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan sekitar di masa pandemi Covid-19
		Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Peningkatan daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non pangan melalui stabilisasi harga, subsidi, dan pengembangan produk lokal
2.	Terwujudnya Produktifitas dan Daya Saing Daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Optimalisasi perekonomian melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, bernilai tambah tinggi, pengembangan pengelolaan pasar, pariwisata dan UMKM yang <i>go digital</i>
		Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan	Peningkatan dan pembenahan infrastruktur, sarana dan prasarana

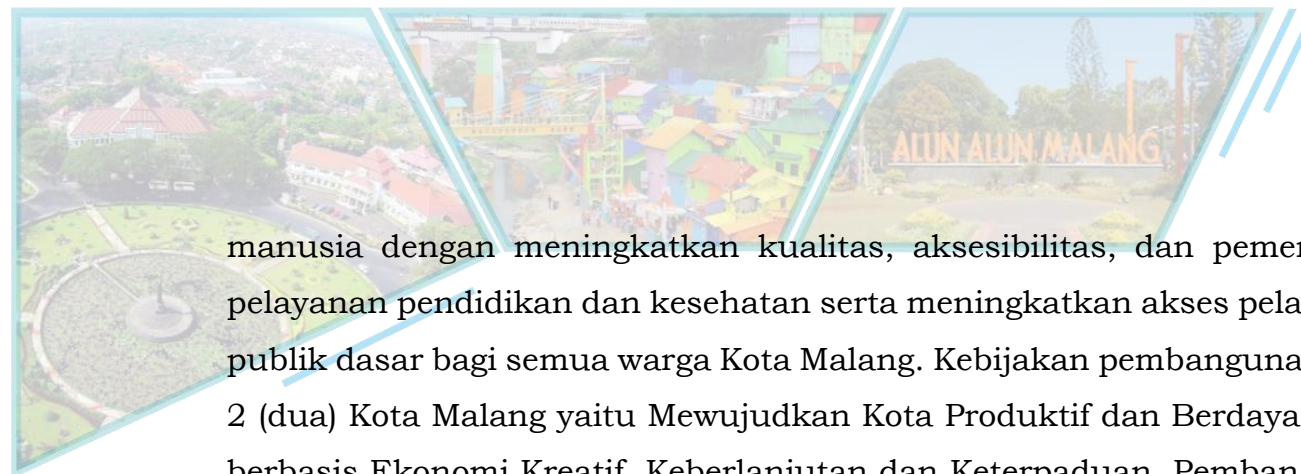
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Sarpras Kota secara Terpadu	perkotaan dengan menjamin kualitas dan penambahan kuantitas transportasi, drainase, dan utilitas
		Meningkatnya Kualitas kemanfaatan tata ruang dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan persampahan dan pengembangan pola tata ruang serta peningkatan kualitas lingkungan hidup
3.	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	Optimalisasi pendampingan, pembinaan serta pemberdayaan PMKS dan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan stabilitas lingkungan	Menciptakan kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk perempuan dan anak serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan stabilitas lingkungan
4.	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Penegakan dan Tertib Hukum	Meningkatkan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
		Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	Peningkatan layanan publik melalui penataan kelembagaan dalam mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien dan proporsional
		Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Meningkatkan sistem penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya
		Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Pengembangan <i>Big Data</i> Informasi yang terintegrasi

**Tabel 6.3**  
**Fokus Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang**

<b>VISI : KOTA MALANG BERMARTABAT</b>				
<b>Arah Kebijakan</b>				
<b>Fokus Tahun-1</b>	<b>Fokus Tahun-2</b>	<b>Fokus Tahun-3</b>	<b>Fokus Tahun-4</b>	<b>Fokus Tahun-5</b>
Suprastruktur Kelembagaan. Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya. Menjaga Daya Beli dan Perlindungan Sosial. Infrastruktur Perekonomian dan Sarana Prasarana Sosial.	Suprastruktur Kelembagaan. Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya. Menjaga Daya Beli dan Perlindungan Sosial. Infrastruktur Perekonomian dan Sarana Prasarana Sosial.	Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya. Menjaga Daya Beli dan Perlindungan Sosial. Infrastruktur Perekonomian dan Sarana Prasarana Sosial. Pemantapan Industri Kreatif Masyarakat. Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi	Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya. Menjaga Daya Beli dan Perlindungan Sosial. Infrastruktur Perekonomian dan Sarana Prasarana Sosial. Pemantapan Industri Kreatif Masyarakat. Kemandirian Sosial Ekonomi. Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi	Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya. Menjaga Daya Beli dan Perlindungan Sosial. Pemantapan Industri Kreatif Masyarakat. Kemandirian Sosial Ekonomi. Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi

Arah kebijakan pembangunan Kota Malang dalam kurun waktu 5 Tahun kedepan terbagi dalam 5 periode dengan uraian sebagai berikut:

**Tahun-1**, kebijakan pembangunan Kota Malang mengarah kepada suprastruktur kelembagaan, akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, menjaga daya beli dan perlindungan sosial serta infrastruktur perekonomian sarana dan prasarana sosial. Arah kebijakan ini selaras dengan misi ke-1 (satu), misi ke-2 (dua), misi ke-3 (tiga), dan misi ke-4 (empat) Kota Malang. Pembangunan diprioritaskan yang pertama pada misi ke-1 (satu) yaitu Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya



manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang. Kebijakan pembangunan misi 2 (dua) Kota Malang yaitu Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan. Kebijakan pembangunan terkait dengan misi 3 (tiga) Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender. Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyetaraan gender, serta kerukunan sosial. Arah kebijakan misi ke-4 (empat) Kota Malang yaitu Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel. Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas, pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

**Tahun-2**, arah kebijakan pembangunan Kota Malang pada tahun ke-2 (dua) masih sama dengan tahun ke-1 (satu) yaitu mengarah kepada suprastruktur kelembagaan, akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, menjaga daya beli dan perlindungan sosial serta infrastruktur perekonomian sarana dan prasarana sosial. Arah kebijakan ini selaras dengan misi ke-1 (satu), misi ke-2 (dua), misi ke-3 (tiga), dan misi ke-4 (empat) Kota Malang.

**Tahun-3**, kebijakan pembangunan Kota Malang mengarah kepada akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya. menjaga daya beli dan perlindungan sosial, infrastruktur perekonomian dan sarana prasarana sosial, pemantapan industri kreatif masyarakat, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dalam tahun ini arah pembangunan Kota Malang terkait pada 3 (tiga) misi Kota Malang, yang pertama pada misi ke-1 (satu) yaitu Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga, Mewujudkan Kota Produktif dan






Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan, Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender.

**Tahun-4**, kebijakan pembangunan Kota Malang pada tahun ke-4 (empat) masih sama dengan tahun ke-3 (tiga) yaitu mengarah kepada Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya. Menjaga Daya Beli dan Perlindungan Sosial, Infrastruktur Perekonomian dan Sarana Prasarana Sosial, Pemantapan Industri Kreatif Masyarakat, Kemandirian Sosial Ekonomi, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

**Tahun-5**, kebijakan pembangunan Kota Malang mengarah kepada Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya, Menjaga Daya Beli dan Perlindungan Sosial, Pemantapan Industri Kreatif Masyarakat, Kemandirian Sosial Ekonomi, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Di tahun ini arah pembangunan selaras dengan 3 (tiga) misi. Pertama, Misi 1 (satu) yaitu Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang. Kedua, misi 2 (dua) Kota Malang yaitu Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan, pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan. Dan ketiga dengan misi 3 (tiga) Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender, penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyeteraan gender, serta kerukunan sosial.

Kota Malang saat ini memasuki tahun ketiga dengan fokus kebijakan pembangunan Kota Malang mengarah kepada akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya. menjaga daya beli dan



perlindungan sosial, infrastruktur perekonomian dan sarana prasarana sosial, pemantapan industri kreatif masyarakat, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dalam tahun ini arah pembangunan Kota Malang terkait pada 3 (tiga) misi Kota Malang, yang pertama pada misi ke-1 (satu) yaitu Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang terutama untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 sehingga diharapkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh akibat pandemi. Kedua terkait dengan misi 2 (dua) Kota Malang yaitu Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan perekonomian masyarakat terutama yang terdampak pandemi covid-19 dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan. Ketiga, terkait dengan misi 3 (tiga) Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender. Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyeteraan gender, serta kerukunan sosial. Kebijakan Pemerintah Kota Malang mengenai pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 dilaksanakan mulai tahun ketiga dengan fokus pada program-program pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan penanganan pandemi covid-19

### 6.3 Program Pembangunan Daerah

**Tabel 6.4**  
**Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang**

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Jawa Timur	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
<b>PN. 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan</b>	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			Program Pemasaran Pariwisata
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			Program Pengembangan UMKM
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Program Penempatan Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
<b>PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia</b>	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,	Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik,	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pengembangan Ekspor
			Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pengembangan Kurikulum

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Jawa Timur	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
<b>Berkualitas dan Berdaya Saing</b>	produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan	berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
			Program Pengendalian Penduduk
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
			Program Rehabilitasi Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Program Pemberdayaan Sosial
			Program Penanganan Bencana
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
			Program Perlindungan Perempuan
			Program Perlindungan Khusus Anak
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan			
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			
Program Pembinaan Perpustakaan			

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Jawa Timur	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
<b>PN. 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan</b>	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
<b>PN. 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan</b>	Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
<b>PN. 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Mendorong revolusi mental dan pembangunan budaya masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
			Program Pengembangan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Program Pembinaan Sejarah
			Program Pengelolaan Permuseuman
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			<b>PN.5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan</b>
Program Penyelenggaraan Jalan			
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)			

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Jawa Timur	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
<b>Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>	Peningkatan Layanan Infrastruktur	nasional dan penyelesaian masalah prioritas kota	Program Pengembangan Permukiman
			Program Pengembangan Perumahan
			Program Kawasan Permukiman
			Program Penataan Bangunan Gedung
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Tanah Kosong
Program Informasi Dan Komunikasi Publik			
Program Aplikasi Informatika			
<b>PN. 6 Membangun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</b>	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
			Program Penanggulangan Bencana
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Jawa Timur	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
<b>PN. 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</b>	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
			Program Pelayanan Penanaman Modal
			Program Pendaftaran Penduduk
			Program Pencatatan Sipil
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Program Administrasi Umum
			Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Program Kepegawaian Daerah
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			Program Pengelolaan Arsip
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
			Program Perizinan Penggunaan Arsip
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah			
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat			

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Jawa Timur	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah
			Program Perekonomian Dan Pembangunan
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik



Tabel 6.5

## Keterkaitan Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Intervensi (Prioritas) Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018-2023	Program Prioritas Perangkat Daerah (P1) (Penyesuaian dengan Nomenklatur PMDN 90/2019)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Peningkatan kualitas pendidikan berbasis digital	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Karakter sejak Usia Dini;</li> <li>2. GRAB → Gratis Belajar 12 tahun bagi siswa tidak mampu;</li> <li>3. Beasiswa Perguruan Tinggi untuk Pelajar (Warga Malang) yang berprestasi;</li> <li>4. Kualitas tenaga pendidik unggul dengan Uji Kompetensi Guru &gt;75;</li> <li>5. Kualitas dan Kesejahteraan Guru (Tunjangan Guru, Kepsek, dan tenaga pendidik berbasis kinerja);</li> <li>6. Rotasi Guru dan Kepsek dalam rangka pemerataan kualitas Pendidikan; dan</li> <li>7. Upgrade Sarana dan Infrastruktur Pendidikan berbasis digital.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Pendidikan;</li> <li>2. Program Pengembangan Kurikulum; dan</li> <li>3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.</li> </ol>
			Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) - 100% Warga Kota Malang mendapat BPJS, warga tidak mampu ditanggung Pemkot;</li> <li>2. Upgrade Kualitas Layanan Puskesmas;</li> <li>3. Unit Layanan Kesehatan 24 Jam, lengkap dengan dokter jaga dan perawat di setiap kelurahan;</li> <li>4. JAMPERSAL 1 Juta Rupiah;</li> <li>5. Ambulan Gratis tiap Kelurahan, penambahan 100 armada dengan waktu tunggu 15 menit dengan membangun jejaring;</li> <li>6. Preventif dan Promotif Kesehatan masyarakat dan kualitas hidup pasien terminal melalui peran aktif dokter keluarga.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;</li> <li>2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;</li> <li>3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;</li> <li>4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;</li> <li>5. Program Pengendalian Penduduk;</li> <li>6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan</li> </ol>

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Intervensi (Prioritas) Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018-2023	Program Prioritas Perangkat Daerah (P1) (Penyesuaian dengan Nomenklatur PMDN 90/2019)
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Peningkatan daya beli masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui operasi pasar;</li> <li>2. Menjamin ketersediaan dan diversifikasi pangan;</li> <li>3. Kemudahan akses perumahan bagi warga kelas menengah;</li> <li>4. Subsidi bahan pangan bagi warga miskin desil 1 dengan daging 1,5 kg/bulan/anak; dan</li> <li>5. Keberpihakan belanja ASN kepada pasar tradisional;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).</li> <li>1. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;</li> <li>2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;</li> <li>3. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;</li> <li>4. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;</li> <li>5. Program Pengembangan Ekspor;</li> <li>6. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;</li> <li>7. Program Pengawasan Keamanan Pangan.</li> </ol>
2.	Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan	Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kreatif	Malang Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sentra UMKM dan Ekonomi Kreatif, Malang Creative Center, Malang Art Center, dan Malang Planning Gallery sebagai pemanfaatan ex-Ramayana dan ex-PDAM;</li> <li>2. Revitalisasi pasar tradisional dan pasar modern berbasis pasar rakyat;</li> <li>3. Memperbaiki sistem kelembagaan BUMD (finansial, pengawasan) yang diantaranya pembentukan BUMD Kota Malang</li> <li>4. Menciptakan ekosistem kolaborasi dan kewirausahaan baru serta Penyediaan <i>co-working space</i> di 5 kecamatan;</li> <li>5. Wisata Kreatif dan Wisata Halal: Wisata Heritage; Kampung Arema; Studio Trans; Islamic Center &amp; Museum al'Quran; Mall UMKM.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;</li> <li>2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;</li> <li>3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;</li> <li>4. Program Pemasaran Pariwisata;</li> <li>5. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;</li> <li>6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;</li> </ol>

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Intervensi (Prioritas) Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018-2023	Program Prioritas Perangkat Daerah (P1) (Penyesuaian dengan Nomenklatur PMDN 90/2019)
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Membangun event-event kebudayaan yang mendidik sebagai salah satu destinasi wisata;</li> <li>7. Menyusun kalender event-event pemberdayaan komunitas sebagai destinasi edukasi dan wisata; dan</li> <li>8. Pengembangan Kawasan pemberdayaan tematik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>8. Program Pengembangan UMKM;</li> <li>9. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan</li> <li>10. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.</li> </ul>
			Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan lingkaran luar Kota Malang;</li> <li>2. Pengembangan sekitar Pintu Tol;</li> <li>3. Kerjasama Malang Raya pengelolaan Sungai, dan Air Minum;</li> <li>4. Percepatan rekayasa lalu lintas penanggulangan macet (Zero Macet);</li> <li>5. Revitalisasi sistem drainase untuk mengurangi banjir (Zero Banjir); diantaranya menuntaskan proyek drainase sistem jacking;</li> <li>6. Sarana dan prasarana Kota yang ramah dan nyaman melalui penyediaan trotoar, taman dan Jembatan; diantaranya melanjutkan pembangunan Jembatan Kedungkandang</li> <li>7. Pengelolaan Kawasan pemukiman Daerah Aliran Sungai (Bedah Kampung-rumah, jalan, gang, saluran air, dll); dan</li> <li>8. Integrasi sistem Angkutan Dalam Kota Malang;</li> <li>9. Pengembangan moda transportasi umum yang modern dan berdaya saing.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;</li> <li>2. Program Penyelenggaraan Jalan;</li> <li>3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);</li> <li>4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu);</li> <li>5. Program Pengembangan Permukiman;</li> <li>6. Program Pengembangan Perumahan;</li> <li>7. Program Kawasan Permukiman;</li> <li>8. Program Penataan Bangunan Gedung;</li> <li>9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;</li> <li>10. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;</li> <li>11. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;</li> <li>12. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;</li> </ul>

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Intervensi (Prioritas) Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018-2023	Program Prioritas Perangkat Daerah (P1) (Penyesuaian dengan Nomenklatur PMDN 90/2019)
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya kualitas pemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru;</li> <li>2. Membentuk fungsi polisi tata ruang;</li> <li>3. Pengembangan pola ruang perbatasan antar wilayah;</li> <li>4. Penyederhanaan dan Perbaikan mekanisme perijinan;</li> <li>5. Pengelolaan dan Pemanfaatan sampah terpadu (<i>zero waste</i>);</li> <li>6. Integrasi PAM dan PAL atas kebutuhan air dan pengelolaan limbah;</li> <li>7. Pengeloaan IPAL di bangunan pemerintah, swasta dan rumah tangga berbasis komunal; dan</li> <li>8. Pengelolaan polusi karbon kendaraan bermotor (<i>zero carbon</i>).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>13. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ); dan</li> <li>14. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;</li> <li>2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;</li> <li>3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);</li> <li>4. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;</li> <li>5. Program Pengelolaan Persampahan;</li> <li>6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); dan</li> <li>7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).</li> </ol>


No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Intervensi (Prioritas) Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018-2023	Program Prioritas Perangkat Daerah (P1) (Penyesuaian dengan Nomenklatur PMDN 90/2019)
1	2	3	4	5	6	7
3.	Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender	Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	Peningkatan kualitas perlindungan sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun Sarana Prasarana Sosial yang ramah terhadap penyandang difabel;</li> <li>2. Pembangunan panti jompo terpadu berkonsep villa lansia diwilayah malang timur;</li> <li>3. Membangun sistem distribusi bantuan social darurat;</li> <li>4. Membangun sistem informasi penghubung warga yang ingin membantu anak kurang mampu dan berkebutuhan khusus;</li> <li>5. Membina dan Memberdayakan PMKS untuk lebih produktif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penempatan Tenaga Kerja;</li> <li>2. Program Hubungan Industrial;</li> <li>3. Program Rehabilitasi Sosial;</li> <li>4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;</li> <li>5. Program Pemberdayaan Sosial;</li> <li>6. Program Penanganan Bencana.</li> </ol>
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Peningkatan perlindungan perempuan, anak dan stabilitas lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sistem pengamanan lingkungan dengan e-siskamling; dan</li> <li>2. Penguatan forum dan peran tokoh-tokoh agama dan masyarakat;</li> <li>3. Penertiban peredaran minuman berakohol dan tempat hiburan;</li> <li>4. RTH ramah perempuan dan anak;</li> <li>5. Membangun sistem informasi pelaporan, pelacakan dan penindakan kasus kekerasan perempuan dan akan; dan</li> <li>6. Penyiapan keluarga muda baru dengan konsep sekolah ibu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;</li> <li>2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;</li> <li>3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;</li> <li>4. Program Perlindungan Perempuan;</li> <li>5. Program Perlindungan Khusus Anak;</li> <li>6. Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum;</li> <li>7. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;</li> <li>8. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan</li> </ol>

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Intervensi (Prioritas) Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018-2023	Program Prioritas Perangkat Daerah (P1) (Penyesuaian dengan Nomenklatur PMDN 90/2019)
1	2	3	4	5	6	7
						Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial; 9. Program Penanggulangan Bencana; 10. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan 11. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 12. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
4.	Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Peningkatan penegakan Perda	1. Penyesuaian sengketa hukum; 2. Harmonisasi Properda dengan Kebutuhan Pembangunan; 3. Sistem Pengaduan Pelanggaran Hukum; 4. Database Perencanaan dan Penegakan Tata Ruang; 5. Penetapan Insentif, disinsentif dan sanksi terhadap pelaksanaan penataan ruang; 6. Penguatan <i>Ngalam Command Center (NCC)</i> sebagai fungsi <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengaduan dan penanganan untuk pelayanan masyarakat; dan</li> <li>Pengaduan dan pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang.</li> </ol>	1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
			Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	Peningkatan kualitas layanan publik	1. Struktur kelembagaan yang ramping dan tepat fungsi ( <i>right sizing</i> ) 2. Penyempurnaan sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan; 3. Optimalisasi kinerja lembaga melalui lelang kinerja; 4. Mall Pelayanan Publik dan Pengembangan sistem layanan publik yang cepat, mudah dan terintegrasi melalui <i>Malang Services</i> ;	1. Program Pelayanan Penanaman Modal; 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); 3. Program Pendaftaran Penduduk; 4. Program Pencatatan Sipil;

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Intervensi (Prioritas) Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018-2023	Program Prioritas Perangkat Daerah (P1) (Penyesuaian dengan Nomenklatur PMDN 90/2019)
1	2	3	4	5	6	7
					5. Penertiban pengelolaan pajak dan retribusi daerah; 6. Pengelolaan sistem manajemen Aset untuk produktifitas; 7. Pengelolaan sistem keuangan yang bebas KKN dan Transparan.	5. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 6. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 7. Program Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; 9. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah; 10. Program Perekonomian dan Pembangunan; 11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan 12. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
			Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Meritokrasi ASN	1. Mengembangkan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kinerja aparatur; 2. Membangun standar kompetensi dan dan peta kebutuhan kepegawaian secara profesional; 3. Menjalankan talent poll untuk menyediakan kebutuhan jabatan structural yang profesional; dan 4. Membangun budaya kerja yang berintegritas dan jiwa kepemimpinan yang tangguh.	1. Program Kepegawaian Daerah; 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Administrasi Umum).

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Intervensi (Prioritas) Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018-2023	Program Prioritas Perangkat Daerah (P1) (Penyesuaian dengan Nomenklatur PMDN 90/2019)
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Integrasi aplikasi informatika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem respon cepat dan monitoring pembangunan;</li> <li>2. Membangun Big Data dan Pola pemanfaatan secara Geo Spasial;</li> <li>3. Mengintegrasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi; dan</li> <li>4. Peningkatan Fungsi Lembaga Perijinan Perda Tata Ruang – DPMPTSP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik;</li> <li>2. Program Aplikasi Informatika; dan</li> <li>3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.</li> </ol>





Program Pembangunan Daerah harus disesuaikan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dijabarkan dalam Program Perangkat Daerah agar memiliki keterkaitan dalam pelaksanaannya sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diharapkan. Dari 4 misi Pembangunan Kota Malang yaitu Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga; Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan; Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender; dan Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel dijabarkan menjadi 12 program Pembangunan Daerah dan prioritas Walikota dan Wakil Walikota. Program Pembangunan Daerah dan prioritas Walikota dan Wakil Walikota kemudian dijabarkan dalam Program-program Prioritas Perangkat Daerah yang sesuai dengan misi yang akan dicapai.



No.	Program RPJMD	Program Kepmen	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%	100%	3.704.617.957,00	100%	11.969.940.425,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	100%	100%		100%		-	-	-	-	-	-	-	-	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	100%		100%		-	-	-	-	-	-	-	-	
			Persentase Keluruhan UCI	73,68%	91%		93%		100%	736.468.200,00	100%	2.284.771.300,00	100%	2.284.771.300,00	100%	5.306.010.800,00	
	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat		Angka Kematian Ibu	83,89	60,22	32.952.265.795,86	60,22	33.412.854.099,00	41,64	3.350.745.580,00	33,31	1.948.792.580,00	24,98	6.236.978.620,00	24,98	77.901.636.674,86	
			Angka Kematian Bayi	6,71	6,02		6,02		4,99	89.192.500,00	4,58	89.245.000,00	4,16	598.625.973,00	4,16	777.063.473,00	
			Persentase balita stunting	<25%	<25%		<24%		<23%	10.540.900.300,00	<18%	1.632.702.300,00	<16%	1.795.972.530,00	<16%	13.969.575.130,00	
	Program Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan		Persentase ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar	-	100%	3.512.148.160,80	100%	7.325.384.416,00	100%	8.768.479.800,00	100%	7.428.451.232,00	100%	9.620.034.065,00	100%	36.654.497.673,80	
	Program BLUD Puskesmas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	-	100%	9.364.369.135,14	100%	28.145.749.780,90	100%	22.956.487.515,00	100%	24.133.946.750,00	100%	28.296.175.965,00	50%	112.896.729.146,04	Dinas Kesehatan
	Program BLUD Rumah Sakit Umum Daerah		BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD	-	30%	-	30%	10.355.705.277,00	35%	10.000.000.000,00	40%	15.000.000.000,00	50%	20.000.000.000,00	50%	55.355.705.277,00	
	Program Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Medis yang berkompeten	-	85%	827.880.100,00	85%	-	87%	8.047.728.320,00	89%	50.000.000,00	90%	1.313.763.780,00	90%	10.239.372.200,00	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan			-													
	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	persentase UKBM yang dibina	-	-	-	-	-	100%	1.541.468.760,00	100%	8.229.214.000,00	100%	16.852.158.260,00	100%	26.622.841.020,00	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	persentase sarana kefarmasian dan industri rumah tangga yang dibina diawasi dan memenuhi syarat	-	70%	692.759.900,00	-	-	70%	449.072.800,00	80%	399.700.000,00	90%	622.000.000,00	90%	2.163.532.700,00	Dinas Kesehatan
	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	-	1,65	417.432.000	1,67		1,7	246.034.830,00	1,74	220.000.000,00	1,74	822.031.350,50	1,72	4.597.656.139,50	Dinas Sosial P3AP2KB
	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	-	75,2	2.901.234.475,00	75,4	2.892.157.959,00	75,6	3.121.485.600,00	75	6.852.251.000,00	75,5	2.803.343.718,50	76	15.678.314.793,50	Dinas Sosial P3AP2KB
	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga kelompok kegiatan Tribina aktif	-	67%	453.658.400,00	67,5%		68%	2.214.539.500,00	85,5%	2.432.300.000,00	86%	3.154.439.939,00	69%	8.254.937.839,00	Dinas Sosial P3AP2KB
			persentase kelompok UPPKS Aktif	-	94,55%		94,64%		94,74%		92,50%		92,75%	94,92%			
3	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan		Indeks Daya Beli/Purchasing Power Parity	0,846	0,847	2.198.922.437,00	0,848	2.981.831.008	0,850	3.982.475.611,00	0,851	3.529.522.100,00	0,852	5.803.290.267,00	0,852	18.496.041.423,00	
	Program bina perdagangan	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Jumlah Alat UTTP yang di Tera dan Tera Ulang	-	45%		-		100%	384.225.900,00	100%	391.570.900,00	100%	876.522.000,00	100%	5.194.130.213,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	Program bina perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	-	-		-		1,00%	353.145.300,00	1,50%	250.000.000,00	1,75%	416.000.000,00	1,75%	1.019.145.300,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	Program bina perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	-	-		-		100%	163.510.000,00	100%	82.856.400,00	100%	360.000.000,00	100%	606.366.400,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase pertumbuhan UKM	-	0,35%	1.289.728.980,00	0,50%	2.252.082.433,00	1,00%		1,25%		1,50%		1,50%		
	Program bina perdagangan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	persentase produk UKM yang difasilitasi dengan promosi/pemasaran	-	-		-		1,00%	650.736.391,00	1,25%	803.574.800,00	1,50%	1.400.000.000,00	1,50%	2.854.311.191,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase pengawasan rokok yang tidak dilekati pita cukai	-	100%		100%		100%	150.000.000,00	100%	-	100%	150.000.000,00	100%	300.000.000,00	

No.	Program RPJMD	Program Kepmen	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program bina perdagangan	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitasi pengembangan ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70%	250.000.000,00	0,70%	250.000.000,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio Konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras	-	2%	417.041.457	-	-	0,093	2.158.058.020,00	0,096	1.911.520.000,00	0,099	2.295.768.267,00	0,099	6.782.387.744,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan pangan utama	-	2%	492.152.000	2%	729.748.575,00	-	-	-	-	-	-	-	1.221.900.575,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase PSAT yang layak konsumsi	-	0%	-	0%	-	2%	122.800.000,00	2%	90.000.000,00	2%	55.000.000,00	6%	267.800.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
<b>II</b>	<b>Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan</b>																
<b>B</b>	<b>Terwujudnya Produktivitas dan Daya Saing Daerah yang merata dan Berkelanjutan</b>		<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>5,40%</b>	<b>5,50%</b>	<b>-</b>	<b>5,60%</b>	<b>-</b>	<b>5,00%</b>	<b>-</b>	<b>5,40%</b>	<b>-</b>	<b>5,80%</b>	<b>-</b>	<b>5,80%</b>	<b>-</b>	
			<b>Gini Ratio</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>-</b>	<b>0,37</b>	<b>-</b>	<b>0,392</b>	<b>-</b>	<b>0,391</b>	<b>-</b>	<b>0,39</b>	<b>-</b>	<b>0,39</b>	<b>-</b>	
<b>4</b>	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif</b>		<b>Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif</b>	<b>N/A</b>	<b>6</b>	<b>32.828.034.185</b>	<b>6,1</b>	<b>27.811.541.746</b>	<b>6,2</b>	<b>42.051.172.437,00</b>	<b>6,3</b>	<b>22.507.815.247,00</b>	<b>6,45</b>	<b>38.182.161.200,00</b>	<b>6,45</b>	<b>163.380.724.814,59</b>	
	Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dibina	-	15%	2.247.522.757	25%	1.322.974.414,83	55%	1.554.169.000,00	60%	3.975.080.000,00	65%	4.013.779.000,00	65%	13.113.525.171,83	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	persentase pengembangan ekonomi kreatif	-	20%	1.370.558.009	30%	-	32%	69.500.000,00	48%	79.880.000,00	60%	100.072.500,00	60%	1.620.010.509,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Program Pemasaran Pariwisata	persentase pemasaran Pariwisata	-	35%	-	45%	-	50%	469.658.000,00	52%	100.000.000,00	60%	174.900.000,00	60%	744.558.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI	-	-	-	-	-	-	-	14%	40.000.000,00	16%	55.000.000,00	16%	95.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program pengembangan usaha mikro	Program Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil	-	11,22%	1.562.544.084,00	40,79%	635.010.750,00	3,40%	2.867.359.640,00	3,50%	188.051.200,00	3,60%	1.478.378.700,00	3,60%	6.731.344.374,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	Program pengembangan industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan jumlah IKM	-	2,00%	6.927.755.995,91	2,00%	3.583.648.416,00	5%	10.373.693.450,00	5%	3.770.500.000,00	5%	8.450.000.000,00	5%	33.105.597.861,91	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	Program pengembangan industri	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase informasi industri yang lengkap dan terkini	-	-	-	-	-	1 sistem	61.626.200,00	1 sistem	100.000.000,00	1 sistem	200.000.000,00	1 sistem	361.626.200,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	-	3,85%	19.686.688.056,85	8%	21.106.478.465,00	3,85%	24.815.034.147,00	7,69%	11.715.802.917,00	7,69%	20.430.000.000,00	7,69%	97.754.003.585,85	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	-	1,00%	575.478.450,00	1,00%	69.040.800,00	1%	700.000.000,00	1%	384.532.000,00	1%	1.031.671.000,00	1%	2.760.722.250,00	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	-	50,23%	-	55,00%	-	60%	-	65%	123.521.550,00	70%	337.748.000,00	70%	461.269.550,00	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase realisasi penanaman modal	-	20%	457.486.832,00	0%	781.270.000	70%	134.695.500,00	75%	100.000.000,00	80%	270.512.000,00	80%	1.743.964.332,00	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
<b>5</b>	<b>Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu</b>		<b>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)</b>	<b>3,75</b>	<b>3,9</b>	<b>147.712.920.279,69</b>	<b>4,05</b>	<b>385.429.609.562</b>	<b>4,2</b>	<b>368.208.036.682,00</b>	<b>4,35</b>	<b>356.196.672.351,00</b>	<b>4,5</b>	<b>490.763.466.119,00</b>	<b>4,5</b>	<b>1.748.310.704.993,69</b>	
	Program Bina Marga	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase kota dalam kondisi baik	82,73%	82,50%	17.121.183.495,00	83,01%	-	83,51%	25.601.154.115,00	84,01%	54.100.867.200,00	84,52%	26.926.397.541,00	84,52%	322.150.436.971,00	DPUPRPKP
			Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-	89,13%	55.987.587.663,86	91,18%	-	92,41%	-	94,46%	-	96,91%	-	96,91%	430.558.068.557,86	

No.	Program RPJMD	Program Kepmen	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Program Bina Marga	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan yang memiliki jalur pejalan kaki	-	88,32%	-	89,93%	198.400.834.620,00	91,53%	161.237.295.194,00	93,14%	52.715.585.700,00	94,74%	160.617.600.000,00	94,74%	430.536.000.537,00	DPUPRPKP
			Persentase jembatan kota dalam kondisi baik	-	94,90%	-	96,09%		92,06%		93,65%		95,24%		95,24%		
			Persentase fasilitas penerangan jalan	-	56,31%	-	67,23%		61,73%		63,55%		70,41%		70,41%		
	Program Penataan Perumahan dan kawasan permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	-	50%	6.413.426.325,00	55%		55%	596.070.000,00	63,76%	351.500.000,00	80%	4.603.929.000,00	80%	25.513.669.080,00	DPUPRPKP
	Program Penataan Perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengembangan Permukiman	Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau	-	50%	-	55%	13.548.743.755,00	65%	13.293.994.493,00	75%	12.234.262.500,00	80%	9.663.060.000,00	80%	35.191.316.993,00	DPUPRPKP
			Persentase penanganan infrastruktur permukiman	-	-	-	-		25%	-	47,50%	-	65,88%	-	65,88%		
	Program Penataan Perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	-	0,25%	-	0,19%		0,10%	3.785.857.000,00	0,04%	3.408.750.000,00	0,00%	4.193.000.000,00	0,00%	11.387.607.000,00	DPUPRPKP
	Program Penataan Perumahan dan kawasan permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan area kawasan kumuh	-	-	-	-		69,17%	99.773.000,00	72,13%	282.370.000,00	73,61%	256.700.000,00	73,61%	638.843.000,00	DPUPRPKP
	Program Cipta Karya	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung	-	100%	587.890.500,00	100%		100%	38.735.552.444,00	100%	93.717.248.787,00	100%	122.860.260.972,00	100%	382.347.964.262,83	DPUPRPKP
			Persentase gedung milik daerah yang menjadi kewenangan dinas dalam kondisi baik	-	-	5.968.612.466,83	-		89,87%	-	94,93%	-	100,00%	-	100,00%		
	Program Cipta Karya	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	-	-	1.786.880.500,00	-	120.478.399.093,00	78%	710.741.336,00	89%	900.000.000,00	100%	1.684.898.299,00	100%	5.082.520.135,00	DPUPRPKP
	Program Cipta Karya	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase pembangunan kawasan prioritas sesuai RTBL	-	1,27%	2.697.551.200,00	5%		5%	1.207.500.488,00	7%	6.900.000.000,00	9%	1.504.912.500,00	9%	12.309.964.188,00	DPUPRPKP
	Program Cipta Karya	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	-	90,21%	4.551.512.860,00	93,71		94,01%	7.010.705.000,00	94,01%	4.650.000.000,00	94,16%	11.700.000.000,00	94,16%	27.912.217.860,00	DPUPRPKP
			Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	-	84,86%	-	85,02%		85,17%	-	85,32%	-	85,47%	-	85,47%		
	Program Pengendalian Lalu Lintas		Persentase penurunan titik kemacetan	-	73%	1.458.031.629,00	68%	10.221.863.389,00	12%	-	9%	-	10%	-	10%		
	Program Pelayanan Angkutan Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat (jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat)	-	61%	12.017.403.486,00	65%	2.986.365.670,00	26,78%	16.264.903.085,00	-	10.656.339.352,00	-	42.673.060.995,00	27,30%	96.277.967.606,00	Dinas Perhubungan
			Load Factor	-	-	-	-		-	-	62,50%	-	63%	-	63%		
			Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	-	13,86%	-	13,00%		12,17%	-	85,45%	-	85,50%	-	85,50%		
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	-	30,00%	39.122.840.154,00	35,00%	39.793.403.035,00	28%	99.664.490.527,00	30%	116.279.748.812,00	34%	104.079.646.812,00	34%	398.940.129.340,00	Kecamatan/ Kelurahan
			Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	-	3,74%	-	3,89%		33%	-	38%	-	43%	-	43%		
<b>6</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Kemanfaatan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup</b>		<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)</b>	<b>82,15</b>	<b>82,92</b>	<b>36.563.408.790,00</b>	<b>83,69</b>	<b>30.626.445.176</b>	<b>67,57</b>	<b>44.487.526.112,00</b>	<b>67,60</b>	<b>43.821.080.999,00</b>	<b>67,63</b>	<b>59.534.650.000,00</b>	<b>67,63</b>	<b>215.033.111.077,00</b>	
	Program Penataan Ruang dan pertanahan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	-	100%	637.838.850,00	100%	1.244.895.000,00	100%	1.791.132.568,00	100%	3.072.880.000,00	100%	3.762.150.000,00	100%	10.508.896.418,00	DPUPRPKP
			Persentase pemanfaatan SIPR dalam pemanfaatan ruang	-	5%	-	7%		85%	-	87%	-	89%	-	89%		
	Program Penataan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun dan sesuai standar	-	85%	509.916.300,00	85%		100%	622.711.400,00	100%	75.000.000,00	100%	2.000.000.000,00	100%	4.225.793.489,00	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Program RPJMD	Program Kepmen	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.
	Program Penataan Lingkungan Hidup	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Masyarakat dan Kegiatan/Usaha Pemilik Izin Lingkungan	-	10%	-	12%	1.018.165.789,00	20%	220.805.000,00	22%	339.324.900,00	25%	875.000.000,00	25%	1.435.129.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penataan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	-	-	-	-	-	64,81%	1.201.341.208,00	64,81%	491.640.000,00	64,81%	2.550.000.000,00	64,81%	4.242.981.208,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Program Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah yang terkurangi di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai kumulatif)	-	21%	19.563.690.390,00	22%	17.940.554.327,00	24%	16.116.719.104,00	26%	25.274.482.099,00	27%	19.678.000.000,00	27%	98.573.445.920,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Penanganan Sampah	-	75%	-	75%		74%	73%	72%	72%	Dinas Lingkungan Hidup				
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pelaku usaha yang sudah melakukan pengelolaan limbah B3	5%	-	592.442.100,00	-	20%	4.000.000,00	23%	19.950.000,00	25%	115.000.000,00	25%	731.392.100,00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase luas RTH Publik yang dikelola	-	8,17%	15.259.521.150,00	8,23%	10.422.830.060,00	0,87%	24.530.816.832,00	0,87%	14.547.804.000,00	0,87%	30.554.500.000,00	0,87%	95.315.472.042,00	
III	Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender																
C	Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang Berpihak Masyarakat Rentan dan Gender		Angka Kemiskinan	4,10	4,07	-	4,44	-	3,978	-	3,874	-	3,768	-	3,768	-	
			Indeks Modal Sosial	79,2	80,880	-	81,20	-	85,68	-	87,84	-	90	-	90	-	
7	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial		Persentase penurunan PMKS	-2,23%	3,31%	19.615.255.955	5,02%	13.163.014.325	5%	24.102.498.850,00	5%	16.650.110.353,00	5%	29.248.414.801,00	5%	102.779.294.283,84	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-	-	-	-	8,2%	-	7,5%	-	6,24%	-	6,24%	-	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial	Program Penempatan Tenaga Kerja	persentase pencari kerja yang ditempatkan	-	45%	425.255.350	75%	153.240.625,00	76%	32.099.900,00	77%	85.000.000,00	78%	789.320.000,00	78%	1.484.915.875,00	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
			persentase peningkatan lapangan kerja	-	5%	-	6,50%		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	-	70%	825.887.600	62%	153.240.625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	-	-	-	-		5,12%	350.775.000,00	10,18%	255.000.000,00	11,3%	934.997.000,00	11,3%	2.366.659.600,00	
	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin			-	-	12.510.121.767,00	-	11.180.227.032,45	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial P3AP2KB
	Program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya	-	14,05%	4.071.585.430,00	14,24%		14,21	20.408.595.197,00	14,25	13.322.580.801,00	14,26	22.819.853.682,00	14,26	84.312.963.909,45	
	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin			-	-	-	-	1.829.546.667,39	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial P3AP2KB
	Program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	-	53,71%	-	51,19%		51,52	1.931.814.760,00	51,84	375.000.000,00	52,15	2.126.712.250,00	52,15	6.263.073.677,39	
	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin			-	-	-	-	1.829.546.667,39	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial P3AP2KB
	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	-	13,28%	1.782.405.808	13,28%		13,28	1.127.197.900,00	13,28	2.443.904.500,00	13,28	2.200.304.407,00	13,28	7.553.812.615,00	

No.	Program RPJMD	Program Kepmen	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	-	100%		100%	-	100%	252.016.093,00	100%	168.625.052,00	100%	377.227.462,00	100%	797.868.607,00	Dinas Sosial P3AP2KB		
8	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan		Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,820	0,850	29.789.373.158	0,830	49.754.797.623	0,868	12.004.193.097,00	0,884	18.015.685.974,00	0,90	34.118.144.206,00	0,90	143.682.194.058,00			
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,71	94,71		94,58		97,0		97,1		97,2		97,20				
	Program Pemberdayaan Perempuan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan Anggaran Responsif Gender ( ARG)	-	63%	1.410.453.819	75%	686.008.520,00	88%	358.459.900,00	100%	-	100%	477.404.646,00	100%	2.932.326.885,00	Dinas Sosial P3AP2KB		
	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Ibu Rumah Tangga yang mendapatkan peningkatan kualitas keluarga	-	-		-		0,02%	156.760.000,00	0,05%	568.614.000,00	0,06%	208.293.750,00	0,06%	2.307.625.013,00	Dinas Sosial P3AP2KB		
	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase organisasi perempuan yang aktif	-	93%		93%		96,50%	509.436.760,00	96,50%	402.500.000,00	96,50%	846.805.082,00	96,50%	1.758.741.842,00	Dinas Sosial P3AP2KB		
	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	-	100%	794.351.113	100%	579.606.150	100%	300.619.300,00	100%	132.262.000,00	100%	965.091.730,00	100%	1.397.973.030,00	Dinas Sosial P3AP2KB		
	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	-	100%		-		100%	879.218.076,00	100%	368.167.900,00	100%	-	100%	1.247.385.976,00	Dinas Sosial P3AP2KB		
	Program Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rasio Poskaming per RW	-	100%	4.952.895.915,00	100%		2	-	2	-	2	7.134.523.800,00	2	17.246.403.853,00	Satpol PP		
	Program Perlindungan Masyarakat	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	-	100%	2.374.371.885,00	100%	5.158.984.138,00	100%	1.695.926.360,00	100%	2.289.204.824,00	100%	3.485.686.600,00	100%	9.845.189.669,00	Satpol PP		
	Program Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan	-	65%	2.064.261.400,00	67,50%	1.889.197.256	70%	2.828.162.356,00	72,50%	2.085.780.000,00	75%	3.246.099.129,00	75%	12.113.500.141,00	Bakesbangpol		
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		Persentase masyarakat tangguh bencana	-	5%	1.089.325.240,00	10%	654.573.000,00	-	-	-	-	-	-	-	15.216.104.888,00			
	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	113,6	-		-		95		90		85		85				
Rata - rata waktu tanggap (responstime) bencana			-	< 1 Jam		< 1 Jam		< 1 Jam		< 1 Jam		< 1 Jam		< 1 Jam		< 1 Jam			
Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik			-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
Persentase tertanganinya infrastruktur yang rusak pasca bencana			-	30%		30%		-		-		-		-		-			
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	-	4,10%	14.909.534.876,00	4,18%	39.893.832.559,00	84%	-	90%	-	96%	-	96%	54.803.367.435,00	Kecamatan/ Kelurahan		

No.	Program RPJMD	Program Kepmen	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	-	-	-	-	92%	334.937.000,00	96%	298.976.000,00	100%	213.440.000,00	100%	847.353.000,00	Kecamatan/ Kelurahan	
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rasio Linmas per RT (--> mendukung indeks rasa aman--> data kota 0,5--> target kota 2023 --> rasio 1)	-	0,50	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan/ Kelurahan	
			Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	-	-	-	-	94,00%	1.834.180.447,00	94,00%	9.579.467.500,00	94%	9.465.799.469,00	94%	20.879.447.416,00		
<b>IV</b>	<b>Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel</b>																
<b>D</b>	<b>Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>74</b>	<b>-</b>	<b>76</b>	<b>-</b>	<b>78</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	
<b>9</b>	<b>Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum</b>		<b>Persentase perda yang ditegakkan</b>	<b>21%</b>	<b>25%</b>	<b>2.220.938.150</b>	<b>40%</b>	<b>882.395.000</b>	<b>60%</b>	<b>11.112.391.672,00</b>	<b>82%</b>	<b>5.828.114.520,00</b>	<b>100%</b>	<b>7.134.523.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>27.178.363.142,00</b>	
	Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan pelanggaran Perda	NA	100%	1.546.997.500,00	100%	882.395.000,00	100%	11.112.391.672,00	100%	5.828.114.520,00	100%	7.134.523.800,00	100%	26.504.422.492,00	Satpol PP
			Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari	NA	100%	673.940.650,00	95%	-	2,4	-	2,4	-	3	-	3	673.940.650,00	
<b>10</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif</b>		<b>Nilai Sakip</b>	<b>70,96</b>	<b>75,65</b>	<b>39.199.095.514</b>	<b>80,5</b>	<b>30.393.482.664</b>	<b>82,05</b>	<b>134.939.160.492,00</b>	<b>83,5</b>	<b>126.544.076.021,00</b>	<b>84,9</b>	<b>78.132.819.763,00</b>	<b>84,9</b>	<b>409.208.634.454,24</b>	
		<b>Opini BPK</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>		<b>WTP</b>		<b>WTP</b>								
		<b>Maturitas SPIP</b>	<b>3,045</b>	<b>3,05</b>	<b>3,1</b>		<b>3,15</b>		<b>3,2</b>								
		<b>Rasio PAD</b>	<b>0,22</b>	<b>0,30</b>	<b>0,25</b>		<b>0,28</b>		<b>0,30</b>								
	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	Program Pelayanan Penanaman Modal	persentase penerbitan ijin dan non ijin ekonomi, pariwisata dan sosial budaya	-	75%	275.160.000,00	82,5%	140.000.000,00	85%	436.365.952,00	87,50%	850.000.000,00	90%	570.000.000,00	90%	2.271.525.952,00	Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum		Persentase penerbitan ijin dan non ijin pekerjaan umum	-	75%	807.215.000,00	82,50%	1.490.601.800,00	85%	500.000.000,00	87,50%	347.246.450,00	90%	807.475.000,00	90%	3.952.538.250,00	
			Persentase realisasi target retribusi IMB	-	100%	-	100,00%	-	100%	-	100,00%	150.000.000,00	100%	660.000.000,00	100%	810.000.000,00	
	Program Pengelolaan parkir	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD	-	1,01%	1.043.672.500,00	1,01%	1.187.319.000,00	1,01%	-	1,03%	-	1,05%	-	1,05%	2.230.991.500,00	Dinas Perhubungan
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	-	95%	2.741.038.627,00	95,5%	2.613.942.224,00	96%	1.111.448.000,00	96,5%	1.176.878.000,00	97%	1.344.891.000,00	97%	8.988.198.851,00	Dispendukcapil
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi pencatatan sipil	-	90%	2.401.671.783,00	91%	2.449.037.452,00	92%	1.592.346.900,00	93%	1.636.022.000,00	94%	1.941.191.000,00	94%	10.020.269.135,00	Dispendukcapil
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	-	100%	3.837.814.662,00	100%	1.336.133.711,00	100%	837.237.200,00	100%	1.286.769.400,00	100%	1.400.000.000,00	100%	8.697.954.973,00	BAPPEDA
			Persentase Capaian program dan kegiatan pada RKPD	-	89%	-	90%	-	95%	289.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	989.000.000,00	
	Program Perencanaan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam		Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara.	-	80%	2.228.831.500,00	85%	824.237.800,00	90%	862.760.000,00	100%	1.212.776.000,00	100%	1.070.000.000,00	100%	6.198.605.300,00	



No.	Program RPJMD	Program Kepmen	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.		
	Program Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara.	-	80%	1.427.826.942,00	85%	934.993.500,00	90%	1.004.732.025,00	100%	820.000.000,00	100%	1.553.360.000,00	100%	5.740.912.467,00	BAPPEDA		
	Program Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan tahapan dan tata cara	-	80%	1.992.064.910,00	85%	1.220.896.800,00	90%	766.399.984,00	100%	762.010.000,00	100%	543.330.000,00	100%	5.284.701.694,00			
		Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	-	60%			70%		75%	564.871.216,00	78%	600.000.000,00	80%	245.000.000,00	80%	1.409.871.216,00			
	Program Perencanaan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design Sektor Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang mendukung perencanaan.	-	75%	3.070.064.428,00	85%	1.749.125.720,00	90%	-	100%	376.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	5.595.190.148,00	BAPPEDA		
	Program Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang ditindaklanjuti.	-	75%				85%		90%	-	100%	173.000.000,00	100%	200.000.000,00		100%	373.000.000,00
	Program Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design sektor Infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung perencanaan.	-	75%				85%		90%	-	100%	109.030.000,00	100%	250.000.000,00		100%	359.030.000,00
			Persentase implementasi rencana kelitbang	-	5%				50%		60%	2.221.840.000,00	70%	1.079.810.000,00	80%	1.434.000.000,00		80%	4.735.650.000,00
			Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	3,5%				3,5%		50%	418.030.000,00	55%	147.000.000,00	60%	299.475.000,00		60%	864.505.000,00
	Program Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BTL APBD ≤ 50%	-	43%	2.641.571.825,00	40%	5.658.180.013,00	-	-	-	64.308.475.067,00	-	-	-	72.608.226.905,00	BKAD		
			Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	-	-	2.076.271.580,00	-	-	100%	84.947.881.332,00	100%	24.201.978.204,00	100%	42.361.656.433,00	100%	153.587.787.549,00			
	Program Pemanfaatan Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	-	2.650.000.000	1.857.531.680,00	2.703.000.000	2.910.849.367,00	0,69%	6.076.179.896,00	0,90%	5.773.499.600,00	1,02%	5.705.245.530,00	1,02%	22.323.306.073,00	BKAD		
	Program Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	-	2.636.869.800,00	37,04%	1.155.075.000,00	18,96%	10.396.471.000,00	14,88%	14.384.167.700,00	17,23%	8.755.954.800,00	17,23%	37.328.538.300,00	Bapenda		
	Program Pelayanan Pajak Daerah		kontribusi pajak daerah terhadap PAD	-	-	5.122.666.650,00	82,08%	3.339.500.400,00	82,97%		83,44%		84,16%						
			persentase penurunan piutang pajak daerah	-	NA		1,81%		18,70%	23,83%	26,21%	26,21%							
	Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang perekonomian, Infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti	-	100%	2.015.416.654,24	100%	1.276.292.845,00	100%	17.579.636.000,00	100%	1.571.934.300,00	100%	750.920.000,00	100%	23.194.199.799,24	Sekretariat Daerah		
			Persentase Paket Selesai Tender	-	-	-	-	-	90%	1.842.100.000,00	95%	754.386.700,00	100%	1.842.100.000,00	100%	4.438.586.700,00			
	Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Administrasi Umum)	Hasil Survei Internal Organisasi	-	3	1.296.361.036,00	3	1.171.665.025,00	2,1	1.123.092.600,00	2,2	1.123.092.600,00	2,3	1.237.000.000,00	3,3	5.951.211.261,00	Sekretariat Daerah/ Bagian Organisasi		
	Program Evaluasi dan		Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP	-	100%		100%		8,5	762.064.000,00	100%	1.230.000.000,00	100%	409.849.500,00	100%	5.064.591.444,00			
			Persentase SAKIP PD dengan Nilai A	-	100%		100%		100%	503.226.387,00	100%	1.030.000.000,00	100%	1.553.477.000,00	100%	3.086.703.387,00			

No.	Program RPJMD	Program Kepmen	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	-	100%	1.727.045.937,00	-	935.632.007,00	100%	250.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	237.770.500,00	100%	697.770.500,00	Inspektorat
			Persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	-	100%	-	-	100%	853.477.000,00	100%	1.030.000.000,00	100%	2.060.124.000,00	100%	3.943.601.000,00		
11	Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN		Indeks Profesionalitas ASN	64,00	66,61	9.771.476.922	67,06	2.748.764.455	74,38	9.489.794.644,00	75,84	4.476.642.629,00	77,10	11.085.067.000,00	77,10	37.571.745.650,00	
	Program Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu	-	93%	-	83,70%	-	84,39%	885.788.000,00	85,65%	834.266.000,00	87,13%	881.120.000,00	87,13%	6.031.134.606,00	BKPSDM
Persentase terisinya jab struktural dan pelaksana			-	NA	-	62%	-	61,8%	4.414.683.794,00	62%	641.676.629,00	63%	5.423.947.000,00	63%	10.480.307.423,00		
Persentase ASN yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar			-	0	-	0%	-	0	353.891.700,00	0	315.000.000,00	0	315.000.000,00	0	983.891.700,00		
Persentase pelanggaran disiplin ASN yang telah ditindaklanjuti			100%	95%	100%	100%	152.111.400,00	100%	175.000.000,00	100%	175.000.000,00	100%	175.000.000,00	100%	502.111.400,00		
	Program Pengembangan kompetensi dan Fasilitasi Profesi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	-	80%	7.683.588.505,00	63,44%	1.406.692.266,00	69,15%	2.695.522.780,00	74,86%	1.000.000.000,00	83,35%	2.240.000.000,00	83,35%	15.025.803.551,00	BKPSDM
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	-	NA	-	91%	-	96%	987.796.970,00	100%	1.510.700.000,00	100%	2.050.000.000,00	100%	
	Program Pengembangan Standar Kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Administrasi Umum)	Persentase standar kompetensi perangkat daerah yang ditetapkan	-	70%	644.549.293,00	70%	15.223.000,00	80%	426.563.000,00	90%	426.563.000,00	100%	470.000.000,00	100%	1.982.898.293,00	
12	Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi		Indeks Kematangan SPBE	N/A	2,85	18.951.324.041	3,70	14.114.220.167	4,21	27.329.384.943,00	4,45	14.315.162.759,00	4,54	40.233.036.050,00	4,54	114.943.127.960,00	
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah/ pemprov/pemda	-	79,00%	3.117.064.751,00	81,00%	1.917.754.871,00	70,00%	6.805.133.000,00	71,00%	3.099.301.332,00	72,00%	10.631.200.000,00	72,00%	25.570.453.954,00	Diskominfo
				Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	-	52,94%	1.358.689.598	55,65%	-	-	-	-	-	-	-	1.358.689.598,00	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi informasi yang terintegrasi	-	6,52%	13.527.340.892,00	12,24%	11.506.156.601,00	89,09%	19.402.669.145,00	94,55%	10.596.206.223,00	100%	27.075.923.050,00	100%	82.108.295.911,00	Diskominfo
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase keterisian e-database SIPD	-	80%	948.228.800,00	82%	690.308.695,00	100%	1.121.582.798,00	100%	619.655.204,00	100%	2.525.913.000,00	100%	5.905.688.497,00	Diskominfo
				Tingkat keamanan informasi pemerintah	-	72%	-	74%	-	18%	-	24%	-	29%	-	-	

# BAB-VII

**KERANGKA  
PENDANAAN PEMBANGUNAN  
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**



## BAB VII




### KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

#### 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Kerangka pendanaan pembangunan daerah mulai tahun 2021 telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penerapan dari peraturan tersebut menjadi salah satu alasan perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah, sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat;
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Walikota dan Wakil Walikota juga termasuk hal tersebut;
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Alokasi anggaran prioritas III diperuntukkan untuk mendanai program-program perangkat daerah yang tidak termasuk dalam kategori Prioritas I dan Prioritas II. Program-program tersebut dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan



Kota Malang namun tidak menjadi prioritas Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018-2023.

Sebagaimana analisis pada Bab III Perubahan RPJMD ini, maka penyajian kerangka pendanaan RPJMD Kota Malang dapat dibagi 2 (dua) yaitu periode Tahun 2019-2020 (Tabel 7.1) dan Tahun 2021-2023 (Tabel 7.2). Masing-masing periode menggambarkan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

**Tabel 7.1**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Malang**  
**Tahun 2019-2020**

Kode	Kapasitas Riil / Belanja		Proyeksi	Realisasi	Proyeksi	Realisasi
			2019	2019	2020	2020
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		KAPASITAS RIIL KEUANGAN	<b>1.270.839.543.300,00</b>	<b>1.800.760.791.691,48</b>	<b>1.267.220.932.997,00</b>	<b>1.781.272.354.554,75</b>
1	1	<b>BELANJA</b>	<b>2.206.747.280.578,09</b>	<b>1.909.775.302.319,19</b>	<b>2.243.430.948.398,09</b>	<b>2.103.467.535.397,26</b>
1	2	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>935.907.737.278,09</b>	<b>851.778.932.165,88</b>	<b>976.210.015.401,09</b>	<b>890.082.252.087,77</b>
1	2	Belanja Pegawai	842.944.367.125,09	776.048.486.767,88	898.365.869.501,09	729.276.551.486,77
1	2	Belanja Bunga	0	0	0	0
1	2	Belanja Subsidi	0	0	0	0
1	2	Belanja Hibah	71.680.417.200,00	73.710.379.600,00	71.680.417.200,00	98.172.201.249,00
1	2	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	0	500.000.000,00	8.018.690.000,00
1	2	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	0	0	0	0
1	2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa/Partai Politik	663.728.700,00	662.694.733,00	663.728.700,00	0
1	2	Belanja Tidak Terduga	20.119.224.253,00	1.357.371.065,00	5.000.000.000,00	54.614.809.352,00
1	3	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.270.839.543.300,00</b>	<b>1.057.996.370.153,31</b>	<b>1.267.220.932.997,00</b>	<b>1.213.385.283.309,49</b>
1	3	Belanja Pegawai	232.445.464.913,00	190.967.861.890,00		161.676.675.462,00
1	3	Belanja Barang dan Jasa	670.032.875.908,91	628.502.968.908,65		688.481.383.207,74
1	3	Belanja Modal	368.361.202.478,09	238.525.539.354,66		363.227.224.639,75

**Tabel 7.2**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Malang**  
**Tahun 2021-2023**

No	Uraian	Proyeksi (Rp)		
		2021	2022	2023
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.148.115.942.868,00</b>	<b>1.889.834.264.412,00</b>	<b>2.136.209.239.436,94</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	992.158.665.158,00	880.109.966.760,00	880.109.966.760,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.024.240.812.710,00	892.248.145.652,00	1.148.891.276.540,63
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	96.017.865.000,00	104.809.112.000,00	92.042.771.136,30
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	35.698.600.000,00	12.667.040.000,00	15.165.225.000,00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>322.573.922.112,00</b>	<b>243.993.726.554,00</b>	<b>304.479.771.366,74</b>
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>81.384.922.982,00</b>	<b>85.459.399.171,00</b>	<b>89.726.877.587,66</b>
<b>2.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>2.552.074.787.962,00</b>	<b>2.219.287.390.137,00</b>	<b>2.530.415.888.391,33</b>

**Tabel 7.3**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Malang**

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>Urusan Wajib</b>															
	<b>Terkait Pelayanan Dasar Pendidikan</b>															
15.00.5.2	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase peningkatan Angka Partisipasi Kasar PAUD	85	3%	3.173.171.791,00	-	-	-	-	-	-	-	-	89,88	3.173.171.791,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase peningkatan Lembaga PAUD terakreditasi	NA	2%		-	-	-	-	-	-	-	-	80,9		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23.00.5.2	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Angka rata-rata lama sekolah	N/A	8,5	118.417.029.682,60	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	118.417.029.682,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase jumlah siswa melanjutkan dari SD ke SMP/MTS	95,84	95,90%		-	-	-	-	-	-	-	-	NA		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase peningkatan jumlah satuan pendidikan SD berakreditasi	N/A	5%		-	-	-	-	-	-	-	-	NA		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Satuan Pendidikan yang Memenuhi SPM	N/A	100%		-	-	-	-	-	-	-	-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase peningkatan angka partisipasi kasar	N/A	3%		-	-	-	-	-	-	-	-			
		Rerata nilai ujian nasional	N/A	77,6		-	-	-	-	-	-	-	-			
		Persentase peningkatan angka partisipasi murni	N/A	95,16		-	-	-	-	-	-	-	-			
		Persentase peningkatan jumlah prestasi siswa dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis	N/A	10%		-	-	-	-	-	-	-	-			
		Persentase penurunan angka putus sekolah	N/A	0,06		-	-	-	-	-	-	-	-			
24.00.5.2	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka rata-rata lama sekolah	N/A	8,5	65.562.101.548,50	-	-	-	-	-	-	-	-	103,05	65.562.101.548,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase jumlah siswa melanjutkan dari SD ke SMP/MTS	95,84	99,99%		-	-	-	-	-	-	-	-	83,67		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase peningkatan jumlah satuan pendidikan SMP berakreditasi	N/A	1%		-	-	-	-	-	-	-	-	NA		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Peningkatan Satuan Pendidikan yang Memenuhi SPM	N/A	1%		-	-	-	-	-	-	-	-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase meningkatnya angka partisipasi kasar	N/A	3%		-	-	-	-	-	-	-	-			
		Persentase peningkatan angka partisipasi murni	N/A	1%		-	-	-	-	-	-	-	-			
		Persentase peningkatan jumlah prestasi siswa dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis	N/A	4%		-	-	-	-	-	-	-	-			
		Persentase penurunan angka putus sekolah	N/A	0,06		-	-	-	-	-	-	-	-			
		Rerata Nilai Ujian Nasional	N/A			-	-	-	-	-	-	-	-			
20.00.5.2	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai UKG	N/A	75	2.928.891.895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	91,15	2.928.891.895,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase peningkatan layanan Administrasi yang tepat waktu	N/A	2%		-	-	-	-	-	-	-	-	7500%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase peningkatan nilai AKIP SKPD	N/A	2%		-	-	-	-	-	-	-	-			
		Persentase peningkatan sarana dan prasarana kantor yang tersedia sesuai dengan kebutuhan	N/A	4%		-	-	-	-	-	-	-	-			
		Persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	N/A	70%		-	-	-	-	-	-	-	-			
		Persentase Satuan Pendidikan dengan jumlah guru sesuai SPM	N/A	100%		-	-	-	-	-	-	-	-			
18.00.5.2	Program Pendidikan Non Formal	Persentase penduduk 15-24 tahun yang buta aksara	N/A	0%	2.865.238.164,00	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	2.865.238.164,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Program Kesetaraan terakreditasi	N/A	2%		-	-	-	-	-	-	-	-			
		Persentase Program Kursus terakreditasi	N/A	2%		-	-	-	-	-	-	-	-			
25.00.5.2	Program Sarana dan Prasarana SKB	Persentase Sarana dan Prasarana SKB dalam kondisi baik	N/A	70%	809.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		809.550.000,00	
26.00.5.2	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal	APK PAUD	85	-	-	90,38	6.220.519.834,00	-	-	-	-	-	-	90,38	6.220.519.834,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		APM PAUD	NA	-	-	81,4				-	-	-	-	81,4		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang PAUD PNF	NA	-	-	20%				-	-	-	-	20%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang PNF	NA	-	-	20%				-	-	-	-	-			
27.00.5.2	Program Pembinaan Pendidikan Dasar	APK SD	99,63	-	-	109,81	167.612.935.231,89			-	-	-	-	109,81	167.612.935.231,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		APM SD	89,03	-	-	104,55				-	-	-	-	104,55		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SD	NA	-	-	20%				-	-	-	-	20%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		APK SMP	95,01	-	-	104,15				-	-	-	-	104,15		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		APM SMP	72	-	-	84,67				-	-	-	-	84,67		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SMP	N/A	-	-	20%				-	-	-	-	20%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
27.00.5.2	Program Pembinaan Ketenagaan	Persentase Guru tersertifikasi	75,31%			91,35%	1.181.168.711,00			-	-	-	-	91,35%	1.181.168.711,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase Guru dengan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Minimal 75	75			80				-	-	-	-	8000%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase profesionalitas dan keahlian Teknis Tenaga Pendidikan	N/A			35%				-	-	-	-	35%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.03.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang memenuhi Kompetensi Minimum	N/A	-	-	-	-	47,24%		-	47,24%	45.398.000,00	47,24%	128.125.000,00	47,24%	173.523.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	85	-	-	-	-	78,48	280.992.590.100,00		80,68	259.817.247.706,00	82,88	258.431.842.708,00	82,88	799.241.680.514,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM PAUD	NA	-	-	-	-	69,12			71,32		73,52		73,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang PAUD PNF	NA	-	-	-	-	20%			20%		20%		20%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		APK SD	99,63	-	-	-	-	110,11			110,41		110,71		110,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		APM SD	89,03	-	-	-	-	106,15			107,75		109,35		109,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SD	NA	-	-	-	-	20%			20%		20%		20%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		APK SMP	95,01	-	-	-	-	105,25			106,35		107,45		107,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		APM SMP	72	-	-	-	-	85,67			86,67		87,67		87,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter Jenjang SMP	N/A	-	-	-	-	20%			20%		20%		20%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.04.0.00.00	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru tersertifikasi	N/A	-	-	-	-	91,55%	756.074.000,00		91,75%	320.560.000,00	91,95%	249.879.625,00	91,95%	1.326.513.625,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Guru dengan Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) Minimal 75	N/A	-	-	-	-	80%			80%		80%		80%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		persentase profesionalitas dan keahlian Teknis Tenaga Pendidikan	N/A	-	-	-	-	42%			52%		52%		52%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	<b>Kesehatan</b>																
17.00.5.2	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase sampel kosmetika yang diambil dari peredaran dan memenuhi syarat	N/A	30%		692.759.900,00								70%	692.759.900,00	Dinas Kesehatan	
		Persentase sampel pangan yang diambil dari peredaran dan memenuhi syarat	N/A	60%													
		Persentase sarana obat tradisional yang diawasi dan memenuhi syarat/standart	N/A	40%													
		persentase sarana kefarmasian dan industri rumah tangga yang dibina diawasi dan memenuhi syarat	N/A	70%													
19.00.5.2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat miskin mendapatkan jaminan kesehatan	N/A	100%		32.952.265.795,86								60,22	32.952.265.795,86	Dinas Kesehatan	
		Persentase Posyandu purnama mandiri	N/A	80%													
20.00.5.2	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk	0,047	<0,45		9.860.521.916,00									9.860.521.916,00	Dinas Kesehatan	
33.00.5.2	Program pelayanan kesehatan dasar	Persentase klinik swasta berijin	N/A	100%		26.022.215.905,42								100%	26.022.215.905,42	Dinas Kesehatan	

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Puskesmas yang telah mengikuti penilaian/survev	N/A	100%												-
34.00.5.2	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang telah lulus credentialing	N/A	80%	543.125.583,00									100%	543.125.583,00	Dinas Kesehatan
35.00.5.2	Program Pelayanan Kesehatan Tradisional	Penyehat tradisional ramuan dan ketrampilan yang memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	N/A	10%	157.562.000,00										157.562.000,00	Dinas Kesehatan
		Persentase kelurahan yang memiliki asuhan mandiri dengan SK Kepala Kelurahan yang ada di wilayah kerja puskesmas	N/A	10%												
36.00.5.2	Program Pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase Desa yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	N/A	100%	3.704.617.957,00										3.704.617.957,00	
		Persentase jamaah haji yang dilakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan	N/A	100%											100%	Dinas Kesehatan
		Persentase penemuan penderita kusta yang diobati dan sembuh	N/A	95%												
		Persentase Penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani	100%	100%											100%	Dinas Kesehatan
		Persentase Penemuan penderita Diare yang ditemukan dan ditangani	N/A	100%											100%	Dinas Kesehatan
		Persentase Penemuan pasien Baru TB - BTA positif yang ditangani	100%	100%											100%	Dinas Kesehatan
		Penemuan penderita pneumonia	N/A	80%												
		Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	N/A	91%											91%	Dinas Kesehatan
		Persentase kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	100	100%											100%	Dinas Kesehatan
		Persentase ODGJ (Schizofrenia dan psikotik) yang ditemukan dan ditangani	100%	100%											100%	Dinas Kesehatan
		Persentase Penderita DBD yang ditangani dan sembuh	97	100%												
		Puskesmas yang melaksanakan PPTM secara terpadu	N/A	100%												
37.00.5.2	Program Kesehatan Kerja Dan Olahraga	Persentase puskesmas yang melaksanakan program pelayanan kesehatan olahraga	N/A	100%	1.196.014.010,00										1.196.014.010,00	Dinas Kesehatan
38.00.5.2	Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Persentase Inspektori Sanitasi terhadap TLU TPM	N/A	92%	1.704.051.391,00									<25%	1.704.051.391,00	Dinas Kesehatan
39.00.5.2	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Persentase balita (0-59 bulan) mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	30,28	100%	1.816.796.106,00									6,02	1.816.796.106,00	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	N/A	100%												
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	N/A	100%												
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar	N/A	100%												
40.00.5.2	Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Persentase Tenaga Medis yang berkompeteren	N/A	85%	827.880.100,00									85%	827.880.100,00	Dinas Kesehatan
41.00.5.2	Program Obat dan perbekalan kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan alat kesehatan	Terperuhnya alat kesehatan sesuai kebutuhan di puskesmas	N/A	90%	3.512.148.160,80									100%	3.512.148.160,80	Dinas Kesehatan
		Terperuhnya ketersediaan obat, perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan di puskesmas	N/A	100%												
42.00.5.2	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	0%	100%	9.364.369.135,14									100%	9.364.369.135,14	Dinas Kesehatan
44.00.5.2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan Farmasi	Terperuhnya alat kesehatan sesuai kebutuhan di puskesmas	N/A	90%	11.518.842.497,00										11.518.842.497,00	Dinas Kesehatan
		Terperuhnya ketersediaan obat, perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan di puskesmas	N/A	100%												
48.00.5.2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase gedung puskesmas dan puskesmas pembantu yang direhab	100%	100%	4.128.812.950,95									100%	4.128.812.950,95	Dinas Kesehatan
54.00.5.2	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	83,89	60,22			33.412.854.099,00							60,22	33.412.854.099,00	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi	6,71	6,02										6,02		
		Persentase balita stunting	<25%	<25%										<24%		

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49.00.5.2	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM	N/A	-	-	100%	77.036.195.439,68							100%	77.036.195.439,68	Dinas Kesehatan
		Cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat	N/A	-	-	100%								100%		Dinas Kesehatan
51.00.5.2	Program BLUD Puskesmas	Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	0%	-	-	100%	28.145.749.780,90							100%	28.145.749.780,90	Dinas Kesehatan
43.00.5.2	Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	NDR (Net Death rate)	N/A	< 2%	25.573.538.636,00	<2%	39.458.009.130,00							<2%	65.031.547.766,00	Dinas Kesehatan
52.00.5.2	Program BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD	N/A	30%		30%	10.355.705.277,00							30%	10.355.705.277,00	Dinas Kesehatan
53.00.5.2	Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	-	-	100%	11.969.940.425,60							100%	11.969.940.425,60	Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	-	-	100%								100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100%	-	-	100%								100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%	-	-	100%								100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	100%	-	-	100%								100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	-	-	100%								100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Keurahan UCI	73,68%	-	-	93,00%								93%		Dinas Kesehatan
55.00.5.2	Program Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Persentase Tenaga Medis yang berkompeten	N/A			85%	7.325.384.416,00							85%	7.325.384.416,00	Dinas Kesehatan
		Persentase ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar	N/A			100%								100%		Dinas Kesehatan
56.00.5.2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan	Persentase ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar	N/A				10.061.876.000,77								10.061.876.000,77	Dinas Kesehatan
50.00.5.2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Pelayanan Kesehatan	Persentase gedung fasilitas pelayanan kesehatan dalam kondisi baik	100%			100%	13.306.716.000,00							100%	13.306.716.000,00	Dinas Kesehatan
		Cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat	N/A			100%										Dinas Kesehatan
45.00.5.2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan Gizi	Persentase balita gizi buruk	0,047	<0,45	821.283.540,00										821.283.540,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.0.00.00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase unit pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM	100%	-	-	-	-	100%	18.378.968.955,00	100%	11.221.634.851,00	100%	19.523.055.541,00	100%	49.123.659.347,00	Dinas Kesehatan
		Cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat	N/A	-	-	-	-	100%	141.981.940.157,00	100%	97.204.131.564,00	100%	145.314.299.520,00	100%	384.500.371.241,00	Dinas Kesehatan
		Persentase gedung puskesmas dan puskesmas pembantu yang direhab	100%	-	-	-	-	100%	-	100%	7.000.000.000,00	100%	22.440.001.600,00	100%	29.440.001.600,00	Dinas Kesehatan
		Persentase Keurahan UCI	73,68%	-	-	-	-	100%	736.468.200,00	100%	2.284.771.300,00	100%	2.284.771.300,00	100%	5.306.010.800,00	Dinas Kesehatan
		NDR (Net Death rate)	N/A	-	-	<2%	-	<2%	30.982.163.631,00	<2%	25.000.000.000,00	<2%	70.862.500.000,00	<2%	126.844.663.631,00	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu	83,89	-	-	-	-	41,64	3.350.745.580,00	33,31	1.948.792.580,00	24,98	6.236.978.620,00	24,98	11.536.516.780,00	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi	6,71	-	-	-	-	4,99	89.192.500,00	4,58	89.245.000,00	4,16	598.625.973,00	4,16	777.063.473,00	Dinas Kesehatan
		Persentase balita stunting	<25%	-	-	-	-	<23%	10.540.900.300,00	<18%	1.632.702.300,00	<16%	1.795.972.530,00	<16%	13.969.575.130,00	Dinas Kesehatan
		Persentase ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan sesuai standar	N/A	-	-	-	-	100%	8.768.479.800,00	100%	7.428.451.232,00	100%	9.620.034.065,00	100%	25.816.965.097,00	Dinas Kesehatan
X.XX.01.0.00.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD	N/A	-	-	-	-	35%	10.000.000.000,00	40%	15.000.000.000,00	50%	20.000.000.000,00	50%	45.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	N/A	-	-	-	-	100%	22.956.487.515,00	100%	24.133.946.750,00	100%	28.296.175.965,00	100%	75.386.610.230,00	Dinas Kesehatan

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.03.0.00.00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Medis yang berkompeten	N/A	-	-	-	-	87%	8.047.728.320,00	89%	50.000.000,00	90%	1.313.763.780,00	90%	9.411.492.100,00	Dinas Kesehatan
1.02.05.0.00.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase UKBM yang dibina	N/A	-	-	-	-	100%	1.541.468.760,00	100%	8.229.214.000,00	100%	16.852.158.260,00	100%	26.622.841.020,00	Dinas Kesehatan
1.02.04.0.00.00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase sarana kefarmasian dan industri rumah tangga yang dibina diawasi dan memenuhi syarat	N/A	-	-	-	-	70%	449.072.800,00	80%	399.700.000,00	90%	622.000.000,00	90%	1.470.772.800,00	Dinas Kesehatan
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>																
08.00.5.2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Infrastruktur Jalan	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	N/A	89,13%	5.074.131.000,00	89,93%	9.997.889.500,00							89,93%	15.072.020.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
12.00.5.2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Gedung/ Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung	N/A	35,34%	587.890.500,00									35%	587.890.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
13.00.5.2	Program Bina Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten / kota pada sistem informasi pembinaan jasa konstruksi (SIP/JAKI)	N/A	36,20%	1.158.643.900									36%	1.158.643.900,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
58.00.5.2	Program Penyelenggaraan Pengujian Mutu Bahan dan Alat Berat	Persentase jumlah pengujian yang diproses sesuai SOP	N/A	100%	628.236.600,00									100%	628.236.600,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
47.00.5.2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Malang	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Prioritas di Kota Malang	N/A	1,27%	2.697.551.200,00									9%	2.697.551.200,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
09.00.5.2	Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan	Persentase jembatan kota dalam kondisi baik	N/A	94,90%	6.931.786.000,00									95,24%	6.931.786.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
14.00.5.2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Kota Malang	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	N/A	90,21%	4.551.512.860,00									94,16%	4.551.512.860,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
23.00.5.2	Program Perencanaan, Pembangunan, Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	N/A	44,40%	1.069.460.000,00									44%	1.069.460.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
26.00.5.2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah di Kota Malang	Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	85%	84,86%	11.211.451.052,00									85,47%	11.211.451.052,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
32.00.5.2	Program Perencanaan Ruang	Persentase dokumen perencanaan dan sistem informasi tata ruang	N/A	80%	318.076.000,00									100%	318.076.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
37.00.5.2	Program Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	Persentase gedung milik daerah yang menjadi kewenangan dinas dalam kondisi baik	81,87%	84,70%	5.968.612.466,83									100,00%	5.968.612.466,83	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
38.00.5.2	Program Perencanaan, Pembangunan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase	Persentase drainase kota dalam kondisi baik	82,73%	82,50%	16.051.723.495,00									84,52%	16.051.723.495,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase penurunan titik genangan air	N/A	28%												
56.00.5.2	Program Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase jumlah pelanggaran tata ruang yang tertangani	100%	80%	133.385.000,00									89%	133.385.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
57.00.5.2	Program Pemanfaatan Tata Ruang	Persentase pelayanan keterangan rencana kota sesuai SOP	N/A	80%	186.377.850,00										186.377.850,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
07.00.5.2	Program Perencanaan Pembangunan/ Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Pedestrian	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	N/A	89,13%	55.987.587.663,86									96,91%	55.987.587.663,86	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
11.00.5.2	Program Pengembangan/Rehabilitasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	60%	100%	746.912.000,00									100%	746.912.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
59.00.5.2	Program Bina Marga	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	N/A			91,18%	198.400.834.620,00							91,18%	198.400.834.620,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase jembatan kota dalam kondisi baik	N/A			96,09%								96,09%		
		Persentase fasilitas penerangan jalan	N/A			67,23%								67,23%		
		Persentase drainase kota dalam kondisi baik	82,73%			83,01%								83,01%		
		Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	60%			90%								90,00%		
		Persentase jalan yang memiliki jalur pejalan kaki	N/A			89,93%								89,93%		
61.00.5.2	Program Cipta Karya	Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung	20%	100%	120.478.399.093,00									100%	120.478.399.093,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase pembangunan kawasan prioritas sesuai RTBL	N/A			5%								5%		
		Persentase rumah tinggal berakses air bersih	93,12%			93,71%								93,71%		
		Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	84,41%			85,02%								85,02%		
63.00.5.2	Program Penataan Ruang dan pertanahan	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	N/A	100%	1.244.895.000,00									100,00%	1.244.895.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase pemanfaatan SIPR dalam pemanfaatan ruang	N/A	7%										7,00%		
62.00.5.2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Saluran Air Limbah	Persentase infrastruktur air limbah dalam kondisi baik	N/A	85,02%	1.411.432.150,00									85,02%	1.411.432.150,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.06.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase kota dalam kondisi baik	82,73%	-	-	83,51%	25.601.154.115,00	84,01%	54.100.867.200,00	84,52%	26.926.397.541,00	84,52%	106.628.418.856,00			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.10.0.00.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	N/A	-	-	92,41%	161.237.295.194,00	94,46%	52.715.585.700,00	96,91%	160.617.600.000,00	96,91%	374.570.480.894,00			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase jalan yang memiliki jalur pejalan kaki	N/A	-	-	91,53%		93,14%		94,74%		94,74%		94,74%		
		Persentase jembatan kota dalam kondisi baik	N/A	-	-	92,06%		93,65%		95,24%		95,24%		95,24%		
		Persentase fasilitas penerangan jalan	N/A	-	-	61,73%		63,55%		70,41%		70,41%		70,41%		
1.03.02.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	60%	-	-	90%	2.782.969.780,00	95%	1.760.000.000,00	100%	120.000.000,00	100%	4.662.969.780,00			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung	N/A	-	-	24,44%		47,45%		71,45%		71,45%		71,45%		
1.03.08.0.00.00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung	20%	-	-	100%	38.735.552.444,00	100%	93.717.248.787,00	100%	122.860.260.972,00	100%	255.313.062.203,00			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase gedung milik daerah yang menjadi kewenangan dinas dalam kondisi baik	81,87%	-	-	-	-	89,87%	-	94,93%	-	100,00%	-	100,00%	-	dan Kawasan Permukiman
1.03.11.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	N/A	-	-	-	-	78%	710.741.336,00	89%	900.000.000,00	100%	1.684.898.299,00	100%	3.295.639.635,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.09.0.00.00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase pembangunan kawasan prioritas sesuai RTBL	N/A	-	-	-	-	5%	1.207.500.488,00	7%	6.900.000.000,00	9%	1.504.912.500,00	9%	9.612.412.988,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.03.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	93,12%	-	-	-	-	94,01%	7.010.705.000,00	94,01%	4.650.000.000,00	94,16%	11.700.000.000,00	94,16%	23.360.705.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.05.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	84,41%	-	-	-	-	85,17%	14.151.690.410,00	85,32%	10.653.582.000,00	85,47%	27.846.000.000,00	85,47%	52.651.272.410,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.12.0.00.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	N/A	-	-	-	-	100%	1.791.132.568,00	100%	3.072.880.000,00	100%	3.762.150.000,00	100%	8.626.162.568,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase pemanfaatan SIPR dalam pemanfaatan ruang	N/A	-	-	-	-	85%	-	87%	-	89%	-	89%	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>																
08.00.5.2	Program Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	Persentase Penindakan Pelanggaran Hunian yang tidak Sesuai Peraturannya	N/A	100%	2.276.209.248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.276.209.248,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
21.00.5.2	Program Penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Rekomendasi Ijin Lokasi	N/A	100%	110.953.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.953.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
10.00.5.2	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase luas RTH Publik yang dikelola	N/A	8,17%	15.259.521.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,23%	15.259.521.150,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
09.00.5.2	Program Pengelolaan Penerangan Jalan	Persentase fasilitas penerangan jalan	N/A	56,13%	8.584.096.543,00	-	-	-	-	-	-	-	-	70,41%	8.584.096.543,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
11.00.5.2	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase luasan makam terkelola	100%	100%	1.024.446.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.024.446.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
07.00.5.2	Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	N/A	50%	6.413.426.325,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	6.413.426.325,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
12.00.5.2	Program Penataan Perumahan dan kawasan permukiman	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	N/A	-	-	55%	13.548.743.755,00	-	-	-	-	-	-	55%	13.548.743.755,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau	N/A	-	-	55%	-	-	-	-	-	-	-	55%	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni	N/A	-	-	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	0,19%	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05.0.00.00	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	N/A	-	-	-	-	55%	596.070.000,00	63,76%	351.500.000,00	80%	4.603.929.000,00	80%	5.551.499.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.07.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau	N/A	-	-	-	-	65%	13.293.994.493,00	75%	12.234.262.500,00	80%	9.663.060.000,00	80%	35.191.316.993,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase penanganan infrastruktur permukiman	N/A	-	-	-	-	25%	-	47,50%	-	65,88%	-	65,88%	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.04.02.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	N/A	-	-	-	-	0,10%	3.785.857.000,00	0,04%	3.408.750.000,00	0,00%	4.193.000.000,00	0,00%	11.387.607.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03.0.00.00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan area kawasan kumuh	N/A	-	-	-	-	69,17%	99.773.000,00	72,13%	282.370.000,00	73,61%	256.700.000,00	73,61%	638.843.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>																
15.00.5.2	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari	N/A	100%	5.528.041.723,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	5.528.041.723,00	Satuan Polisi Pamong Praja
18.00.5.2	Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas	Persentase Pos Kamling yang digunakan	N/A	96%	4.952.895.915,00	-	-	-	-	-	-	-	-	96%	4.952.895.915,00	Satuan Polisi Pamong Praja
19.00.5.2	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase potensi satuan linmas	N/A	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	Satuan Polisi Pamong Praja
19.00.5.2	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	N/A	100%	2.374.371.885,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.374.371.885,00	Satuan Polisi Pamong Praja
16.00.5.2	Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Persentase penanganan pelanggaran Perda	N/A	100%	1.546.997.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.546.997.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
17.00.5.2	Program Pembinaan Polisi Pamong Praja	Persentase anggota Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti pelatihan teknis	N/A	90%	673.940.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	673.940.650,00	Satuan Polisi Pamong Praja
20.00.5.2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari	N/A	-	-	95%	4.015.084.500,00	-	-	-	-	-	-	95%	4.015.084.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
21.00.5.2	Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Persentase penanganan pelanggaran Perda	N/A	-	-	100%	882.395.000,00	-	-	-	-	-	-	100%	882.395.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
22.00.5.2	Program Perlindungan Masyarakat	Rasio Poskamling per RW	N/A	-	-	100%	5.158.984.138,00	-	-	-	-	-	-	100%	5.158.984.138,00	Satuan Polisi Pamong Praja
22.00.5.2	Program Perlindungan Masyarakat	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	N/A	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	Satuan Polisi Pamong Praja
15.00.5.2	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat tangguh bencana	N/A	5%	1.089.325.240,00	10%	654.573.000,00	-	-	-	-	-	-	5%	1.743.898.240,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15.00.5.2	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase kejadian bencana pada titik pantau	N/A	30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16.00.5.2	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Rata - rata waktu tanggap (respon time) bencana	N/A	< 1 Jam	2.194.178.910,00	< 1 Jam	892.596.000,00	-	-	-	-	-	-	< 1 Jam	3.086.774.910,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16.00.5.2	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	N/A	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17.00.5.2	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase tertanganinya infrastruktur yang rusak pasca bencana	N/A	30%	1.867.784.375,00	30%	1.131.667.400,00	-	-	-	-	-	-	30%	2.999.451.775,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17.00.5.2	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase pulihnya kondisi sosial ekonomi, budaya dan psikologis korban bencana	N/A	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02.0.00.00	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari	N/A	-	-	-	-	2,4	3.254.285.000,00	2,4	5.000.000.000,00	3	5.560.689.200,00	3	13.814.974.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.0.00.00	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan pelanggaran Perda	N/A	-	-	-	-	100%	705.930.000,00	100%	828.114.520,00	100%	1.573.834.600,00	100%	3.107.879.120,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.0.00.00	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rasio Poskamling per RW	N/A	-	-	-	-	2	7.152.176.672,00	2	-	2	-	2	7.152.176.672,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04.0.00.00	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	N/A	-	-	-	-	100%	1.695.926.360,00	100%	2.289.204.824,00	100%	3.485.686.600,00	100%	7.470.817.784,00	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.05.03.0.00.00	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	113,6	-	-	-	-	95	3.106.492.898,00	90	2.290.713.750,00	85	8.075.000.000,00	85	13.472.206.648,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Rata - rata waktu tanggap (respon time) bencana	N/A	-	-	-	-	< 1 Jam	-	< 1 Jam	-	< 1 Jam	-	< 1 Jam	-		
		Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	N/A	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
17.00.5.2	Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan kebutuhan pokok	N/A	54,30%	4.071.585.430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,28%	4.071.585.430,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
18.00.5.2	Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase jumlah PMKS yang mendapat bantuan dan perlindungan sosial	N/A	53,71%	1.782.405.808,00	-	-	-	-	-	-	-	-	53,71%	1.782.405.808,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
16.00.5.2	Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara dengan baik	100%	100%	407.409.438,13	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	407.409.438,13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
15.00.5.2	Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan	N/A	0,02%	12.510.121.767,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02%	12.510.121.767,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
		Persentase jumlah lembaga dan/atau perseorangan yang berperan aktif sebagai potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan	N/A	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		
		Persentase PMKS Fakir Miskin yang mendapat bantuankebutuhan dasar	N/A	5,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,59%		-
19.00.5.2	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	N/A	-	-	51,19%	1.829.546.667,39	-	-	-	-	-	-	51,19%	1.829.546.667,39	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	N/A	-	-	13,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	13,28%		-
		Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara dengan baik	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		-
20.00.5.2	Program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya	N/A	-	-	14,24%	11.180.227.032,45	-	-	-	-	-	-	14,24%	11.180.227.032,45	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	N/A	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		-
1.06.07.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara dengan baik	100%	-	-	-	-	100%	706.338.100,00	100%	243.082.700,00	100%	579.702.137,00	100%	1.529.122.937,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
1.06.05.0.00.00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	N/A	-	-	-	-	51,52%	1.931.814.760,00	51,84%	375.000.000,00	52,15%	2.126.712.250,00	52,15%	4.433.527.010,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	



Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.02.0.00.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	N/A	-	-	-	-	13,28%	1.127.197.900,00	13,28%	2.443.904.500,00	13,28%	2.200.304.407,00	13,28%	5.771.406.807,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.06.04.0.00.00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	N/A	-	-	-	-	14,21%	20.408.595.197,00	14,25%	13.322.580.801,00	14,26%	22.819.853.682,00	14,26%	56.551.029.680,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1.06.06.0.00.00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	-	-	-	-	100%	252.016.093,00	100%	168.625.052,00	100%	377.227.462,00	100%	797.868.607,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
<b>Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>																
<b>Tenaga Kerja</b>																
15.00.5.2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	N/A	1%	575.478.450,00	1%	69.040.800,00	-	-	-	-	-	-	1%	644.519.250,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18.00.5.2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas	persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	N/A	50,23%	445.954.636,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,23%	445.954.636,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.00.5.2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan kesempatan kerja	N/A	45%	425.255.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	45%	425.255.350,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19.00.5.2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Ketenagakerjaan Sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan lapangan kerja	N/A	5%	671.501.067,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	671.501.067,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16.00.5.2	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	N/A	70%	825.887.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	70%	825.887.600,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.00.5.2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas	Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	N/A	-	-	55%	23.839.559,00	-	-	-	-	-	-	-	23.839.559,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21.00.5.2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	N/A	-	-	75%	153.240.625,00	-	-	-	-	-	-	75%	153.240.625,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	N/A	-	-	62%	-	-	-	-	-	-	-	62%	-	
2.07.03.0.00.00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	N/A	-	-	1%	700.000.000,00	1%	384.532.000,00	1%	1.031.671.000,00	1%	1.031.671.000,00	1%	2.116.203.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	N/A	-	-	60%	-	65%	123.521.550,00	70%	337.748.000,00	70%	461.269.550,00			
2.07.04.0.00.00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang ditempatkan	N/A	-	-	76%	32.099.900,00	77%	85.000.000,00	78%	789.320.000,00	78%	906.419.900,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.07.05.0.00.00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	N/A	-	-	-	-	5,12%	350.775.000,00	10,18%	255.000.000,00	11,3%	934.997.000,00	11,3%	1.540.772.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																
15.00.5.2	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase organisasi perempuan yang aktif	N/A	93%	1.410.453.819,00	-	-	-	-	-	-	-	-	93%	1.410.453.819,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	N/A	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	
16.00.5.2	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Perempuan dan anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	794.351.113,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	794.351.113,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
15.00.5.2	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase organisasi perempuan yang aktif	N/A	-	-	93%	686.008.520,00	-	-	-	-	-	-	-	686.008.520,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		Persentase Perangkat daerah yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	N/A	-	-	75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.00.5.2	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Perempuan dan anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	-	-	100%	579.606.150,00	-	-	-	-	-	-	100%	579.606.150,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
2.08.05.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	N/A	-	-	-	-	88%	358.459.900,00	100%	-	100%	477.404.646,00	100%	835.864.546,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
2.08.04.0.00.00	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Ibu Rumah Tangga yang mendapatkan peningkatan kualitas keluarga	N/A	-	-	-	-	0,02%	156.760.000,00	0,05%	568.614.000,00	0,06%	208.293.750,00	0,06%	933.667.750,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
2.08.02.0.00.00	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi perempuan yang aktif	N/A	-	-	-	-	96,50%	509.436.760,00	96,50%	402.500.000,00	96,50%	846.805.082,00	96,50%	1.758.741.842,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
2.08.03.0.00.00	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	N/A	-	-	-	-	100%	300.619.300,00	100%	132.262.000,00	100%	965.091.730,00	100%	1.397.973.030,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.08.07.0.00.00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	N/A	-	-	-	-	100%	879.218.076,00	100%	368.167.900,00	100%	773.351.448,00	100%	2.020.737.424,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
	<b>Pangan</b>															
15.00.5.2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase peningkatan kecukupan pangan	N/A	2%	417.041.457,00									2%	417.041.457,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
16.00.5.2	Program Pengembangan Penganekaragaman, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Persentase Pengembangan Penganekaragaman, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	N/A	2%	492.152.000,00									2%	492.152.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
15.00.5.2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan pangan utama	N/A			2%	729.748.575,00							2%	729.748.575,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03.0.00.00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras	N/A					0,093	2.158.058.020,00	0,096	1.911.520.000,00	0,099	2.295.768.267,00	0,099	6.365.346.287,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.05.0.00.00	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang layak konsumsi	N/A					2%	122.800.000,00	2%	90.000.000,00	2%	55.000.000,00	6%	267.800.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	<b>Pertanian</b>															
2.10.08.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase kelurahan yang sudah terinventarisir tanah kosong dalam data base	N/A	-	-	-	-	3,51%	100.000.000,00	7,02%	100.000.000,00	10,53%	300.000.000,00	10,53%	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	<b>Lingkungan Hidup</b>															
16.00.5.2	Program Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Persentase Kemitraan/ Kerjasama yang terjalin dengan Dinas Lingkungan Hidup	N/A	75%	426.817.030,00									10%	426.817.030,00	Dinas Lingkungan Hidup
21.00.5.2	Program Peningkatan Pelayanan laboratorium lingkungan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Laboratorium	N/A	79	1.799.351.011,37										1.799.351.011,37	
15.00.5.2	Program Pengembangan Tata Lingkungan Hidup	Persentase dokumen lingkungan hidup yang disetujui	N/A	100%	509.916.300,00									85%	509.916.300,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase kajian yang dilaksanakan	N/A	80%												Dinas Lingkungan Hidup
17.00.5.2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Nilai rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) bidang Pelayanan Kebersihan	N/A	80,6	17.507.196.740,00									80,6	17.507.196.740,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase penduduk yang dilayani pengangkutan sampah	N/A	77,51%										77,51%		
18.00.5.2	Program Peningkatan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Persentase menurunnya pelanggaran di bidang lingkungan hidup	N/A	12%	511.007.000,00										511.007.000,00	
19.00.5.2	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase masyarakat yang peduli lingkungan	N/A	50%	306.094.500,00									28%	306.094.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
20.00.5.2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kegiatan/Usaha yang melaksanakan pengendalian air dan B3	N/A	20%	592.442.100,00										592.442.100,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase kegiatan pengendalian lingkungan yang terlaksana	N/A	60%												Dinas Lingkungan Hidup
22.00.5.2	Program Peningkatan Kapasitas Pengolahan sampah	Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah di TPS dan PKD	N/A	50%	2.056.493.650,00									75%	2.056.493.650,00	Dinas Lingkungan Hidup
23.00.5.2	Program Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Persentase sampah yang terolah di TPA	N/A	77,50%	4.818.666.600,00										4.818.666.600,00	Dinas Lingkungan Hidup
25.00.5.2	Program Pengurangan dan Penanganan Sampah	Persentase Masyarakat/Lembaga yang melakukan Pengolahan Sampah	N/A	20%	514.730.900,00										514.730.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
26.00.5.2	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional Persampahan	Persentase Kendaraan Operasional Persampahan yang Laik Jalan	N/A	90%	900.514.852,00										900.514.852,00	Dinas Lingkungan Hidup
30.00.5.2	Program Penataan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun dan sesuai standar	N/A	-	-	85%	1.018.165.789,00							85%	1.018.165.789,00	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28.00.5.2	Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Persentase Pengurangan Sampah yang berkurang di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai kumulatif)	N/A			22%	17.940.554.327,00							22%	17.940.554.327,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Penanganan Sampah	N/A			75%								75%		
10.00.5.2	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase luas RTH Publik yang dikelola dari luas wilayah kota /kawasan perkotaan	8%			8,23%	10.422.830.060,00							8,23%	10.422.830.060,00	Dinas Lingkungan Hidup
29.00.5.2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah yang berkurang di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai kumulatif)	N/A				1.437.040.196,54								1.437.040.196,54	
		Persentase Penanganan Sampah	N/A													
27.00.5.2	Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan Masyarakat dan Kegiatan/Usaha Pemilik Izin Lingkungan	N/A			12%	665.433.500,00							12%	665.433.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Komunitas Berbudaya Lingkungan di Kota Malang	N/A			30%								30,00%		
2.11.02.0.00.00	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun dan sesuai standar	N/A					100%	622.711.400,00	100%	75.000.000,00	100%	2.000.000.000,00	100%	2.697.711.400,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06.0.00.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Masyarakat dan Kegiatan/Usaha Pemilik Izin Lingkungan	N/A					20%	220.805.000,00	22%	339.324.900,00	25%	875.000.000,00	25%	1.435.129.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.0.00.00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	N/A					64,81%	1.201.341.208,00	64,81%	491.640.000,00	64,81%	2.550.000.000,00	64,81%	4.242.981.208,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah yang berkurang di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai kumulatif)	N/A					24%	16.116.719.104,00	26%	25.274.482.099,00	27%	19.678.000.000,00	27%	61.069.201.203,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Penanganan Sampah	N/A					74%		73%		72%		72%		
2.11.05.0.00.00	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	persentase pelaku usaha yang sudah melakukan pengelolaan limbah B3	5%					20%	4.000.000,00	23%	19.950.000,00	25%	115.000.000,00	25%	138.950.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik yang dikelola	N/A					0,87%	24.530.816.832,00	0,87%	14.547.804.000,00	0,87%	30.554.500.000,00	0,87%	69.633.120.832,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10.0.00.00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang terselesaikan	N/A					90%	44.525.000,00	90%	71.228.000,00	90%	200.000.000,00	90%	315.753.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08.0.00.00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Komunitas Berbudaya Lingkungan di Kota Malang	N/A					45,00%	735.962.000,00	47,00%	153.797.000,00	47,50%	525.000.000,00	47,50%	1.414.759.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09.0.00.00	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai baik	N/A					-	-	31,82%	137.650.000,00	33,33%	450.000.000,00	33,33%	587.650.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>															
15.00.5.2	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	N/A	95%	2.741.038.627,00	95,5%	2.613.942.224,00							95%	5.354.980.851,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.00.5.2	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi pencatatan sipil	N/A	90%	2.401.671.783,00	91%	2.449.037.452,00							90%	4.850.709.235,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17.00.5.2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase penduduk yang telah tertib administrasi kependudukan.	N/A	90%	830.711.800,00	90%	326.947.000,00							90%	1.157.658.800,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.0.00.00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	N/A					96%	1.111.449.000,00	96,5%	1.176.878.000,00	97%	1.344.891.000,00	97%	3.633.218.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.0.00.00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi pencatatan sipil	N/A					92%	1.592.346.900,00	93%	1.636.022.000,00	94%	1.941.191.000,00	94%	5.169.559.900,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penduduk yang telah tertib administrasi kependudukan.	N/A					92%	232.807.000,00	94%	309.208.500,00	96%	293.254.000,00	96%	835.269.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data hasil pelayanan selama satu tahun	N/A					100%	55.000.000,00	100%	60.500.000,00	100%	66.550.000,00	100%	182.050.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>																
15.00.5.2	Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur	N/A	77,49	417.432.000,00									1,65	417.432.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
16.00.5.2	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB Aktif	N/A	75,2	2.901.234.475,00									75,2	2.901.234.475,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
17.00.5.2	Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok UPPKS aktif	N/A	94,55%	1.593.302.349,00										1.593.302.349,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
18.00.5.2	Program Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia	Persentase keluarga balita, keluarga remaja, lansia yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	N/A	16,59%	453.658.400,00									67%	453.658.400,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
19.00.5.2	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	N/A			1,67	2.892.157.959,00							1,67	2.892.157.959,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		Cakupan peserta KB Aktif	N/A			75,4								75,4		
		Persentase keluarga kelompok kegiatan Tribina aktif	N/A			67,5%								67,5%		
		persentase kelompok UPPKS Aktif	N/A			94,64%							94,64%			
2.14.02.0.00.00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	N/A					1,70	246.034.830,00	1,74	220.000.000,00	1,74	822.031.350,50	1,74	1.288.066.180,50	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
2.14.03.0.00.00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	N/A					75,6	3.121.485.600,00	75,0	6.852.251.000,00	75,5	2.803.343.718,50	75,5	12.777.080.318,50	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
2.14.04.0.00.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga kelompok kegiatan Tribina aktif	N/A					68%	2.214.539.500,00	85,5%	2.432.300.000,00	86%	3.154.439.939,00	86%	7.801.279.439,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		persentase kelompok UPPKS Aktif	N/A					94,74%		92,50%		92,75%		92,75%		Keluarga Berencana
	<b>Perhubungan</b>															
08.00.5.2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	persentase penurunan titik kemacetan	N/A	73%	1.458.031.629,00									73%	1.458.031.629,00	Dinas Perhubungan
27.00.5.2	Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran	Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD	N/A	1,01%	1.043.672.500,00									1,01%	1.043.672.500,00	Dinas Perhubungan
09.00.5.2	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase menurunnya pelanggaran laik jalan kendaraan orang dan barang	N/A	1%	2.059.812.324,00									1%	2.059.812.324,00	Dinas Perhubungan
10.00.5.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kota	N/A	100%	885.498.600,00									100%	885.498.600,00	Dinas Perhubungan
21.00.5.2	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Ruas Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan Lalu Lintas	N/A	61%	7.467.329.562,00									61%	7.467.329.562,00	Dinas Perhubungan
25.00.5.2	Program Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	N/A	13,86%	1.604.763.000,00									13,86%	1.604.763.000,00	Dinas Perhubungan
28.00.5.2	Program Pengendalian Lalu Lintas	persentase penurunan titik kemacetan	N/A			68%	10.221.863.389,00							68%	10.221.863.389,00	Dinas Perhubungan
29.00.5.2	Program Pengelolaan perparkiran	Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD	N/A			1,01%	1.187.319.000,00							1,01%	1.187.319.000,00	Dinas Perhubungan
29.00.5.2	Program Pelayanan Angkutan Darat	Persentase layanan angkutan darat	N/A			65%	2.986.365.670,00							65%	2.986.365.670,00	Dinas Perhubungan
		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	N/A			13,00%								13,00%	-	
2.15.02.0.00.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	persentase penurunan titik kemacetan	N/A					12%	9.544.936.185,00	9%	5.405.120.071,00	10%	27.168.876.075,00	10%	42.118.932.331,00	Dinas Perhubungan
		Persentase layanan angkutan darat (jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat)	N/A					26,78%						27,30%	-	
		Load Factor	N/A					-						63,00%	-	
		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	N/A					12,17%						85,50%	-	
		Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD	N/A					1,01%	6.719.966.900,00	1,03%	5.251.219.281,00	1,05%	15.504.184.920,00	1,05%	27.475.371.101,00	Dinas Perhubungan
	<b>Komunikasi dan Informatika</b>															
15.00.5.2	Program Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik	Persentase pengelolaan informasi publik	N/A	100%	3.117.064.751,00									79,00%	3.117.064.751,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.00.5.2	Program Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi dengan jaringan komunikasi publik	N/A	100%	1.358.689.598,00									52,94%	1.358.689.598,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
16.00.5.2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi informasi yang terintegrasi	N/A	6,52%	13.527.340.892,00	12,24%	11.506.156.601,00							12,24%	25.033.497.493,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
18.00.5.2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi yang terlayani dan terpublikasi	N/A			81,00%	1.917.754.871,00							81,00%	1.917.754.871,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	N/A			55,65%	-							55,65%	-	
2.16.02.0.00.00	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah/pemprov/pemda	N/A					70,00%	6.805.133.000,00	71,00%	3.099.301.332,00	72,00%	10.631.200.000,00	72,00%	20.535.634.332,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.0.00.00	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi informasi yang terintegrasi	N/A					89,09%	19.402.669.145,00	94,55%	10.596.206.223,00	100%	27.075.923.050,00	100%	57.074.798.418,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>															
15.00.5.2	Program Pengembangan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang dibina	N/A	72,16%	1.558.354.294,00									72,16%	1.558.354.294,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
16.00.5.2	Program Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi yang dinilai sehat	N/A	37,67%	464.660.400,00									37,67%	464.660.400,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
17.00.5.2	Program pengembangan usaha mikro	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil	N/A	11,22%	1.562.544.084,00									11,22%	1.562.544.084,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18.00.5.2	Program pembinaan lingkungan sosial di bidang Usaha Mikro	Persentase WUB Mikro yang diberdayakan	N/A	14,47%	1.092.067.900,00									14,47%	1.092.067.900,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
19.00.5.2	Program Pembinaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	N/A			79,85%	875.452.976,96							79,85%	875.452.976,96	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
17.00.5.2	Program pengembangan usaha mikro	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil	N/A	40,79%	635.010.750,00									40,79%	635.010.750,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
18.00.5.2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Usaha Mikro	Persentase WUB Mikro yang diberdayakan	N/A	22,91%	517.464.960,00									22,91%	517.464.960,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.03.0.00.00	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	N/A			48,88%	59.040.078,00	52,70%	132.523.000,00	57,97%	409.606.700,00	57,97%	601.169.778,00			Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.05.0.00.00	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang dididik dan dilatih	N/A			56,65%	833.643.599,00	62,00%	495.597.800,00	68,51%	907.913.100,00	68,51%	2.237.154.499,00			Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.06.0.00.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	N/A			57,97%	349.754.210,00	67,19%	294.967.000,00	73,78%	914.214.800,00	73,78%	1.558.936.010,00			Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.04.0.00.00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP	N/A			83,96%	187.406.912,00	88,55%	200.450.000,00	91%	486.453.100,00	91%	874.310.012,00			Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.08.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil	N/A			3,40%	2.867.359.640,00	3,50%	188.051.200,00	3,60%	1.478.378.700,00	3,60%	4.533.789.540,00			Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.07.0.00.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase WUB Mikro yang diberdayakan	N/A			4,90%	1.716.833.400,00	5,18%	2.608.125.900,00	5,46%	5.314.911.295,00	5,46%	9.639.870.595,00			Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	<b>Penanaman Modal</b>															
16.00.5.2	Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal	Persentase ketaatan pelaku investasi terhadap peraturan Perundang-undangan	N/A	60%	299.443.654,00									20%	299.443.654,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.00.5.2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kebijakan penanaman modal yang ditindak lanjuti	N/A	20%	457.486.832,00									20%	457.486.832,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.00.5.2	Program Pengolahan Data dan Informasi	Persentase tersedianya data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	N/A	80%	400.308.750,00									12%	400.308.750,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18.00.5.2	Program Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	Persentase kesesuaian layanan non perizinan yang diterbitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	N/A	100%	275.160.000,00									75%	275.160.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19.00.5.2	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Persentase kesesuaian layanan perizinan yang diterbitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	N/A	100%	807.215.000,00									75%	807.215.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.00.5.2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah minat investor	N/A			30%	781.270.000,00							30%	781.270.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21.00.5.2	Program Pengendalian, Data dan Informasi	persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	N/A			15,00%	435.625.000,00							15,00%	435.625.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22.00.5.2	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	persentase penerbitan ijin dan non izin ekonomi, pariwisata dan sosial budaya	N/A			82,5%	140.000.000,00							82,5%	140.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23.00.5.2	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum	Persentase penerbitan ijin dan non ijin pekerjaan umum	N/A			82,50%	1.490.601.800,00							82,50%	1.490.601.800,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase realisasi target retribusi IMB	N/A			100,00%	-							100,00%	-	

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.18.02.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi penanaman modal	N/A					70%	134.695.500,00	75%	100.000.000,00	80%	270.512.000,00	80%	505.207.500,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03.0.00.00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah minat investor	N/A					40%	-	50%	110.000.000,00	60%	66.365.000,00	60%	176.365.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	N/A					80%	179.469.724,00	90%	197.000.000,00	100%	217.158.000,00	100%	593.627.724,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.0.00.00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	N/A					70%	468.312.900,00	75,00%	469.415.000,00	80%	566.659.000,00	80%	1.504.386.900,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.0.00.00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	persentase penerbitan ijin dan non ijin ekonomi, pariwisata dan sosial budaya	N/A					85%	436.365.952,00	87,50%	850.000.000,00	90%	570.000.000,00	90%	1.856.365.952,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase penerbitan ijin dan non ijin pekerjaan umum	N/A					85%	500.000.000,00	87,50%	347.246.450,00	90%	807.475.000,00	90%	1.654.721.450,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase realisasi target retribusi IMB	N/A					100%		100,00%	150.000.000,00	100%	660.000.000,00	100%	810.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>																
18.00.5.2	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	N/A	0,10%	771.310.200,00									0,10%	771.310.200,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
15.00.5.2	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	0,18%	1%	1.628.897.804,00									1%	1.628.897.804,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
16.00.5.2	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Capaian kegiatan pembinaan kewirausahaan pemuda	N/A	60%	456.622.500,00										456.622.500,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
17.00.5.2	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	persentase cabor berprestasi	N/A	4,00%	1.071.235.813,00									4,00%	1.071.235.813,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
19.00.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Capaian kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga	N/A	90%	2.573.682.854,45										2.573.682.854,45	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
20.00.5.2	Program Pembinaan Kepemudaan	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	0,18%			1%	524.545.500,00							1%	524.545.500,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
21.00.5.2	Program Pembinaan Keolahragaan	persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	N/A			0,12%	5.037.343.440,00							0,12%	5.037.343.440,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		persentase cabor berprestasi	N/A			5,00%								5,00%		
2.19.02.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	0,18%			1%	1.447.837.580,00			1%	1.544.715.000,00	1%	1.980.000.000,00	1%	4.972.552.580,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.19.04.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang	N/A					11,50%	600.000.000,00	11,80%	500.000.000,00	12,10%	550.000.000,00	12,10%	1.650.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.19.03.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	N/A					0,14%	6.049.288.159,00	0,15%	11.246.077.602,00	0,16%	2.310.253.088,00	0,16%	19.605.618.849,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		persentase cabor berprestasi	N/A					5,0%	10.437.789.700,00	5,0%	15.000.000.000,00	5,0%	11.275.000.000,00	5,0%	36.712.789.700,00	
<b>Statistik</b>																
15.00.5.2	Program Pengelolaan Data dan Informasi Statistik	Persentase keterisian e-database SIPD	N/A	80%	948.228.800,00									80%	948.228.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
16.00.5.2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase keterisian e-database SIPD	N/A			82%	690.308.695,00							82%	690.308.695,00	Dinas Komunikasi dan Informatika





Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>															
18.00.5.2	Pengembangan Potensi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	N/A	5%	905.080.500,00									5,0%	905.080.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
19.00.5.2	Program Peningkatan Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	N/A			5%	909.799.500,00							5%	909.799.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.04.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan	N/A					2,50%	1.408.300.525,00	2,50%	1.952.868.000,00	2,50%	967.169.500,00	2,50%	4.328.338.025,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.06.0.00.00	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penambahan jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi persyaratan dan standar	N/A					13 pelaku usaha	338.999.980,00	13 pelaku usaha	180.000.000,00	13 pelaku usaha	100.294.700,00	13 pelaku usaha	619.294.680,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	<b>Pariwisata</b>															
15.00.5.2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase meningkatnya pelaku ekonomi kreatif yang dibina	N/A	29,92%	1.370.558.009,00									50%	1.370.558.009,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
16.00.5.2	Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dibina	N/A	15%	2.247.522.757,00									65%	2.247.522.757,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Persentase pelaku usaha sektor pariwisata yang dibina	N/A	25%										60%		
17.00.5.2	Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dibina	N/A			25%	1.322.974.414,83							25%	1.322.974.414,83	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Persentase industri pariwisata yang dibina	N/A			30%								30%		
18.00.5.2	Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	N/A			25%	313.118.900,00							25%	313.118.900,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Persentase pemasaran Pariwisata	N/A			45%								45%		
3.26.02.0.00.00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang dibina	N/A					55%	1.554.169.000,00	60%	3.975.080.000,00	65%	4.013.779.000,00	65%	9.543.028.000,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		persentase industri pariwisata yang dibina	N/A					32%	69.500.000,00	48%	79.880.000,00	60%	100.072.500,00	60%	249.452.500,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
3.26.05.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	persentase pengembangan ekonomi kreatif	N/A					30%	1.005.436.500,00	40%	1.930.447.580,00	50%	1.640.100.000,00	50%	4.575.984.080,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
3.26.03.0.00.00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	persentase pemasaran Pariwisata	N/A					50%	469.658.000,00	52%	100.000.000,00	60%	174.900.000,00	60%	744.558.000,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
3.26.04.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI	N/A					-	-	14%	40.000.000,00	16%	55.000.000,00	16%	95.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
	<b>Pertanian</b>															
17.00.5.2	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	N/A	5%	218.328.980,00									15%	218.328.980,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
18.00.5.2	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	N/A	2%	380.126.000,00									2%	380.126.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
51.00.5.2	Program Peningkatan Produksi Tanaman	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman	N/A	0,50%	730.642.200,00									2%	730.642.200,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
20.00.5.2	Program Peningkatan Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	N/A			2%	353.305.250,00							2%	353.305.250,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
21.00.5.2	Program Peningkatan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persentase peningkatan produksi peternakan	N/A			2%	266.891.100,00							2%	266.891.100,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase peningkatan pemeriksaan sampel pangan asal hewan	N/A			15%								15%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase peningkatan pelayanan kesehatan hewan	N/A			2%								2%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03.0.00.00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik	N/A					79%	-	81%	200.000.000,00	83%	80.000.000,00	83%	280.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.02.0.00.00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi peternakan	N/A					-		-	240.343.000,00	-		-	240.343.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah produksi peternakan	N/A					22000 ton	64.853.000,00	22000 ton	34.441.000,00	22000 ton	83.490.000,00	66000 ton	182.784.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase peningkatan produksi pertanian	N/A					-	-	-	-	-	-	2%	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah produksi pertanian	N/A					63534,15 ton	350.715.000,00	64169,49 ton	224.309.000,00	64611,19 ton	508.652.500,00	192314,83 ton	1.083.676.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07.0.00.00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kenaikan Skor Kelompok Tani	N/A					900	169.694.000,00	950	436.266.000,00	1000	73.125.000,00	1000	679.085.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04.0.00.00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan pemeriksaan sampel pangan asal hewan	N/A					2%	200.684.000,00	2%	101.450.000,00	2%	232.688.500,00	2%	534.822.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase peningkatan pelayanan kesehatan hewan	N/A					2%	208.296.509,00	2%	173.550.000,00	2%	397.688.500,00	2%	779.535.009,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
21.00.5.2	Perdagangan Program Pengembangan Usaha Perdagangan	Persentase pedagang yang dibina	N/A	45%	1.289.728.980,00									45%	1.289.728.980,00	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
26.00.5.2	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Cukai)	Jumlah pengawasan barang yang kena cukai ilegal	N/A	12	256.446.500,00									100%	256.446.500,00	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
15.00.5.2	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah pedagang yang memiliki UTP yang sesuai dengan standar	N/A	250	421.200.000,00										421.200.000,00	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
20.00.5.2	Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar	Persentase pemeliharaan pasar rakyat	N/A	100%	19.686.688.056,85									3,85%	19.686.688.056,85	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
22.00.5.2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kemetrolgian	Jumlah alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera	N/A	5000	528.214.301,00										528.214.301,00	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
23.00.5.2	Program Peningkatan Kualitas pelayanan Pasar	Persentase peningkatan jumlah pasar yang bersih, tertib, indah, nyaman dan terpelihara	N/A	100%	421.527.693,00										421.527.693,00	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
25.00.5.2	Program bina perdagangan	Persentase pertumbuhan UKM	N/A			0,50%	2.252.082.433,00							0,50%	2.252.082.433,00	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
26.00.5.2	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Cukai)	Persentase pengawasan barang kena cukai ilegal	N/A			100%	65.866.000,00							100%	65.866.000,00	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
27.00.5.2	Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar	Persentase penetapan pasar rakyat sebagai pasar halal	N/A			8%	21.106.478.465,00							8%	21.106.478.465,00	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06.0.00.00	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Alat UTP yang di Tera dan Tera Ulang	N/A					100%	384.225.900,00	100%	391.570.900,00	100%	876.522.000,00	100%	1.652.318.800,00	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04.0.00.00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	N/A					1,00%	353.145.300,00	1,50%	250.000.000,00	1,75%	416.000.000,00	1,75%	1.019.145.300,00	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.02.0.00.00	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan fasilitas Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	N/A					100,00%	163.510.000,00	100,00%	82.856.400,00	100,00%	360.000.000,00	100,00%	606.366.400,00	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase pertumbuhan UKM	N/A					1,00%		1,25%		1,50%		1,50%		
3.30.07.0.00.00	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk UKM yang difasilitasi dengan promosi/pemasaran	N/A					1,00%	650.736.391,00	1,25%	803.574.800,00	1,50%	1.400.000.000,00	1,50%	2.854.311.191,00	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase pengawasan rokok yang tidak dilekati pita cukai	N/A					100%	150.000.000,00	100%	-	100%	150.000.000,00	100%	300.000.000,00	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitasi pengembangan ekspor	N/A					-	-	-	-	0,70%	250.000.000,00	0,70%	250.000.000,00	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03.0.00.00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	N/A					3,85%	24.815.034.147,00	7,69%	11.715.802.917,00	7,69%	20.430.000.000,00	7,69%	56.960.837.064,00	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
<b>Perindustrian</b>																
20.00.5.2	Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka	Laju pertumbuhan ILMATETTA atas dasar harga konstan	N/A	2,10%	2.622.553.920,91									2%	2.622.553.920,91	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
23.00.5.2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka (Cukai)	Jumlah wira usaha industri baru sektor ILMATETTA	N/A	10	691.258.000,00										691.258.000,00	
21.00.5.2	Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	Laju pertumbuhan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman atas dasar harga konstan	N/A	2,10%	749.403.679,00										749.403.679,00	
25.00.5.2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman (Cukai)	Jumlah wira usaha industri baru sektor agro, kimia, makanan dan minuman	N/A	30%	589.011.242,00									30%	589.011.242,00	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
26.00.5.2	Program Pembinaan Industri (Cukai)	Persentase PDRB IHT terhadap PDRB	N/A	15%	156.712.400,00									15%	156.712.400,00	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
27.00.5.2	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai melalui forum tatap muka (Cukai)	Persentase IHT yang memahami peraturan terbaru di bidang cukai	N/A		59.967.000,00										59.967.000,00	
22.00.5.2	Program Pengembangan Industri Kreatif Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka	Pertumbuhan Industri Kreatif Unggulan ILMATETTA	N/A		2.224.111.000,00										2.224.111.000,00	
24.00.5.2	Program Pengembangan Industri Kreatif Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	Pertumbuhan Industri Kreatif Unggulan Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	N/A		640.429.396,00										640.429.396,00	
27.00.5.2	Program pengembangan industri	Persentase peningkatan jumlah IKM	N/A			2%	3.583.648.416,00							2%	3.583.648.416,00	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
27.00.5.2	Program Pembinaan Industri	Persentase IHT yang dibina	N/A			30%	71.305.400,00							30%	71.305.400,00	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.02.0.00.00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan jumlah IKM	N/A					5%	10.373.693.450,00	5%	3.770.500.000,00	5%	8.450.000.000,00	5%	22.594.193.450,00	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase informasi industri yang lengkap dan terkini	N/A					1 sistem	61.626.200,00	1 sistem	100.000.000,00	1 sistem	200.000.000,00	1 sistem	361.626.200,00	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03.0.00.00	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Izin Usaha Industri yang diawasi	N/A					100%	12.180.000,00	100%	50.000.000,00	100%	626.711.882,00	100%	688.891.882,00	Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
<b>Usuran Penunjang Pemerintah</b>																
<b>Perencanaan</b>																
16.00.5.2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam	Persentase Capaian program dan kegiatan PD bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam	N/A	80%	2.228.831.500,00									80%	2.228.831.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design Sektor Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang mendukung perencanaan.	N/A	75%										75%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah mitra bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara.	N/A	80%										80%		- Badan Perencanaan Daerah
17.00.5.2	Program perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya	Persentase Capaian program dan kegiatan PD bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial, dan Budaya	N/A	80%	1.427.826.942,00										1.427.826.942,00	Badan Perencanaan Daerah
		Persentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya yang ditindaklanjuti	N/A	75%										75%		- Badan Perencanaan Daerah
		Persentase Penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah mitra Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara.	N/A	80%										80%		- Badan Perencanaan Daerah
18.00.5.2	Program perencanaan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	N/A	60%	1.992.064.910,00									60%	1.992.064.910,00	Badan Perencanaan Daerah
		Persentase Capaian program dan kegiatan PD bidang Pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah	N/A	80%												Badan Perencanaan Daerah
		Persentase Penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan tahapan dan tata cara	N/A	80%										80%		- Badan Perencanaan Daerah
		Persentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design sektor Infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung perencanaan.	N/A	75%										75%		- Badan Perencanaan Daerah
15.00.5.2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	N/A	80%	3.837.814.662,00									80%	3.837.814.662,00	Badan Perencanaan Daerah
		Persentase keterlibatan stakeholders dalam musrenbang	N/A	75%										89%		Badan Perencanaan Daerah
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD.	N/A	100%										100%		Badan Perencanaan Daerah
19.00.5.2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD.	N/A			100%	1.336.133.711,00							100%	1.336.133.711,00	Badan Perencanaan Daerah
		Persentase Capaian program dan kegiatan pada RKPD	N/A			90%								90%		Badan Perencanaan Daerah
20.00.5.2	Program Perencanaan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase Penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah mitra bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara.	N/A			85%	824.237.800,00							85%	824.237.800,00	Badan Perencanaan Daerah
		Persentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design Sektor Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang mendukung perencanaan.	N/A			85%								85%		- Badan Perencanaan Daerah
21.00.5.2	Program Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah mitra Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara.	N/A			85%	934.993.500,00							85%	934.993.500,00	Badan Perencanaan Daerah
		Persentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang ditindaklanjuti.	N/A			85%								85%		- Badan Perencanaan Daerah

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22.00.5.2	Program Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan tahapan dan tata cara	N/A			85%	1.220.896.800,00							85%	1.220.896.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	N/A			70%								70%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design sektor Infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung perencanaan.	N/A			85%								85%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.0.00.00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD.	N/A					100%	837.237.200,00	100%	1.286.769.400,00	100%	1.400.000.000,00	100%	3.524.006.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Capaian program dan kegiatan pada RKPD	N/A					95%	289.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	989.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.0.00.00	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara.	N/A					90%	862.760.000,00	100%	1.212.776.000,00	100%	1.070.000.000,00	100%	3.145.536.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara	N/A					90%	1.004.732.025,00	100%	820.000.000,00	100%	1.553.360.000,00	100%	3.378.092.025,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan tahapan dan tata cara	N/A					90%	766.399.984,00	100%	762.010.000,00	100%	543.330.000,00	100%	2.071.739.984,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	N/A					75%	564.871.216,00	78%	600.000.000,00	80%	245.000.000,00	80%	1.409.871.216,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	<b>Keuangan</b>															
15.00.5.2	Program Penyusunan Anggaran Daerah	Ketepatan dan keakuratan penyusunan anggaran daerah	100%	100%	2.641.571.825,00									43%	2.641.571.825,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
16.00.5.2	Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelayanan penerbitan SP2D kurang dari 2 (dua) hari	100%	100%	2.076.271.580,00									100%	2.076.271.580,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
18.00.5.2	Program Pematausahaan Aset Daerah	Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat	N/A	13,57%	1.993.780.701,00										1.993.780.701,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
19.00.5.2	Program Pemanfaatan Aset Daerah	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	N/A	0,35%	1.857.531.680,00	2.703.000.000	2.910.849.367,00							1,02%	4.768.381.047,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
17.00.5.2	Belaporan Keuangan Daerah	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK	WTP	100%	966.757.286,00		1.192.273.275,00								2.159.030.561,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
22.00.5.2	Program Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah	Persentase BTL APBD ≤ 50%	N/A	49%		40%	5.658.180.013,00							40%	5.658.180.013,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
20.00.5.2	Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Daerah Baru	N/A	5%	5.122.666.650,00									84,16%	5.122.666.650,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
21.00.5.2	Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak	persentase penurunan piutang pajak daerah	N/A	1,81%	2.088.830.500,00									26,21%	2.088.830.500,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
22.00.5.2	Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah	Persentase hasil kajian/analisa pengembangan potensi pajak daerah yang di tindaklanjuti	N/A	100%	2.636.869.800,00									17,23%	2.636.869.800,00	Badan Pendapatan Daerah
24.00.5.2	Program Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah	persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	N/A			37,04%	1.155.075.000,00							37,04%	1.155.075.000,00	Badan Pendapatan Daerah
25.00.5.2	Program Pelayanan Pajak Daerah	kontribusi pajak daerah terhadap PAD	N/A			82,08%	3.339.500.400,00							82,08%	3.339.500.400,00	
26.00.5.2	Program Pengendalian Pajak Daerah	persentase penurunan piutang pajak daerah	N/A			1,81%	1.572.674.050,00							1,81%	1.572.674.050,00	
5.02.02.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase BTL APBD ≤ 50%	N/A					-	-	-	64.308.475.067,00	-	-	-	64.308.475.067,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK	N/A					100%	84.947.881.332,00	100%	24.201.978.204,00	100%	42.361.656.433,00	100%	151.511.515.969,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.02.03.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	N/A					0,69%	6.076.179.896,00	0,90%	5.773.499.600,00	1,02%	5.705.245.530,00	1,02%	17.554.925.026,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04.0.00.00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	N/A					18,96%	10.396.471.000,00	14,88%	14.384.167.700,00	17,23%	8.755.954.800,00	17,23%	33.536.593.500,00	Badan Pendapatan Daerah
		kontribusi pajak daerah terhadap PAD	N/A					82,97%		83,44%	84,16%	84,16%	84,16%			
		persentase penurunan piutang pajak daerah	N/A					18,70%		23,83%	26,21%	26,21%	26,21%			
<b>Kepegawaian</b>																
15.00.5.2	Program Pengadaan, Penempatan dan Pembinaan Karir Kepegawaian	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan	N/A	93,0%	2.087.888.417,00									93,0%	2.087.888.417,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
16.00.5.2	Program Fasilitasi Pemberhentian Pegawai	Persentase PNS yang menerima Surat Keputusan pensiun tepat waktu	N/A	100%	162.759.557,00									100,0%	162.759.557,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
18.00.5.2	Program Pembinaan Kepegawaian	Persentase pelanggaran disiplin ASN yang telah ditindaklanjuti	100%	95,00%	1.089.055.850,00									95,0%	1.089.055.850,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
19.00.5.2	Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase pegawai yang disiplin	N/A	92%	406.417.750,00									92,0%	406.417.750,00	
21.00.5.2	Program Pengembangan kompetensi dan Fasilitasi Profesi	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	68			62%	1.406.692.266,00							62%	1.406.692.266,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	N/A			63,44%								63,44%		
22.00.5.2	Program Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Persentase ASN yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar	0			0%	603.439.250,00							0%	603.439.250,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20.00.5.2	Program Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian	Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu	N/A			100%								100%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase terisinya jabatan struktural dan pelaksana	N/A			83,70%	1.342.072.189,00							83,70%	1.342.072.189,00	
5.03.02.0.00.00	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu	N/A					84,39%	885.788.000,00	85,65%	834.266.000,00	87,13%	881.120.000,00	87,13%	2.601.174.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase terisinya jab struktural dan pelaksana	N/A					61,8%	4.414.683.794,00	62%	641.676.629,00	63%	5.423.947.000,00	63%	10.480.307.423,00	
		Persentase ASN yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar	N/A					0	353.891.700,00	0	315.000.000,00	0	315.000.000,00	0	983.891.700,00	
		Persentase pelanggaran disiplin ASN yang telah ditindaklanjuti	100%					100%	152.111.400,00	100%	175.000.000,00	100%	175.000.000,00	100%	502.111.400,00	
<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>																
17.00.5.2	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	N/A	80,0%	7.683.588.505,00									80,0%	7.683.588.505,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.0.00.00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	N/A					69,15%	2.695.522.780,00	74,86%	1.000.000.000,00	83,35%	2.240.000.000,00	83,35%	5.935.522.780,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	N/A					96%	987.796.970,00	100%	1.510.700.000,00	100%	2.050.000.000,00	100%	4.548.496.970,00	
<b>Penelitian dan Pengembangan</b>																
19.00.5.2	Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	N/A	50%	3.070.064.428,00									50%	3.070.064.428,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20.00.5.2	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	N/A			50%	1.749.125.720,00							50%	1.749.125.720,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	N/A			3,5%								3,5%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5.05.02.0.00.00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbitangan	N/A					60%	2.221.840.000,00	70%	1.079.810.000,00	80%	1.434.000.000,00	80%	4.735.650.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	N/A					50%	418.030.000,00	55%	147.000.000,00	60%	299.475.000,00	60%	864.505.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Persentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design Sektor Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang mendukung perencanaan.	N/A					90%		100%	376.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	776.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Persentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang ditindaklanjuti.	N/A					90%		100%	173.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	373.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Persentase Jumlah kajian/ analisa/ studi / rencana induk/ grand design sektor Infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung perencanaan.	N/A					90%		100%	109.030.000,00	100%	250.000.000,00	100%	359.030.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
<b>Usuran Pemerintahan Umum Lainnya</b>																	
<b>Inspektorat Daerah</b>																	
15.00.5.2	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan	N/A	100%	1.727.045.937,00									100%	1.727.045.937,00	Inspektorat Daerah	
16.00.5.2	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan	N/A	100%	990.427.478,00									100%	990.427.478,00	Inspektorat Daerah	
17.00.5.2	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan	N/A	100%	687.079.250,00									100%	687.079.250,00	Inspektorat Daerah	
19.00.5.2	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah IV	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan	N/A	100%	671.905.600,00									100%	671.905.600,00	Inspektorat Daerah	
20.00.5.2	Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan reviu	N/A			100%	935.632.007,00							100%	935.632.007,00	Inspektorat Daerah	
		Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah dilakukan reviu	N/A			100%								100%			
21.00.5.2	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang ekonomi dan sumber daya alam	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan	N/A			100%	14.900.000,00							100%	14.900.000,00	Inspektorat Daerah	
21.00.5.2	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan	N/A			100%	13.256.800,00							100%	13.256.800,00	Inspektorat Daerah	
23.00.5.2	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang infrastruktur dan pembangunan wilayah	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan	N/A			100%	58.003.421,00							100%	58.003.421,00	Inspektorat Daerah	
6.01.02.0.00.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP	N/A					8,5	762.064.000,00	8,5	1.230.000.000,00	8,5	409.849.500,00	8,5	2.401.913.500,00	Inspektorat Daerah	
		Persentase SAKIP PD dengan Nilai A	N/A					100%	503.226.387,00	100%	1.030.000.000,00	100%	1.553.477.000,00	100%	3.086.703.387,00	Inspektorat Daerah	
		Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang	N/A						100%	250.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	237.770.500,00	100%	697.770.500,00	Inspektorat Daerah
		Persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang	N/A						100%	853.477.000,00	100%	1.030.000.000,00	100%	2.060.124.000,00	100%	3.943.601.000,00	Inspektorat Daerah
6.01.03.0.00.00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	N/A					100%	109.141.900,00	100%	1.314.873.443,00	100%	282.062.000,00	100%	1.706.077.343,00	Inspektorat Daerah	
		Persentase PD yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	N/A					100%	840.354.300,00	100%	292.444.000,00	100%	1.348.124.000,00	100%	2.480.922.300,00	Inspektorat Daerah	
<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>																	



Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15.00.5.2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase penurunan kejadian yang berpotensi menyebabkan disintegrasi	N/A	100%	752.904.258,00									100%	752.904.258,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.00.5.2	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase hak pilih yang digunakan dalam Pemilu	N/A	100%	1.105.636.152,00									100%	1.105.636.152,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
17.00.5.2	Program Pemberdayaan Ormas dan LSM	Persentase LSM/Ormas yang berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan definisi partisipasi aktif	N/A	100%	89.168.600,00									100%	89.168.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
18.00.5.2	Program Kewaspadaan Daerah	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan	N/A	65%	2.064.261.400,00									65%	2.064.261.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19.00.5.2	Program Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan	N/A			67,50%	1.889.197.256,00							75%	1.889.197.256,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
20.00.5.2	Program Penguatan Ideologi, wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi ekonomi, sosial, budaya dan agama	N/A			67,5%	517.033.100,00							67,5%	517.033.100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	N/A			10,0%								10,0%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
21.00.5.2	Program Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	N/A			52,5%	245.579.381,00							52,5%	245.579.381,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	N/A			27,5%								27,5%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.0.00.00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	N/A					11%	231.819.000,00	12,0%	530.895.000,00	13%	313.110.732,00	13%	1.075.824.732,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05.0.00.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi ekonomi, sosial, budaya dan agama	N/A					70%	1.293.224.000,00	72,5%	451.250.900,00	75%	1.405.075.280,00	75%	3.149.550.180,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06..0.00.00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan	N/A					70%	2.828.162.356,00	72,50%	2.085.780.000,00	75%	3.246.099.129,00	75%	8.160.041.485,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.0.00.00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	N/A					55%	3.527.759.000,00	57,50%	7.521.867.000,00	60%	4.214.818.092,00	60%	15.264.444.092,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.0.00.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	N/A					30%	149.330.900,00	32,5%	250.735.000,00	35%	453.659.214,00	35%	853.725.114,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>Sekretariat DPRD</b>																
15.00.5.2	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran bagi Pimpinan/ Anggota DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran bagi Pimpinan/ Anggota DPRD	N/A	100%	2.340.387.200,00									100%	2.340.387.200,00	Sekretariat DPRD
16.00.5.2	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	N/A	100%	12.162.676.229,00									100%	12.162.676.229,00	Sekretariat DPRD

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.00.5.2	Program Penyelenggaraan Fungsi Kehumasan Dewan Perwakilan Rakyat	Persentase Penyelenggaraan Fungsi Kehumasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	N/A	100%	13.779.756.468,00									100%	13.779.756.468,00	Sekretariat DPRD
21.00.5.2	Program Pelayanan Kesekretariatan DPRD	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	N/A			100%	11.857.655.244,00							100%	11.857.655.244,00	Sekretariat DPRD
20.00.5.2	Program Perencanaan dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100			100%	390.913.650,00							100%	390.913.650,00	Sekretariat DPRD
		Persentase Promperda yang menjadi Perda	N/A			57%								57%		Sekretariat DPRD
18.00.5.2	Program Fasilitas Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda	N/A			100%	22.881.856.141,00							100%	22.881.856.141,00	Sekretariat DPRD
19.00.5.2	Program Penyelenggaraan Kehumasan	Persentase publikasi kegiatan DPRD	N/A			75%	2.070.680.000,00							75%	2.070.680.000,00	Sekretariat DPRD
X.XX.01.0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA)	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	N/A			100%	8.572.266.611,00			100%	54.668.402.147,00			100%	11.336.822.593,00	Sekretariat DPRD
		persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	N/A			80%	58.871.349.812,00			80%				80%	100.183.645.921,00	Sekretariat DPRD
		Nilai survei kepuasan internal	N/A			80				80					80	
4.02.02.0.00.00	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan pembahasan Ranperda	N/A			100%	16.303.390.270,00			100%	27.060.048.853,00			100%	21.561.233.632,00	Sekretariat DPRD
		Persentase publikasi kegiatan DPRD	N/A			90%	14.657.481.307,00			100%				100%	24.533.873.931,00	Sekretariat DPRD
<b>Kecamatan</b>																
15.00.5.2	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	N/A	80,00	45.182.971.797,00									80,00	45.182.971.797,00	Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun
17.00.5.2	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	N/A	30%	39.122.840.154,00	35,0%	39.793.403.035,00							35,0%	78.916.243.189,00	Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun
		Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	N/A	3,74%		3,89%								3,89%		
16.00.5.2	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	N/A	41%	14.909.534.876,00	41,8%	39.893.832.559,00							42%	54.803.367.435,00	Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing
		Rasio Linmas per RT	N/A	0,50		0,65								0,65		
22.0.5.2	Program Pemerintahan Umum	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	N/A			80,1	43.079.123.694,00							80,4	43.079.123.694,00	Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing
7.01.02.0.00.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	N/A					80,2	4.827.399.931,00	80,3	4.729.478.610,00	80,4	4.509.478.610,00	80,4	14.066.357.151,00	Kecamatan Blimbing
7.01.03.0.00.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	N/A					28%	20.004.582.479,00	30%	23.724.439.390,00	34%	21.224.439.390,00	34%	64.953.461.259,00	Kecamatan Blimbing
		Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	N/A					33%		38%		43%		43%		
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	N/A					84%		90%		96%		96%		
7.01.05.0.00.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	N/A					92%	40.770.000,00	96%	34.126.000,00	100%	34.000.000,00	100%	108.896.000,00	Kecamatan Blimbing
7.01.04.0.00.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Linmas per RT	N/A					1		1		1		1		
		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	N/A					94,00%	378.299.770,00	94,00%	1.948.319.400,00	94%	1.923.319.400,00	94%	4.249.938.570,00	Kecamatan Blimbing
7.01.02.0.00.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	N/A					80,2	4.942.280.380,00	80,3	4.193.485.580,00	80,4	4.073.485.580,00	80,4	13.209.251.540,00	Kecamatan Klojen
7.01.03.0.00.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	N/A					28%	15.856.565.120,00	30%	18.001.600.190,00	34%	15.501.600.190,00	34%	49.359.765.500,00	Kecamatan Klojen

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	N/A					33%		38%		43%		43%		
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	N/A					84%		90%		96%		96%		Kecamatan Klojen
7.01.05.0.00.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	N/A					92%	63.163.000,00	96%	58.000.000,00	100%	48.000.000,00	100%	169.163.000,00	Kecamatan Klojen
7.01.04.0.00.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Linmas per RT	N/A					1		1		1		1		
		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	N/A					94,00%	418.601.325,00	94,00%	1.884.023.400,00	94%	1.859.355.369,00	94%	4.161.980.094,00	Kecamatan Klojen
7.01.02.0.00.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	N/A					80,2	5.856.134.740,00	80,3	5.089.717.600,00	80,4	4.994.327.170,00	80,4	15.940.179.510,00	Kecamatan Lowokwaru
7.01.03.0.00.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	N/A					28%	19.013.700.258,00	30%	23.820.168.350,00	34%	21.220.166.350,00	34%	64.054.034.958,00	Kecamatan Lowokwaru
		Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	N/A					33%		38%		43%		43%		
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	N/A					84%		90%		96%		96%		
7.01.05.0.00.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	N/A					92%	124.400.000,00	96%	137.900.000,00	100%	87.490.000,00	100%	349.790.000,00	Kecamatan Lowokwaru
7.01.04.0.00.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Linmas per RT	N/A					1		1		1		1		
		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	N/A					94,00%	381.135.302,00	94,00%	1.895.354.700,00	94%	1.873.354.700,00	94%	4.149.844.702,00	Kecamatan Lowokwaru
7.01.02.0.00.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	N/A					80,2	5.573.665.090,00	80,3	5.552.729.866,00	80,4	5.230.729.866,00	80,4	16.357.124.822,00	Kecamatan Kedungkandang
7.01.03.0.00.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	N/A					28%	23.779.867.027,00	30%	25.274.341.465,00	34%	23.074.241.465,00	34%	72.128.449.957,00	Kecamatan Kedungkandang
		Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	N/A					33%		38%		43%		43%		
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	N/A					84%		90%		96%		96%		
7.01.05.0.00.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	N/A					92%	64.894.000,00	96%	9.000.000,00	100%	9.000.000,00	100%	82.894.000,00	Kecamatan Kedungkandang
7.01.04.0.00.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Linmas per RT	N/A					1		1		1		1		
		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	N/A					94,00%	403.087.450,00	94,00%	2.048.320.000,00	94%	2.026.320.000,00	94%	4.477.727.450,00	Kecamatan Kedungkandang
7.01.02.0.00.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	N/A					80,2	5.337.033.934,00	80,3	4.592.172.360,00	80,4	4.332.172.360,00	80,4	14.261.378.654,00	Kecamatan Sukun
7.01.03.0.00.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	N/A					28%	21.009.775.643,00	30%	25.459.199.417,00	34%	23.059.199.417,00	34%	69.528.174.477,00	Kecamatan Sukun
		Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	N/A					33%		38%		43%		43%		
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	N/A					84%		90%		96%		96%		
7.01.05.0.00.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	N/A					92%	41.710.000,00	96%	59.950.000,00	100%	34.950.000,00	100%	136.610.000,00	Kecamatan Sukun
7.01.04.0.00.00	PROGRAM KOORDINASI	Rasio Linmas per RT	N/A					1		1		1		1		Kecamatan Sukun

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	N/A					94,00%	253.056.600,00	94,00%	1.803.450.000,00	94%	1.783.450.000,00	94%	3.839.956.600,00	
	<b>Sekretariat Daerah</b>															
15.00.5.2	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan	Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang	N/A	3,1313	3.322.614.588,00									3,1313	3.322.614.588,00	Sekretariat Daerah
17.00.5.2	Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase Pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	N/A	100%	34.275.987.000,00									100%	34.275.987.000,00	Sekretariat Daerah
21.00.5.2	Program Penataan dan Penyelaras Peraturan Perundang-undangan	Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti	N/A	100%	1.207.813.412,00									100%	1.207.813.412,00	Sekretariat Daerah
22.00.5.2	Program Penerapan dan Penegakan Hukum	Persentase sidang penegakan hukum daerah	N/A	100%	2.908.536.500,00									100%	2.908.536.500,00	Sekretariat Daerah
18.00.5.2	Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan perekonomian	N/A	8 dokumen	803.982.123,00									8 dokumen	803.982.123,00	Sekretariat Daerah
19.00.5.2	Program Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur	Persentase kebijakan bidang perekonomian, Infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti	N/A	100%	429.762.637,00									100%	429.762.637,00	Sekretariat Daerah
20.00.5.2	Program Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan	N/A	100%	2.015.416.654,24									100%	2.015.416.654,24	Sekretariat Daerah
23.00.5.2	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kebijakan bidang ketatalaksanaan yang difasilitasi	N/A	100%	1.296.361.036,00									3,3	1.296.361.036,00	Sekretariat Daerah
24.00.5.2	Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Rencana Aksi yang ditindaklanjuti	N/A	100%	644.549.293,00									100%	644.549.293,00	Sekretariat Daerah
25.00.5.2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang mendapat layanan kedinasan	N/A	100%	3.606.782.877,00									100%	3.606.782.877,00	Sekretariat Daerah
16.00.5.2	Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokolan dan Hubungan Antar Lembaga	Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	N/A	100%	9.983.491.580,00	100%	7.886.555.682,00							100%	17.870.047.262,00	Sekretariat Daerah
		Persentase kegiatan yang dipublikasikan	N/A	100%		100%								100%		
32.00.5.2	Pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan	Persentase Pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	N/A			100%	1.432.580.520,00							100%	1.432.580.520,00	Sekretariat Daerah
33.00.5.2	Program Pengembangan Kebijakan Bidang Hukum	Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti	N/A			100%	1.657.217.236,00							100%	1.657.217.236,00	Sekretariat Daerah
34.00.5.2	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang	N/A			3,576	901.558.934,00							3,576	901.558.934,00	Sekretariat Daerah
35.00.5.2	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka penyampaian informasi melalui media	Persentase kegiatan bidang cukai yang dipublikasikan	N/A			100%	500.000.000,00							100%	500.000.000,00	Sekretariat Daerah
26.00.5.2	Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan SDA	Persentase kebijakan bidang perekonomian, Infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti	N/A			100%	225.661.778,00							100%	225.661.778,00	Sekretariat Daerah
27.00.5.2	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi	Persentase hasil evaluasi ditindaklanjuti	N/A			100%	143.917.080,00							100%	143.917.080,00	Sekretariat Daerah
28.00.5.2	Program Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan	N/A			100%	1.276.292.845,00							100%	1.276.292.845,00	Sekretariat Daerah
29.00.5.2	Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja	Hasil Survei Internal Organisasi	N/A			3	1.171.665.025,00							3	1.171.665.025,00	Sekretariat Daerah
30.00.5.2	Program Pengembangan Standar Kompetensi	Persentase standar kompetensi perangkat daerah yang ditetapkan	N/A			70%	15.223.000,00							100%	15.223.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.0.00.00	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase ketercapaian IKK	N/A					70%	3.183.791.866,00	75%	4.020.000.000,00	80%	4.200.000.000,00	80%	11.403.791.866,00	Sekretariat Daerah

Kode	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR RPJMD		Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	N/A					100%	9.626.590.000,00	100%	9.133.600.000,00	100%	9.958.600.000,00	100%	28.718.790.000,00	Sekretariat Daerah
		Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti	N/A					100%	4.108.369.000,00	100%	4.001.843.000,00	100%	6.176.885.000,00	100%	14.287.097.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.0.00.00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan bidang perekonomian, Infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti	N/A					100%	17.579.636.000,00	100%	1.571.934.300,00	100%	750.920.000,00	100%	19.902.490.300,00	Sekretariat Daerah
		Persentase Paket Selesai Tender	N/A					90%	1.842.100.000,00	95%	754.386.700,00	100%	1.842.100.000,00	100%	4.438.586.700,00	Sekretariat Daerah
X.XX.01.0.00.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	N/A					100%	29.931.744.102,00	100%	35.786.676.550,00	100%	33.893.282.000,00	100%	99.611.702.652,00	Sekretariat Daerah
		persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	N/A					80%	12.946.955.200,00	80%	3.149.799.850,00	80%	5.614.779.835,00	80%	21.711.534.885,00	Sekretariat Daerah
		Nilai survey kepuasan internal	N/A					80	24.379.075.232,00	80	9.083.300.000,00	80	9.728.638.180,00	80	43.191.013.412,00	Sekretariat Daerah
X.XX.01.0.00.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (PROGRAM ADMINISTRASI UMUM)	Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	N/A					100%	10.365.261.000,00	100%	10.865.261.000,00	100%	10.957.000.000,00	100%	32.187.522.000,00	Sekretariat Daerah
		Persentase kegiatan bidang cukai yang dipublikasikan	N/A											100%	-	Sekretariat Daerah
		Hasil Survei Internal Organisasi	N/A					2,1	1.123.092.600,00	2,2	1.123.092.600,00	2,3	1.237.000.000,00	3,3	3.483.185.200,00	Sekretariat Daerah
		Persentase standar kompetensi perangkat daerah yang ditetapkan	N/A					80%	426.563.000,00	90%	426.563.000,00	100%	470.000.000,00	100%	1.323.126.000,00	Sekretariat Daerah
01.00.5.2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	N/A	100%	83.628.108.122,00									100%	83.628.108.122,00	Semua Perangkat daerah
02.00.5.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	N/A	80%	64.660.025.820,67									80%	64.660.025.820,67	Semua Perangkat daerah
05.00.5.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Nilai survey kepuasan internal	N/A	80	9.041.950.761,00									80	9.041.950.761,00	Semua Perangkat daerah
06.00.5.2	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	N/A	100%	11.983.788.955,00									100%	11.983.788.955,00	Semua Perangkat daerah
07.00.5.2	Program Pelayanan Kesekretariatan	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	N/A			100%	116.004.594.508,48							100%	116.004.594.508,48	Semua Perangkat daerah
		persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	N/A			80%								80%		Semua Perangkat daerah
		Nilai survey kepuasan internal	N/A			80								80		Semua Perangkat daerah
X.XX.01.0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	N/A					100%	1.054.097.637.604,00	100%	889.092.350.861,00	100%	795.793.341.899,58	100%	2.738.983.330.364,58	Semua Perangkat daerah
		persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	N/A					80%						80%		Semua Perangkat daerah
		Nilai survey kepuasan internal	N/A					80						80		Semua Perangkat daerah
					1.057.996.370.153,31		1.213.385.283.309,49		2.552.074.787.962,00		2.219.287.390.137,00		2.530.415.888.391,33		9.573.159.719.953	

# BAB-VIII

**KINERJA**

**PENYELENGGARAAN**

**PEMERINTAHAN DAERAH**

**BAB VIII****KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah menjadi berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Sementara Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program .


Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018-2023 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kota Malang dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan yang ada. Tabel Indikator Kinerja Utama disajikan pada Tabel 8.1.

**Tabel 8.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama**  
**Kota Malang**

No.	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,430	81,320	81,860	81,450	83,000	81,705	83,800	82,000	84,900	82,248
2	Indeks Pendidikan	0,780	0,770	0,790	0,768	0,820	0,770	0,840	0,771	0,870	0,772
3	Indeks Kesehatan	0,814	0,816	0,816	0,819	0,818	0,818	0,828	0,821	0,825	0,823
4	Indeks Daya Beli / <i>Purchasing Power Parity</i>	0,847	0,847	0,848	0,856	0,850	0,850	0,851	0,851	0,852	0,852
5	Pertumbuhan Ekonomi	5,75%	5,73%	5,80%	-2,26%	5,85%	5,00%	5,90%	5,40%	5,95%	5,80%
6	Gini Rasio	0,380	0,392	0,370	0,395	0,370	0,392	0,370	0,391	0,360	0,390
7	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,00%	8,10%	6,10%	-13,50%	6,20%	6,20%	6,30%	6,30%	6,45%	6,45%
8	IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)	3,90	4,14	4,05	4,06	4,20	4,20	4,35	4,35	4,50	4,50
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	82,92	65,27	83,69	75,54	84,46	67,57	85,23	67,60	86,00	67,63
10	Angka Kemiskinan	3,91%	4,07%	3,76%	4,44%	3,59%	3,98%	3,43%	3,87%	3,27%	3,77%
11	Indeks Modal Sosial	81,36	80,880	83,52	81,20	85,68	85,68	87,84	87,84	90,00	90,00



No.	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	5,88%	-	9,61%	-	8,20%	-	7,50%	-	6,24%
13	Persentase penurunan PMKS	5,00%	3,31%	5,00%	502,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
14	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,836	0,850	0,852	0,830	0,868	0,868	0,884	0,884	0,900	0,900
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,80	94,72	96,90	94,97	97,00	97,00	97,10	97,10	97,20	97,20
16	Indeks Reformasi Birokrasi	72,00	69,67	74,00	69,72	76,00	71,66	78,00	72,58	80,00	73,51
17	Persentase perda yang ditegakkan	25,00%	26,37%	40,00%	54,00%	60,00%	60,00%	82,00%	82,00%	100,00%	100,00%
18	Nilai SAKIP	75,65	75,00	80,50	80,50	82,05	82,05	83,50	83,50	84,90	84,90
19	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Maturitas SPIP	3,50	3,05	4,00	3,05	4,10	3,10	4,20	3,15	4,30	3,20
21	Rasio PAD	0,24	0,30	0,26	0,25	0,28	0,28	0,30	0,30	0,33	0,33
22	Indeks Profesionalitas ASN	71,46	66,61	72,92	67,06	74,38	74,38	75,84	75,84	77,10	77,10
23	Indeks Kematangan SPBE	3,80	2,85	4,09	3,70	4,21	4,21	4,45	4,45	4,54	4,54



Pada Perubahan RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 terdapat penyesuaian target pada beberapa Indikator Kinerja Utama antara lain Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, Gini Rasio, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, Angka Kemiskinan, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Maturitas SPIP. Perubahan target tersebut didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, serta intervensi target karena adanya pandemi Covid-19 yang belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Selain perubahan target indikator tersebut, mempertimbangkan kondisi yang ada serta untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kota Malang pulih dari pandemi Covid-19 maka pada Perubahan RPJMD memasukkan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.

Selain perubahan pada Indikator Kinerja Utama, dalam rangka menyikapi perkembangan keadaan khususnya setelah pandemi COVID-19 dan beberapa kebijakan nasional terkait percepatan penangannya serta kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian target Indikator Kinerja Daerah dalam Perubahan RPJMD Kota Malang. Penyesuaian target Indikator Kinerja Daerah ini tertuang dalam tabel 8.2.

**Tabel 8.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Malang**

No.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
<b>1)</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
1	Indeks pembangunan Manusia	81,000	81,430	81,860	81,705	82,000	82,248	82,248
2	Indeks Daya Beli / <i>Purchasing Power Parity</i>	0,846	0,847	0,848	0,850	0,851	0,852	0,852
3	Indeks Pendidikan	0,770	0,780	0,790	0,770	0,771	0,772	0,772
4	Indeks Kesehatan	0,814	0,814	0,816	0,818	0,821	0,823	0,823
5	Pertumbuhan Ekonomi	5,72%	5,75%	5,80%	5,00%	5,40%	5,80%	5,80%
6	Gini Rasio	0,410	0,380	0,370	0,392	0,391	0,390	0,390
7	Angka Kemiskinan	4,10%	3,91%	3,76%	3,98%	3,87%	3,77%	3,77%
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-	-	8,20%	7,50%	6,24%	6,24%
9	Rasio PAD	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,33	0,33
10	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	N/A	6,00%	6,10%	6,20%	6,30%	6,45%	6,45%
12	Indeks Modal Sosial	79,20	81,36	83,52	85,68	87,84	90,00	90,00
13	Persentase penurunan PMKS	-2,23%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
14	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,820	0,836	0,852	0,868	0,884	0,900	0,900
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,71	96,80	96,90	97,00	97,10	97,20	97,20
<b>2)</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>							
1	Rasio Konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras	N/A	N/A	N/A	0,093	0,096	0,099	0,099
2	Maturitas SPIP	3,045	3,500	4,000	3,100	3,150	3,200	3,200

No.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
3	Nilai SAKIP	70,96	75,65	80,5	82,05	83,50	84,90	84,90
4	IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)	3,75	3,90	4,05	4,20	4,35	4,50	4,50
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	82,15	82,92	83,69	67,57	67,60	67,63	67,63
6	Indeks Reformasi Birokrasi	68,05	72,00	74,00	71,66	72,58	73,51	73,51
7	Persentase perda yang ditegakkan	21%	25%	40%	60%	82%	100%	100%
8	Indeks Profesionalitas ASN	64,00	71,46	72,92	74,38	75,84	77,10	77,10
9	Indeks Kematangan SPBE	N/A	3,80	4,09	4,21	4,45	4,54	4,54
<b>3)</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							
	<b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>							
1	Pendidikan							
1.1	Angka Partisipasi Kasar							
1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA/PAUD	85	89,88	90,38	78,48	80,68	82,88	82,88
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	99,63	-	109,81	110,11	110,41	110,71	110,71
1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	95,01	103,05	104,15	105,25	106,35	107,45	107,45
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) TK/RA/PAUD	NA	80,9	81,4	69,12	71,32	73,52	73,52
1.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	89,03	-	104,55	106,15	107,75	109,35	109,35
1.7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	72	83,67	84,67	85,67	86,67	87,67	87,67
2	Kesehatan							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	83,89	68	65	60	55	50	50
2.2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	6,71	6,02	5,41	4,99	4,58	4,16	4,16
2.3	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	73,68%	91%	93%	100%	100%	100%	100%

No.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
2.4	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	100%	100%	100%	-	-	-	-
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	Pekerjaan Umum:							
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-	89,13%	91,18%	92,41%	94,46%	96,91%	96,91%
3.2	Persentase jalan yang memiliki jalur pejalan kaki	-	88,32%	89,93%	9,153%	93,14%	94,74%	94,74%
3.3	Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	-	84,86%	85,02%	85,17%	85,32%	85,47%	85,47%
3.4	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	82,50	82,50	83,01	83,51	84,01	84,52	84,52
3.5	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	80	80	90	95	100	100	100
3.6	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	-	90,21	93,71	94,01	94,01	94,16	94,16
3.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	-	60	70	75	78	80	80
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
4.1	Persentase Area Kawasan Kumuh	-	-	-	69,17%	72,13%	73,61%	73,61%
4.2	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	-	50%	55%	55%	63,76%	80%	80%
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							

No.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
5.1	Rasio Linmas per RT	0,74	0,74	0,81	0,87	0,93	1	1
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.4	Persentase perda yang ditegakkan	25%	25%	40%	60%	82%	100%	100%
6	Sosial							
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	-	53,71%	51,19%	51,52%	51,84%	52,15%	52,15%
6.2	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina	71,48%	75,87%	80,96%	80,15%	81,31%	81,71%	81,71%
6.3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>							
1	Tenaga Kerja							
1.1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	-	45%	75%	76%	77%	78%	78%
1.2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	-	1%	1%	1%	1%	1%	1%
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Rasio KDRT	1:3171	1:3171	1:3398	1:3380	1:3361	1:3343	1:3343

No.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
2.2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	-	100%	-	100%	100%	100%	100%
3	Pangan							
3.1	Skor Pola Pangan Harapan	88,12%	92%	93%	94%	95%	96%	96%
3.2	Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Terhadap Beras	-	2%	2%	0,093	0,096	0,099	0,099
3.3	Persentase peningkatan ketersediaan pangan utama	-	2%	2%	-	-	-	-
4	Pertanahan							
4.1	Persentase kelurahan yang sudah terinventarisir tanah kosong dalam data base	0	0	0	3,51%	7,02%	10,53%	10,53%
5	Lingkungan Hidup							
5.1	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	-	56,5	57	57,5	58	58	58
5.2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	-	80	80	80	80	80	80
5.3	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	21%	21%	22%	24%	26%	27%	27%
5.4	Persentase Penanganan Sampah	-	75%	75%	74%	73%	72%	72%
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
6.1	Prosentase penduduk ber KTP	93,72%	94,72%	95,72%	96,72%	97,72%	98,72%	98,72%
6.2	Persentase penduduk berakte kelahiran usia 0-18 tahun	90,17%	91,19%	91,58%	92,37%	92,64%	93,15%	93,15%
6.3	Persentase Pasangan berakte nikah	19,77%	29,77%	39,70%	49,77%	59,77%	69,77%	69,77%

No.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1	Total Fertility Rate (TFR)	-	1,65	1,67	1,70	1,74	1,74	1,74
9	Perhubungan							
9.1	Persentase layanan angkutan darat	-	61%	65%	26,78%	-	-	27,30%
9.2	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	-	13,86%	13,00%	12,17%	85,45%	85,50%	85,50%
10	Komunikasi dan Informatika							
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	14	15	16	17	18	19	19
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%
10.3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	NA	20%	40%	60%	80%	100%	100%
10.4	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	NA	20%	40%	60%	80%	100%	100%
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah							
11.1	Persentase koperasi aktif	-	72,16	79,85	48,88	52,70	57,97	57,97
12	Penanaman Modal							
12.1	Rasio daya serap tenaga kerja	63,91%	63,91%	65%	67,00%	70,00%	73%	73%
13	Kepemudaan dan Olah Raga							
13.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kepeloporan pemuda	0,25%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
13.2	Jumlah Penyelenggaraan Even Olahraga Massal Bertaraf Internasional (Tourism Sport)	0	1	1	1	1	1	1



No.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
13.3	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	0,18%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
13.4	Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	NA	0,1	0,12	0,14	0,15	0,16	0,16
14	Statistik							
14.1	Prosentase ketermanfaatan data statistik sektoral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.2	Persentase keterisian e-database SIPD	-	80	82	100	100	100	100
15	Persandian							
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	3%	6%	12%	18%	24%	29%	29%
16	Kebudayaan							
16.1	Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina	-	40%	45%	51%	57%	59%	59%
17	Perpustakaan							
17.1	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	-	2%	2,50%	3%	3,50%	4%	4%
17.2	Persentase peningkatan koleksi perpustakaan	-	2%	2,10%	2,20%	2,30%	2,40%	2,40%
17.3	Persentase cakupan wilayah operasional perpustakaan keliling di 57 kelurahan	-	70%	80%	90%	100%	100%	100%
17.4	Persentase peningkatan koleksi yang terdigitalisasi	-	10%	12%	15%	17%	20%	20%
18	Kearsipan							

No.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
18.1	Persentase peningkatan dokumen arsip yang berbasis elektronik	-	11%	11,50%	12%	12,50%	13%	13%
Layanan Urusan Pilihan								
1	Pariwisata							
1.1	Jumlah Kunjungan wisata	4.824.407	5.947.041	6.541.745	7.195.920	7.915.512	8.707.063	8.707.063
2	Pertanian							
2.1	Persentase peningkatan produksi sektor pertanian	-	2%	2%	-	-	-	2%
2.2	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	-	2%	2%	2%	2%	2%	2%
2.3	Persentase peningkatan pemeriksaan sampel pangan asal hewan	-	15%	15%	2%	2%	2%	2%
5	Perdagangan							
5.1	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
5.2	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI	-	3,85%	8,00%	3,85%	7,69%	7,69%	7,69%
6	Perindustrian							
6.1	Pertumbuhan Industri	3,67	3,7	3,88	4,15	4,41	4,67	4,67
6.2	Persentase peningkatan jumlah IKM	-	2%	2%	5%	5%	5%	5%
6.3	Persentase IHT yang dibina	-	30%	30%	-	-	-	-
7	Kelautan dan Perikanan							
7.1	Persentase peningkatan produksi perikanan	-	5%	5%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
<b>Penunjang Urusan</b>								

No.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Perencanaan Pembangunan							
1.1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	-	60%	70%	75%	78%	80%	80%
2	Keuangan							
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
3.1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	-	80	63,44	69,15	74,86	83,35	83,35
3.2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	-	NA	91	96	100	100	100
3.3	Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu	-	93,0	83,7	84,39	85,65	87,13	87,13
4	Penelitian dan pengembangan							
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	-	50%	50%	60%	70%	80%	80%
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	80%	90%	100%	100%	100%	100%
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	3,50%	3,50%	50%	55%	60%	60%
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	-	5%	10%	30%	60%	90%	90%
5	Pengawasan							
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Sekretariat Dewan							
6.1	Prosentase Promperda yang menjadi Perda	36%	36%	57%	133%	100%	100%	100%

No.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
6.2	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.3	Persentase publikasi kegiatan DPRD	-	-	75%	90%	100%	100%	100%

# BAB-IX

**PENUTUP**

## BAB IX PENUTUP

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari dokumen perencanaan lainnya dengan mempedomani keselarasan antara RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, dan RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025, serta keterkaitan dengan RPJMD dan RTRW pada Kabupaten/Kota daerah sekitar Kota Malang, dimana saat ini Kabupaten Malang dan Kota Batu yang juga mengalami perubahan. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kota Malang dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kota. Lebih lanjut, informasi dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kota Malang digunakan sebagai acuan dalam penataan ruang dalam rangka mewujudkan target pembangunan jangka menengah daerah periode 2018-2023.

Pengaruh dampak pandemi COVID-19 terhadap tata ekonomi global dan nasional, berimplikasi juga kepada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam skala makro maupun mikro (sektoral), perlu diukur realisasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD tahun 2018-2023 terutama pada tahun 2020 menjadi jauh dari nilai capaian target. Pandemi COVID-19 yang belum bisa diprediksi kapan berakhir, membuat Pemerintah Daerah harus mengatur strategi dalam menempatkan prioritas pembangunan daerah bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Timur. Bila mencermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 342 ayat (1) huruf (c) menjelaskan bahwa salah satu alasan yang mendasari perlu dilakukan Perubahan RPJPD dan RPJMD adalah **terjadi perubahan yang mendasar** serta pada Pasal 342 ayat (3) Perubahan yang

mendasar dimaksud adalah mencakup terjadinya **bencana alam, krisis ekonomi dan perubahan kebijakan nasional.**

Perubahan Kebijakan Nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menjadi lingkup untuk mendasari juga atas perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023.

### **9.1 Pedoman Transisi**

Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018 – 2023 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan tahun 2023. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir.

Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018 – 2023 dilatarbelakangi oleh penyelarasan RPJMN Tahun 2020 – 2024, penyesuaian struktur APBD pada PP Nomor 12 Tahun 2019, penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan penyesuaian target capaian indikator kinerja akibat pandemi Covid-19

#### **9.1.1 Masa Transisi Tahun 2020**

Pada tahun 2020, dilakukan penyusunan RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2020. Dalam 2 (dua) dokumen tersebut telah memuat penyesuaian target indikator makro pembangunan dan target indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai respon dari terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap target dan pelaksanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara RPJMD Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka akan terjadi perbedaan antara dokumen RKPD Tahun 2021 dengan dokumen APBD Tahun 2021. Pada RKPD Kota Malang Tahun 2021 hanya memuat program dan kegiatan sedangkan pada dokumen APBD 2021 sudah memuat klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

### **9.1.2 Masa Transisi Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)**

Dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan, maka Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 ini memuat 5 (lima) tahun periode RPJMD, yaitu realisasi pembangunan tahun 2019, rencana tahun 2020 dan 2021 yang sesuai dengan perubahan target pembangunan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2020; dan rencana tahun 2022 dan 2023 yang targetnya disesuaikan dengan target tahun 2020 dan 2021.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan sampai akhir periode RPJMD maka diperlukan pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2023. Sebagaimana diketahui, tahun 2023 adalah tahun terakhir RPJMD Kota Malang

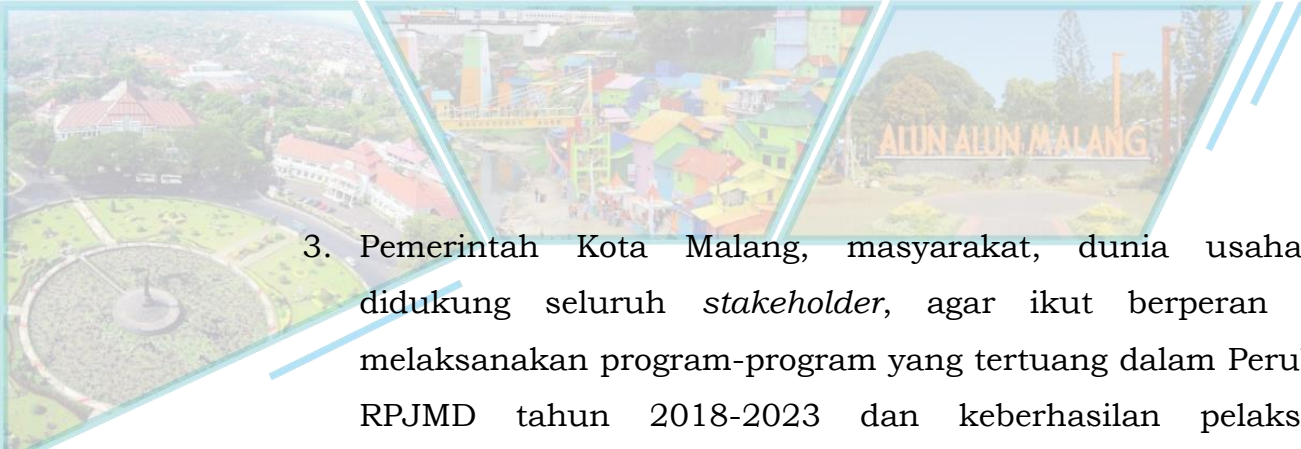


Tahun 2018-2023 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah Kota Malang akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Penyusunan RKPD Tahun 2024 akan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Malang Tahun 2005- 2025, Rancangan RKP Tahun 2024, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah. Salah satu agenda penyusunan RKPD Tahun 2024 yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan tahun 2023, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional tahun 2024, dan hal-hal penting lainnya.

## **9.2 Kaidah Pelaksanaan**

Perubahan RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 tetap dilakukan secara konsisten, transparan, partisipatif, dan penuh tanggungjawab. Dalam proses penyesuaian atas RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 ini tetap memenuhi kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyesuaikan Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dan berkewajiban menjamin konsistensi perencanaan;
2. Program dan kegiatan beserta indikasi anggaran yang telah ditetapkan merupakan acuan, dan apabila terdapat perubahan tidak berimplikasi dalam mewujudkan sasaran program pembangunan daerah.

- 
3. Pemerintah Kota Malang, masyarakat, dunia usaha dan didukung seluruh *stakeholder*, agar ikut berperan dalam melaksanakan program-program yang tertuang dalam Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 dan keberhasilan pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 merupakan wujud penguatan peran (partisipasi) seluruh elemen dalam pembangunan;
  4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan/implementasi dokumen Perubahan RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023.



Pemerintah  
**Kota Malang**





**PEMERINTAH KOTA MALANG**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARYADI WARDOYO, S.STP, M. Si

Jabatan : CAMAT BLIMBING

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. H. SUTIAJI

Jabatan : WALIKOTA MALANG

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**WALIKOTA MALANG,**

**Drs. H. SUTIAJI**

Malang, Januari 2022

**CAMAT BLIMBING,**

**ARYADI WARDOYO, S.STP, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19770811 199711 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	80,53
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	8,30
3	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3,85
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	80,3
5	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	94%
		Rasio Linmas per RT	1
6	Prosentase pelaksanaan Pembinaan dan Fasilitasi Forum-Forum atau Koordinasi Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkipimcam	96%
7	Meningkatnya keaktifan dan peran lembaga kemasyarakatan	Prosentase lembaga yang aktif	90%
8	Meningkatnya kapasitas penentuan prioritas dalam penanganan masalah di wilayah	Persentase usulan masyarakat untuk sarana dan prasarana di wilayah yang diakomodir	38%
9	Meningkatnya konsistensi perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan dengan pelaksanaannya	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	30%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 15.730.177.600,-	PAD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 4.729.478.610,-	PAD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 23.589.439.390,-	PAD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.948.319.400,-	PAD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 34.126.000,-	PAD

Malang, Januari 2022

WALIKOTA MALANG,

Drs. H. SUTIAJI

CAMAT BLIMBING,

ARYADI WARDOYO, S.STP, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770811 199711 1 001



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**KECAMATAN BLIMBING**  
Jl. Raden Intan Kav. 14 Telp. (0341) 491330  
**MALANG**

KodePos : 65125

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. RUDI CAHYONO CATUR UTOMO

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN BLIMBING

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ARYADI WARDOYO, S.STP, M.Si

Jabatan : CAMAT BLIMBING

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2022

**CAMAT BLIMBING**

**SEKRETARIS**

ARYADI WARDOYO, S.STP, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770811 199711 1 001

Drs. RUDI CAHYONO CATUR UTOMO  
Pembina  
NIP. 19680606 198809 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SEKRETARIAT KECAMATAN BLIMBING**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>
		<b>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>80%</b>
		<b>Nilai survey kepuasan internal</b>	<b>80</b>
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%
3	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%
4	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%
5	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%
6	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%
7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80%
8	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai RKBMD dan sesuai ketentuan	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	80%
9	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	80%

	<b>Kegiatan</b>		<b>Anggaran</b>
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	375.452.400
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	67.750.000
3	Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	78.960.000
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	14.631.984.500
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	50.000.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	204.000.000
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	94.558.700
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	227.472.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>15.730.177.600</b>

Malang, Januari 2022

**CAMAT BLIMBING**

**SEKRETARIS**

**ARYADI WARDOYO, S.STP, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19770811 199711 1 001

**Drs. RUDI CAHYONO CATUR UTOMO**

Pembina

NIP. 19680606 198809 1 001





PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN BLIMBING

Jl. Raden Intan Kav. 14 Telepon ( 0341 ) 491330  
Website: <http://kecblimbing.kotamalang.go.id> - E-mail: [kec-blimbing@malangkota.go.id](mailto:kec-blimbing@malangkota.go.id)  
M A L A N G

Kode Pos 65126

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUCAS PAAIS, S.Sos. MM  
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
KECAMATAN BLIMBING

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ARYADI WARDAYO, S.STP, M.Si  
Jabatan : CAMAT BLIMBING

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**CAMAT BLIMBING**

**ARYADI WARDOYO, S.STP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19770811 199711 1 001

Malang, Januari 2022  
**KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN  
KETENTAMAN KETERTIBAN**

**LUCAS PAAIS, S.Sos. MM**  
Pembina  
NIP.19670429 199203 1 008

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

### SEKSI PEMERINTAHAN , KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksanakannya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ,Tentara Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di Wiilayah Kecamatan yang tepat waktu	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan	2 kegiatan
		Jumlah Patroli yang dilaksanakan	24 kali
2.	Terlaksanakannya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Jumlah Unsur Wilayah yang mendapatkan Pembinaan oleh Fortopimcam (RT .RW Linmas )yang sesuai ketentuan	1064 lembaga

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 30.001.000
2.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 34.126.000
	<b>Jumlah</b>	<b>64.127.000</b>

Malang, Januari 2022

**KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

**CAMAT BLIMBING**



**ARYADI WARDOYO, S.STP,M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP.1977081101997111001



**LUCAS PA AIS, S.Sos,MM**  
Pembina  
NIP.196704291992041008



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**KECAMATAN BLIMBING**  
Jl. Raden Intan Kav. 14 Telp. (0341) 491330  
**MALANG**

KodePos : 65125

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RETNO INDRIYAH, SE  
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KECAMATAN BLIMBING

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ARYADI WARDOYO, S.STP,M.Si  
Jabatan : CAMAT BLIMBING

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2022

**CAMAT BLIMBING**

**ARYADI WARDOYO, S.STP,M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770811 199711 1 001

**KEPALA SEKSI  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**RETNO INDRIYAH, SE**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19730814 199803 2 009


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kecamatan	Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan lembaga kemasyarakatan yang aktif	91%
2.	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan yang tepat sasaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan yang dibina dan difasilitasi	12 Lembaga
		Jumlah PKK Kecamatan dan Kelurahan yang Aktif	12 Kelompok
3.	Terlaksananya peningkatan unsur kemasyarakatan yang difasilitasi	Persentase unsur kemasyarakatan yang terfasilitasi	91%
4.	Terlaksananya partisipasi aktif unsur kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Unsur Kemasyarakatan yang Aktif dalam Musrenbang	12 Lembaga

No	Sub Kegiatan		Anggaran
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp	33.640.000
2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp	148.850.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>182.490.000</b>

Malang, Januari 2022

**CAMAT BLIMBING**

  
**ARYADI WARDOYO, S.STP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770811 199711 1 001

**KEPALA SEKSI  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

  
**RETNO INDRIYAH, SE**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19730814 199803 2 009



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**KECAMATAN BLIMBING**  
Jl. Raden Intan Kav. 14 Telp. (0341) 491330  
**MALANG**

KodePos : 65125

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. KASRI ASTUTIK  
Jabatan : KEPALA SEKSI PRASARANA DAN SARANA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ARYADI WARDOYO, S.STP,M.Si  
Jabatan : CAMAT BLIMBING

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2022

**CAMAT BLIMBING**

**KEPALA SEKSI PRASARANA DAN SARANA**

  
**ARYADI WARDOYO, S.STP,M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770811 199711 1 001

  
**Dra. KASRI ASTUTIK**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19640101 198701 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SEKSI PRASARANA DAN SARANA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya database kondisi sarpras di wilayah kecamatan (dan prioritas pelaksanaan pembangunan sarpras) sesuai ketentuan	Jumlah dokumen informasi pembangunan yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen
		Jumlah Dokumen database kondisi Sarpras di wilayah Kecamatan (dan prioritas pelaksanaan pembangunan sarpras) disusun sesuai ketentuan	1 dokumen
2	Terlaksananya Kegiatan monitoring dan evaluasi sarana prasarana yang ada dikelurahan se wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan	Jumlah evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan di kelurahan yang ter monitoring	11 kelurahan
		Jumlah Satgas Banjir di tingkat kecamatan yang terlatih dan berkompeten	5 orang

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Evaluasi Kelurahan	Rp 294.669.300
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 294.669.300</b>

Malang, Januari 2022

**CAMAT BLIMBING**

**KEPALA SEKSI PRASARANA DAN SARANA**



**ARYADI WARDOYO, S.STP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770811 199711 1 001



**Dra. KASRI ASTUTIK**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19640101 198701 2 003



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**KECAMATAN BLIMBING**  
Jl. Raden Intan Kav. 14 Telp. (0341) 491330  
**MALANG**

KodePos : 65125

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAHLINA,SH  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
KECAMATAN BLIMBING

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. RUDI CAHYONO CATUR UTOMO  
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN BLIMBING

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**SEKRETARIS**

**Drs. RUDI CAHYONO CATUR UTOMO**  
Pembina  
NIP. 19680606 198809 1 001

Malang, Januari 2022

**KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN**

**DAHLINA,SH**  
Penata  
NIP. 19690423 200112 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
		Jumlah dokumen RPJMD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen
2	Tersusunnya DPA – SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA-DPA yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
		Jumlah Dokumen PRKA-DPPA yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
3.	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen hasil survey kepuasan masyarakat yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
		Jumlah dokumen standar pelayanan yang disusun tepat waktu	1 Dokumen
		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun tepat waktu	1 Dokumen
4	Terlaksananya pengelolaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang terverifikasi	Jumlah berkas laporan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	1200 Berkas
		Jumlah kegiatan penyusunan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan yang disusun tepat waktu	1 Kegiatan
		Jumlah laporan Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan sesuai ketentuan	3 Laporan
		Jumlah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan	6 Laporan
		Jumlah laporan evaluasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi subbag perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu	1 Laporan
		Jumlah pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai tugas pokok dan fungsi	24 Kegiatan



No	Kegiatan	Anggaran	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	63.550.000
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	2.000.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	1.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	1.200.000
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	14.610.125.500
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp	21.859.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>14.699.734.500</b>

SEKRETARIS

**Drs. RUDI CAHYONO CATUR UTOMO**  
Pembina  
NIP. 19680606 198809 1 001

Malang, Januari 2022

**KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN**

**DAHLINA,SH**  
Penata  
NIP. 19690423 200112 2 001



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**KECAMATAN BLIMBING**

Jl. Raden Intan Kav.14 Telp. ( 0341 ) 491330 Fax.(0341) 2996097  
Website : <http://www.kecblimbing.malangkota.go.id> E-mail : [kec-blimbing@malangkota.go.id](mailto:kec-blimbing@malangkota.go.id)  
**MALANG** Kode Pos: 65126

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VIRA MERDIANA, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. RUDI CAHYONO CATUR UTOMO

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**SEKRETARIS**

**Drs. RUDI CAHYONO CATUR UTOMO**  
Pembina  
NIP. 19680606 198809 1 001

Malang, 4 Januari 2022  
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM  
DAN KEPEGAWAIAN**

**VIRA MERDIANA, SE**  
Penata  
NIP. 19800714 201012 2 026

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1.	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/ dikembangkan kapasitasnya	134 ASN
2.	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan komponen listrik penerangan kantor sesuai ketentuan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 Jenis
3.	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor sesuai ketentuan	Jumlah alat tulis kantor	63 Jenis
4.	Tersedianya barang kebutuhan logistik kantor sesuai ketentuan	Jumlah makanan dan minuman	49 Jenis
5.	Tersedianya pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sesuai ketentuan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis
6.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan dan ketentuan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis 12 bulan
7.	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu kedinasan sesuai ketentuan	Jumlah makanan dan minuman tamu	5 Jenis
8.	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat dinas serta kebutuhan rapat koordinasi/konsultasi sesuai ketentuan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 Jenis
9.	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai ketentuan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara	9 Jenis
10.	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sesuai ketentuan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan diproses perizinannya	12 buah
11.	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan dan ketentuan	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 Jenis
12.	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan gedung kantor sesuai kebutuhan ketentuan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	2 paket
13.	Terlaksananya administrasi surat menyurat kedinasan secara tepat waktu	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	1700 surat
14.	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan belanja telpon, air, listrik dan internet secara tepat waktu	Jumlah tagihan belanja telpon, air dan listrik	12 bulan
15.	Terlaksananya/terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor yang memadai	Luasan ruangan yang dibersihkan	6 gedung
		Jumlah petugas kebersihan	3 orang

		Jumlah petugas pengolah informasi	1 orang
		Jumlah tenaga sopir dinas	1 orang
16.	Terlaksananya pengamanan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan	Jumlah tenaga pengamanan	2 orang

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 50.000.000,00
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 69.212.000,00
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 7.500.000,00
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 30.170.000,00
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 6.000.000,00
6. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 5.000.000,00
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 253.970.400,00
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 94.558.700,00
9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 85.000.000,00
10. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 4.000.000,00
11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 115.000.000,00
12. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 5.000.000,00
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 56.848.000,00
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 165.624.000,00
15. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 78.960.000,00
	<b>Rp. 1.030.443.100,00</b>

**SEKRETARIS**

**Drs. RUDI CAHYONO CATUR UTOMO**  
Pembina  
NIP. 19680606 198809 1 001

Malang, 4 Januari 2022

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM  
DAN KEPEGAWAIAN**

**VIRA MERDIANA, SE**  
Penata  
NIP. 19800714 201012 2 026



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**KECAMATAN BLIMBING**  
Jl. Raden Intan Kav. 14 Telp. (0341) 491330  
**MALANG**

KodePos : 65125

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : S. TUTIK MURIANI, SE  
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DAHLINA, SH  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
KECAMATAN BLIMBING

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**KEPALA SUB BAGIAN  
PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

**DAHLINA, SH**

Penata

NIP. 19690423 200112 2 001

Malang, Januari 2022

**BENDAHARA PENGELUARAN**

**S. TUTIK MURIANI, SE**

Penata Muda Tk. I

NIP. 19650522 200701 2 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BENDAHARA PENGELUARAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah pengajuan SPP Uang Persediaan (SPP-UP); untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan sesuai ketentuan	1 SPP
		Jumlah pengajuan SPP Ganti Uang (SPP-GU); untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan yang di susun sesuai ketentuan	8 SPP
		Jumlah pengajuan SPP Langsung (SPP-LS) pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD yang disusun tepat waktu	24 SPP
		Jumlah pengajuan Langsung (SPP-LS) untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran sesuai ketentuan	85 SPP
		Jumlah berkas pemotongan dan membayar seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut oleh bendahara	310 SSP
		Jumlah rekonsiliasi sesuai ketentuan	2 Kali Rekon
		Jumlah pembayaran dengan cara Transaksi Non Tunai (TNT) belanja langsung dan tidak langsung dari Rekening Bank Jatim 00410 32244 sesuai ketentuan	3220 Kali
		Jumlah dokumen Bahan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan yang di susun sesuai ketentuan	1 Dokumen
		Jumlah kegiatan pengumpulan data TPP Kecamatan dan Kelurahan yang di susun sesuai ketentuan	12 Kali
		Jumlah kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang di susun sesuai ketentuan	12 Kali
Jumlah pelaksanaan tugas lain yang diperintah Atasan sesuai tugas pokok dan fungsi	12 kali		

Malang, Januari 2022

**KEPALA SUB BAGIAN  
PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

**BENDAHARA PENGELUARAN**



**DAHLINA, SH**

Penata

NIP. 19690423 200112 2 001



**S. TUTIK MURIANI, SE**

Penata Muda Tk. I

NIP. 19650522 200701 2 011



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**KECAMATAN BLIMBING**  
Jl. Raden Intan Kav. 14 Telp. (0341) 491330  
**MALANG**

KodePos : 65125

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR KHOMARIYA

Jabatan : PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DAHLINA, SH

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KECAMATAN BLIMBING

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2022

**KEPALA SUB BAGIAN  
PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

**DAHLINA, SH**

Penata

NIP. 19690423 200112 2 001

**PENGADMINISTRASI  
PERENCANAAN DAN PROGRAM**

**NUR KHOMARIYA**

Pengatur Muda Tingkat I

NIP. 19850506 201407 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya bahan/alatkerja/alat/data/sejenis bahan penyusunan dokumen Renja/RKT yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah bahan / alat kerja/alat data / Dokumen Pendukung penyusunan dokumen Renja/RKT yang sesuai ketentuan	2 dokumen
		Jumlah Laporan Reviu IKU yang sesuai ketentuan	1 dokumen
2	Tersedianya bahan/alat kerja/alat/data/dokumen pendukung penyusunan dokumen Renstra yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah bahan penyusunan dokumen Renstra yang sesuai ketentuan	1 dokumen
		Jumlah bahan penyusunan dokumen review Renstra yang sesuai ketentuan	1 dokumen
3	Tersedianya bahan /alat /alat kerja /data/Dokumen Pendukung Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan LAKIP / SAKIP yang sesuai ketentuan	2 dokumen
		Jumlah Laporan Triwulan tepat waktu	4 laporan
		Jumlah Laporan Penyusunan LKPJ – LPPD tepat waktu	1 dokumen
		Jumlah Laporan Penyusunan Perjanjian Kinerja yang sesuai ketentuan	1 dokumen
		Jumlah Laporan Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja yang sesuai ketentuan	1 dokumen
		Jumlah Laporan Penyusunan SP yang sesuai ketentuan	1 dokumen
3	Tersedianya bahan penyusunan RENJA/RKT yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah bahan Penyusunan RENJA RKPD dan KUA-PPAS yang sesuai ketentuan	1 dokumen
4	Tersusunnya RKA/PRKA dan DPA/DPPA yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Laporan Penyusunan RKA – DPA tepat waktu	2 dokumen
		Jumlah Laporan Penyusunan PRKA – DPPA tepat waktu	2 dokumen
5	Terlaksananya tugas lainnya	Jumlah tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai tugas pokok dan fungsinya	12 kali

Malang, Januari 2022

**KEPALA SUB BAGIAN  
PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

  
**DAHLINA, SH**

Penata  
NIP. 19690423 200112 2 001

**PENGADMINISTRASI  
PERENCANAAN DAN PROGRAM**

  
**NUR KHOMARIYA**

Pengatur Muda Tingkat I  
NIP. 19850506 201407 2 003





PEMERINTAH KOTA MALANG  
**KECAMATAN BLIMBING**  
Jl. Raden Intan Kav. 14 Telp. (0341) 491330  
**MALANG**

KodePos : 65125

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAHMUDI  
Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DAHLINA, SH  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
KECAMATAN BLIMBING

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2022

**KEPALA SUB BAGIAN  
PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

**DAHLINA, SH**  
Penata  
NIP. 19690423 200112 2 001

**PENGADMINISTRASI KEUANGAN**

**MAHMUDI**  
Pengatur Tingkat I  
NIP. 19660508 200701 1 019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
PENGADMINISTRASI KEUANGAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah yang terarsipkan	Jumlah dokumen bahan LPJ Keuangan Kecamatan yang disiapkan	342 Berkas
		Jumlah dokumen penyusunan perencanaan keuangan (program dan kegiatan) yang di arsip	30 dokumen
		Jumlah dokumen berkas laporan Keuangan yang di arsipkan	1200 Lembar
		Jumlah pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan langsung / Camat sesuai tugas pokok dan fungsi	24 Kegiatan

Malang, Januari 2022

**KEPALA SUB BAGIAN  
PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

**PENGADMINISTRASI KEUANGAN**



**DAHLINA, SH**  
Penata  
NIP. 19690423 200112 2 001



**MAHMUDI**  
Pengatur Tingkat I  
NIP. 19660508 200701 1 019



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**KECAMATAN BLIMBING**  
Jl. Raden Intan Kav. 14 Telp. (0341) 491330  
**MALANG**

KodePos : 65125

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOKO SUTRISNO  
Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DAHLINA, SH  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
KECAMATAN BLIMBING

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2022

**KEPALA SUB BAGIAN  
PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

**DAHLINA, SH**  
Penata  
NIP. 19690423 200112 2 001

**PENGADMINISTRASI KEUANGAN**

**JOKO SUTRISNO**  
Pengatur Muda Tingkat I  
NIP. 19690502 201407 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
PENGADMINISTRASI KEUANGAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya Laporan Keuangan yang terarsipkan	Jumlah SPJ Keuangan Kecamatan yang diarsipkan	36 Arsip
		Jumlah verifikasi SPJ GU, LS, Gaji dan Tunjangan sesuai ketentuan	1396 dokumen
		Jumlah dokumen pajak yang dipungut / dipotong yang di arsipkan	310 Arsip
		Jumlah penyiapan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan	144 kegiatan
		Jumlah pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan langsung / Camat sesuai tugas pokok dan fungsi	12 kali

Malang, Januari 2022

**KEPALA SUB BAGIAN  
PERENCANAAN DAN KEUANGAN**



**DAHLINA, SH**  
Penata  
NIP. 19690423 200112 2 001

**PENGADMINISTRASI KEUANGAN**



**JOKO SUTRISNO**  
Pengatur Muda Tingkat I  
NIP. 19690502 201407 1 001



**PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN BLIMBING**

Jl. Raden Intan Kav.14 Telp. ( 0341 ) 491330 Fax.(0341) 2996097  
Website : <http://www.kecblimbing.malangkota.go.id> E-mail : [kec-blimbing@malangkota.go.id](mailto:kec-blimbing@malangkota.go.id)  
MALANG Kode Pos: 65126

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOYOK ZURIADI  
Jabatan : PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : VIRA MERDIANA, SE  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM  
DAN KEPEGAWAIAN**

**VIRA MERDIANA, SE**  
Penata  
NIP. 19800714 201001 2 026

Malang, 4 Januari 2022  
**PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**

**YOYOK ZURIADI**  
Pengatur Muda Tingkat I  
NIP. 19741101 201407 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pengadministrasian kepegawaian dengan baik sesuai ketentuan	Jumlah data kepegawaian yang lengkap dan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kepegawaian	134 Data
		Jumlah usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, usulan karis/karsu	20 berkas
		Jumlah arsip kepegawaian yang tersimpan dan terdokumentasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	10 dokumen
		Jumlah rekap daftar hadir ASN	12 dokumen
		Jumlah buku penjagaan kepegawaian	12 buku
		Jumlah laporan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaiannya	134 laporan
		Jumlah pegawai yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	134 orang
		2.	Terlaksananya kegiatan kehumasan
Jumlah website yang dikelola	1 website		
Jumlah media sosial yang dikelola (IG, FB, Twitter)	3 media sosial		
3.	Terlaksananya tugas lainnya	Jumlah tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai tugas pokok dan fungsinya	60 kegiatan

Malang, 4 Januari 2022

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM  
DAN KEPEGAWAIAN**



**VIRA MERDIANA, SE**  
Penata  
NIP. 19800714 201001 2 026

**PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**



**YOYOK ZURIADI**  
Pengatur Muda Tingkat I  
NIP. 19741101 201407 1 003



**PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN BLIMBING**

Jl. Raden Intan Kav.14 Telp. ( 0341 ) 491330 Fax.(0341) 2996097  
Website : <http://www.kecblimbing.malangkota.go.id> E-mail : [kec-blimbing@malangkota.go.id](mailto:kec-blimbing@malangkota.go.id)  
**MALANG** Kode Pos: 65126

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAMIMAH  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : VIRA MERDIANA, SE  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM  
DAN KEPEGAWAIAN**

**VIRA MERDIANA, SE**  
Penata  
NIP. 19800714 201001 2 026

Malang, 4 Januari 2022  
**PENGADMINISTRASI UMUM**

**TAMIMAH**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19640606 199012 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PENGADMINISTRASI UMUM

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
1	Terlaksananya kegiatan surat menyurat yang terdistribusi secara tepat waktu dan ter-registrasi sesuai ketentuan	Jumlah surat masuk yang diterima dan ter-registrasi sesuai ketentuan	450	Surat
		Jumlah surat keluar yang terdistribusi sesuai tujuan dan ter-registrasi sesuai ketentuan	350	Surat
		Jumlah undangan yang diterima dan ter-registrasi sesuai ketentuan	450	Surat
		Jumlah undangan keluar yang terdistribusi sesuai tujuan dan ter-registrasi sesuai ketentuan	100	Surat
		Jumlah surat masuk melalui aplikasi Suradi yang terdistribusi tepat waktu	450	Surat
2	Terlaksananya kegiatan yang mendapatkan layanan keprotokolan sesuai prosedur	Jumlah rapat yang terselenggara dengan baik sesuai ketentuan	36	Kegiatan
		Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi dengan baik	5	Kunjungan
3	Terlaksananya kegiatan kehumasan dengan baik sesuai ketentuan	Jumlah telepon masuk yang terlayani dengan baik	400	Kali
4	Terlaksananya tugas lainnya	Jumlah tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai tugas pokok dan fungsinya	60	Kegiatan

KEPALA SUBBAG UMUM  
DAN KEPEGAWAIAN



**VIRA MERDIANA, SE**

Penata

NIP. 19800714 201001 2 026

Malang, 4 Januari 2022  
PENGADMINISTRASI UMUM



**TAMIMAH**

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19640606 199012 2 001





**PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN BLIMBING**

Jl. Raden Intan Kav.14 Telp. ( 0341 ) 491330 Fax.(0341) 2996097  
Website : <http://www.kecblimbing.malangkota.go.id> E-mail : [kec-blimbing@malangkota.go.id](mailto:kec-blimbing@malangkota.go.id)  
**MALANG** Kode Pos: 65126

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. FARIS  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : VIRA MERDIANA, SE  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**KEPALA  
SUB BAGIAN  
UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

**VIRA MERDIANA, SE**  
Penata  
NIP. 19800714 201001 2 026

Malang, 4 Januari 2022  
**PENGADMINISTRASI UMUM**

**MOH. FARIS**  
Pengatur Tingkat I  
NIP. 19651129 200701 1 019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
PENGADMINISTRASI UMUM**

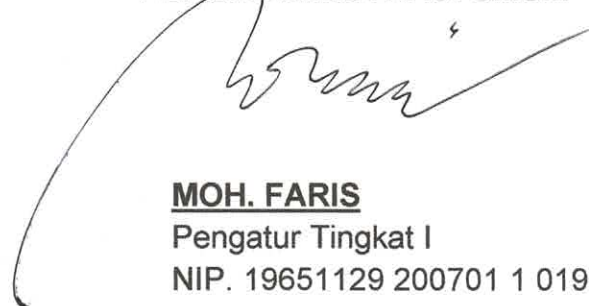
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
1	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu sesuai ketentuan	Jumlah pembayaran air, listrik, telpon dan internet tepat waktu	48	berkas
		Jumlah pembayaran tenaga pengamanan kantor tepat waktu	2	berkas
		Jumlah pembayaran tenaga kebersihan kantor tepat waktu	3	berkas
		Jumlah pembayaran tenaga sopir kendaraan dinas tepat waktu	1	berkas
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	15	jenis
		Jumlah alat tulis kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	63	jenis
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia sesuai kebutuhan	3	jenis
		Jumlah surat kabar yang tersedia sesuai kebutuhan	2	jenis
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara sesuai kebutuhan	9	jenis
		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan diproses perizinannya	12	buah
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara dengan baik	3	gedung
2	Terlaksananya tugas lainnya	Jumlah tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung yang sesuai tugas pokok dan fungsi	24	kegiatan

**KEPALA SUB BAGIAN  
UMUM DAN KEPEGAWAIAN**



**VIRA MERDIANA, SE**  
Penata  
NIP. 19800714 201001 2 026

Malang, 4 Januari 2022  
**PENGADMINISTRASI UMUM**



**MOH. FARIS**  
Pengatur Tingkat I  
NIP. 19651129 200701 1 019



**PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN BLIMBING**

Jl. Raden Intan Kav.14 Telp. ( 0341 ) 491330 Fax.(0341) 2996097  
Website : <http://www.kecblimbing.malangkota.go.id> E-mail : [kec-blimbing@malangkota.go.id](mailto:kec-blimbing@malangkota.go.id)  
MALANG Kode Pos: 65126

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SOLEH  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : VIRA MERDIANA, SE  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 4 Januari 2022

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM  
DAN KEPEGAWAIAN**

**VIRA MERDIANA, SE**  
Penata  
NIP. 19800714 201001 2 026

**PENGADMINISTRASI UMUM**

**MUHAMMAD SOLEH**  
Pengatur Muda Tingkat I  
NIP. 19681225 200801 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
PENGADMINISTRASI UMUM**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
1	Terlaksananya kegiatan surat menyurat yang terdistribusi secara tepat waktu dan ter-registrasi sesuai ketentuan	Jumlah surat keluar yang terdistribusi sesuai tujuan dan ter-registrasi sesuai ketentuan	350	Surat
		Jumlah undangan keluar yang terdistribusi sesuai tujuan dan ter-registrasi sesuai ketentuan	100	Surat
2	Terlaksananya kegiatan yang mendapatkan layanan keprotokolan sesuai prosedur	Jumlah ruangan rapat yang terkondisi dengan baik sesuai kebutuhan	3	Ruangan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara dengan baik	15	Jenis
		Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi dengan baik	5	Kunjungan
3	Terlaksananya tugas lainnya	Jumlah tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai tugas pokok dan fungsinya	60	Kegiatan

Malang, 4 Januari 2022

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM  
DAN KEPEGAWAIAN**



**VIRA MERDIANA, SE**

Penata

NIP. 19800714 201001 2 026

**PENGADMINISTRASI UMUM**



**MUHAMMAD SOLEH**

Pengatur Muda Tingkat I

NIP. 19681225 200801 1 012



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**KECAMATAN BLIMBING**  
Jl. Raden Intan Kav. 14 Telp. (0341) 491330  
**MALANG**

KodePos : 65125

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARTATIK  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : RETNO INDRIYAH, SE  
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KECAMATAN BLIMBING

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2022

**PENGADMINISTRASI UMUM**

**KEPALA SEKSI  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

  
**RETNO INDRIYAH, SE**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19730814 199803 2 009



**SUHARTATIK**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19641116 199203 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
PENGADMINISTRASI UMUM**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
1	Tersedianya dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan data hasil Musrenbangkel untuk kegiatan Pra Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan tepat waktu	1	Laporan
		Jumlah laporan data hasil Musrenbang Kecamatan untuk kegiatan Musrenbang Kota Malang yang dilaksanakan tepat waktu	1	Laporan
2	Tersedianya bahan penyusunan Profil Kecamatan sesuai ketentuan	Jumlah data profil Kecamatan yang disusun sesuai ketentuan	1	Buku
3	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Yang terfasilitasi	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang aktif	12	lembaga
		Jumlah tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai tugas pokok dan fungsi	3	kegiatan

**KEPALA SEKSI  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

  
**RETNO INDRIYAH, SE**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19730814 199803 2 009

Malang, Januari 2022  
**PENGADMINISTRASI UMUM**

  
**SUHARTATIK**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19641116 199203 2 003



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**KECAMATAN BLIMBING**  
Jl. Raden Intan Kav. 14 Telp. (0341) 491330  
**MALANG**

KodePos : 65125

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MURIANTO  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : RETNO INDRIYAH, SE  
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KECAMATAN BLIMBING

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2022

**KEPALA SEKSI  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

  
**RETNO INDRIYAH, SE**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19730814 199803 2 009

**PENGADMINISTRASI UMUM**

  
**MURIANTO**  
Pengatur Muda Tingkat I  
NIP. 19730407 200801 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
PENGADMINISTRASI UMUM**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
1	Tersedianya dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumentasi pelaksanaan Pra Musrenbang tingkat Kecamatan yang disusun sesuai ketentuan	1	dokumen
		Jumlah dokumentasi pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan yang disusun sesuai ketentuan	1	dokumen
2	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan Yang terfasilitasi	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang aktif	12	lembaga
3		Jumlah tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai tugas pokok dan fungsi	3	kegiatan

Malang, Januari 2022

**KEPALA SEKSI  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

  
**RETNO INDRIYAH, SE**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19730814 199803 2 009

**PENGADMINISTRASI UMUM**

  
**MURIANTO**  
Pengatur Muda Tingkat I  
NIP. 19730407 200801 1 011





PEMERINTAH KOTA MALANG  
**KECAMATAN BLIMBING**  
Jl. Raden Intan Kav. 14 Telp. (0341) 491330  
**MALANG**

KodePos : 65125

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPIYATI  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM  
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : LUCAS PAAIS, S.Sos, MM  
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN KECAMATAN BLIMBING

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2022

**PENGADMINISTRASI UMUM**

**SUPIYATI**

Pengatur

NIP. 19710105 201001 2 001

**KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

**LUCAS PAAIS, S.Sos, MM**

Pembina

NIP. 19670429 199203 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
PENGADMINISTRASI UMUM**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya bahan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang sesuai ketentuan .	Jumlah penomoran/registrasi Surat Kuasa sesuai ketentuan	384 Surat
		Jumlah Penomoran/registrasi Surat Pernyataan Waris sesuai ketentuan	850 Surat
		Jumlah Legalisasi berkas Keperluan pengurusan surat tanah sesuai ketentuan	12 Dokumen
		Jumlah Penomoran/registrasi Surat Dispensasi Nikah	720 Surat
		Jumlah Penomoran/registrasi Surat-Surat Pelayanan Umum	600 Surat
		Jumlah Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai tugas pokok dan fungsi	36 kali

**KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

**LUCAS PAAIS, S.Sos, MM**  
Pembina  
NIP. 19670429 199203 1 008

Malang, Januari 2022  
**PENGADMINISTRASI UMUM**

**SUPIYATI**  
Pengatur  
NIP. 19710105 201001 2 001



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**KECAMATAN BLIMBING**  
Jl. Mayjen Sungkono No. 59 Telp. (0341) 752273  
**MALANG**

KodePos : 65137

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPONO  
Jabatan : PETUGAS KEAMANAN

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : LUCAS PAAIS, S.Sos, MM  
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN KECAMATAN BLIMBING

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

**LUCAS PAAIS, S.Sos, MM**  
Pembina  
NIP. 19670429 199203 1 008

Malang, Januari 2022  
**PETUGAS KEAMANAN**

**SUPONO**  
Pengatur Tingkat I  
NIP. 19650807 200701 1 049

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
PETUGAS KEAMANAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya bahan, persiapan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesuai ketentuan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan bekerjasama dengan Babinkamtibmas dan Babinsa untuk terwujudnya keamanan dan ketertiban yang kondusif	96 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengamanan pada kegiatan keagamaan di wilayah Kecamatan Blimbing sesuai ketentuan	48 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan Pengawasan, Kendaraan dan Pegawai di Lingkungan kantor Kecamatan untuk keamanannya. sesuai ketentuan	96 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan patroli wilayah di 12 Kelurahan seKecamatan Blimbing sesuai ketentuan	144 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan Patroli/pemantauan Wilayah di Hari Nasional/Keagamaan sesuai ketentuan	144 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemetaan dan mengkoordinasikan Anggota (LINMAS) di tingkat Kelurahan Blimbing sesuai ketentuan	24 Laporan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemetaan Kerawanan terjadinya bencana Alam dan kerawanan Konflik sosial di Kecamatan Blimbing sesuai ketentuan	96 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pendataan pedagang kali lima ( PKL ) yang ada di 11 wilayah Kec. Blimbing sesuai ketentuan	1056 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan atau menanggapi surat pengaduan dari warga masyarakat terkait tindak keamanan dan ketertiban umum sesuai ketentuan	12 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan Pengamanan Kunjungan Walikota , Wakil Walikota, tamu dari luar kota di Wilayah Kecamatan Blimbing sesuai ketentuan	36 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan perintah/tugas yang diberikan oleh atasan	192 Kegiatan

**KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN  
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN**



**LUCAS PAAIS, S.Sos, MM**  
Pembina  
NIP. 19670429 199203 1 008

Malang, Januari 2022  
**PETUGAS KEAMANAN**



**SUPONO**  
Pengatur Tingkat I  
NIP. 19650807 200701 1 049



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**KECAMATAN BLIMBING**  
Jl. Raden Intan Kav. 14 Telp. (0341) 491330  
**MALANG**

KodePos : 65125

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIF CHOIRIYANTO  
Jabatan : PETUGAS KEAMANAN

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : LUCAS PAAIS, S.Sos, MM  
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN KECAMATAN BLIMBING

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

**LUCAS PAAIS, S.Sos, MM**  
Pembina  
NIP. 19670429 199203 1 008

Malang, Januari 2022  
**PETUGAS KEAMANAN**

**ARIF CHOIRIYANTO**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19700124 199603 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
PETUGAS KEAMANAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya bahan, persiapan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesuai ketentuan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan bekerjasama dengan Babinkamtibmas dan Babinsa untuk terwujudnya keamanan dan ketertiban yang kondusif	96 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengamanan pada kegiatan keagamaan di wilayah Kecamatan Blimbing sesuai ketentuan	48 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan Pengawasan, Kendaraan dan Pegawai di Lingkungan kantor Kecamatan untuk keamanannya.	96 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan patroli wilayah di 11 Kelurahan seKecamatan Blimbing sesuai ketentuan	144 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan Patroli/pemantauan Wilayah di Hari Nasional/Keagamaan sesuai ketentuan	144 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemetaan dan mengkoordinasikan Anggota (LINMAS) di tingkat Kelurahan Blimbing sesuai ketentuan	24 Laporan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemetaan Kerawanan terjadinya bencana Alam dan kerawanan Konflik sosial di Kecamatan Blimbing sesuai ketentuan	96 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pendataan pedagang kali lima ( PKL ) yang ada di 11 wilayah Kec. Blimbing sesuai ketentuan	1056 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan atau menanggapi surat pengaduan dari warga masyarakat terkait tindak keamanan dan ketertiban umum sesuai ketentuan	12 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan Pengamanan Kunjungan Walikota , Wakil Walikota, tamu dari luar kota di Wilayah Kecamatan Blimbing sesuai ketentuan	36 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan perintah/tugas yang diberikan oleh atasan	192 Kegiatan

**KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**



**LUCAS PAAIS, S.Sos, MM**  
Pembina  
NIP. 19670429 199203 1 008

Malang, Januari 2022  
**PETUGAS KEAMANAN**



**ARIF CHOIRIYANTO**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19700124 199603 1 003

# KECAMATAN BLIMBING

Jl. Mayjen Sungkono No. 59 Telp. (0341) 752273

MALANG

KodePos : 65137

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUNDORO MARTONO

Jabatan : PETUGAS KEAMANAN

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : LUCAS PAAIS, S.Sos, MM

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN KECAMATAN BLIMBING

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

  
LUCAS PAAIS, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19670429 199203 1 008

Malang, Januari 2022  
PETUGAS KEAMANAN

  
SUNDORO MARTONO  
Pengatur Muda Tingkat I  
NIP. 19730426 200901 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
PETUGAS KEAMANAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya bahan, persiapan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesuai ketentuan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan bekerjasama dengan Babinkamtibmas dan Babinsa untuk terwujudnya keamanan dan ketertiban yang kondusif	96 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengamanan pada kegiatan keagamaan di wilayah Kecamatan Blimbing sesuai ketentuan	48 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan Pengawasan, Kendaraan dan Pegawai di Lingkungan kantor Kecamatan untuk keamanannya. sesuai ketentuan	96 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan patroli wilayah di 12 Kelurahan seKecamatan Blimbing sesuai ketentuan	144 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan Patroli/pemantauan Wilayah di Hari Nasional/Keagamaan sesuai ketentuan	144 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemetaan dan mengkoordinasikan Anggota (LINMAS) di tingkat Kelurahan Blimbing sesuai ketentuan	24 Laporan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemetaan Kerawanan terjadinya bencana Alam dan kerawanan Konflik sosial di Kecamatan Blimbing sesuai ketentuan	96 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pendataan pedagang kali lima ( PKL ) yang ada di 11 wilayah Kec. Blimbing sesuai ketentuan	1056 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan atau menanggapi surat pengaduan dari warga masyarakat terkait tindak keamanan dan ketertiban umum sesuai ketentuan	12 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan Pengamanan Kunjungan Walikota , Wakil Walikota, tamu dari luar kota di Wilayah Kecamatan Blimbing sesuai ketentuan	36 Kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan perintah/tugas yang diberikan oleh atasan	192 Kegiatan

**KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN  
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN**



**LUCASL PAAIS, S.Sos, MM**  
Pembina  
NIP. 19670429 199203 1 008

Malang, Januari 2022  
**PETUGAS KEAMANAN**



**SUNDORO MARTONO**  
Pengatur Muda Tingkat I  
NIP. 19730426 200901 1 004





PEMERINTAH KOTA MALANG  
**KECAMATAN BLIMBING**  
Jl. Raden Intan Kav. 14 Telp. (0341) 491330  
**MALANG**

KodePos : 65125

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERLINA, ST  
Jabatan : PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dra. KASRI ASTUTIK  
Jabatan : KEPALA SEKSI PRASARANA DAN SARANA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2022

**KEPALA SEKSI PRASARANA DAN SARANA**

**PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA**

**Dra. KASRI ASTUTIK**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19640101 198701 2 003

**HERLINA, ST**  
Penata  
NIP. 19761119 201001 1 009

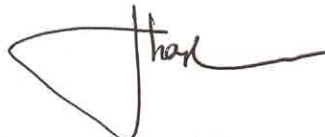
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kerja</b>	<b>Target</b>
1	Tersedianya bahan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan yang sesuai ketentuan	Jumlah bahan Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan sesuai ketentuan	12 Kelurahan
2	Tersedianya bahan Rencana Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan yang sesuai ketentuan	Jumlah bahan penyusunan Dokumen Database Kondisi Sarpras di Wilayah Kecamatan dan Prioritas Pelaksanaan Pembangunan Sarpras sesuai ketentuan	1 dokumen 12 kelurahan

Malang, Januari 2022

**KEPALA SEKSI PRASARANA DAN SARANA**

**PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA**



**Dra. KASRI ASTUTIK**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19640101 198701 2 003

**HERLINA, ST**  
Penata  
NIP. 19761119 201001 1 009



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**KECAMATAN BLIMBING**  
Jl. Raden Intan Kav. 14 Telp. (0341) 491330  
**MALANG**

KodePos : 65125

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERU PURWANTO  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dra. KASRI ASTUTIK  
Jabatan : KEPALA SEKSI PRASARANA DAN SARANA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2022

**KEPALA SEKSI PRASARANA DAN SARANA**

**Dra. KASRI ASTUTIK**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19640101 198701 2 003

**PENGADMINISTRASI UMUM**

**HERU PURWANTO**  
Pengatur Tk. I  
NIP. 19650303 200701 1 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
PENGADMINISTRASI UMUM**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya bahan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan yang sesuai ketentuan	Jumlah bahan Monev Pembangunan Prasarana dan Sarana di Wilayah Kecamatan sesuai ketentuan	12 Kelurahan
2.	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	Jumlah buku barang milik daerah yang sesuai ketentuan	1 Buku
		Jumlah buku barang milik daerah pada KIB yang sesuai ketentuan	7 Buku
		Jumlah buku inventaris yang sesuai ketentuan	1 Buku
		Jumlah kartu inventaris yang sesuai ketentuan	15 Buku
		Jumlah kartu barang /aset yang sesuai ketentuan	120 Buku
		Jumlah buku rencana kebutuhan barang yang sesuai ketentuan	1 Kartu
		Jumlah buku rencana kebutuhan perbaikan barang unit yang sesuai ketentuan	4 Buku
		Jumlah jurnal asset yang sesuai ketentuan	1 Buku
		Jumlah RKPBU yang sesuai ketentuan	1 buku
		3.	Tersusunnya laporan asset Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan dan tepat waktu
Jumlah laporan asset tahunan yang sesuai ketentuan	1 Laporan		

Malang, Januari 2022

**KEPALA SEKSI PRASARANA DAN SARANA**

**PENGADMINISTRASI UMUM**



**Dra. KASRI ASTUTIK**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19640101 198701 2 003



**HERU PURWANTO**  
Pengatur Tk. I  
NIP. 19650303 200701 1 014



## PEMERINTAH KOTA MALANG

### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NINA SUDIARTY, S.STP, M. Si

Jabatan : CAMAT BLIMBING

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. H. SUTIAJI

Jabatan : WALIKOTA MALANG

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Drs. H. SUTIAJI

Malang, 20 Oktober 2022

CAMAT BLIMBING.

NINA SUDIARTY, S.STP, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770718 199703 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	80,58
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	4,37
3	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3,85
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	80,3
5	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	94%
		Rasio Linmas per RT	1
6	Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi Forum-Forum atau Koordinasi Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkipimcam	96%
7	Meningkatnya keaktifan dan peran lembaga kemasyarakatan	Prosentase lembaga yang aktif	90%
8	Meningkatnya kualitas usulan masyarakat yang sesuai prioritas dalam penanganan masalah di wilayah	Persentase usulan masyarakat untuk sarana dan prasarana di wilayah yang diakomodir	38%
9	Meningkatnya konsistensi perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan dengan pelaksanaannya	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	30%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 17.690.211.032,-	PAD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayan Publik	Rp. 5.104.397.860,-	PAD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 22.936.862.150,-	PAD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.852.269.600,-	PAD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 19.986.000,-	PAD



Malang, 20 Oktober 2022

**CAMAT BLIMBING,**

**NINA SUDIARTY, S. STP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770718 199703 005

Provinsi/Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia	
	2021	2022
Kota Surakarta	82,62	83,08
Kota Salatiga	83,60	84,35
Kota Semarang	83,55	84,08
Kota Pekalongan	75,40	75,90
Kota Tegal	75,52	76,15
<b>D I YOGYAKARTA</b>	80,22	80,64
Kulon Progo	74,71	75,46
Bantul	80,28	80,69
Gunung Kidul	70,16	70,96
Sleman	84,00	84,31
Kota Yogyakarta	87,18	87,69
<b>JAWA TIMUR</b>	72,14	72,75
Pacitan	68,57	69,37
Ponorogo	71,06	71,87
Trenggalek	70,06	71,00
Tulungagung	73,15	74,06
Blitar	71,05	71,86
Kediri	72,56	73,46

Data Series : 2011-2017 | 2018-2020 | 2021-2022 | 2011-2012 | 2013-2014 | 2015-2016

Pengumuman Hasil Finalisasi Pendataan Pegawai Non ASN di Lingkungan Badan Pusat Statistik dapat di akses melal

